



H. Khairunas, S.I.P
(Bupati Solok Selatan)



Ir. H. Yulian Efi, MM
(Wakil Bupati Solok Selatan)

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2021

SELAMAT DATANG DI KAB. SOLOK SELATAN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2021**



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Povinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

20. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

30. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

31. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

32. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

34. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

35. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

37. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

38. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

39. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah.

40. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman :
 - a. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran;
 - b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Bagian Kedua

Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 3

RKPD disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
- b. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan;

- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menjelaskan tentang Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Mengemukakan tentang kondisi perekonomian nasional dan regional serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022 dan Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

Mengemukakan secara *eksplisit* rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2022, beserta instansi pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatif

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah direncanakan dalam pencapaian kinerja tahunan

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI SOLOK SELATAN,



Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2021

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



DONI RAHMAT SAMULO

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 35

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.4
1.4. Maksud dan Tujuan	I.6
1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD	I.6
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II.1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II.1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II.11
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II.13
2.1.1.4. Demografi	II.15
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.18
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.18
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II.30
2.1.2.3. Fokus Seni dan Budaya	II.35
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II.35
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan	
Dasar.....	II.35
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan	
Dasar.....	II.52
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II.68
2.1.3.3. Fokus Layanan Fungsi Penunjang	II.73
2.1.4. Aspek Daya Saing	II.75
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.75
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II.76
2.1.4.3. Iklim Investasi	II.78
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II.79
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Daerah Sampai 2020	II.
2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	II.79
2.2.2. Pencapaian Indikator kinerja Kunci Tahun 2020	II.83
2.2.3. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun	
2020	II.89
2.3. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas	
Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II.92
2.3.1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.92
2.3.2. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	II.94
2.4. Pelaksanaan Inovasi Daerah	II.108

BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1.	Kondisi dan Target Perekonomian Nasional	III.1
3.1.2.	Kondisi dan Target Perekonomian Provinsi Sumatera Barat	III.9
3.1.3.	Kondisi dan Target Perekonomian Kabupaten Solok Selatan	III.14
3.2.	Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III.18
3.2.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	III.32
3.2.1.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 ...	III.32
3.2.1.2.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 ...	III.36
3.2.1.3.	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020	III.39
3.2.2.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	III.44
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV
4.1.	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV.1
4.2.	Arah dan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	IV.7
4.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV.11
4.4.	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	IV.16
4.5.	Inovasi yang direncanakan dilaksanakan atau dilanjutkan pada Tahun 2022	IV.19
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	VI
6.1.	Indikator Kinerja Utama	VI.1
6.2.	Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI.2
6.3.	Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik	VI.7
BAB VII	PENUTUP	VII

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan	II.2
Tabel. 2.2.	Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong di Kabupaten Solok Selatan.	II.2
Tabel. 2.3.	Nama Sungai di Kabupaten Solok Selatan	II.10
Tabel. 2.4.	Peruntukan Kawasan di Kabupaten Solok Selatan	II.11
Tabel. 2.5.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.15
Tabel. 2.6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020	II.16
Tabel. 2.7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	II.17
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020	II.17
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk Solok Selatan Menurut Jenis Kegiatan Utama 2020	II.18
Tabel. 2.10.	PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) ..	II.20
Tabel. 2.11.	Perkembangan Nilai dan Petumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	II.22
Tabel. 2.12.	Perkembangan Nilai dan Petumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	II.23
Tabel. 2.13.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (%)	II.24
Tabel. 2.14.	Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang terselesaikan dan Angka Kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 ..	II.30
Tabel. 2.15.	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.34
Tabel. 2.16.	Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.35
Tabel. 2.17.	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.36
Tabel. 2.18.	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.37
Tabel. 2.19.	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.38
Tabel. 2.20.	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Atas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.39
Tabel. 2.21.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Cakupan Layanan Ibu dan Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.40
Tabel. 2.22.	Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.42
Tabel. 2.23.	Perkembangan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.43
Tabel. 2.24.	Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.45
Tabel. 2.25.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2020	II.47
Tabel. 2.26.	Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	II.47
Tabel. 2.27.	Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Kepemilikannya	II.47

Tabel. 2.28.	Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.49
Tabel. 2.29.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.49
Tabel. 2.30.	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2020	II.50
Tabel. 2.31.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.51
Tabel. 2.32.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.53
Tabel. 2.33.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.54
Tabel. 2.34.	Perkembangan Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.55
Tabel. 2.35.	Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.55
Tabel. 2.36.	Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.57
Tabel. 2.37.	Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.58
Tabel. 2.38.	Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2020	II.58
Tabel. 2.39.	Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.59
Tabel. 2.40.	Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.60
Tabel. 2.41.	Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.61
Tabel. 2.42.	Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.62
Tabel. 2.43.	Perkembangan Kinerja Koperasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.62
Tabel. 2.44.	Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.63
Tabel. 2.45.	Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.64
Tabel. 2.46.	Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.64
Tabel. 2.47.	Perkembangan Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.65
Tabel. 2.48.	Perkembangan Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.65
Tabel. 2.49.	Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020	II.66
Tabel. 2.50.	Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.67
Tabel. 2.51.	Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020	II.67
Tabel. 2.52.	Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Solok	

	Selatan Tahun 2016-2020	II.68
Tabel. 2.53.	Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.69
Tabel. 2.54.	Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun)	II.70
Tabel. 2.55.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan dan Perkebunan Utama di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun ..	II.70
Tabel. 2.56.	Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ekor)	II.70
Tabel. 2.57.	Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.71
Tabel. 2.58.	Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.72
Tabel. 2.59.	Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.73
Tabel. 2.60.	Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.74
Tabel. 2.61.	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.77
Tabel. 2.62.	Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.77
Tabel. 2.63.	Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar Wilayah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.78
Tabel. 2.64.	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.78
Tabel. 2.65.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	II.80
Tabel. 2.66.	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020	II.83
Tabel. 2.67.	Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2020	II.90
Tabel. 3.1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp. Triliun)	III.5
Tabel. 3.2.	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (Persen)	III.6
Tabel. 3.3.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Rp. Triliun)	III.7
Tabel. 3.4.	PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp. Triliun)	III.10
Tabel. 3.5.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)	III.11
Tabel. 3.6.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan Berdasarkan Pengeluaran (% yoy)	III.12
Tabel. 3.7.	Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	III.13
Tabel. 3.8.	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (juta)	III.15
Tabel. 3.9.	Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan	III.18
Tabel. 3.10	Perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 – 2021	III.29
Tabel. 3.11	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.000)	III.35
Tabel. 3.12.	Pertumbuhan dan Kontribusi per Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016-2020 (Persen)	III.36
Tabel. 3.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp. 000)	III.38
Tabel. 3.14	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.000)	III.42

Tabel. 3.15	Pertumbuhan dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016-2020	III.43
Tabel. 3.16	Proyeksi dan Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2023	III.48
Tabel. 4.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV.8
Tabel. 4.2.	Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022	IV.11
Tabel. 4.3.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan	IV.14
Tabel. 4.4.	Keterkaitan Prioritas Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Nasional	IV.18
Tabel. 4.5.	Keterkaitan Prioritas Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat.....	IV.18
Tabel. 5.1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Per Urusan Dan Perangkat Daerah	V. 2
Tabel. 6.1.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022	VI.1
Tabel. 6.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022	VI.3
Tabel. 6.3.	Indikator Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik	VI.7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan dan Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.5
Gambar 2.1.	Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan	II.1
Gambar 2.2.	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.25
Gambar 2.3.	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.26
Gambar 2.4.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.28
Gambar 2.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	II.28
Gambar 2.6.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.29
Gambar 2.7.	Perkembangan Persentase Melek Huruf Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2019	II.31
Gambar 2.8.	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.32
Gambar 2.9.	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.32
Gambar 2.10	Pembandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.33
Gambar 2.11	Pembandingan PDB Per Tenaga Kerja Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (Rp. Juta)	II.34
Gambar 2.12	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II.76
Gambar 2.13	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat	II.79
Gambar 3.1	Inflasi Tahunan (yoy) Per Kota Sampel Inflasi Sumbar	III.13
Gambar 3.2	Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Pada tahun 2020	III.17
Gambar 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020	III.35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta mengikuti arah pembangunan pola ruang yang telah ditetapkan pada RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berisikan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu

RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 disusun agar menjadi acuan bagi seluruh *stake holder* di daerah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 pada instansi bersangkutan, sehingga proses perencanaan mulai dari penampungan aspirasi sampai kepada penyusunan perencanaan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal, Forum OPD/Lintas Perangkat Daerah, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari Reses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RKPD Tahun 2022 secara kontekstual dan substantif dalam mekanisme perencanaan telah mengintegrasikan program-program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Solok Selatan oleh Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, khusus terkait penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan telah mempedomani pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk nomenklatur Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pencapaian kinerja nya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 untuk berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun RKPD Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2021-2026, yang penyusunannya mempedomani dan mempertimbangkan Visi Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2031.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

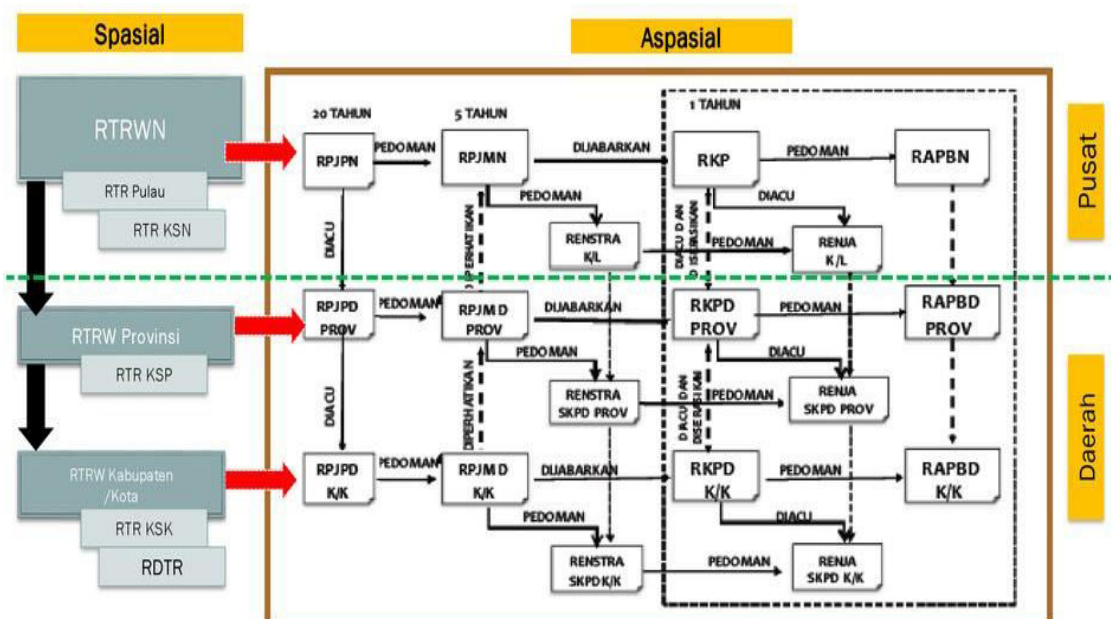
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, selanjutnya disingkat dengan RKPD Tahun 2022, merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 untuk berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Selain itu RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi pencapaian kinerja

pembangunan, isu strategis yang berkembang, serta rencana pengembangan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032.

Penyusunan Dokumen RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan. Penyusunan RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan tahap-tahap yang diamanatkan oleh Permendagri 86 Tahun 2017 melalui aplikasi e-planning Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD Kemendagri). Penyusunan RKPD dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan Renja OPD, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD/Lintas OPD, Penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD Kabupaten, Musrenbang RKPD Provinsi, Musrenbang RKP Nasional, Fasilitas RKPD Kabupaten oleh Provinsi, Evaluasi pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan verifikasi dan asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rangkaian tahap tersebut ditujukan agar substansi RKPD Tahun 2022 dapat selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan teknis Organisasi Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Selain itu penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan menerapkan konsep *Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial* (THIS). Secara diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar. 1.1.
Hubungan dan Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, sebagai berikut: RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Provinsi dan Nasional serta RPJM Provinsi dan Nasional melalui mekanisme Musrenbang Provinsi dan Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMD Kabupaten yang di dalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan .

RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang operasional untuk jangka periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan tentang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan pencapaian realisasi, Capaian Indikator Kunci Utama (IKU) Daerah tahun 2020, Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah sampai tahun 2020, dan Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Daerah tahun 2020

2.3. Permasalahan Pembangunan

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian nasional dan regional serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022,

3. 2. Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4. 1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Menjelaskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 Pemerintah Pusat yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

4. 2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Menjelaskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

4. 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan yang merupakan landasan penetapan landasan prioritas pembangunan daerah.

4. 4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Menjelaskan tema, prioritas dan sasaran dari prioritas pembangunan daerah tahun 2022, serta keterkaitan prioritas Kabupaten Solok Selatan dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara *eksplisit* rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan urusan pemerintah daerah beserta instansi pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah direncanakan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

BAB VII Penutup

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

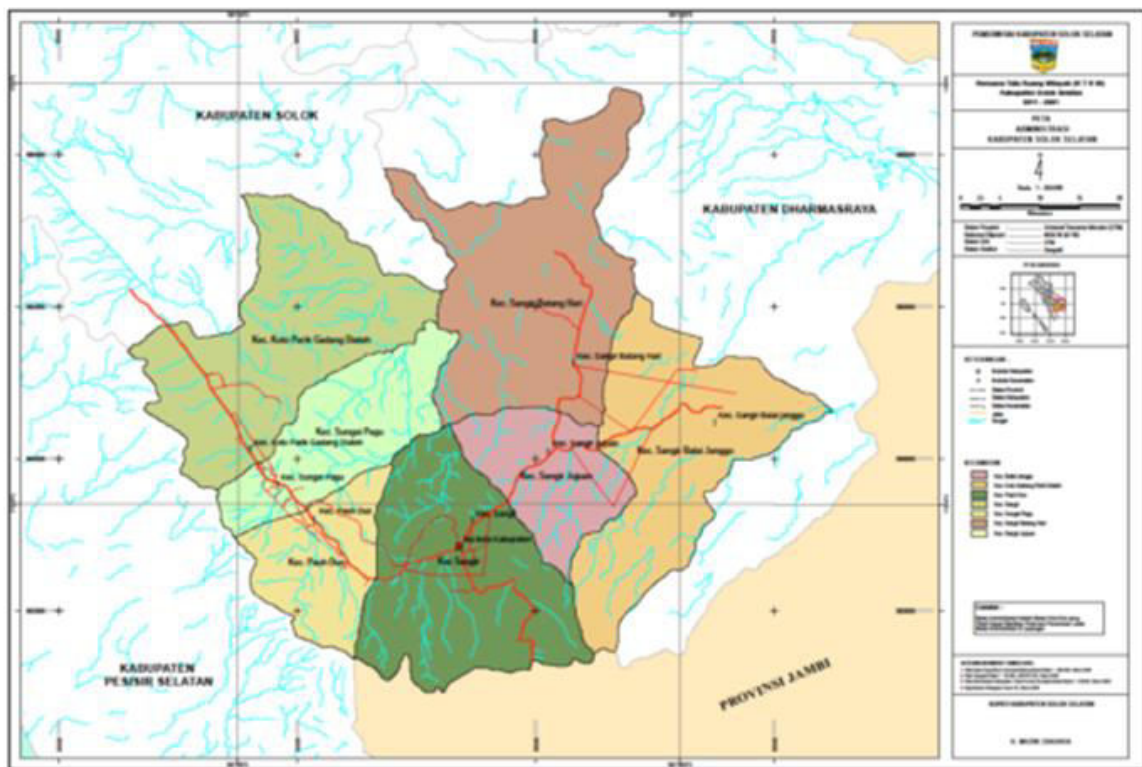
2.1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah

2.1.1. Aspek Administrasi, Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu dari tiga kabupaten pemekaran yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara geografis daerah ini berada pada 01° 17' 13" - 01° 46' 45" Lintang Selatan dan 100° 53' 24"- 101° 26' 27" Bujur Timur. Tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.1.
Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan



Secara administrasi, luas wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah 3.590,15 Km², dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 berdasarkan digitasi peta Topografi Angkatan Darat yang menetapkan luas wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.590,15 Km². Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh. Dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sangir dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pauh Duo. Saat ini Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan yang terbagi 275 Jorong

Tabel 2.1.
Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Luas Daerah Perda No.8/2012
1.	Sangir	632,13
2.	Sungai Pagu	358,41
3.	Koto Parik Gadang Diateh	672,66
4.	Sangir Jujuan	278,63
5.	Sangir Batang Hari	751,66
6.	Pauh Duo	265,31
7.	Sangir Balai Janggo	631,35
Jumlah		3.590,15

Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

Tabel 2.2.
Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong di Kabupaten Solok Selatan

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
1	Sangir	1	Lubuk Gadang	1	Timbulun
				2	Padang Aro
				3	Durian Taruang
				4	Sungai Padi
				5	Bukik Malintang
				6	Rimbo Tengah
				7	Taratak
				8	Lubuk Gadang
				9	Sariak Taba
				10	Gunung Pasir
				11	Bukik Patanahan
				12	Bukit Malintang Barat
				13	Bukit Malintang Utara
				14	Sungai Padi Utara
				15	Sungai Padi Selatan
				16	Timbulun Atas
				17	Koto Tinggi
				18	Padang Alai
				19	Jujutan
		2	Lubuk Gadang Timur	1	Sungai Landeh
				2	Sungai Aro

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
				3	Maluih
				4	Gaduang
				5	Durian Tanjak
				6	Taratak Tinggi
				7	Tanjuang Harapan
				8	Kampung Tengah
				9	Sungai Lingkitang
		3	Lubuk Gadang Tenggara **	1	Tandai
				2	Leter W
				3	Taluak Aia Putih
				4	Sungai Sanda
				5	Tandai Bukik Bulek
				6	Tandai Ateh
				7	Lubuak Rasak
				8	Tandai Simpang Tigo
		4	Lubuk Gadang Selatan	1	Sungai Lambai
				2	Pincuran Tujuh
				3	Sungai Lambai Timur
				4	Sungai Lambai Barat
				5	Sungai Kapur
				6	Pincuran Tujuh
				7	Pincuran Tujuh Barat
				8	Pincuran Tujuh Selatan
		5	Lubuk Gadang Barat **	1	Pasir putih
				2	Sapan
				3	Karang Putih
				4	Aia Manyuruak
		6	Lubuk Gadang Barat Daya **	1	Liki
				2	Liki Atas
				3	Sungai Bangku
		7	Lubuk Gadang Utara	1	Bariang
				2	Tanggo Aka
				3	Sampu
				4	Bariang Kampuang Dalam
				5	Manggis
				6	Koto Ramba
				7	Bariang Palabihan
2	Sungai Pagu	8	Koto Baru	1	Kampung Nan Limo
				2	Bariang Rao-Rao
				3	Lubuk Jaya
				4	Muaro Palak Gadang
				5	Kiambang Jaya
				6	Kiambang Sungai Aur
				7	Bariang Kapalo Koto
		9	Pasar Muara Labuh	1	Pasar Muara Labuh Timur
				2	Pasar Muara Labuh Barat
				3	Pasar Muara Labuh Selatan

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
				4	Pasar Muara Labuh Utara
		10	Pulakek Koto Baru	1	Kapalo Bukit
				2	Pulakek Tengah
				3	Koto Birah
				4	Air Batu
				5	Mantirai Indah
				6	Jolok Sungai Siriah
				7	Kapalo Koto
				8	Macang Masam
				9	Ujuang Tanjung
				10	Ipuah Pasir Jambu
		11	Sako Pasia Talang	1	Mudiak Lolo Barat
				2	Mudiak Lolo Timur
				3	Mudiak Lolo Selatan
				4	Mudiak Lolo Utara
		12	Pasia Talang	1	Pasia Talang
				2	Tigo Lareh Bakapanjangan
				3	Melayu Palak Laweh
				4	Batang Pagu
				5	Panai
				6	TLB Selatan
				7	MPL Timur
		13	Bomas	1	Bangko
				2	Mato Aia
				3	Sungai Durian
				4	Bolai Sungai Durian
				5	Tanah Sirah Sei Durian
				6	Simpang Tigo Sei Durian
				7	Bangko Tengah
				8	Bangko Ulu
				9	Bangko Ampera
		14	Sako Selatan Pasia Talang	1	Sungai Talu
				2	Sawah Siluak
				3	Alai Sako
				4	Lolo Kaciak
		15	Sako Utara Pasia Talang	1	Sipotu
				2	Banda Gadang
				3	Mudiak Lawe Barat
				4	Mudiak Lawe Timur
		16	Pasia Talang Selatan	1	IV Jorong
				2	Kampung Palak
				3	Kalampaian
				4	Rawang
				5	IV Jorong Selatan
		17	Pasia Talang Barat	1	Lundang
				2	Sungai Cangkar
				3	Batang Lawe Barat
				4	Batang Lawe Timur

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
		18	Pasia Talang Timur	1	Koto Kaciak
				2	Sigintir
				3	Banda Dalam
				4	Pampangan
3	Koto Parik Gadang Diateh	19	Pakan Rabaa	1	Pakan Rabaa
				2	Sungai Kapur
				3	Sungai Pangkua
				4	Sungai Bong Bandar Jelatang
		20	Pakan Rabaa Selatan **	1	Sungai Aro
				2	Sungai Aro Aia Angek
				3	Sungai Aro Sawa Lawe
				4	Sungai Aro Aia Tajun
		21	Pakan Rabaa Timur	1	Pinti Kayu Gadang
				2	Pinti Kayu Ketek
				3	Sapan Salak
				4	Tanjung Nan IV
				5	Sapan Sungai Nan II
				6	Pasia Putih
				7	Ladang Konsi
				8	Pinti Kayu Tengah
				9	Manggih
				10	Pasir Panjang
		22	Pakan Rabaa Utara	1	Sungai Kalu I
				2	Sungai Kalu II
				3	Batang Pasampan
				4	Koto Baru Sungai Kalu
				5	Pulai Bungkuak
				6	Batuang Bajawek
		23	Pakan Rabaa Utara Duo **	1	Ulu Suliti I
				2	Ulu Suliti II
				3	Ulu Suliti III
				4	Ulu Suliti IV
				5	Tanjung Limau Kapeh
				6	Pasampan Timur
		24	Pakan Rabaa Tengah	1	Batang Limpauang
				2	Bancah
				3	Bancah Anak Lolo
				4	Bt Limpauang Tratak Panas
				5	Bt Limpauang Kandang Bniah
		25	Balun Pakan Rabaa Tengah **	1	Balun
				2	Balun Sungai Ipuh
				3	Balun Sawahtau
				4	Balun Balai Akad
		26	Batang Lolo **	1	Batang Lolo Sungai Rambutan
				2	Batang Lolo Atas
				3	Batang Lolo Panduang

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
				4	Batang Lolo Batu Kulambai
				5	Batang Lolo
4	Sangir Jujuan	27	Lubuk Malako	1	Koto Gadang
				2	Koto Tuo
				3	Padang Darek
				4	Bancah Kapeh
				5	Lubuk Batuang
				6	Taratak Baru
				7	Pangian Indah
				8	Koto Tuo Mata Air
		28	Padang Air Dingin	1	Buluh Kasok
				2	Sikayan Talang
				3	Padang Air Dingin
				4	Koto Jepang
		29	Bidar Alam	1	Pasar Bidar Alam
				2	Batikan
				3	Kapalo Koto
				4	Simpang Tigo
				5	Harapan Baru
				6	Sungai Galugu Kapalo Koto
				7	Bulian
		30	Padang Limau Sundai	1	Sibalabeh Ateh
				2	Koto Ranah
				3	Tanjung Durian
				4	Ranah Sungai Bamban
		31	Padang Gantiang	1	Sirumbuk
				2	Pidang
				3	Padang Batu Bala
				4	Sungai Baramah
5	Sangir Batang Hari	32	Abai	1	Kapalo Koto
				2	Aur Duri
				3	Pasar
				4	Batu Nago
				5	Batu Kadunduang
				6	Limo Suku
				7	Simpang Ampek
				8	Pasar Baru
		33	Ranah Pantai Cermin	1	Koto Tuo
				2	Sungai Mintan
				3	Talakiak
				4	Simpang Tigo
				5	Rawan
		34	Dusun Tengah	1	Sinuek
				2	Koto Tengah
				3	Sungai Cupak
				4	Sungai Gadang
				5	Bukik Indah
				6	Koto Lingkek

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
		35	Sitapus	1	Bangkar Dalam
				2	Padang Koto Tuo
				3	Padang Beringin
				4	Padang Osoli
		36	Lubuk Ulang Aling	1	Pulau Panjang
				2	Koto Ranah
				3	Kampung Baru
				4	Batu Gajah
		37	Lubuk Ulang Aling Selatan	1	Limau Sundai
				2	Muaro Sangir
				3	Batu Lauang
				4	Sungai Penuh
				5	Gasiang
				6	Ombak Kubu
				7	Talantam
		38	Lubuk Ulang Aling Tengah	1	Tanah Galo
				2	Pulau Karam
				3	Rantau Limau Kapeh
6	Pauh Duo	39	Alam Pauh Duo	1	Pk Salasa
				2	Ampalu
				3	Simancung
				4	Durian 3 Capang
				5	Karang Hitam Simancuang
		40	Pekonina Alam Pauh Duo **	1	Pekonina
				2	Taratak Tinggi Pekonina
				3	Sapan Sari Pekonina
				4	Kampung Baru Pekonina
				5	Lubuak Paraku
		41	Kapau Alam Pauh Duo	1	Lasuang Batu
				2	Bulantik
				3	Taratak Baru
				4	Koto Kapau
				5	Kampung Nan Baru
				6	Banuaran
		42	Luak Kapau Alam Pauh Duo	1	Pinang Sinawa
				2	Ujung Jalan
				3	Janjang Kambiang
				4	Batu Jarang
				5	Sungai Duo
				6	Tubo Taratak Tinggi
		43	Pauh Duo Nan Batigo	1	Taratak Bukareh
				2	Paninjauan
				3	Jorong Pinang Awan
				4	Bukik Sikumpa

KECAMATAN		DESA / NAGARI		JORONG	
7	Sangir Balai Janggo	44	Sungai Kunyit	1	Koto Sungai Kunyit
				2	Taratak Sungai Sungkai
				3	Sungai takuak
				4	Mercu
				5	Mukti Tama
				6	Psr Sungai Sungai Sungkai
				7	Sungai Tengah
				8	Log Batu Sandi
		45	Talunan Maju	1	Kurnia Maju
				2	Talunan Indah Sepakat
				3	Talunan I
				4	Talunan II
		46	Talao Sungai Kunyit	1	Talao
				2	Sungai Keruh
				3	Sungai Jerinjing
				4	Sungai Talang
		47	Sungai Kunyit Barat	1	Sungai Gadiang
				2	Ngalau Indah
				3	Sungai Lasuang
				4	Sinar Paninjauan
				5	Ngalau Indah II

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Keterangan ** Nagari/ Desa Persiapan

Secara topografis 60% dari wilayah Kabupaten Solok Selatan berada pada kelerengan di atas 40% yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor dan sekitar 15% yang tergolong datar dan landai. Secara topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

- (1) Kawasan dataran tinggi bergelombang yang menempati wilayah bagian Timur, mulai dari Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan ke arah Utara sampai ke wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari;
- (2) Kawasan perbukitan, lebih dominan menutupi wilayah Kabupaten Solok Selatan. mulai dari bagian Utara sampai bagian tengahnya;
- (3) Kawasan lembah kaki pegunungan yang menempati wilayah bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan bagian Selatan, yang merupakan kaki Gunung Kerinci.

Rata-rata tinggi permukaan pusat pemerintahan kecamatan berada pada ketinggian 217-479 meter di atas permukaan laut, dengan puncak tertinggi permukaan daerah berada di kaki Gunung Kerinci, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera

Secara *geologis*, Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangka yang masih aktif sampai sekarang. Zona

tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Di sisi lain berdasarkan peta geologi terlihat adanya potensi sumber daya mineral. Sumber daya mineral tersebut antara lain terdiri dari (a) mineral logam berupa tembaga, emas dan perak (b) potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas dan (c) bahan galian berupa batu gamping, pasir, batu sungai dan batuan lainnya.

Dari sisi *vulkanologis*, kabupaten ini terletak di antara dua gunung berapi yang masih aktif yang berada di luar Kabupaten Solok Selatan yaitu Gunung Talang di Kabupaten Solok dan Gunung Kerinci di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Jika terjadi aktivitas vulkanik dan seismik kedua gunung berapi tersebut akan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Solok Selatan terdiri atas tanah *Andosol* dan *Litosol*. Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur. Oleh karena itu daerah ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan. Berdasarkan peta kesesuaian lahan diperoleh informasi, bahwa disamping tanaman pangan, komoditas perkebunan yang lebih sesuai dengan potensi lahan adalah jenis tanaman dataran tinggi seperti teh, kakao dan kopi daripada tanaman karet dan kelapa sawit.

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten ini terdapat 15 (lima belas) aliran sungai besar dan permanen yang alirannya berada diseluruh kecamatan. Kecamatan Sangir dialiri oleh 5 (lima) sungai; Sungai Pagu dan Pauh Duo dialiri oleh 3 (tiga); Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari masing-masing dialiri oleh 2 (dua) sungai dan Koto Parik Gadang diateh dialiri oleh 1 (satu) sungai. Sungai-sungai besar yang mengalir pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, bersifat permanen dan memiliki arus yang cukup deras. Dengan bentangan alamnya yang berbukit-bukit serta dilalui oleh banyak sungai seperti itu, menjadikan Kabupaten Solok Selatan rawan terhadap bahaya banjir dan longsor. Di samping itu, selain dilewati oleh Sungai Batang

Hari Kabupaten Solok Selatan juga merupakan hulu (daerah tangkapan-*catchment area*) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Batang Hari dan sebahagian daerahnya merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan Hutan Lindung. Dengan demikian, Kabupaten Solok Selatan mempunyai nilai ekologis yang sangat tinggi karena merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang termasuk daerah yang berada pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang mengalir ke Pantai Timur.

Tabel 2.3.
Nama Sungai di Kabupaten Solok Selatan

No	Sungai	Kecamatan
1	Batang Timbulun	Sangir
2	Batang Belangir	Sangir
3	Batang Sangir	Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari
4	Batang Kapur	Sangir
5	Batang Liki	Sangir
6	Batang Ikur	Sangir Jujuan
7	Batang Pangian	Sangir Balai Janggo
8	Batang Gane	Sangir Balai Janggo
9	Batang Jujuan	Sangir Balai Janggo, Sangir Jujuan
10	Batang Hari	Sangir Batang Hari
11	Batang Suliti	Koto Parik Gadag Diateh, Sungai Pagu
12	Batang Bangko	Pauh Duo, Sungai Pagu
13	Batang Lolo	Sungai Pagu
14	Batang Pulakek	Pauh Duo
15	Batang Tiak	Sangir Batang Hari

Sumber : Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

Kabupaten Solok Selatan secara umum beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan cukup tinggi yaitu 1.600-4.000 mm/tahun. Dengan kelembaban udara berkisar 80%, Kabupaten Solok Selatan mempunyai iklim tropika basah. Pada umumnya musim penghujan berlangsung pada bulan Januari s/d Mei dan September s/d Desember, sedangkan musim kemarau pada bulan Juni s/d Agustus. Angin pada umumnya bertiup dari arah Barat Daya-Tenggara.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenruhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.4.
Peruntukan Kawasan di Kabupaten Solok Selatan

Peruntukan Kawasan Berdasarkan Arahan Tata Ruang	(Ha)	%
Hutan Lindung	84.259,65	23,47
Hutan Konservasi	66.273,25	18,46
Hutan Produksi	12.242,24	3,41
Hutan Produksi Terbatas	53.600,19	14,93
Hutan Poduksi Yang Dapat Dikonversi	19.350,64	5,39
Jumlah Kawasan Hutan	235.725,97	65,66
Perkebunan	95.137,65	26,50
Pertanian	14.575,81	4,06
Pertambangan	12.349,94	3,44
Permukiman	1.220,63	0,34
Jumlah Kawasan Budidaya	123.284,03	34,34
Luas Wilayah	359.010,00	100,00

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032

Pola pemanfaatan lahan Kabupaten Solok Selatan diarahkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya sendiri dibagi atas kawasan budidaya kehutanan dan non kehutanan. Kawasan budidaya kehutanan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Sementara kawasan non kehutanan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan budidaya pertanian/perkebunan, permukiman dan kegiatan budidaya lainnya. Adapun dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari kawasan hutan ke perkebunan dan permukiman.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan arahan kebijakan RTRW Kabupaten Solok Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada “**Upaya Optimalisasi Lahan Produktif Bagi Pengembangan Wilayah Dengan Tetap Menjaga Keseimbangan Fungsi Perlindungan Taman Nasional Kerinci Sebat (TNKS) dan Hutan Lindung**”. Optimalisasi lahan produktif merupakan upaya ekonomisasi wilayah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan melalui kreativitas penyelenggaraan sumber daya buatan yang ramah lingkungan. Perlindungan TNKS dan hutan lindung sebagai upaya penjaminan kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Solok Selatan serta wilayah hilir, terkait dalam hal dukungan penyediaan sumber daya alam. Dukungan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan hanya mungkin terjadi kalau aset alam yang ada sekarang ini

mendapat perlindungan sebaik mungkin. Selain itu Kabupaten Solok Selatan mempunyai Kawasan Strategis Provinsi yang ditujukan untuk pengembangan Agrowisata yaitu Kawasan Strategis Taluak Aia Putih.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan menjadi kawasan strategis. Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Solok Selatan maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Kawasan strategis ditetapkan dalam RTRW dimaksudkan untuk:

- 1) Mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumberdaya pembangunan yang ada, baik dari level pusat hingga daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis, secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh;
- 2) Memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada.

Perencanaan pengembangan Wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan ke dalam tiga wilayah pengembangan yang didasarkan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut:

- a. **Kecamatan Sangir** yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan I dengan *growth point* pelayanan pemerintahan, pelayanan umum, jasa dan perdagangan.
- b. **Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh** sebagai pusat pengembangan II yang dipusatkan di Muara Labuh dengan *growth point* pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, budaya dan sentra produksi tanaman pangan.
- c. **Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Jujuhan dan Sangir Balai Janggo** sebagai pusat pengembangan III dengan *growth point* sektor perkebunan dan pertambangan.

Sekaitan dengan zonasi tersebut, maka pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang akan diangkat meliputi:

1) **Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan adalah:

- ❖ Kawasan Perekonomian Padang Aro sebagai pusat layanan pemerintahan, jasa dan perdagangan di Daerah Kabupaten Solok Selatan
- ❖ Kawasan Perekonomian Muara Labuh sebagai pusat layanan jasa dan perdagangan yang didukung oleh sektor pertanian dan sosial budaya
- ❖ Kawasan Perekonomian Lubuk Malako sebagai kawasan agropolitan guna mendukung perekonomian daerah sekitar
- ❖ Kawasan Perekonomian Abai sebagai pusat layanan jasa dan perdagangan yang didukung oleh sektor perkebunan, pertambangan dan sosial budaya.

2) Kawasan strategis untuk kepentingan sosio-kultural

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosio-kultural di Kabupaten Solok Selatan adalah Kawasan situs Nagari Seribu Rumah Gadang di Koto Baru; Kawasan Petilasan Rumah Gadang Rajo Balun dan Kawasan Petilasan Mesjid Anam Puluah Kurang Aso di Pasir Talang; Kawasan Rumah Gadang Panjang di Abai; Kawasan Sejarah PDRI di Bidar Alam; Kawasan Cagar Budaya Durian Tarung di Lubuk Gadang; dan Kawasan Cagar Budaya Surau dan Makam Syekh Muhammad Arif Sampu di Sungai Padi.

3) Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah kawasan delapan belas (15) Daerah Aliran Sungai di tujuh (7) kecamatan, Kawasan Pegunungan Kerinci di Kecamatan Sangir, Kawasan TNKS, Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Kawasan penambangan emas di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir, Kawasan Penambangan Biji Besi di Kecamatan KPGD, Kawasan HPH PT. Andalas Merapi Timber (AMT), Kawasan Lahan Kritis di Ulu Suliti Kecamatan KPGD, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Nagari.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam. Melihat kedudukan Kabupaten Solok Selatan yang berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana baik gempa bumi, longsor maupun banjir. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Solok Selatan meliputi lahan kritis, erosi, bencana tanah longsor dan banjir.

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. **Gerakan Tanah.** Gerakan tanah disebabkan oleh sesar yang ada di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Dari kedudukan wilayah Kabupaten Solok Selatan yang berada pada sistem Patahan Besar yaitu sistem Patahan Semangka, yang meliputi sebahagian besar daerah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Sungai Pagu.
2. **Gempa Bumi dan Gunung Api.** Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Walaupun sebenarnya Kabupaten Solok Selatan secara administrasi daerah tidak memiliki gunung api, tetapi sebahagian besar wilayah kaki Gunung Kerinci berada di wilayahnya. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah akan terkena imbas yang tidak langsung dari letusan dari gunung tersebut (awan panas dan lahar dingin) seperti wilayah Sangir, Pauh Duo dan Sungai Pagu. Sedangkan untuk potensi bahaya gempa cukup besar hal ini mengingat pulau Sumatera secara umum berada di daerah tektonik aktif dimana lempeng Samudera Hindia bergerak ke Utara menghujam secara menyerong terhadap lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke Selatan dengan laju pergerakan mencapai 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar maka akan menyebabkan pergeseran lempeng benua mikro (*mikro plate*) yang berada di antara Jalur Tumbukan (Palung) dan Zona Patahan Semangka. Pergerakan tersebut akan memicu pergerakan sesar/patahan yang ada di wilayah Solok Selatan dan juga dapat menyebabkan pergerakan tanah. Daerah-daerah yang akan terkena dampak langsung jika terjadi pergeseran Patahan Sumatera akibat gempa bumi meliputi daerah sepanjang Balun, Muara Labuh sampai dengan Pekonina yang berada di sekitar zona Patahan Sumatera.
3. **Longsor.** Longsor umumnya terjadi pada daerah perbukitan yang bertebing terjal dan daerah tebing sungai terutama pada daerah *cut of slope* seperti pada daerah berlereng dengan kelerengan >15%, daerah perbukitan bergelombang, daerah perbukitan terjal dan daerah kaki pegunungan. Daerah ini meliputi sebahagian besar wilayah Kabupaten Solok Selatan terutama 1). Nagari Pakan Rabaa Utara, Nagari Pakan Rabaa Tengah dan Nagari Pakan Rabaa Timur di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; 2). Nagari Sako Pasir Talang dan Nagari Sako Utara pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu; 3). Nagari Alam Pauh Duo dan Nagari Kapau di Kecamatan Pauh Duo; 4). Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Timur, dan Nagari Lubuk Gadang Utara di Kecamatan Sangir; 5). Bukik Manggiu, Bukik Kingkiang, Bukik Koto Jepang di Sangir Jujuan; 6). Nagari Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batang Hari.
4. **Banjir.** Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu juga

daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir. Daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir terdapat di sepanjang Sungai Batang Hari, Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti, Sungai Batang Liki dan sepanjang Sungai Batang Sangir. Upaya penanganan banjir dilakukan secara terpadu dengan mengkoordinasikan kerjasama lintas wilayah administratif dan lintas sektoral yang meliputi kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis yang terletak di sekitar jalur lintas air serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

Kebijakan pengamanan kawasan lindung ditentukan sesuai dengan tujuan pemantapannya yaitu mencegah terjadinya bencana (lahan kritis, longsor dan banjir). meningkatkan fungsi *hidrologis* dan menjaga kelestarian kawasan bawahan maupun disekitarnya sendiri. Pengendalian dan pengarahan kegiatan yang ada dan berkembang di kawasan tersebut untuk menjaga fungsi kawasan serta pemantapan kawasan lindung. Pengurangan atau relokasi penduduk pada kawasan rawan bencana, pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 176.931 jiwa pada tahun 2016 menjadi 182.936 jiwa pada tahun 2020. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 1,67% namun pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan yaitu 0,67% menjadi 0,45%. Sedangkan untuk jenis kelamin (*sex ratio*) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari Rasio jenis kelamin penduduk Solok Selatan diatas 100%. Namun jika dilihat pada periode tahun 2017-2020 Sex Rasio cenderung mengalami penurunan dari 104,81 pada tahun 2017 menjadi 103,92% pada tahun 2020.

Tabel 2.5.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	176.931	177.931	180.905	182.117	182.936
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	49,28	49,56	50,39	50,73	50,95
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,81	0,57	1,67	0,67	0,45
Sex Ratio (%)	101,17	104,81	104,27	104,00	103,92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2020 berdasarkan luas wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan adalah 50,95 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (93,59 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sangir (81,28 jiwa/km²), Pauh Duo (73,98 jiwa/km²), Sangir Jujuan (53,47 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diateh (44,13 jiwa/km²), Kecamatan Sangir Balai Janggo (27,77 jiwa/km²) dan Sangir Batang Hari (21,65 jiwa/km²).

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk			Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Sangir	26.251	25.126	51.377	81,28
2	Sungai Pagu	16.733	16.811	33.544	93,59
3	Koto Parik Gadang Diateh	15.119	14.564	29.683	44,13
4	Sangir Jujuan	7.665	7.232	14.897	53,47
5	Sangir Batang Hari	8.303	7.969	16.272	21,65
6	Pauh Duo	9.945	9.683	19.628	73,98
7	Sangir Balai Janggo	9.211	8.324	17.535	27,77
Jumlah		93.227	89.709	182.936	50,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan (Data diolah).

Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk. Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk tidak padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk. yaitu: tidak padat. dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km², kurang padat antara 51-250 jiwa/Km², cukup padat 251-400 jiwa/Km², dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km²).

Sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2019 dapat menggambarkan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 46,67%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46-47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dilihat per kecamatan dapat dilihat secara berurutan Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) Kecamatan Sungai Pagu yang paling tinggi yaitu 49,42% dan diikuti oleh Pauh Duo (48,06%), Sangir Jujuan (47,39%), KPGD (46,58), Sangir (46,45%), Sangir Batang Hari (45,01%), dan terakhir Sangir Balai Janggo (41,83%). Penyebaran penduduk per kelompok umur perkecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	Sangir	Sungai Pagu	KPGD	SJJ	SBH	Pauh Duo	SBJ	Total
00-04	4.087	2.157	2.166	1.147	1.236	1.442	1.241	13.476
05-09	4.846	2.964	2.507	1.382	1.563	1.835	1.649	16.746
10-15	4.945	2.985	2.744	1.381	1.584	1.877	1.801	17.317
15-19	5.275	3.028	3.049	1.396	1.758	1.999	1.835	18.340
20-24	5.022	3.032	2.863	1.421	1.574	1.902	1.623	17.437
25-29	3.972	2.318	2.171	1.127	1.244	1.370	1.385	13.587
30-34	3.941	2.313	2.150	1.195	1.324	1.416	1.469	13.808
35-39	4.126	2.512	2.286	1.198	1.279	1.511	1.579	14.491
40-44	3.827	2.217	2.012	1.097	1.193	1.416	1.421	13.183
45-49	3.038	2.073	1.743	934	963	1.123	1.200	11.074
50-54	2.441	1.885	1.497	728	814	975	822	9.162
55-59	1.911	1.622	1.298	539	589	841	597	7.397
60-64	1.528	1.450	1.181	472	483	704	432	6.250
65-69	1.112	1.136	864	349	304	491	233	4.489
70-74	580	692	480	230	176	296	126	2.580
>=75	726	1.160	672	301	188	430	122	3.599
Total Kabupaten	51.377	33.544	29.683	14.897	16.272	19.628	17.535	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan (Diolah)

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan menurut tingkat pendidikan secara umum dapat dilihat sebaran penduduk Kabupaten Solok Selatan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu Tidak/Belum Sekolah sebesar 22,90%, Belum Tamat atau masih bersekolah pada tingkat SD sebesar 14,57%, tamat SD atau sedang bersekolah pada tingkat SLTP sebesar 24,26%, tamat SLTP atau masih sedang bersekolah pada tingkat SLTA sebesar 15,42%, tamat SLTA atau sedang melanjutkan ke jenjang Diploma/S1 sebesar 17,50% dan berpendidikan Diploma/S1/S2/S3 5,32%. Secara rinci dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tidak/Blm Sekolah	21.593	20.311	41.904
2	Belum Tamat SD / Sederajat	14.146	12.522	26.668
3	Tamat SD/Sederajat	22.195	22.201	44.396
4	SLTP/Sederajat	14.902	13.312	28.214
5	SLTA/Sederajat	16.916	15.098	32.014
6	Diploma I/II/III	892	2.022	2.914
7	Diploma IV/Strata I	2.433	4.128	6.561

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
8	Strata-II	148	111	259
9	Strata-III	2	4	6
Jumlah Penduduk		93.227	89.709	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

Ditinjau dari jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 menurut jenis kegiatan utamanya dapat dilihat bahwa sebaran penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa 47,64% penduduk belum bekerja/tidak bekerja (terdiri dari anak-anak, penduduk yang bukan usia kerja, dan ibu rumah tangga), Pelajar dan Mahasiswa sebesar 20,53%, Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebesar 14,61%, Wiraswasta sebesar 11,47%, dan ASN, Pensiunan, Tenaga Pengajar, Tenaga Kesehatan, dan serta Penyuluh Agama sebesar 2,60%. Secara rinci penyebaran penduduk berdasarkan jumlah kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Solok Selatan Menurut Jenis Kegiatan Utama 2020

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	26.365	60.788	87.153
2	Aparatur/Pejabat Negara	1.539	2.244	3.783
3	Tenaga Pengajar	137	476	613
4	Wiraswasta	18.271	2.721	20.992
5	Pertanian/Peternakan	23.544	3.549	27.093
6	Nelayan/Perikanan	13	3	16
7	Pelajar/Mahasiswa	20.270	17.376	37.646
8	Tenaga Kesehatan	34	322	356
9	Pensiunan	265	197	462
10	Lainnya	2.789	2.033	4.822
Jumlah Penduduk		93.227	89.709	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

A. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Dalam melihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga

Berlaku yang menghitung nilai tambah batang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar

Perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari Rp. 4.598.229,50 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 5.571.732,28 juta pada tahun 2019 untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 3.435.196,44 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 3.977.409,14 juta untuk PDRB berdasarkan ADHK. Meskipun mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya namun tingkat pertumbuhan baik PDRB ADHB dan dan ADHK tahun 2016-2019 terus mengalami perlambatan dari 8,55% menjadi 5,08% untuk PDRB berdasarkan ADHK dan 5,12% menjadi 4,80% untuk PDRB berdasarkan ADHB. Penurunan ini terjadi seiring dengan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang diiringi oleh penurunan beberapa harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian.

Untuk tahun 2020 merupakan tahun yang paling berat bagi perekonomian dunia, nasional dan daerah dimana dihadapkan kepada bencana Pandemi Covid 19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 yaitu melalui *social distancing* dan *physical distancing*, yang diikuti oleh kebijakan yang lebih luas di beberapa daerah yang salah satunya Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik dari penawaran (supply) dan sektor permintaan (demand). Disisi produksi atau penawaran (supply) kebijakan ini mengakibatkan penurunan hasil produksi, dimana akses masyarakat dan dunia usaha ke faktor-faktor produksi dibatasi sehingga produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan sedangkan dari sisi permintaan (demand) kebijakan ini berdampak kepada penurunan permintaan yang disebabkan karena terbatasnya pergerakan masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam memenuhi konsumsinya. Kondisi ini menyebabkan pelaku ekonomi cenderung melakukan *wait and see* dalam keputusan ekonominya, atau dengan kata lain menahan kegiatan konsumsi maupun investasi.

Selain itu larangan mudik serta pemotongan atau penundaan dana transfer diberlakukan oleh pemerintah pusat ke daerah (mengakibatkan penurunan belanja daerah) akan berdampak terhadap perekonomian daerah, hal ini didasari oleh Laporan Bank Indonesia setiap tahunnya yang menyatakan bahwa perputaran uang yang cukup besar di Sumatera Barat pada umumnya terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat menyambut Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal) dan pada saat akhir tahun terutama pada waktu pencairan belanja pembangunan yang berasal dari pemerintah. Kondisi ini akhirnya

meyebabkan terjadinya kontraksi (pertumbuhan dibawah 0%) dalam perekonomian yang ditandai oleh menurunnya PDRB dari tahun sebelumnya dari Rp. 5,571,732,28 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528,507,31 juta pada tahun 2020 (mengalami penurunan 0,78%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan dari Rp. 3.977.409,14 juta menjadi Rp. 3.928.031,94 juta (mengalami penurunan -1,24%) untuk PDRB berdasarkan ADHK.

Tabel 2.10.
PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (harga berlaku)		PDRB (harga konstan tahun)	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	4.598.229,50	8,55	3.435.196,44	5,12
2017	4.990.779,69	8,54	3.612.139,52	5,18
2018	5.302.502,22	6,25	3.795.200,14	5,04
2019	5,571,732,28	5,08	3.977.409,14	4,80
2020	5.528,507,31	-0,78	3.928.031,94	-1,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari per sektor pembentuk PDRB atas Harga Berlaku dapat dilihat hampir seluruhnya sektor perekonomian mengalami penurunan pertumbuhan kecuali sektor yang terkait dengan penanganan Covid 19, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; dan Jasa lainnya. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan masih dapat bertumbuh dan bertahan meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tetap dapat bertumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jaminan sosial terhadap masyarakat dan peningkatan anggaran kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi dan mengurangi dampak Pandemic Covid 19.

Sedangkan dari sisi PDRB atas Harga Konstan yang menggambarkan kondisi riil pertumbuhan nilai tambah barang dengan mengeluarkan inflasi harga barang dari perhitungan dengan cara memakai harga dasar tahun 2010 dapat dilihat bahwa sebahagian besar sektor perekonomian mengalami penurunan, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa lainnya, Konstruksi, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan. Meskipun masih mengalami

penurunan pertumbuhan namun sektor utama pembentuk perekonomian Kabupaten Solok Selatan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih bisa bertumbuh masing-masing 0,25% dan 0,09%. Beberapa sektor yang masih bisa tetap mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 7,44 untuk sektor Informasi dan Komunikasi dan 7,40 untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sekolah daring dan memaksimalkan penggunaan internet dan aplikasi untuk penyelesaian tugas-tugas pemerintahan dan dunia usaha serta peningkatan anggaran pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Pandemi Covid 19.

Dilihat dari struktur perekonomian periode tahun 2016-2020 struktur perekonomian kontribusi sektor perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer yaitu rata-rata 40,64% dari PDRB ADHB, dengan sektor utama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Pengadaan Listrik dan Gas. Namun dominasi sektor primer ini terus mengalami penurunan dari 43,53% (pada tahun 2016) menjadi 38,21% (pada tahun 2020) seiring dengan melambatnya pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian dan meningkat dan berkembangnya sektor sekunder dan tersier seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Penyediaan Akomodasi dan makan Minum.

Tabel 2.11.

Perkembangan Nilai dan Petumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)

Sektor	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.546,34	7,45	1.597,08	3,28	1.626,26	1,83	1.626,72	0,03	1.590,98	- 2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	454,05	6,11	462,68	1,90	491,03	6,13	527,66	7,46	519,50	- 1,55
C	Industri Pengolahan	247,11	4,62	246,59	- 0,21	246,80	0,09	234,85	- 4,84	237,70	1,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,22	16,93	1,56	28,14	1,81	16,03	2,20	21,55	2,11	- 4,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,10	8,76	2,24	6,51	2,38	6,25	2,59	8,82	2,63	1,54
F	Konstruksi	528,61	7,90	584,08	10,49	648,48	11,03	724,26	11,69	707,20	- 2,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	833,38	11,15	915,33	9,83	1.014,21	10,80	1.126,05	11,03	1.116,73	- 0,83
H	Transportasi dan Pergudangan	272,22	9,34	295,99	8,73	326,62	10,35	367,31	12,46	337,83	- 8,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,63	12,85	38,41	10,91	41,75	8,70	47,98	14,92	43,53	- 9,27
J	Informasi dan Komunikasi	184,78	10,62	209,48	13,37	233,54	11,49	265,85	13,83	285,31	7,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,76	10,48	38,92	- 2,11	40,50	4,06	43,55	7,53	44,30	1,72
L	Real Estate	37,65	9,04	39,78	5,65	42,52	6,89	46,18	8,60	46,60	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,67	9,10	0,73	8,78	0,77	6,05	0,84	9,09	0,83	- 1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,91	10,44	239,72	12,07	255,91	6,75	278,46	8,81	304,84	9,47
P	Jasa Pendidikan	99,49	13,77	110,85	11,42	119,22	7,55	136,66	14,63	144,40	5,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,25	6,86	53,40	10,67	59,63	11,67	66,18	10,98	73,28	10,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	54,04	17,08	57,03	5,53	64,74	13,52	74,38	14,89	70,76	- 4,87
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.598,22	8,55	4.893,87	6,43	5.216,18	6,59	5.571,73	6,82	5.528,51	- 0,78

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.12.

Perkembangan Nilai dan Petumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Rp. Miliar)

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.106,20	2,95	1.126,25	1,81	1.150,90	2,19	1.170,07	1,67	1.172,98	0,25
B	Pertambangan dan Penggalan	287,92	6,3	290,32	0,83	301,87	3,98	317,35	5,13	310,48	-2,16
C	Industri Pengolahan	201,37	2,52	200,45	-0,46	201,94	0,74	196,76	-2,57	193,26	-1,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,8	10,22	0,87	8,75	0,95	9,20	1,01	6,32	0,96	-4,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,74	3,31	1,85	6,32	1,94	4,86	2,01	3,61	2,02	0,50
F	Konstruksi	401,16	6,83	437,29	9,01	469,84	7,44	499,48	6,31	467,56	-6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	644,17	5,5	698,89	8,49	744,43	6,52	795,87	6,91	796,62	0,09
H	Transportasi dan Pergudangan	217,65	7,61	234,79	7,88	253,7	8,05	276,32	8,92	247,21	-10,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,23	5,98	26,49	9,33	28,64	8,12	31,13	8,69	27,88	-10,44
J	Informasi dan Komunikasi	186,69	8,71	208,55	11,71	227,61	9,14	246,43	8,27	264,77	7,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,09	6,85	29,03	-3,52	29,44	1,41	30,07	2,14	30,12	0,17
L	Real Estate	28,13	4,56	29,51	4,91	30,81	4,41	32,49	5,45	32,5	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	0,51	4,79	0,55	7,84	0,58	5,45	0,61	5,17	0,59	-3,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	155,73	5,81	167,47	7,54	178,64	6,67	189,03	5,82	188,04	-0,52
P	Jasa Pendidikan	72	8,64	79,04	9,78	84,61	7,05	91,95	8,68	96,23	4,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,08	3,96	41,53	9,06	45,25	8,96	48,67	7,56	52,27	7,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	38,71	10,57	40,25	3,98	44,06	9,47	48,16	9,31	44,53	-7,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.435,20	5,12	3.613,14	5,18	3.795,20	5,04	3.977,41	4,80	3.928,03	-1,24

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.13.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2016-2020 (%)

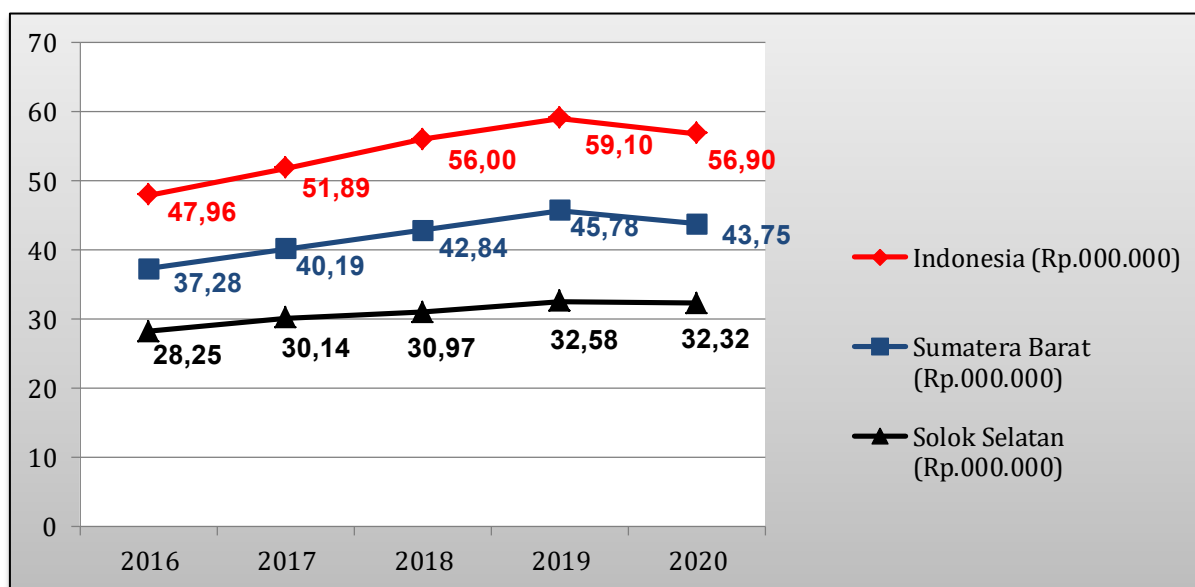
Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,63	32,20	32,63	31,17	31,18	30,33	29,20	29,42	28,78	29,86
B	Pertambangan dan Penggalian	9,87	8,38	9,45	8,04	9,41	7,95	9,47	7,98	9,40	7,90
C	Industri Pengolahan	5,37	5,86	5,04	5,55	4,73	5,32	4,22	4,95	4,30	4,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	11,50	11,68	11,93	12,10	12,43	12,38	13,00	12,56	12,79	11,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,12	18,75	18,70	19,34	19,44	19,62	20,21	20,01	20,20	20,28
H	Transportasi dan Pergudangan	5,92	6,34	6,05	6,50	6,26	6,68	6,59	6,95	6,11	6,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,71	0,78	0,73	0,80	0,75	0,86	0,78	0,79	0,71
J	Informasi dan Komunikasi	4,02	5,43	4,28	5,77	4,48	6,00	4,77	6,20	5,16	6,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,88	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76	0,80	0,77
L	Real Estate	0,82	0,82	0,81	0,82	0,82	0,81	0,83	0,82	0,84	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,65	4,53	4,90	4,64	4,91	4,71	5,00	4,75	5,51	4,79
P	Jasa Pendidikan	2,16	2,10	2,27	2,19	2,29	2,23	2,45	2,31	2,61	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,11	1,09	1,15	1,14	1,19	1,19	1,22	1,33	1,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,18	1,13	1,17	1,11	1,24	1,16	1,33	1,21	1,28	1,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

B. PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan. Dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa pada periode 2016-2019 PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 28,23 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.32,58 juta pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 32,32 juta atau mengalami penurunan Rp. 0,26 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan dari PDRB berdasarkan ADHB dari Rp. 5,571,732,28 Juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528,507,31 Juta pada tahun 2020

Gambar 2.2.
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

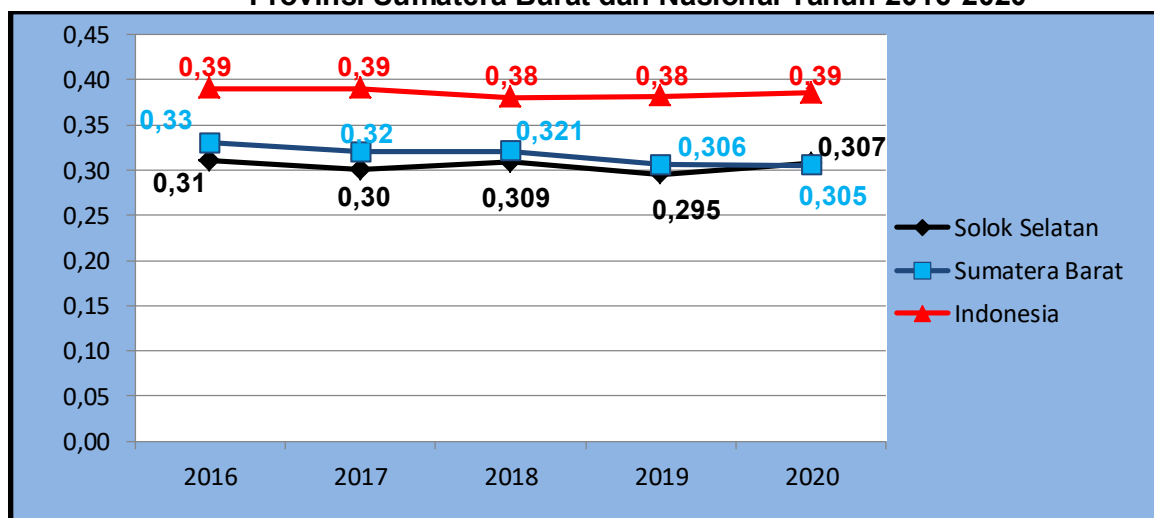
Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 namun jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi dan Nasional, penurunan PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan lebih rendah. Hal ini menyebabkan selisih antara PDRB perkapita Provinsi dan Nasional semakin mengecil yaitu dari 13,20 juta dengan Provinsi dan 26,52 juta dengan Nasional pada tahun 2019 menjadi Rp 11,43 juta dengan Provinsi dan 24,93 juta dengan Nasional pada tahun 2020.

C. Indek Gini (Gini Rasio)

Koefisien indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar indeks gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial.

Dilihat dari perkembangan, rasio Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 berfluktuasi setiap tahunnya yaitu dari 0,310 tahun 2016, turun menjadi 0,300 pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 0,310 pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 0,295 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,307, kenaikan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin tidak merata atau dengan kata lain *gap* antara penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin meningkat dengan kata lain dampak pandemic Covid 19 lebih berdampak terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat pendapatan menengah kebawah. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi dan Nasional Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan lebih baik dari rata-rata Nasional (berada dibawah rata-rata Nasional) akan tetapi lebih rendah dari rata-rata Provinsi (berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari perkembangan indeks gini, distribusi Kabupaten Solok Selata masih berada pada kategori ketimpangan sedang karena indeksnya masih berada diantara 0,3 dan dibawah 0,5 ($0.3 \leq G \leq 0.5$).

Gambar 2.3.
Perbandingan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

D. Angka Kemiskinan

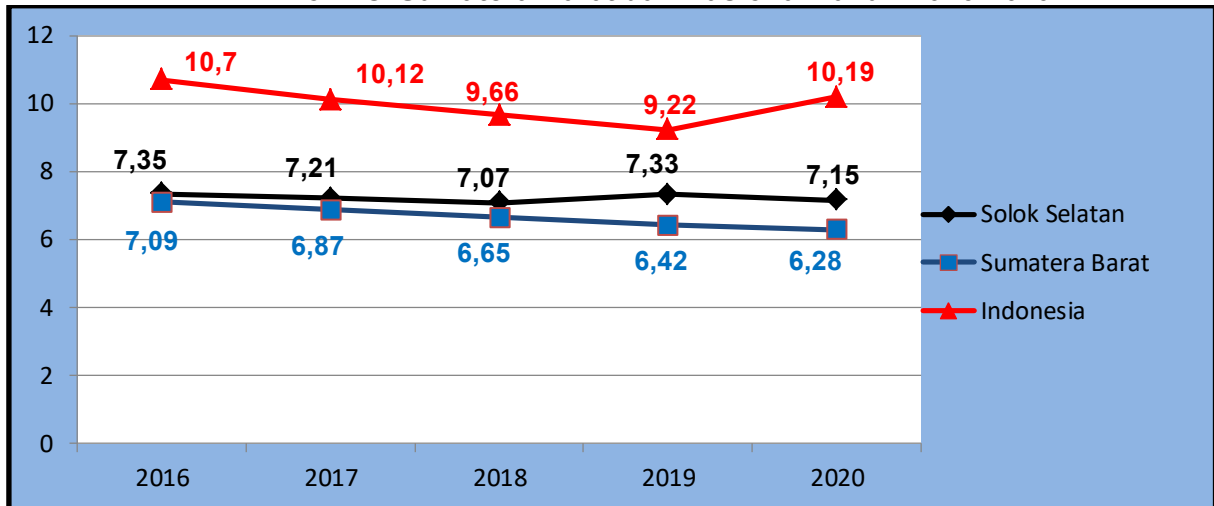
Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Di lain pihak Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonominya tinggi, serta diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang menghitungnya, serta kriteria yang ditetapkan.

Dari gambar dibawah dapat kita lihat bahwa sampai tahun 2018 tingkat kemiskinan penduduk Solok Selatan terus mengalami penurunan dari 7,35% pada tahun 2016 menjadi 7,07% pada tahun 2018, namun penurunannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 Tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan mengalami kenaikan menjadi 7,33%, kenaikan ini disebabkan karena melemahnya harga-harga komoditas unggulan Kabupaten Solok Selatan seperti Sawit dan Karet serta faktor bencana yang melanda kabupaten Solok Selatan selama tahun 2019. Namun pada tahun 2020 meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19, namun tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,15 atau turun sebesar 0,18% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tingkat kemiskinan ini diikuti oleh menurunnya jumlah penduduk miskin dari 12,49 ribu jiwa menjadi 12,39 ribu jiwa dan peningkatan garis kemiskinan (rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan) dari Rp. 387.438 per bulan menjadi Rp. 419 442 perbulan.

Penurunan tingkat kemiskinan ini diikuti oleh peningkatan dari kesejahteraan penduduk miskin yang dapat dilihat dari penurunan dari indikator pendukungnya yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,84 pada tahun 2019 menjadi 0,79 pada tahun 2020 dan Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,21 pada tahun 2019 menjadi 0,15 pada tahun 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* (P1)), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk miskin. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty*

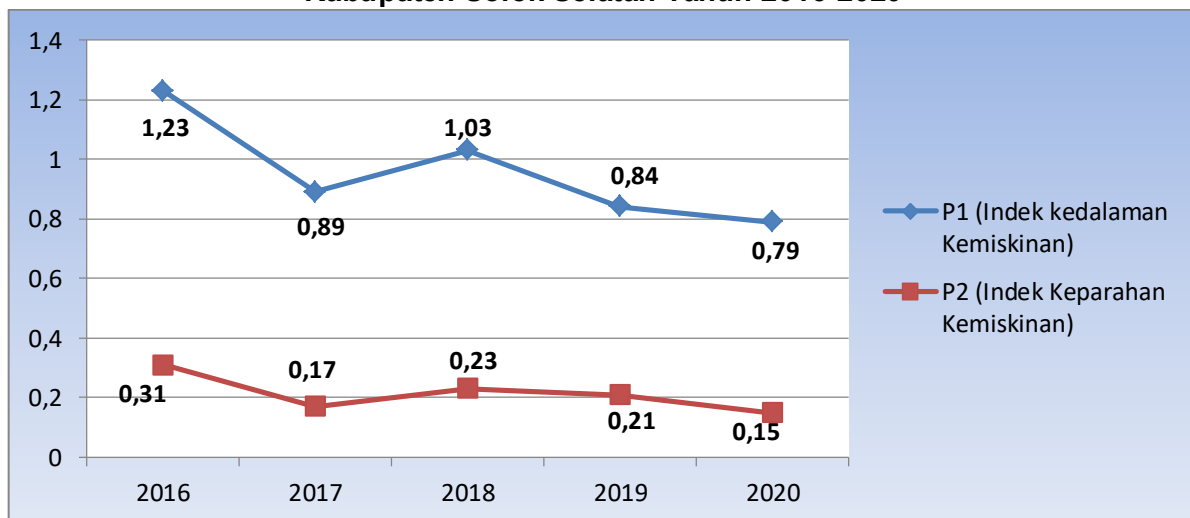
Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan semakin lebar ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan sangat miskin.

Gambar 2.4.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Gambar 2.5.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

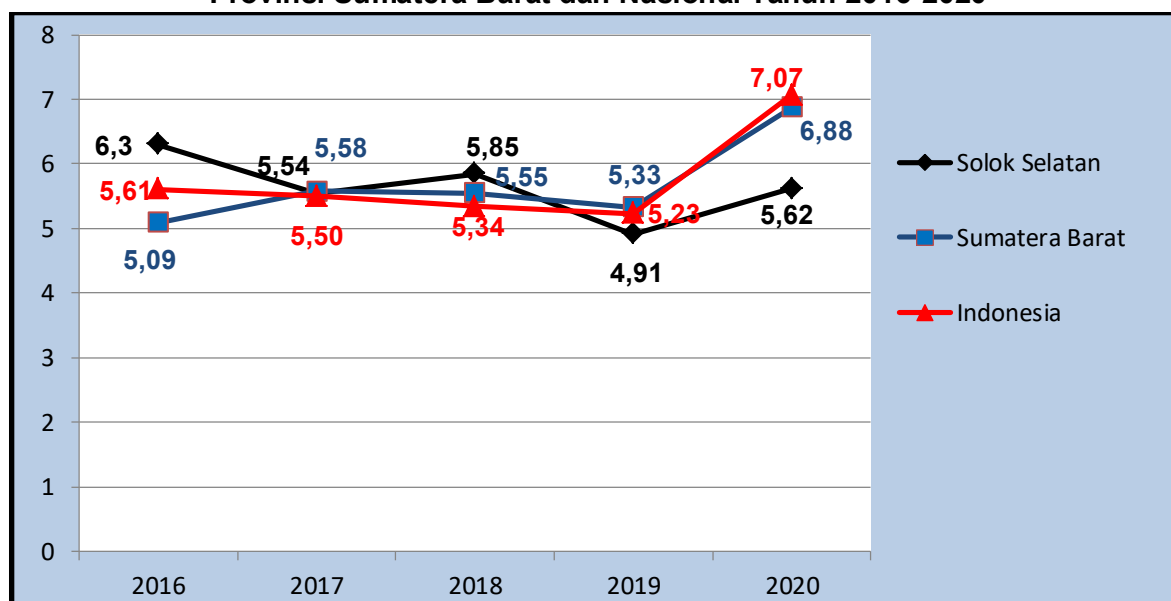
E. Pengangguran

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat

keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Dilihat dari perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2019 Tingkat pengangguran di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi cenderung mengalami penurunan yaitu dari 6,3% pada tahun 2016, 5,54% pada tahun 2017, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 5,85%, dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 4,91%. Penurunan ini lebih disebabkan karena meningkatnya penduduk usia produktif untuk kembali melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 14,46% sehingga TPT menjadi 5,62%. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat penurunan kondisi perekonomian dunia termasuk Solok Selatan akibat kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 melalui Kebijakan PSBB, yang membatasi aktifitas masyarakat dalam perekonomian

Gambar 2.6.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

F. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk melihat tingkat keamanan masyarakat maka dapat dilihat dari perkembangan angka kriminalitas. Jika dilihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok

Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan yaitu dari 35,72 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 18,69 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Penurunan ini seiring dengan menurun kasus kriminalitas dari 632 kasus menjadi 342 kasus.

Penurunan angka kriminalitas dapat diartikan tingkat keamanan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan semakin meningkat seiring dengan menurunnya angka kriminalitas di kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.14.
Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang terselesaikan dan Angka Kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus Kriminal ditangani	632	528	458	443	342
2.	Persentase Kasus yang Terselesaikan	47,15	64,77	50,65	68,39	100
3.	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	35,72	29,67	25,31	24,32	18,69

Sumber: BPS dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan

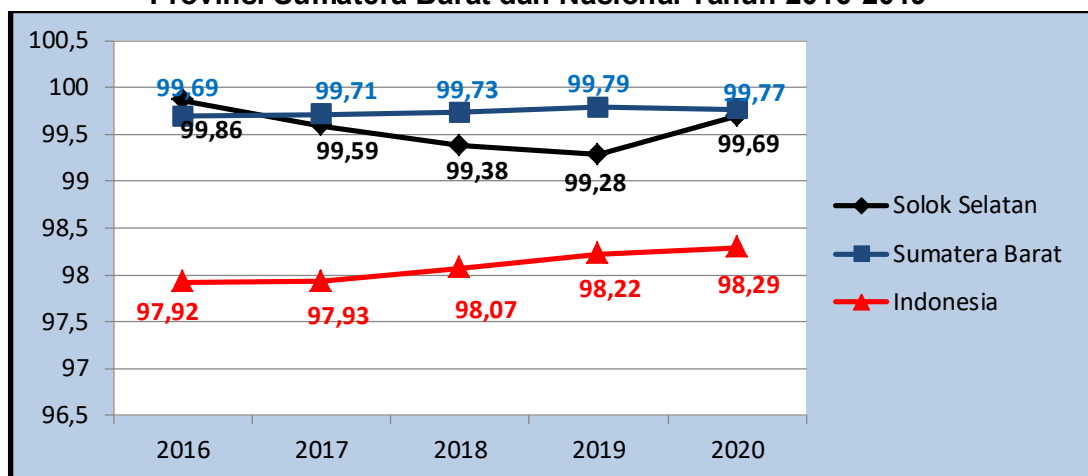
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15-64 tahun yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya

Selama periode tahun 2016-2019, capaian angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 98,61%, terus mengalami penurunan, sampai tahun 2019 menjadi 99,28%. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 99,69%. Ini berarti masih terdapat 0,31% penduduk yang berusia 15-64 tahun yang masih buta huruf. Pada tahun 2020 angka melek huruf penduduk berjenis laki-laki masih lebih besar dari pada penduduk perempuan yaitu laki-laki 100% dan perempuan 99,37%. Jika dilihat dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata nasional akan tetapi masih berada dibawah rata-rata provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.7.
Perkembangan Persentase Melek Huruf Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

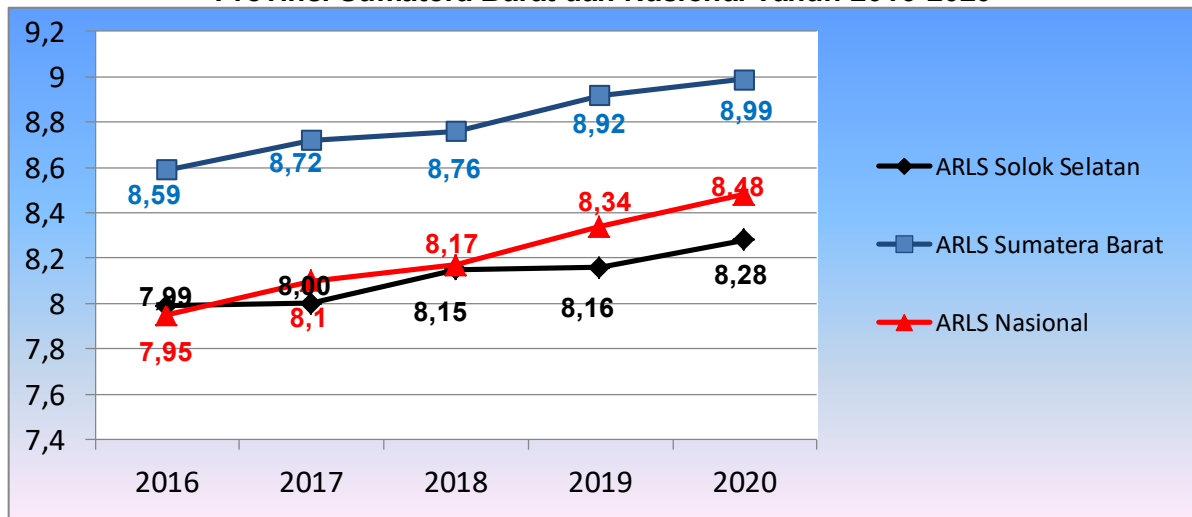
Untuk melihat rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat melalui Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang.

Jika dilihat dari perkembangan ARLS, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 7,99 tahun pada tahun 2016 menjadi 8,28 tahun pada tahun 2020. ARLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,28 tahun dapat diartikan rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas menamatkan pendidikan setara kelas 2-3 SMP. Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia diatas 45 tahun serta relatif banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi maupun Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMK/MA) yang cenderung mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah diluar Kabupaten Solok Selatan.

Sedangkan untuk AHLS menunjukan adanya peningkatan yaitu dari 12,51 tahun pada tahun 2016 menjadi 12,71 tahun pada tahun 2020. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) diprediksi bersekolah sampai tingkat SMA-D1. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan pendidikan dari pendidikan dasar sembilan tahun menjadi pendidikan universal (12 tahun) serta hampir meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.

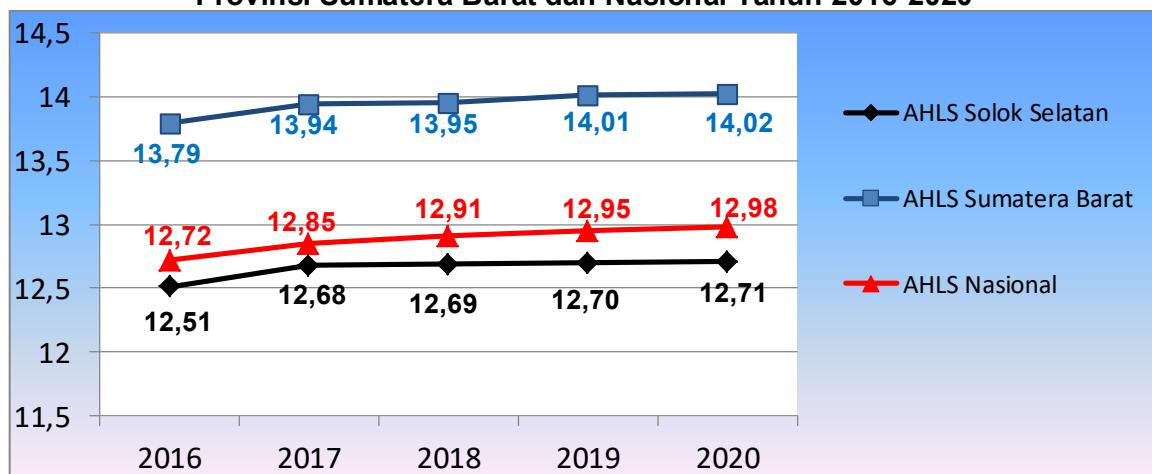
Meskipun terus mengalami kenaikan ARLS dan AHLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih dibawah Rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 8,99 tahun dan 8,48 tahun untuk ARLS dan 14,02 tahun dan 12,98 tahun untuk AHLS.

Gambar 2.8.
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Gambar 2.9.
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



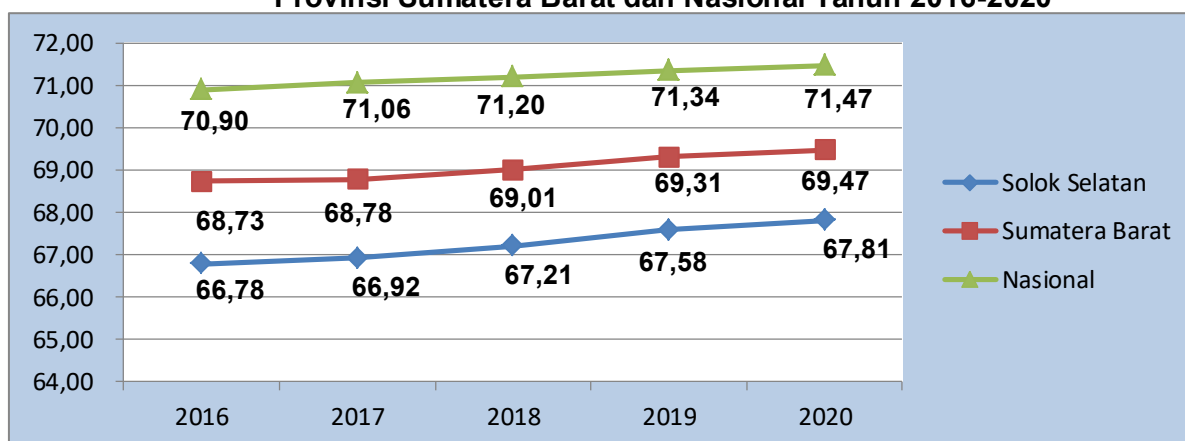
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

C. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan indikator kesehatan yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka harapan hidup adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah. Dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 adalah 66,78 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 67,81 tahun. Peningkatan umur harapan hidup seiring dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat terutama pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan peningkatan AHH Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada periode tahun 2016-2020 terlihat bahwa peningkatan bahwa peningkatan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan lebih besar yaitu 1,93 tahun sedangkan nasional hanya sebesar 0,57 tahun dan Provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 0,74 tahun. Meskipun Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (diatas rata Kabupaten Pasaman, Sijunjung dan Mentawai) dan Nasional

Gambar 2.10.
Pembandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Solok Selatan

D. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari dua indikator pokok yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Dilihat dari perkembangan TPAK Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 69,19% pada tahun 2016 menjadi 72,67% pada tahun 2020. Peningkatan TPAK ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja di Kabupaten Solok Selatan tersedia untuk melakukan kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan TPAK ini kurang diikuti oleh peningkatan penduduk usia produktif yang bekerja terutama periode 2019-2020 yang mengalami penurunan dari 95,09% menjadi 94,38%

Sedangkan tingkat produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan yang dapat dilihat dari Rasio PDB per Tenaga Kerja sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga Rp. 67,72 juta pertahun, namun pada tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan menjadi 65,38 juta pertahun pada tahun 2019 menjadi 64,81 juta pertahun. Penurunan ini lebih disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Solok Selatan dari 5,07%

pada tahun 2018 menjadi 4,89% pada tahun 2019 dan -1,24% pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan beberapa harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian yang merupakan mayoritas penyerapan tenaga kerja di Solok Selatan serta kebijakan penanganan Pandemic Covid-19 melalui Kebijakan PSBB, yang membatasi aktifitas masyarakat dalam perekonomian

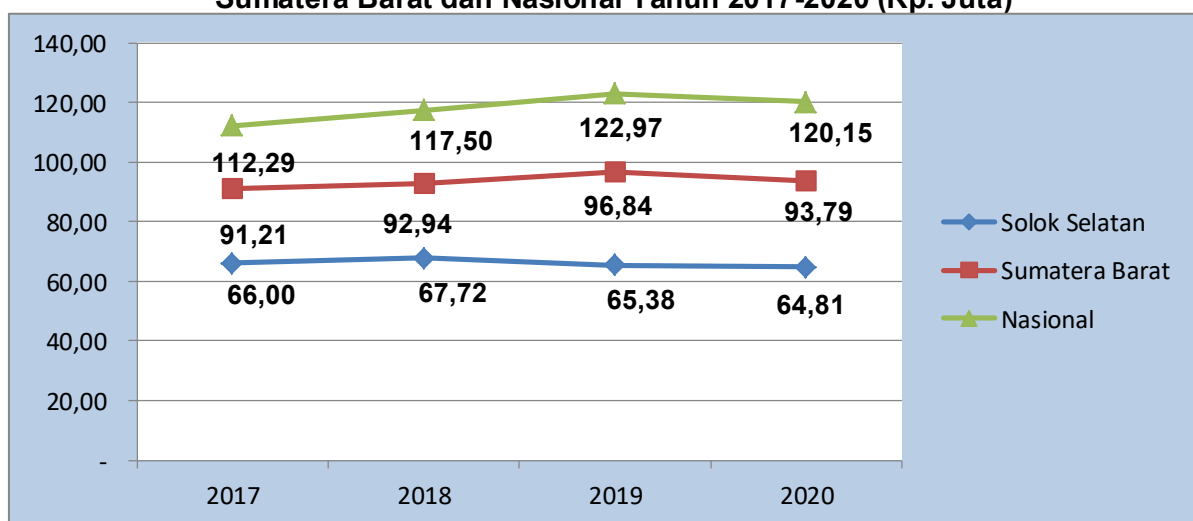
Tabel 2.15.
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	nd	69,19	74,64	72,12	72,67
2	Penduduk Usia Produktif yang Bekerja (%)	nd	94,46	94,14	95,09	94,38
3	PDB Per Tenaga Kerja (Produktifitas Tenaga Kerja) (Rp.juta)	na	66,00	67,72	65,38	64,81

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Rendahnya produktifitas tenaga kerja Solok Selatan disebabkan belum berkembangnya industri terutama industri padat modal dan sebahagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan dan industri menengah kebawah yang pengolahannya masih bersifat padat karya sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil.

Gambar 2.11.
Pembandingan PDB Per Tenaga Kerja Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (Rp. Juta)



Sumber: Badan Pusat statistik

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan nasional bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dilihat dari perkembangan pembangunan seni budaya dan olahraga periode tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Namun dilihat dari sisi pengelolaan baik group kesenian maupun klup olahraga sebahagian besar belum dikelola secara profesional sehingga sering tumbuh, hilang dan berganti. Untuk ketersediaan Gedung Kesenian masih belum ada karena sampai tahun 2020 kabupaten Solok Selatan belum memiliki Gedung Kesenian, namun untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya diselenggarakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muaralabuh, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro dan Balai Adat Koto Baru. Sedangkan untuk ketersediaan sarana olahraga terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,49% pada tahun 2016 mejadi 3,96% pada tahun 2020, Namun sebahagian besar tidak permanen dan dikelola oleh kelompok masyarakat dan nagari sehingga pengelolaannya belum optimal. Pada tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan telah memiliki 1 Gelanggang Olah Raga (GOR) yang merupakan Hibah dari PT Supreme energy yang pengelolaanya diserahkan pada pemerintah daerah.

Tabel 2.16.
Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Group Kesenian per 10.000 penduduk	5,10	5,01	4,98	3,80	5,15
2	Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	
3	Rasio Klup Olahraga per 10.000 penduduk	8,91	7,55	7,42	9,61	9,61
4	Rasio Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,49	0,48	0,47	0.53	3,96

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

Berikut ini diuraikan gambaran perkembangan indikator kinerja di Urusan Wajib Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020:

1) Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD)

Jika dilihat kinerja jenjang pendidikan TK/PAUD pada periode 2017-2019, terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD dari 68,13 pada tahun 2017 menjadi 47,42% pada tahun 2019 meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 54,88%. Rendahnya APK TK/PAUD ini disebabkan karena masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK/PAUD yang dapat dilihat dari rasio ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah masih berada pada angka 20,45 Per 10000 penduduk usia Sekolah atau 1 (satu) TK/PAUD melayani 486 penduduk usia sekolah. Hal ini juga diikuti oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada TK/PAUD serta masih terdapatnya anak usia 6 tahun yang sudah bersekolah pada tingkat SD/MI.

Tabel 2.17.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar	63,87	68,13	52,03	47,42	54,88
2	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	13,84	15,25	18,73	19,42	20,45
3	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	18,64	18,55	16,95	16,95	13,97
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	18,18	38,51	40,75	42,54	35,92
5	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	37,80	41,52	36,25	32,13	54,0
6	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	44,02	19,97	23,00	25,23	10,08
7	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	0
8	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	1:15	1:15	1:15	1:10	1:10
9	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	38,75	42,60	42,60	53,60	65,30

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

2) Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A)

Untuk pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2020 terus mengalami perbaikan dari tahun hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel dibawah ini seperti Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan. Meskipun mengalami perbaikan masih terdapat beberapa indikator yang belum maksimal pencapaiannya seperti Angka Partisipasi Murni yang masih berada pada angka 90,33% yang berarti masih terdapat 9,67% penduduk usia sekolah yang 7-12 yang masih belum bersekolah/tidak bersekolah/berada pada jenjang yang seharusnya, selain itu masih

terdapatnya penduduk usia sekolah SD/MI yang putus sekolah sebesar 0,80% dan tidak melanjutkan ke pendidikan menengah pertama sebesar 3,29% dari lulusan pendidikan dasar.

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 124-125 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas:14,65 siswa. Namun dari sisi kualitas cenderung mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari menurunnya ruang kelas kondisi baik dari 65,95% menjadi 23,34%, penurunan ini disebabkan karena bencana alam dan kondisi bangunan yang sudah berumur. Disisi ketersediaan tenaga pengajar terdapat oleh penurunan Rasio Guru permurid dari 68,23 per 1000 siswa pada tahun 2017 menjadi 62,46 per 1000 siswa pada tahun 2020. Meskipun dari sisi rasio jumlah mengalami penurunan namun disisi kualitas terus mengalami kenaikan hingga 92,94% pada tahun 2020.

Tabel 2.18.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	112,48	116,30	117,50	117,47	115,50
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	91,87	81,84	84,02	87,34	90,33
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99,65	99,46	100	99,10	99,42
4	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,35	0,32	1,25	0,76	0,80
5	Angka Kelulusan (AL)	100	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM)	100	100	97,85	96,34	96,71
7	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	72,25	77,86	73,14	78,16	80,59
8	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	18,94	18,94	19,18	19,12	14,65
9	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	84,97	78,97	68,18	65,94	23,34
10	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	7,10	11,42	9,61	8,00	63,07
11	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	4,58	8,09	12,07	13,01	13,14
12	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	3,36	1,52	10,14	13,04	0,45
13	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	57,49	68,23	68,23	64,44	62,46
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	62,98	82,41	91,26	91,40	91,94

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

3) Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)

Untuk pelayanan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2017-2020 terdapat beberapa indikator yang mengalami perbaikan meskipun sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016 seperti Angka Partisipasi Kasar, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, namun untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah dan Angka

Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah mengalami sedikit penurunan kinerja

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 198-199 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas:18-19 siswa. Namun dari sisi kualitas cenderung mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari menurunnya ruang kelas kondisi baik dari 78,76% menjadi 33,54%, penurunan ini disebabkan karena bencana alam dan kondisi bangunan yang sudah berumur. Disisi ketersediaan tenaga pengajar terdapat oleh penurunan Rasio Guru permurid dari 62,54 per 1000 siswa pada tahun 2016 menjadi 73,13 per 1000 siswa pada tahun 2020. Meskipun dari sisi rasio jumlah mengalami penurunan namun disisi kualitas terus mengalami kenaikan hingga 95,54% pada tahun 2020.

Tabel 2.19.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	91,87	81,84	84,02	87,34	90,33
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	73,53	76,32	74,36	77,44	76,90
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99,16	99,25	97,91	97,27	96,75
4	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,16	0,27	2,98	2,18	2,20
5	Angka Kelulusan (AL)	100	100	99,07	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM)	98,63	99,45	94,13	84,91	99,11
7	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	62,67	58,80	59,11	50,50	50,50
8	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	19,90	20,38	20,75	24,08	18,79
9	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	79,86	81,85	81,72	78,76	33,54
10	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	6,14	6,85	0,00	0,00	57,23
11	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	9,22	6,85	6,45	16,99	9,23
12	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	4,78	4,45	11,83	4,25	0
13	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	62,54	62,54	43,47	77,83	73,13
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	83,94	87,86	95,35	95,80	95,54

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

4) Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Paket C)

Untuk pelayanan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2020 hanya indikator Angka Partisipasi Kasar yang mengalami peningkatan dari 70,73% menjadi 79,71%. Sedangkan untuk indikator lainnya cenderung kinerjanya mengalami penurunan seperti Angka Partisipasi Murni dari 67,15% pada tahun

2016 menjadi 64,30% pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah dari 80,87% pada tahun 2016 menjadi 76,33% pada tahun 2020, Angka Putus Sekolah dari 0,10% pada tahun 2016 naik menjadi 1,77 pada tahun 2019 namun kembali mengalami penurunan menjadi 0,82% pada tahun 2020

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 420-421 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas:18,79 siswa. Peningkatan ini diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan persentase ruang kelas yang berkualitas baik dari 50,34% pada tahun 2016 menjadi 98,48% pada tahun 2020. Disisi ketersediaan tenaga pengajar terdapat oleh penurunan Rasio Guru permurid dari 76,36 per 1000 siswa pada tahun 2016 menjadi 70,53 per 1000 siswa pada tahun 2020. Meskipun dari sisi rasio jumlah mengalami penurunan namun disisi kualitas terus mengalami kenaikan hingga 97,40% pada tahun 2020.

Tabel 2.20.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Atas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	70.73	70.10	73.32	78.87	79,71
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	67.15	67.31	64.54	63.82	64,30
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	80.87	73,46	75,50	76,33	76,33
4	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,10	0,10	1,77	1,77	0,82
5	Angka Kelulusan (AL)	99,9	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM)					
7	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10.000 penduduk usia Sekolah)	20,50	26,80	26,47	20,94	23,79
8	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	27,61	28,43	24,77	23,16	18,79
9	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	50,34	52,34	64,89	98,48	98,48
10	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	48,98	0,00	33,59	0,00	0,00
11	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	0,68	46,38	0,00	0,00	0,00
12	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	1,28	1,28	1,53	1,52	1,52
13	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	76,36	75,01	63,29	67,93	70,53
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	95,16	95,83	97,75	97,40	97,40

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

B. Urusan Wajib Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayan dasar yang harus diperoleh masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pelayanan masyarakat sangat

menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (0-59 Bulan) yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mempresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKB dan AKI merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Dilihat dari perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2019 cenderung berfluktuasi akan tetapi cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 3,17 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB, 3,5 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBA dan 126,86 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 baik AKB, AKBA dan AKI kembali mengalami peningkatan menjadi menjadi 7,92 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB, 8,56 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBA dan 198,08 per 100.000 kelahiran hidup. Peningkatan ini disebabkan rendahnya kesadaran orang tua dalam memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Pandemic Covid 19 mengakibatkan terbatasnya akses ke sarana kesehatan serta kurang optimalnya pelayanan kesehatan. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan kunjungan bayi serta Cakupan kelahiran, cakupan kompilasi kebidanan, cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus, cakupan pelayanan anak balita dan cakupan balita pneumonia yang ditangani oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan.

Tabel 2.21.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Cakupan Layanan Ibu dan Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	6,43	6,46	4,76	3,17	7,92
2	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 Kelahiran hidup	6,74	7,04	5,1	3,5	8,56
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per	153,2	88,03	254,04	126,86	198,08

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	100.000 Kelahiran hidup					
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	81,5	75,16	79,00	77,8	73
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani(%)	63,5	46,2	46,1	16,0	41,3
6	Cakupan imunisasi lengkap bayi (%)	95,87	97,21	96,7	95,7	74,2
7	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	81,1	82,7	78,3	76,0	69,5
8	Cakupan pelayanan nifas (%)	78,5	81,7	79,0	78,4	68,4
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	21,6	7,8	8,5	19,0	22,2
10	Cakupan kunjungan bayi (%)	82,5	90,65	91,04	85,3	83,8
11	Cakupan pelayanan anak balita (%)	41,43	72,62	87,79	70,6	85,9
12	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	6,4	8,11	10	19,6	4,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (berdasarkan angka yang dilaporkan)

2) Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut SDG's adalah status Gizi Balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga perhitungan yaitu 1). Berat Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi secara umum, dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Gizi Buruk, 2). Tinggi Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, ini dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Stunting dan, 3). Berat Badan menurut Tinggi Badan, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, indikator ini dapat dilihat melalui Persentase Balita Gizi Kurang.

Dilihat dari perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2020 mengalami penurunan yaitu dari 0,04% pada tahun 2016 menjadi 0,01% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%) maka persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan masih dibawah standar WHO.

Sedangkan persentase balita gizi kurang meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,55%, namun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 6,6%. Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan dari persentase balita stunting pada tahun 2020 dari 9,5% menjadi 13,7%. Kenaikan ini sangat erat kaitannya dengan terbatasnya akses ibu dan balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Pandemic Covid 19 yang dapat dilihat dari menurunnya beberapa indikator seperti cakupan kunjungan ibu hamil, cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan balita

Masih terdapatnya Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting di Kabupaten Solok Selatan sebahagian besar disebabkan oleh rendahnya

akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Selain itu faktor orang tua dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan yang tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak

Tabel 2.22.
Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,04	0,03	0,03	0,03	0,01
2	Persentase Balita Gizi Kurang	0,4	0,7	3,55	4,6	6,6
3	Persentase Balita Stunting	2,5	14,6	16,46	9,5	13,7
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

3) Kondisi derajat kesehatan masyarakat

Untuk melihat kualitas kesehatan di Kabupaten Solok Selatan terutama untuk penyakit menular terbanyak dapat dilihat dari beberapa indikator penyakit yaitu:

- Tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 2016-2019 yaitu dari 36,26 per 100.000 penduduk tahun 2016 menjadi 162,5 per 100.000 penduduk tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 121,57 per 100.000 penduduk atau 215 kasus. Penurunan prevalensi tuberkulosis ini diiringi dengan peningkatan kematian karena tuberkulosis yaitu dari 1,75 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 3,4 per 100.000 penduduk
- Tingkat prevalensi DBD periode 2016-2020 mengalami penurunan, dengan tingkat prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 98,94% per 100.000 penduduk namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 16,47 per 100.000 penduduk atau 29 kasus.
- Tingkat Prevalensi Diare penduduk periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 22,49 per 1000 penduduk pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 17,49 per 1000 penduduk atau 2434 kasus.
- Tingkat Prevalensi penyakit Malaria penduduk pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan meskipun pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,01 per 1000 penduduk pada tahun 2019 (2 kasus), menjadi 0,00 per 1000 penduduk pada tahun 2020 (0 orang dari 88 kasus konfirmasi malaria)

- Tingkat Prevalensi HIV/AIDS penduduk di Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 berfluktuasi dengan tingkat prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,0059%. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,0029%, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,0034% seiring dengan bertambahnya kasus menjadi 6 kasus.

Tabel 2.23.
Perkembangan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	36,26	50,12	155,57	162,5	121,57
2.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,84	1,21	2,7	1,75	3,4
3.	Prevalensi DBD(per 100.000 penduduk)	98,94	60,22	61,2	43,25	16,47
4.	Prevalensi Diare (per 1000 penduduk)	19,5	18,92	18,9	22,49	17,49
5.	Prevalensi penyakit Malaria (per 1000 penduduk)	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
6.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (persen)	0,0030	0,0012	0,0059	0,0029	0,0034
7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
8.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	91,95	96,38	93,2	89,5	83,4
9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

4) Perkembangan indikator pelayanan Kesehatan

Untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator penyakit yaitu

1. Rasio jumlah posyandu per satuan balita (per 1000 balita) dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu dari 14,94 per 1000 balita pada tahun 2016 menjadi 16,5 per 1000 balita (294 Posyandu) pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan rasio ideal pelayanan 1 unit posyandu melayani balita adalah antara 75–100 balita (10,0-13,3 per 1000 balita), maka cakupan pelayanan posyandu Kabupaten Solok Selatan masih diatas rasio ideal yaitu 1 unit posyandu melayani 63-64 balita. Namun peningkatan rasio posyandu tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan yaitu persentase Posyandu Mandiri (Posyandu yang melaksanakan kegiatan minimal 8 kali dalam setahun, mempunyai kader 5 orang dan cakupan kegiatan utamanya lebih dari 50%) yang mengalami penurunan dari 56,6% pada tahun 2019 menjadi 40,8% pada tahun 2020. Penurunan pelayanan ini berdampak kepada penurunan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) / Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dari 100% pada tahun 2019

menjadi 70,2% pada tahun 2020

2. Rasio jumlah puskesmas untuk per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yaitu dari 0,055 tahun 2016 menjadi 0,057 pada tahun 2020 atau 1 puskesmas melayani 17.543 penduduk. Dilihat dari cakupan pelayanan puskesmas per kecamatan terjadi juga peningkatan yakni dari 114,29% pada tahun 2016 (8 Puskesmas) menjadi 142,85% pada tahun 2020 (10 Puskesmas). Dengan rasio puskesmas untuk per satuan penduduk dan cakupan pelayanan puskesmas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pelayanan kesehatan setingkat puskesmas sudah mencukupi dengan standar rasio 1 puskesmas per 30.000 penduduk, dan untuk cakupan 1 puskesmas per 1 kecamatan. Sedangkan untuk cakupan pelayanan puskesmas pembantu yang standar pelayanannya 1 per desa (nagari) sedikit mengalami penurunan sudah berada diangka 130,77% pada tahun 2019 menjadi 108,51% pada tahun 2020 dengan jumlah puskesmas pembantu 51 unit penurunan ini seiring dengan pemekaran 8 Nagari tahun 2019 .
3. Rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis (perawat, bidan) per 1000 penduduk secara umum belum terpenuhi yang tersebar Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Pada tahun 2020 jumlah dokter di Fasilitas Tingkat I berjumlah 30 orang (22 dokter umum dan 8 dokter gigi) dengan rasio dokter sebanyak 0,17 per 1000 penduduk / 1 dokter melayani 5.822 penduduk (standar 0,4 per 1000 penduduk/ 1 dokter : 2500 penduduk). Sementara itu untuk tenaga paramedis yang terdiri dari perawat berjumlah 108 orang dan bidan 185 orang dengan rasio baru mencapai 1,66 per 1000 penduduk atau 1 tenaga medis melayani 601 penduduk.
4. Selama periode 2016-2020 pelayanan RSUD Kabupaten Solok Selatan belum optimal disebabkan standar pelayanan RSUD baru akreditasi C dengan Rasio Ketersediaan Rumah Sakit adalah 0,0057 per 1000 penduduk dengan jumlah tenaga medis dokter adalah dokter spesialis 17 Orang, dokter gigi 5 orang, dokter umum 7 orang. Untuk capaian *Bed Occupancy Rate/BOR* (persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu) pada periode tahun 2016- 2018 terus mengalami peningkatan yaitu dari 50,98% pada tahun 2016 menjadi 55,5% pada tahun 2018 namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 45,7. Sedangkan untuk *Gross Death Rate/GDR* (angka kematian umum) meskipun mengalami penurunan sampai tahun 2018 yaitu 12,7 per 1000 pasien keluar, namun kembali mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 19,2 per 1000 pasien keluar. Peningkatan *Gross Death Rate/GDR* diikuti oleh penurunan *Net Death Rate/NDR* (angka kematian $\geq$ 48 jam setelah dirawat) yang pada tahun dari 18,0 per 1000 pasien keluar pada tahun 2018 menjadi 16,0 per 1000 pasien keluar

pada tahun 2020

- Sedangkan untuk cakupan pelayanan dasar melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan yaitu dari 54,5% menjadi 47,3%. Penurunan ini seiring dengan kebijakan BPJS untuk meningkatkan iuran asuransi kesehatan serta penurunan sharing pendanaan dari provinsi dari 40% menjadi 20% .

Tabel 2.24.

**Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio posyandu per 1000 balita	14,94	15,3	16,1	15,74	16,5
2.	Persentase Posyandu Mandiri	61,3	58,21	59,1	56,6	40,8
3.	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	0,055	0,054	0,053	0,053	0,057
4.	Rasio puskesmas pembantu per 1000 penduduk	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
5.	Cakupan puskesmas	128,57	128,57	128,57	128,57	142,85
6.	Cakupan puskesmas pembantu	125,64	125,64	130,77	130,77	108,51
7.	Rasio dokter per 1000 penduduk di Puskesmas dan jaringannya	0,28	0,21	0,1	0,18	0,12
8.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Puskesmas dan jaringannya	3,10	2,58	2,27	2,0	1,66
9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,0061	0,0060	0,0059	0,0058	0,0057
10.	Gross Death Rate (per 1000 pasien keluar)	27,71	18,04	12,7	15,4	19,2
11.	Net Death Rate (per 1000 pasien keluar)	18,12	11,38	18,0	18,6	16
12.	Bed Occupancy Rate (BOR)	50,98	52,66	55,5	45,1	45,7
13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93,3	100	100	100	70,2
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
15.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	91,95	96,38	93,2	89,5	83,4
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
17.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	97,87	97,92	97,31	97,5	87,2
18.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas	54,5	54,9	54,2	58,20	47,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Gambaran kinerja pelayanan sub Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sampai tahun 2020 panjang jalan di Kabupaten Solok Selatan sepanjang 1430,77 km yang terdiri dari 99,2 km jalan Nasional, 153,44 jalan Provinsi, dan 1178,13 km jalan Kabupaten, dengan jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 527 ruas. Jika dilihat dari kondisi jalan baik jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Solok Selatan

berada pada kondisi 28,49% kondisi baik, 31,40% kondisi rusak ringan, 20,95% kondisi rusak sedang dan 19,17% berada pada kondisi rusak berat. Jika dilihat dari kemantapan jalan kabupaten yang merupakan tanggung jawab Kabupaten Solok Selatan, kondisi tidak mantap 58,46% dan hanya 41,54% dalam kondisi mantap. Sedangkan untuk jembatan, hingga tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan memiliki 253 jembatan dengan kondisi baik sebesar 73,91%.

2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya di Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan. Meskipun dari sisi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten terus mengalami peningkatan dari 7.609,87 hektar pada tahun 2016 menjadi 9.613,06 pada tahun 2020, peningkatan luas daerah irigasi diirigi oleh peningkatan rasio jaringan irigasi terhadap luas sawah dari 0,75 menjadi 0,94 pada tahun 2020. Namun dari sisi kualitas irigasi kabupaten yang berkondisi baik terus mengalami penurunan yaitu dari 72,52% pada tahun 2016 menjadi 21,36% pada tahun 2020, penurunan yang disebabkan oleh faktor bencana yang seringnya terjadi di Kabupaten Solok Selatan seperti banjir dan longsor terutama yang terjadi pada akhir tahun 2020.
3. Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan mengalami perkembangan selama periode 2016–2020. terus mengalami peningkatan yaitu dari 36,43% pada tahun 2016 menjadi 59,17% pada tahun 2020. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah.
4. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rumah tangga sudah mengakses air minum layak sudah mencapai 52,72% dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 77,04%. Selain peningkatan dari akses air minum yang bersumber dari PDAM, pelaksanaan program PAMSIMAS yang telah dimulai tahun 2008 dan tetap berlanjut sampai dengan tahun 2020 dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan cakupan rumah tangga pengguna air minum di Kabupaten Solok Selatan.
5. Dilihat dari Rata-rata Indeks kesulitan geografis daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari 28,11 pada tahun 2019 menjadi 29,43 pada tahun 2020. Indeks kesulitan geografis merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar (Nilai maksimal 100). Dilihat dari komponen perhitungan indeks kesulitan geografis bahwa permasalahan utama Kabupaten Solok

Selatan berada pada komponen pelayanan dasar masyarakat dengan rata-rata indeks 20,75 dan aksesibilitas masyarakat dengan indeks 26,81.

Tabel 2.25.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2020

No	KECAMATAN	Panjang	JENIS PERKERASAN					
			Aspal HTX	Beton	Burda	Burtu	Telford /Kerikil	Tanah
1	Koto Parik Gadang Diateh	129,69	51,55	39,50	-	-	23,27	15,37
2	Sungai Pagu	136,62	58,19	37,78	0,40	-	11,84	28,41
3	Pauh Duo	111,16	42,36	10,43	3,00	-	28,89	26,48
4	Sangir	312,50	62,79	24,72	20,51	-	106,55	97,94
5	Sangir Jujuan	108,44	27,23	12,70	5,60	-	33,30	29,61
6	Sangir Balai Janggo	204,93	8,40	9,95	19,10	-	136,00	31,48
7	Sangir Batang Hari	174,79	4,90	7,56	9,10	-	109,43	43,80
JUMLAH		1.178,13	255,42	142,63	57,71	-	449,28	273,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.26.
Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%)	21,28	31,88	37,13	46,17	41,54
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	45	67	70	71,94	78,26
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	442,32	456,13	531,25	543,92	488,73
4	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	72,52	75,32	70,02	45,87	21,36
5	Luas Irigasi Teknis (Ha)	7.609,87	7.750	7.750	7.750	9.613,06
6	Rasio Jaringan Irigasi	0,75	0,76	0,76	0,76	0,94
7	Akses Air Minum Layak (%)	52,72	53,40	62,78	69,02	77,04
8	Akses Sanitasi Layak (%)	36,43	39,47	49,38	51,14	59,17
9	Rasio ketaatan terhadap RTRW	46,71	na	na	na	46,73
10	Rata-Rata Indek Kesulitan Geografis	na	na	na	28,11	29,43
	a) Pelayanan Dasar	na	na	na	13,55	20,75
	b) Infrastruktur	na	na	na	47,78	46,77
	c) Aksesibilitas	na	na	na	28,21	26,81

Sumber Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.27.
Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Kepemilikannya

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Nasional					
	% Kondisi Baik	28,82	31,34	25,02	26,46	20,40
	% Kondisi Sedang	56,66	59,89	51,10	52,09	70,62
	% Kondisi Rusak Ringan	12,09	8,47	19,00	16,28	7,76
	% Kondisi Rusak Berat	2,42	0,30	4,89	5,17	1,22
2	Jalan Provinsi					

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	% Kondisi Baik	na	7,60	13,24	37,12	30,63
	% Kondisi Sedang	na	63,32	60,32	21,62	13,87
	% Kondisi Rusak Ringan	na	1,81	2,14	4,32	14,41
	% Kondisi Rusak Berat	na	27,27	24,29	36,94	41,08
3	Jalan Kabupaten					
	% Kondisi Baik	na	15,54	19,20	19,83	28,89
	% Kondisi Sedang	na	16,33	17,22	17,29	30,38
	% Kondisi Rusak Ringan	na	49,89	47,20	46,51	22,91
	% Kondisi Rusak Berat	na	18,23	16,38	16,37	17,82
4	Jalan Non Status					
	% Kondisi Baik	na	na	na	na	na
	% Kondisi Sedang	na	na	na	na	na
	% Kondisi Rusak Ringan	na	na	na	na	na
	% Kondisi Rusak Berat	na	na	na	na	na

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

D. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2015-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN selama periode 2016-2020 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berjumlah 97,47%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,57% (masih 0,43% rumah yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama). Meskipun sudah 99,57% rumah yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama namun masih terdapat 3,89% rumah tangga pengguna listrik non PLN yang pada umumnya menggunakan genset, PLTMH dan Tenaga Surya (panel surya) baik dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
2. Dilihat dari perkembangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok Selatan tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi tetapi cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 1.618 rumah pada tahun 2016 menjadi 3.458 pada tahun 2019, Peningkatan ini disebabkan selain akibat kondisi perekonomian masyarakat serta bencana alam yang melanda Solok Selatan setiap tahunnya seperti Gempa, Banjir dan Longsor tetapi karena adanya pendataan yang dilakukan terhadap perumahan masyarakat yang melibatkan wal nagari pada tahun 2018-2020

Tabel 2.28.
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Pemukiman
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Akses Rumah Penerangan utama listrik (%)	97,47	97,69	98,36	97,85	99,57
2.	Rumah Tidak Layak Huni	1618	3337	2539	3384	3458

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perumkim & LH

E. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, Kesbangpol Linmas, dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9,34	9,78	8,68	8,30	8,49
2.	Jumlah Linmas	0	0	0	0	0
3.	Persentase Jorong Memiliki Pos Kamling	28	98,14	97,06	97,45	98,53
4.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	80	77	84,21	100	100
5.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas)	0,14	0,43	0,57	0,60	0,29
6.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten	100	92,59	94,74	100	100
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
8.	Cakupan layanan WMK	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
9	Capaian Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	nd	60,00	68,18	64,10	53,85
10	Persentase Nagari Tangguh Bencana	28,20	53,84	74,36	92,31	92,31
11	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana	100	100	100	100	100
12	Indek Resiko Bencana Solok Selatan (berdasarkan IRBI)	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20
13	Indeks Ketahanan Daerah	na	na	na	na	0,30

Sumber: BPBD dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

Data pada tabel diatas menunjukan beberapa indikator pelayanan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengalami perbaikan yaitu Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, Persentase Jorong Memiliki Pos Kamling kenaikan ini diikuti oleh kenaikan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3. Namun untuk Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas) mengalami penurunan seiring dengan adanya pembatasan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Solok Selatan.

Disisi pelayanan kebakaran terjadi penurunan Capaian Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%) terutama dari tahun 2018-2020 dari 68,18% menjadi 53,86%. Penurunan ini disebabkan karena pengembangan wilayah pemukiman tidak diiringi dengan penambahan infrastruktur dan cakupan layanan WMK sehingga menyebabkan baru 15,84% wilayah Kabupaten Solok Selatan yang terlayani. Sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan baru memiliki 3 pos pemadam kebakaran (SPM 7 unit) dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 3 unit.

Sedangkan untuk pelayanan penanganan bencana terus mengalami peningkatan yaitu disisi mitigasi atau kesiapan menghadapi bencana sampai tahun 2020 terdapat 92,31% Nagari Tangguh Bencana dengan tingkat Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana yang ditangani 100%. Meskipun demikian, jika dilihat dari perkembangan Indeks Resiko Bencana (indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia) Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori resiko sedang dengan indeks 137,20 sedangkan jika dilihat dari indeks ketahanan daerah Kabupaten Solok Selatan baru sebesar 0,30 dari 1 (Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap/Indeks Resiko Bencana tetap))

Selanjutnya dapat pula digambarkan kinerja pelayanan sub urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2016-2020 seperti terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyuluhan wasbang a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	1 70	1 70	1 70	1 70	1 70
2	FKUB a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	4 21	2 20	2 20	2 26	1 23
3	Sosialisasi P4GN a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	1 150	1 100	1 100	2 100	- -
4	Pendidikan Politik bagi warga Negara a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	1 39	- -	1 39	3 258	1 75
5	Pembinaan Politik Daerah a) Jumlah Parpol b) Parpol yang mendapat bantuan c) Jumlah LSM / Ormas	12 11 30	12 11 17	12 11 18	16 12 24	16 10 34
6	Bakorpullahdasila/Kominda a) Anggota KOMINDA (orang) b) Pelaksanaan Rapat (kali) c) Opservasi Lapangan (kali)	25 4 -	27 2 -	33 2 -	84 2 -	51 1 -

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten. Solok Selatan

F. Urusan Sosial

Dilihat dari perkembangan PMKS di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu dari 33.106 orang menjadi 15.193 orang. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 26.974 orang. Peningkatan yang cukup tinggi ini lebih disebabkan oleh bencana alam yang cukup berdampak terhadap kehidupan masyarakat Solok Selatan tahun 2019 seperti gempa bumi, banjir dan longsor. Peningkatan mengakibatkan terjadi nya penurunan cakupan pelayanan terhadap PMKS dari 75% menjadi 70,28%. Namun pada tahun 2020 jumlah PMKS kembali mengalami penurunan menjadi 16.756 orang. Namun penurunan tidak diikuti oleh peningkatan PMKS yang ditangani, yang mengalami penurunan dari 70,28% menjadi 57,62%.

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib didorong oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2020 berjumlah 4 unit. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya pemberian bantuan, pendampingan serta pemberian pekerjaan agar menjadi produktif. Gambaran kinerja pelayanan urusan sosial Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 2.31.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS	33.106	25.380	15.193	26.974	16.756
2	Persentase PMKS yang ditangani	66	70	75	70,28	57,62
3	Ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	2	2	4	4
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15,15	12,34	56,72	69,3	57,62
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)/ sejenis lainnya	0	0	0	0	0
6	Persentase Ketersediaan Tenaga Pendamping (minimal 66 orang)	87	100	100	100	100
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1,04	1,04	1,04	3,11	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Ketengakerjaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2020 berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada periode tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 69,19% pada tahun 2017 menjadi 74,64% pada tahun 2018. Peningkatan ini diiringi oleh meningkatnya tingkat pengangguran dari 5,54% pada tahun 2017 menjadi 5,85% pada tahun 2018. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penduduk Kabupaten Solok Selatan sudah menamatkan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2019 TPAK kembali mengalami penurunan menjadi 72,12% yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,91%. Namun pada tahun 2020 TPAK kembali mengalami peningkatan menjadi 7,67%, peningkatan ini diiringi oleh meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 5,62%. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan di Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok Selatan yang membatasi akses masyarakat untuk beraktifitas termasuk kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) terhadap perekonomian Kabupaten Solok Selatan
2. Sedangkan perkembangan tingkat ketaatan perusahaan terhadap aturan dapat dilihat dari indikator pemenuhan tingkat keselamatan dan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dilihat pada periode 2016-2020. Persentase perusahaan yang menerapkan standar keselamatan dan perlindungan cenderung mengalami perubahan yaitu dari 83% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 57,69%. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yang terutama terkait dengan penerapan standar prosedur kesehatan menghadapi pandemic Covid 19 . Sedangkan untuk persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pada lembaga formal terus mengalami penurunan yaitu dari 3,4% tahun 2016 menjadi 0% tahun 2020 .
3. Untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan selalu di mediasi oleh pemerintahan daerah melalui forum Tripartit (pemerintah, pengusaha dan perserikatan tenaga kerja) yang ditandai dengan persentase kasus tenaga kerja yang ditangani 100%.

Tabel 2.32.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	nd	69,19	74,64	72,12	72,67
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	2,9	0,34	11,67	13,22	19,6
3	Tingkat pengangguran terbuka	nd	5,54	5,85	4,91	5,62
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan standar Keselamatan dan perlindungan	83	83	72	80	57,69
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	3,4	nd	1,6	na	0
6	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Solok Selatan di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender. Disisi Indek Pembangunan Gender untuk melihat indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia mengalami peningkatan dari 94,54 pada tahun 2017 menjadi 95,08 pada tahun 2020. Peningkatan Indek Pembangunan Gender ini diikuti oleh peningkatan peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari peningkatan Indek Pemberdayaan Gender dari 51,17 pada tahun 2017 menjadi 53,15 pada tahun 2020.
2. Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya pada tahun 2017-2020 partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017 tingkat partisipasi berada di posisi 54,73% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 63,37%. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 57,86%, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 59,42%. Pola penurunan dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan ketersediaan lapangan kerja baru dan tingginya kecenderungan wanita melanjutkan pendidikan atau menjadi ibu rumah tangga. Peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita ini diikuti oleh pertumbuhan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu dari 47,50% pada tahun 2016 menjadi 68,45% pada tahun 2020.
3. Penanganan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2016-2020 berfluktuasi tergantung jenis kasus

yang ditangani. Pada 2016-2017 pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan yang ditangani berada pada tingkat 100%. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 89% namun sampai tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 89,7%. Jika dilihat peningkatan rasio KDRT terhadap jumlah penduduk kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 meskipun berfluktuasi namun relatif masih rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, rasio KDRT di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yaitu dari 0,054 per 1000 penduduk menjadi 0,021 per 1000 penduduk. Penurunan ini lebih disebabkan karena menurunnya kasus KDRT dari 10 Kasus pada tahun 2019 menjadi 4 kasus pada tahun 2020.

Tabel 2.33.

Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Pembangunan Gender	na	94,54	94,92	95,03	95,05
2	Indek Pemberdayaan Gender	na	51,17	51,40	52,25	53,15
3	Level kabupaten layak anak					
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	na	54,73	63,37	57,87	59,42
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,68	49,83	54,39	54,69	55,80
6	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,026	0,054	0,052	0,054	0,021
7	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditangani	100	100	89	89,5	89,7

Sumber: Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan

C. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pangan adalah ada atau tidaknya peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan lain sebagainya, kemudian ketersediaan pangan utama yang dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Kondisi kinerja urusan pangan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 memperlihatkan masih kurangnya jumlah regulasi pangan. Selama periode ini belum ada produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pangan, yang ada hanyalah berupa Peraturan Bupati dan keputusan Bupati

Dilihat dari tingkat ketersediaan bahan pangan utama mengalami peningkatan kecuali daging, telur dan susu. Peningkatan ini diikuti oleh terjadinya diversifikasi pangan

yang ditandainya bergesernya ketersediaan pangan utama dari kacang-kacangan, ubi kayu dan ubi jalar ke jagung. Namun peningkatan kurang diiringi oleh peningkatan ketersediaan bahan pangan hewani seperti daging, telur dan susu. Oleh karena itu, dimasa datang kelembagaan dan personil aparatur yang melaksanakan urusan pangan perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya, apalagi saat ini kedaulatan pangan menjadi isu dan prioritas nasional.

Tabel 2.34.
Perkembangan Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Pangan Utama, berupa:						
	• Padi	ton	125.903	147.747	147.898	152.488	142.581
	• Jagung		59.344	95.862	76.630	103.323	82.909
	• Kacang Hijau		0	18	12	13	13,86
	• Kacang Tanah		5.592	2.560	1.260	1.281	1.189,02
	• Kedelai		669	12	76	137	26,79
	• Ubi Jalar		30.011	2.247	1.891	2.683	3.551
	• Ubi Kayu		4.747	3.720	3.720	3.546	4.538,4
	Pangan Hewani						
	• Daging	ton	975,87	981,71	1.034,19	1.082,86	1.485,19
	• Telur		199,31	208,23	222,73	231,7	248,04
	• Susu		14,11	9,07	28,22	32,56	18,14
	• Ikan		2.063	1.231	1.340	1.731	1.661,45
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	51,8	73,6	76,5	77,6	77,8

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

D. Urusan Pertanahan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2015-2020 dapat dilihat dari perkembangan jumlah tanah bersertifikat yang diterbitkan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.35.
Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah tanah yang bersertifikat yang dikeluarkan	bidang	1.646	1.520	3.539	6.516	2.276
1	Hak Milik	bidang	1.611	1.514	3.483	6.480	2.051
2	Hak Guna Bangunan	bidang	29	3	51	33	171
3	Hak Pakai	bidang	6	3	5	3	54

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2015-2019 jumlah sertifikat yang dikeluarkan berfluktuasi setiap tahunnya dengan trend meningkat, yaitu dari 1.698 bidang tanah pada tahun 2016, 1.646 bidang tanah tahun 2016, 1.520 bidang tanah

tahun 2017 3.539 bidang tanah tahun 2018, menjadi 6.416 bidang tanah pada 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 2.276 bidang tanah. Fluktuasi jumlah sertifikat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah kegiatan sertifikat prona yang dibiayai oleh pemerintah pusat, selain permintaan pribadi masyarakat.

E. Urusan Lingkungan Hidup

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk capaian pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup yang mengalami peningkatan dari 79,21 pada tahun 2019 menjadi 80,53 pada tahun 2020. Peningkatan ini lebih dipicu oleh peningkatan indeks kualitas udara dari 75,57 pada tahun 2019 menjadi 93,26. Peningkatan ini merupakan dampak dari penurunan kasus kebakarann hutan diwilayah Riau dan Jambi. Sedangkan untuk Indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan cenderung mengalami penurunan yaitu dari 79,38 dan 81,82 pada tahun 2019 menjadi 67,50 dan 75,64 pada tahun 2020. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri, pertambangan, perkebunan, dan sampah.
2. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok Selatan harus mendapat perhatian khusus. Bila dilihat dari sudut pandang pemberian layanan (*service provider*) di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 182936 orang. Dihat dari pelayanan terhadap persampahan dari 2017-2019 terus mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari perkiraan produksi sampah 26.088 M³ pada tahun 2017 yang terangkut sebesar 12.150 M³ (46,57%) dan terkelola 17.550 M³ (67,27%) dan pada tahun 2019 dari perkiraan produksi sampah 26.589 M³ yang terangkut 3.013 M³ (11,33%), yang terkelola 3.013 M³ (11,33%). Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana persampahan menjadi terangkut 7.408 M³ (27,78%), yang terkelola 7.408 M³ (27,78%) dengan perkiraan produksi sampah 26.667 M³. Untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana persampahan dan mempercepat beroperasinya TPA Jujutan.
3. Dilihat dari cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan yaitu dari 75,0% pada tahun 2017 mejadi 68,18% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 80.0%. Meskipun cakupan pengawasan terhadap AMDAL masih belum optimal namun dengan berkat kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, penegakan hukum lingkungan yang dapat dilihat dari persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan pengerusakan

lingkungan hidup dapat ditindak lanjuti seluruhnya yaitu 100%.

Tabel 2.36.
Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	79,21	80,53
	➤ Indek Kualitas Udara	-	-	-	75,57	93,26
	➤ Indek Kualitas Air	64,00	76,25	79,38	79,38	67,50
	➤ Indek Kualitas Lahan	-	94,02	92,66	81,82	75,64
2	Cakupan Pelayanan Persampahan					
	➤ Terangkut (%)	-	46,57	37,98	11,33	27,78
	➤ Terkelola (%)	-	67,27	45,40	11,33	27,78
3	Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL (%)	-	75,0	70,58	68,18	80,0

Sumber: Dinas Perumkim dan LH Kabupaten Solok Selatan

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Rumah Tangga di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Kartu Keluarga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 yaitu dari 86,23% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 83,22%.
2. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan dari 75,48% pada tahun 2016 menjadi 98,94% pada tahun 2019. Peningkatan ini diikuti oleh pembersihan dan penghapusan data ganda serta peningkatan pelayanan, persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 88,86%
3. Untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 47,80% pada tahun 2016 menjadi 85,94% pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kelahiran terutama untuk bayi yang baru lahir.
4. Sedangkan untuk rasio pasangan yang berakte perkawinan (ditujukan bagi pasangan non muslim) yang diukur dari jumlah pasangan nikah berakte perkawinan terus mengalami peningkatan dari 5,0% pada tahun 2016, menjadi 68,45% pada tahun 2020.

Tabel 2.37.
Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	88,23	88,5	100	100	83,22
2	Persentase penduduk ber KTP	75.48	77,18	84,69	98,94	88,86
3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	47.80	66,1	75,27	78,13	85,94
4	Persentase Penduduk yang memiliki akte perkawinan	5.00	14.00	15,27	51,97	68,45

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dilihat dari perkembangan indikator rata-rata Indek Desa Membangun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,6538 pada tahun 2017 menjadi 0,7133 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan seluruh komponen pembentuk indek desa membangun yaitu Indek Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekonomi dan Indek Ketahanan Lingkungan. Dilihat dari ketiga rata-rata indek pembentuk diatas permasalahan utama masih terletak pada Indek Ketahanan Ekonomi yang masih berada pada angka 0,65. Peningkatan Indek Desa Membangun merupakan dampak langsung dari penurunan dari jumlah desa/nagari Tertinggal /sangat tertinggal dari 16 desa/nagari tertinggal dan 6 desa/nagari sangat tertinggal pada tahun 2016 menjadi 3 desa/nagari tertinggal/sangat tertinggal pada tahun 2020. Penurunan ini diikuti juga oleh peningkatan dari status desa/nagari dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, maju menjadi mandiri. Nagari yang masih dikategorikan tertinggal adalah Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Permasalahan utama dari tiga nagari tersebut disebabkan rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, rendahnya kualitas lingkungan, rendahnya aksesibilitas ke pusat pertumbuhan.

Tabel 2.38.
Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indek Desa Membangun	Indek	-	0,6538	0,6538	0.7024	0,7133
	➤ Indek Ketahanan Sosial	Indek	-	0,7141	0,7141	0.7733	0,8022
	➤ Indek Ketahanan Ekonomi	Indek	-	0,6156	0,6156	0.6346	0,6590
	➤ Indek Ketahanan Lingkungan	Indek	-	0,6316	0,6316	0.6991	0,6786
2	Persentase Desa Mandiri	%	0	0	5,13	10,26	12,82
3	Persentase Desa Maju	%	5,13	5,13	20,51	38,46	48,72

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Desa Berkembang	%	38,48	38,46	46,15	43,59	30,77
5	Persentase Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal	%	56,42	56,41	28,21	7,89	7,69

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Meningkatnya kualitas individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh peningkatan kualitas institusi keluarga. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika dilihat perkembangannya akseptor KB aktif periode 2016-2020 di Kabupaten Solok Selatan kecuali tahun 2017 persentase akseptor KB terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016, akseptor KB aktif sebesar 77,18%, menjadi 81,65% pada tahun 2019. Peningkatan ini seiring meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB aktif dari 21.287 pasangan menjadi 27.801 pasangan yang salah satu akibat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB yang dapat dilihat dari peningkatan akseptor KB mandiri dari 5,035% menjadi 16,27%
2. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 1,67% namun sampai tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 0,45%. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah rata-rata anggota keluarga per Rumah Tangga yaitu dari 3,72 orang pada tahun 2019 menjadi 3,46 orang tahun 2020.
3. Sedangkan persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I juga mengalami penurunan pada periode 2016-2018 dari 32,36% pada tahun 2016 menjadi 27,30% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 27,32%. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan dari tingkat kemiskinan daerah dari 27,30% pada tahun 2018 menjadi 27,32 pada tahun 2019.

Tabel 2.39.

Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk	0,81	0,57	1,67	0,67	0,45
Rata-rata jumlah anggota keluarga per	3,46	3,46	3,45	3,72	3,46

Indikator	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga					
Cakupan Akseptor KB aktif (%)	77,18	73,66	80,21	81,27	81,65
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	32,36	27,39	27,30	27,32	na

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Dinas P2KB&P3A, BPS (Data diolah)

I. Urusan Perhubungan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum terdapat transportasi umum yang representatif di Kabupaten Solok Selatan, selain itu volume kendaraan angkutan penumpang dalam jangka waktu tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Layanan angkutan umum masih didominasi oleh kendaraan yang tidak resmi dan tidak terdaftar yang beroperasi dan melayani angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu rendahnya standard kelayakan dan kondisi terminal angkutan umum di Kabupaten Solok Selatan baik dari ketersediaan sarana dan prasarana yang belum dapat difungsikan. Untuk menunjang pelayanan arus penumpang ke daerah yang belum memiliki moda transportasi angkutan umum. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kecelakaan dari 1,80 per 10.000 pada tahun 2017 penduduk menjadi 2,40 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Dilihat dari cakupan layanan, cakupan layanan angkutan sungai lebih baik dari pada cakupan layanan angkutan per 100 penduduk yaitu untuk angkutan sungai 31,20 per 100 penumpang melayani sedangkan untuk layanan angkutan darat baru 0,0413 per 100 penumpang

Tabel 2.40.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (Angkutan penumpang)	Unit	11	15	15	20	20
2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	52.351	52.350	51.212	44.401	48.451
3.	Rasio Izin Trayek/jumlah penduduk (10.000 penduduk)	Rasio	0,676	0,843	0,829	0,714	1,093
	Rasio angka kecelakaan per 10.000 penduduk	Rasio	nd	1,20	2,43	2,14	2,40
4.	Jumlah Terminal	Unit	2	2	2	2	2
5.	Jumlah Dermaga	Unit	1	1	1	1	2
6.	Jumlah angkutan Sungai	Unit	315	315	351	311	326
7.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Sungai	Orang	1350	1.345	1.118	997	1045
8.	Rasio layanan angkutan darat	Rasio	0,0210	0,0287	0,0293	0,0450	0,0413

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	(per 100 penumpang)						
	Rasio layanan angkutan sungai (per 100 penumpang)	Rasio	23,33	23,42	31,40	31,19	31,20
9.	Jumlah orang melalui dermaga / terminal per tahun	orang	5.440	5.435	5.269	5.013	5.132

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

2. Kinerja pada urusan perhubungan juga dapat dilihat dari cakupan layanan terhadap kendaraan umum. Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki KIR mengalami peningkatan yaitu dari 78% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum penumpang/barang dalam melakukan uji kelayakan kendaraannya sesuai ketentuan yang berlaku cukup tinggi.

Tabel 2.41.
Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	78	87	89	91	100
2.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Kendaraan /Menit	20	20	20	20	20
3.	Biaya KIR:						
	PNP	Rp.	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)
	Bus dan Barang	Rp.	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan jumlah Jaringan Telekomunikasi, Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal, Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal, Website Milik Pemerintah Daerah, Pameran/Expo, Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik. Dilihat dari indikator kinerja untuk mendukung pelayanan publik perkembangan komunikasi dan informatika dan cakupan layanan telekomunikasi masih kurang maksimal. Sampai tahun 2020 jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik baru 9 OPD dan untuk cakupan layanan telekomunikasi baru 83,28% yang dilayani oleh 3 Provider (dengan jumlah kawasan pemukiman yang termasuk Blank Spot Area sebanyak 46 Jorong). Untuk Sedangkan untuk PDRB sektor informasi dan komunikasi cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,78% pada tahun 2017 menjadi 7,44% pada tahun 2020.

Tabel 2.42.
Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	Provider	6	5	4	4	3
2.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Surat Kabar	17	17	17	17	18
3.	Jumlah Penyiaran Radio	Stasiun	2	2	2	2	2
4.	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Pameran/Expo	Kegiatan	3	1	0	1	1
6.	Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik	OPD	5	6	6	7	9
7.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	86
8.	Indeks SPBE	Indek	nd	nd	1,92	1,74	nd
9.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	71,00	71,38	76,87	76,87	83,28
10.	Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi	RP. Milyar	8,71	11,78	9,07	8,27	7,44

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan

K. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum keberadaan Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal, sehingga kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, secara kuantitas jumlah koperasi di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yaitu dari 131 unit pada tahun 2016 menjadi 115 unit pada tahun 2019. Adanya penurunan jumlah koperasi ini disebabkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembubaran dan pencabutan badan hukum koperasi yang bermasalah oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya peningkatan dari persentase dari koperasi aktif dari 40,6% pada tahun 2016 menjadi 56,5% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 peningkatan koperasi aktif diiringi dengan penurunan dari koperasi aktif yang melakukan RAT dari 61,3 pada tahun 2019 menjadi 43,1% pada tahun 2020.

Tabel 2.43.
Perkembangan Kinerja Koperasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	Unit	131	107	109	114	115
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	65	67	54	62	65
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	40,6	62,6	49,5	54,4	56,5
4.	Jumlah Koperasi Aktif yang RAT	Unit	21	30	26	38	28
5.	Persentase Koperasi Aktif yang RAT	%	32	44,8	48,1	61,3	43,1

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

2. Selain Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Dari dibawah dapat dilihat terjadinya peningkatan UMKM yang cukup sangat signifikan dari 3.375 unit pada tahun 2016 menjadi 9.907 unit pada tahun 2020. Peningkatan ini didorong oleh pengkatan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan pedagang kecil.

Tabel 2.44.
Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UMKM	Unit	3.375	3927	4047	4240	9907
2.	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	5	3	3	3
3.	Persentase UMKM Non BPR/LKM	%	96,36	99,1	98,9	99,1	99,6

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

L. Urusan Penanaman Modal

Perkembangan kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Solok Selatan. Jika dilihat perkembangan investasi pada tahun 2016-2020 dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi invetasi yang berasal dari PMDN pada tahun 2018 yaitu dari Rp.100.128 juta pada tahun 2017 menjadi 518,726 juta. Peningkatan ini disebabkan masuknya investasi baru di sektor pertambangan (PT Bumi Indonesia Bersinar) dan investasi pabrik kelapa sawit oleh PT Mas Unggul Sejagat. Namun pada tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan menjadi Rp.234.850 juta tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan penyelesaian kedua investasi tersebut dan tidak terdapatnya investasi besar baru, sehingga pembentukan investasi kembali ditopang oleh investasi pemerintah, perseorangan dan UMKM. Sedangkan untuk investasi yang berasal dari PMA pada tahun 2017 terjadi peningkatan investasi menjadi \$167.093 ribu yang disebabkan aktifitas eksplorasi panas bumi (geothermal) oleh PT Supreme Energi. Namun kemudian cenderung mengalami penurunan sejalan dengan penyelesaian eksplorasi Geothermal oleh PT Supreme energy

Gambaran kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan investasi selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45.
Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
	Jumlah nilai investasi berskala nasional:						
	➢ PMDN	Rp (juta)	56.072	100.128	518.726	339.618	234.850
	➢ PMA	\$ (ribu)	10.606	167.093	52.265	72.407	13.847
3	Rata-rata lama pelayanan perizinan	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang seni yang permanen hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang seni masih perlu ditingkatkan. Sampai tahun 2019 terdapat 2 gelanggang tempat petunjukan seni di Solok Selatan meskipun dari segi ketersediaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan yaitu RTH Muaralabuh dan RTH Padang Aro. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2015-2019 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2015 rasio lapangan olahraga sebesar 1,87 per 10.000 penduduk dan mengalami penurunan menjadi 1,75 per 10.000 pada tahun 2019. Sedangkan untuk prestasi di bidang Olahraga terjadi peningkatan prestasi, hal ini dapat dilihat pada event PORPROV Sumatera Barat terjadi peningkatan ranking Kabupaten Solok Selatan yaitu dari peringkat 18 tahun 2014 dan peringkat 11 tahun 2016 dan peringkat 12 tahun 2018.

Tabel 2.46.
Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Perkembangan (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	10	34
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	34	34	34	45	40
3.	Rasio Gelanggang Remaja/ Gelanggang Seni (per 10.000 penduduk)	0,061	0,060	0,059	0,11	0,22
4.	Rasio Lapangan Olahraga (per 10.000 penduduk)	1,85	1,87	1,76	1,75	1,75
5.	Peringkat PORPROV	11	-	12	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

N. Urusan Statistik

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 adalah disusun dan diterbitkannya dokumen/buku statistik sebagai berikut:

1. Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2020 dokumen ini selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Solok Selatan dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
2. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.47.
Perkembangan Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

O. Urusan Persandian

Selama periode tahun 2016-2020 penyelenggaraan Urusan Persandian belum optimal dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, dan masih menyiapkan kerangka dan regulasi untuk pelaksanaan urusan meskipun organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Persandian sudah dibentuk melalui demikian Peraturan daerah Nomor:15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tabel 2.48.
Perkembangan Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah aplikasi informasi daerah	7	9	9	10	12
2	Persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan					

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

P. Urusan Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan, Jumlah sanggar Budaya yang berprestasi. Dari tahun 2016-2020 Kabupaten Solok Selatan rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya yang disebut dengan Festival Sarantau Sasurambi. Kegiatan ini berupa pementasan potensi seni dan budaya anak nagari dan pameran atau bazar usaha-usaha kecil dan menengah serta produk-produk kerajinan dan kuliner kabupaten Solok Selatan. Selain itu terdapat festival-festival rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat dan nagari untuk memperingati momen-momen penting yang menjadi budaya masyarakat kabupaten Solok Selatan. Selain festival seni dan budaya Minangkabau seperti Maarak Bungo Lamang, Balimau Adat, Mambantai Kabau Nan Gadang terdapat juga festival etnis Jawa seperti wiwitan, sedekah bumi dan kuda kepang.

Sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan sudah mempunyai 1 kawasan cagar budaya yang sudah diakui oleh provinsi dan nasional yaitu Kawasan Seribu Rumah Gadang berada di kenagarian Koto Baru. Pada tahun 2018-2019 Kabupaten Solok Selatan mendapatkan 2 penghargaan yaitu tahun 2018 Kawasan Seribu Rumah Gadang pemenang pada Nominasi Kampung adat yang terpopuler dan 2019 Rumah Adat Panjang pemenang Situs Sejarah Terpopuler di Indonesia pada Festival Anugrah Pesona Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Tabel 2.49.
Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	8	8	12	7
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	2	3	4	4
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	17	14,29	15	28,08	30,76
4	Jumlah Sanggar Budaya yang berprestasi	sanggar	3	0	3	3	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan

Q. Urusan Perpustakaan

Hingga saat ini, peran perpustakaan masih kurang dalam menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai serta makin mudahnya akses internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu penyebab makin rendahnya pengunjung perpustakaan.

Jika dilihat dari rasio koleksi buku perpustakaan (perbandingan antara judul buku dengan jumlah buku) di Perpustakaan Daerah terjadi peningkatan yaitu dari 0,34 pada tahun 2016 menjadi 0,39 pada tahun 2020. Peningkatan ini diiringi dengan penambahan jumlah judul maupun jumlah buku yang tersedia dari 4.002 judul buku dengan jumlah koleksi 11.474

buku pada tahun 2016 menjadi 6.555 judul buku dengan jumlah koleksi 16.467 buku pada tahun 2020. Namun Peningkatan koleksi ini diikuti oleh penurunan kunjungan ke perpustakaan terutama tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan dari 2.850 pengunjung pada tahun 2018 menjadi 698 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.50.
Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan	Unit	144	144	171	171	171
2.	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	39	39	45	17	10
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	2.694	2.566	2.850	1.155	698
4.	Rasio Kunjungan Perpustakaan	Rasio	1,98	1,88	2,09	0,85	0,51
5.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	4.002	4.375	5.090	5.395	6.555
		Buah	11.474	11.757	12.624	13.901	16.467

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan

R. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Gambaran kinerja pelayanan urusan kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku, peningkatan SDM pengelola kearsipan. Dilihat Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku meskipun mengalami peningkatan tetapi pencapaiannya masih relatif rendah. Sampai tahun 2020 perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku baru 33,33% (11 OPD). Peningkatan pengelolaan kearsipan ini terus ditingkatkan melalui peningkatan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan yang diperuntukan oleh pengelola Arsip OPD, Nagari dan Sekolah.

Tabel 2.51.
Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	6,06	6,06	6,06	15,15	33,33
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	3	3	7	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi alternatif pilihan untuk dikembangkan dimasa depan, ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relatif original dengan ikon **Nagari Seribu Rumah Gadang**. Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain. Disisi objek wisata terjadi peningkatan dari jumlah objek wisata di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 2 lokasi objek wisata yang dikelola menjadi 10 objek wisata. Diantara objek wisata unggulan daerah adalah, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran, Kawasan Saribu Rumah Gadang, Rumah Gadang Panjang, Goa Batu Kapal, Hot Water Boom Sapan Maluluang, Kebun Teh Liki (Desa Wisata Wonorejo), Kawasan PDRI, Puncak Laras, Air Terjun Kembar.

Peningkatan jumlah lokasi wisata ini berdampak terhadap peningkatan kunjungan ke objek wisata dari 31.289 orang pada tahun 2016 menjadi 68.012 orang pada tahun 2019. Selain itu peningkatan ini ditunjang oleh peningkatan jumlah event-event promosi daerah dan meningkatnya pengelolaan objek wisata unggulan daerah baik yang dikelola pemerintah maupun kelompok masyarakat. Namun seiring dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak terhadap kunjungan ke Objek Wisata sehingga mengalami penurunan menjadi 36.196 orang. Jika kita lihat dari persentase objek Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis mengalami penurunan yaitu 0% pada tahun 2016 menjadi 35,0% pada tahun 2020. Disisi jumlah terjadi peningkatan dari objek wisata yang sudah dikelola oleh Pokdarwis yaitu dari 20 Objek Wisata menjadi 21 Objek Wisata.

Tabel 2.52.
Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan Wisatawan	Orang	31.289	35.320	68.398	68.012	36.196
2.	Objek wisata unggulan yang dikelola	Objek	2	7	7	10	10
3	Jumlah Objek wisata	Objek	65	60	60	60	70
4	Persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis	Objek	0	33,33	33.33	33.33	35,0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan.

B. Urusan Pertanian

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, dimana 48,30% penduduk bergerak disektor pertanian. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Dalam pembentukan struktur ekonomi, sektor ini merupakan sektor andalan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020, yaitu sebesar 31,08%. Meskipun kontribusinya terus mengalami penurunan dari 33,63% pada tahun 2016 menjadi 28,78% pada tahun 2020 namun nilai produksinya tetap mengalami pertumbuhan rata-rata 1,77% pertahun. Sub sektor yang paling dominan di sektor pertanian adalah sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan tanaman hortikultura.

Tabel 2.53.
Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya utama lokal	Ton/Ha	5.51	5,4	5,4	5,48	5,43
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	33,69	32,59	31,18	29,20	28,78
3	Cakupan bina kelompok petani	%	71,35	80,95	80,95	38,84	38,84
4	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	59,29	59,29	59,00	73,11	71,15
5	Jumlah KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan	4	8	8	8	8
6	Jumlah KSP Perkebunan	Kawasan	3	4	4	4	4
7	Jumlah KSP Peternakan	Kawasan	1	2	2	2	3

Sumber: Dinas Pertanian dan BPS kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari produksi tanaman pangan kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2020 produksi utama yang dihasilkan oleh petani kecuali umbi-umbian cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan produksi tertinggi adalah padi sebesar 142.581 ton/tahun, yang diikuti oleh jagung sebesar 82.909 ton/tahun, umbi-umbian sebesar 8.089,4 ton/tahun dan kacang-kacangan 1.129,65 ton/tahun. Penurunan ini disebabkan karena perubahan iklim dan bencana alam yang melanda lahan pertanian seperti longsor dan banjir. Untuk produksi padi Kabupaten Solok Selatan memiliki luas baku 10.225 Ha dengan Indeks Pertanaman (IP) 2,59 pertahun dapat memproduksi 142.581 ton atau tingkat produktivitas 5,44 ton/hektar. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.54.
Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun)

No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	125.903	147.747	147.898	152.488	142.581
2	Jagung	66.679	95.862	76.630	103.323	82.909
3	Kacang Hijau	307	19	12	13	13,86
4	Kacang Tanah	5.600	1.459	1.260	1.281	1.189
5	Kedelai	707	12	76	137	26,79
6	Ubi Jalar	32.324	2.247	1.891	2.683	3.551
7	Ubi Kayu	39.205	3.720	3.720	3.546	4.538,4

Sumber: Dinas Pertanakaan Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan untuk perkembangan produksi buah-buahan utama di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 terdiri dari jeruk, pisang dan manggis sedangkan untuk produksi perkebunan terdiri dari karet, kelapa sawit dan kopi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55.
Perkembangan Produksi Buah-Buahan dan Perkebunan Utama
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun)

No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jeruk	4.786,9	7.107,2	3.882,8	3.383,3	5.845,2
2	Manggis	632,30	95,9	147,8	458,7	898,9
3	Pisang	1.016,4	3.065,4	759,1	599,6	4.508
4	Karet	12.019,97	12.226,37	14.606,39	14.624,80	10.192,81
5	Kelapa Sawit	1.491,95	4.233	11,739,84	12.059,58	43.515,98
6	Kopi	1.760	2.014,21	2.483,31	2.784,36	2.754

Sumber: Dinas Pertanakaan Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan jumlah ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.56.
Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020 (Dalam Ekor)

No	Ternak	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	9.540	10.117	10.361	10.571	10.795
2	Sapi Perah	16	17	28	32	18
3	Kerbau	6.482	6.727	6.748	6,951	5.177
4	Kambing	8.729	8.917	9.073	9.346	8.560
5	Ayam Petelur	4.500	5.000	5.150	5.000	7.699
6	Ayam Pedaging	82.225	83.879	84.245	86.773	173.980
7	Ayam Buras	91.704	92.988	94.958	97.807	99.823
8	Itik	28.986	30.126	30.616	31.250	32.029

Sumber: Dinas Pertanakaan Kabupaten Solok Selatan

C. Urusan Perdagangan

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 833,38 milyar pada tahun 2016 menjadi 1.116,73 milyar pada tahun 2020. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten yaitu dari 18,12% pada tahun 2016 menjadi 20,20% pada tahun 2020. Data ini memberikan arti bahwa pengelolaan sektor perdagangan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Secara teoritis, untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam perspektif industrialisasi antara lain dilihat dari sejauh mana perkembangan kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB suatu daerah. Sedangkan untuk cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dari tahun 2017-2020 tidak mengalami peningkatan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.57.
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,12	18,70	19,44	20,21	20,20
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	29,05	43,34	43,34	43,34	43,34
3	Jumlah sarana perdagangan (pasar)	unit					
	➢ Pasar Kabupaten		2	2	2	2	2
	➢ Pasar Tradisional		32	31	31	31	31

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

D. Urusan Perindustrian

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan industri selama tahun 2016-2020 nilainya mengalami penurunan yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 247,11 milyar pada tahun 2016, menjadi Rp 237,70 milyar pada tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 berkontribusi 5,37% dan pada tahun 2020 menjadi 4,30%. Penurunan ini disebabkan karena melemahnya kondisi perekonomian nasional dan global, serta belum jelasnya fokus pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan. Jika dilihat dari pertumbuhan industri kecil dan menengah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya meskipun angka pertumbuhannya berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari industri kecil dan menengah yaitu 26,63%, peningkatan ini disebabkan oleh insentif dan kemudahan akses ke permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Namun pada tahun 2020 meskipun kondisi perekonomian mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) namun jumlah Industri kecil dan menengah tetap mengalami pertumbuhan sebesar 4,63%

Sesuai dengan potensi daerah, secara teoritis pengembangan sektor perindustrian adalah pengembangan industri berbasis pertanian, seperti pengolahan produk. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58.
Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,37	5,04	4,73	4,20	4,30
2.	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	12,64	1,81	4,88	26,63	4,63
3.	Cakupan Bina Pengrajin	%	13,32	21,38	25,38	4,00	3,7
4.	Persentase IKM yang Mengekspor Produk ke luar Daerah	%	0,23	1,08	1,38	1,32	1,26
5.	Persentase IKM yang menerapkan Good Higiene	%	0	3,6	3,4	2,6	2,5
6.	IKM yang memiliki HAKI	IKM	1	3	11	16	17
7.	Persentase IKM memiliki Sertifikat Halal	%	3,7	21,6	18,8	18,0	20,2

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

E. Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selama tahun 2016-2020 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa. Kegiatan Urusan Transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitasi beberapa kegiatan pendukung perkembangan eks UPT transmigrasi yang dibangun sebelum tahun 2014 di Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah, pengembangan ekonomi warga UPT Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari serta persiapan perencanaan pembentukan Kawasan Perkotaan Baru

F. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan, karena didukung oleh banyak sungai dan daerah ini juga dikenal dengan sebutan sebagai Nagari Seribu Sungai yang keberadaan debit airnya cukup terjamin dengan terlindunginya Taman Nasional Kerinci Seblat. Disamping potensi sungai, juga terdapat beberapa potensi embung yang salah satunya berfungsi untuk lahan budidaya perikanan darat. Kemudian, pola budidaya perikanan berupa kolam, empang dan juga mina padi juga telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan pertanian.

Namun pada sisi lain, kegiatan pengembangan budidaya perikanan belum berkembang dengan baik, meskipun dilihat dari produksi sektor perikanan terus mengalami peningkatan yaitu dari 874,19 ton pada tahun 2016 menjadi 1.661 ton pada tahun 2020. Namun peningkatan tersebut belum dapat menutupi kebutuhan ikan di Solok Selatan, hal ini dapat dilihat dari masih besarnya impor kebutuhan ikan dari luar daerah untuk konsumsi

Kabupaten Solok Selatan . Data menunjukkan bahwa impor ikan yang masuk ke Kabupaten Solok Selatan, untuk jenis ikan tawar (ikan mas dan ikan nila) berasal dari Maninjau Kabupaten Agam dan Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota, Singkarak Kabupaten Solok yang membudidayakan ikan tawar (perikanan darat). Sedangkan untuk jenis ikan laut berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Peingkatan ini seiring dengan peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat Solok Selatan dari 20,30 kg/perkapita tahun 2016 menjadi 31,58 kg perkapita tahun 2020.

Tabel 2.59.
Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Capaian Produksi perikanan	%	94,00	90,00	100	105	91,79
	Jumlah produksi Ikan	Ton	874,19	1.017	1.340	1.731	1.661
2	Cakupan bina perikanan	%	72,15	79	82,18	90,0	97,24
3	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (sungai)	%	86,9	92,0	98,0	94,0	97,25
4	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ kapita	20,30	27	28,06	30,80	31,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

Pelayanan Fungsi penunjang merupakan Fungsi pelayanan pemerintah yang bertugas atau menjalani tugas dan fungsi mengatur dan mengurus pelayanan urusan pemerintahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Fungsi penunjang ini terdiri atas beberapa unsur:

- 1) Unsur Pendukung Urusan Pemerintah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengelolaan Perbatasan
- 3) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri atas Inspektorat Daerah
- 4) Unsur Kewilayahan terdiri atas Kecamatan
- 5) Unsur Pemerintahan Umum terdiri atas Kesatuan Bangsa

Dari tabel dibawah dapat dilihat perkembangan dan capaian kinerja Fungsi Penunjang Pelayanan Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2.60.
Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
I	Sekretariat Daerah					
1.	Nilai LAKIP/SAKIP	CC	CC	CC	CC	
2.	Nilai LKPJ/LPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.	Persentase pencapaian SPM per-urusan	70	70	95	83,60	83,60
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati	16	16	0	3	
6.	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	-	15	-	14	-
7.	Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi	-	belum	-	belum	-
II	Sekretariat DPRD					
1.	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	35	20	22	16	12
2.	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	0	1	1	1	1
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
I	Perencanaan					
1.	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu (RKPD dan RKPD Perubahan)	50	50	50	100	100
2.	Persentase pencapaian kinerja Daerah	na	na	na	na	na
3.	Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP	44,70	57,97	57,13	55,93	55,93
II	Keuangan					
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Pencapaian Target PAD	114,95	95	87,8	88,79	109,29
3.	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	5,43	9,18	7,67	7,83	10,07
III	Kepegawaian					
1.	Indek Merit	na	na	na	na	154
2.	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	na	35	50	88,26	88,26
IV	Pendidikan dan Pelatihan					
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	na	na	na	na	47,76
2.	Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural					
	- Eselon II	65	65	43,3	17	17
	- Eselon III	21	21	15,3	21	21
	- Eselon IV	18	30	18,3	22	22
3.	Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:					
	- S1	58,23	55,26	55,34	58,73	65,89
	- S2	4,51	4,30	4,55	4,62	4,86
	- S3	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
V	Penelitian dan Pengembangan					
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	100	100	100	100	0

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Inovasi Daerah dalam Pelayanan Pemerintah	-	-	-	26	6
VI	Pengelolaan Perbatasan					
1.	Persentase tapal batas antar nagari yang ditetapkan	na	na	na	15,38	61,53
2.	Persentase tapal batas antar kecamatan yang ditetapkan	na	na	na		
3	Jumlah Nagai yang telah ditetapkan Tapal Batas antar Nagari	na	na	na	6	14
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
I	Inspektorat Daerah					
1.	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	II dengan catatan	II	II+	II+	II+

Sumber: Bappeda, Inspektorat, BPKD, BKSDM, Sekretariat Daerah dan Sekwan

2.1.4. Aspek Daya Saing

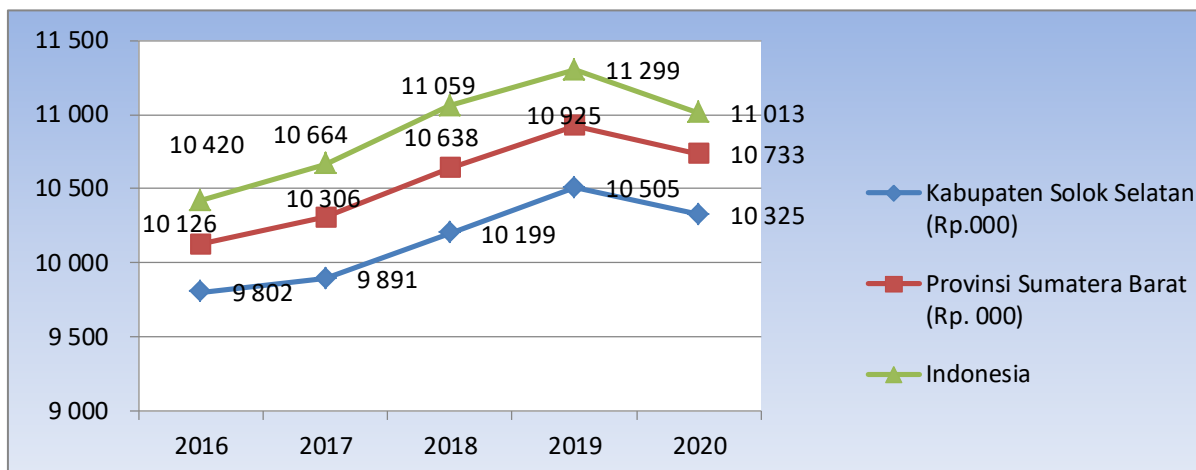
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk

Pengeluaran per kapita menggambarkan berapa rata-rata pengeluaran penduduk perbulan dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan berupa makanan maupun non makanan. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia khususnya untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pengeluaran perkapita ini merupakan angka perkapita yang disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan menggunakan 96 komoditas (66 Komoditas makanan, dan 30 komoditas non makanan). Jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2019 dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 9.653.000,- (rata-rata Rp.804.417 per bulan) pada tahun 2015 menjadi Rp. 10.505.000,- (rata-rata Rp. 875.417 per bulan) pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 10.325.000 (rata-rata Rp. 860.417 per bulan)

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan jarak deviasi semakin melebar yaitu dari Rp. 324.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 408.000,- Tahun 2020 dengan Provinsi dan dari Rp. 618.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 688.000,- Tahun 2020 dengan Nasional

Gambar 2.12.
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani menjadi satu-satu indikator urusan pertanian untuk mengukur dari aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Secara konseptual, yang dimaksud dengan nilai tukar petani merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). Ini berarti semakin tinggi Nilai Tukar Petani maka semakin sejahtera petani. Jika dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 baru berada pada angka 106,60% dimana indeks yang diterima (It) petani sebesar 107,70% dan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 101,03%. Dimana NTP terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu 110,23%, diikuti oleh sektor hortikultura yaitu 109,51% dan subsektor tanaman pangan 105,73%

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Infrastruktur Perhubungan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan perhubungan dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah barang/orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun. Perkembangan indikator urusan perhubungan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61.
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1,92	2,26	2,49	2,76	2,87
2.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	6.024	6.022	5.702	5.500	5.625
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	351.214	350.110	370.104	373.205	375.342
3.	Jumlah orang melalui dermaga/terminal per tahun	orang	5.440	5.435	5.102	5.013	5.132
	Jumlah barang melalui dermaga/terminal per tahun	Ton	320.110	329.009	301.614	289.701	292.561

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

B. Infrastruktur Prasarana Wilayah

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat diukur melalui empat indikator yaitu: jenis dan jumlah bank dan cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel. Perkembangan indikatornya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.62.
Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis dan jumlah bank dan cabangnya						
	Jumlah Bank	Buah	12	12	12	12	12
	• Bank Umum	Buah	5	5	5	5	5
	• Bank Syariah	Buah	2	2	2	2	2
	• BPR	Buah	5	5	5	5	5
2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan						
	Jumlah perusahaan asuransi	Buah	3	3	3	3	3
	• Asuransi jiwa	Buah	1	1	1	1	1
	• Asuransi lainnya	Buah	2	2	2	2	2
3.	Jenis, kelas dan jumlah restoran						
	• Restoran	Buah	-	-	-	-	-
	• Rumah Makan	Buah	32	31	31	31	31
4.	Jenis, dan kelas dan jumlah penginapan/hotel						
	Jumlah Penginapan/Hotel	Buah	16	16	16	16	16
	• Kelas Wisma	Buah	10	10	10	10	10
	• Hotel Melati	Buah	5	5	5	5	5
	• Hotel Bintang 1	Buah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan komunikasi, informatika dan energi dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan jumlah daerah *blank spot*. Perkembangan indikator urusan komunikasi, informatika dan energi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63.
Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar Wilayah
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Elektrifikasi	persen	68,57	80,76	82,52	89,08	95,68
2	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan Non PLN)	%	97,47	97,69	98,36	97,85	99,57
3	Jumlah Jorong Blank Spot	Jorong	46	46	46	46	46

Sumber: Dinas Kominfo, Dinas Perumkim & LH, BPS Kabupaten Solok Selatan dan Ranting PLN Muara Labuh

2.1.4.3. Fokus Investasi

Untuk melihat fokus iklim berinvestasi dalam mengukur aspek daya saing daerah dilakukan dengan mengukur enam indikator yaitu: 1) angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3) lama proses perizinan, 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, 5) jumlah perda yang mendukung iklim investasi, dan 6) persentase desa berstatus swasembada/mandiri terhadap total desa. Perkembangan fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.64.
Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Angka kriminalitas,	per 10.000 penduduk	35,72	29,67	25,31	24,32	18,69
2.	Jumlah Demo	Kali/Tahun	1	3	2	0	0
3.	Lama Proses Perizinan,	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
4.	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah						
	• Jumlah Pajak Daerah	(Milyar Rp)	4,962	6.961	7.617	8.420	6.801
	• Jenis Pajak Daerah	Jenis	9	9	9	9	9
	• Jumlah Retribusi Daerah	(Milyar Rp)	1,164	1.231	903	1.378	1.199
	• Jenis Retribusi Daerah	Jenis	14	14	10	10	10
5.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Dokumen	0	0	0	0	0
6.	Persentase Desa Berstatus swasembada/Mandiri Terhadap Total Desa	%	2,56	2,56	5,1	12,82	51,28

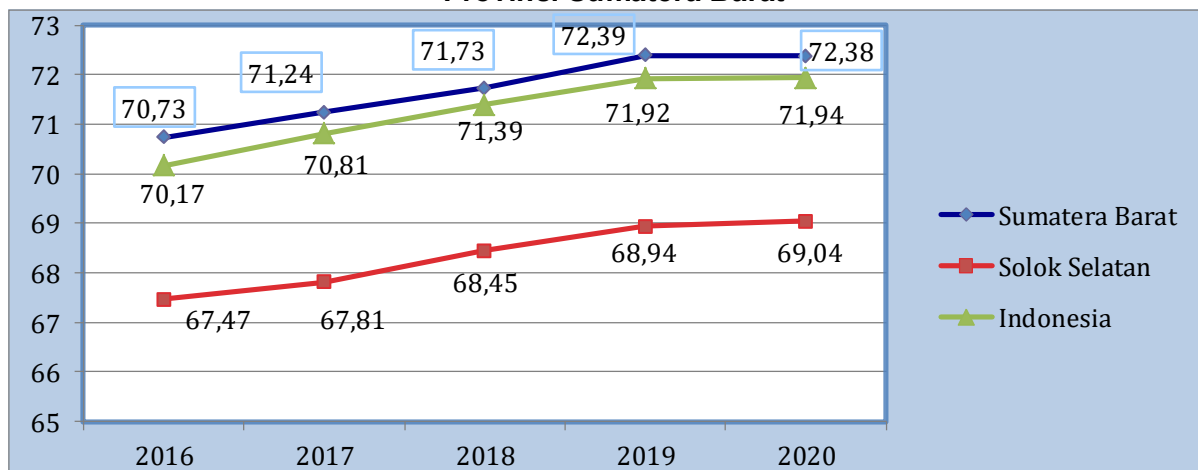
Sumber: Kantor Kesbang Pol, BPKD, Dinas Penanaman modal dan PTSP dan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Solok Selatan

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konsep ini, manusia dipandang sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan Indeks pembangunan Manusia selama tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan menunjukkan trend peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 67,47 pada tahun 2016 menjadi 69,04 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun angkanya masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 72,38 dan Nasional yaitu 71,94 pada tahun 2020. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat berada pada ranking 15 berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.13.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Daerah Sampai Tahun 2020.

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Solok Selatan Tahun 2016-2021 maka dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dibawah ini:

Tabel 2.65.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat tentang Ajaran Agama	Peringkat Kabupaten pada MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Peringkat	12	12	100
		Jumlah Situs cagar budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	5	3	60
		Persentase pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (full desain)	Persentase	85	20,66	24,30
		Persentase Penduduk bekerja yang membayar zakat melalui BAZNAZ	Persentase	9,5	6,2	65,26
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Nilai rata-rata ujian kompetensi guru				
		- PAUD	Angka	65,90	54,68	82,97
		- SD/MIN/SDLB	Angka	64,39	53,11	82,48
		- SMP/MTs	Angka	65,77	57,33	87,17
		Persentase guru yang bersertifikasi pendidik				
		- PAUD	Persentase	30,86	60,87	197,25
		- SD/MIN/SDLB	Persentase	89,94	76,83	85,42
		- SMP/MTs	Persentase	91,36	75,59	82,74
		APM				
		- SD/MIN	Persentase	99,53	95,57	96,02
		- SMP/MTs	Persentase	81,77	72,68	88,88
		Persentase sekolah yang terakreditasi				
		- SD/MIN	Persentase	100	97,97	97,97
		- SMP/MTs	Persentase	100	99,28	99,28
		Angka Melanjutkan (%)				
		- SD/MIN	Persentase	99,33	96,72	97,37
		- SMP/MTs	Persentase	99,11	95,96	96,82
		Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	Persentase	6	9,78	163,00
3	Meningkatnya pemerataan sumber daya dan manajemen kesehatan	% masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Persentase	100	85,9	85,90
		% prevalensi Gizi Buruk	Persentase	0,02	0,06	300,00
		Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 KH	Angka Per 100.000KH	160,2	198	123,60
		Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH	Angka Per 1.000KH	5,1	7,9	154,90
		Visite Rate (Rata-rata kunjungan masyarakat kefasilitas kesehatan)	Angka	2	1	50,00
		% Keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif penduduk)	Persentase	100	100	100,00
		Prevalensi Kasu HIV (<0,4 per 1.000 penduduk)	Angka	0,13	0,003	2,31
		Prevalensi Acute Flacid Paralysis (per 100.000 penduduk usia < 15 Tahun)	Angka	1,9	0	0,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
4	Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat	Persentase rumah penduduk yang memiliki jamban sehat	Persentase	93,7	75,3	80,36
		Persentase penduduk yang mengakses air minum sehat	Persentase	96	89,4	93,13
		Penghargaan Tatatan Kabupaten/Kota Sehat	Penghargaan	Wistara	Wiwerda	100
		Persentase jorong open defecation free (ODF)	Persentase	60,2	32	53,16
5	Penanggulangan Kemiskinan melalui peningkatan program-program pengentasan kemiskinan (Poverty Alleviation)	Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan bedah rumah (RTM)	Rumah Tangga	109	120	110,09
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka	69,68	72,67	104,29
6	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan	Persentase Rata-rata alokasi dana desa	Persentase	10	10	100,00
7	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang ekonomi	Perkembangan Badan Usaha Milik Nagari				
		1. Persentasi Nagari yang memiliki BUMNAG	Persentase	100	97,43	97,43
		2. Persentase Badan Usaha Milik Nagari Aktif (%)	Persentase	100	57,89	57,89
8	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang sosial budaya	Peningkatan peran masyarakat dalam program Keluarga Berencana				
		- Jumlah PUS sebagai Akseptor KB	Pasangan	30.854	27.801	90,11
		- % PUS sebagai Akseptor KB melalui program Pemerintah	Persentase	45	54,15	120,33
		- % PUS sebagai Akseptor KB melalui program mandiri	Persentase	55	12,86	23,38
9	Meningkatnya partisipasi dibidang Lingkungan Hidup	% Sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat provinsi	Persentase	20	5	25,00
10	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana	Persentase Nagari Tangguh Bencana	Persentase	92,3	92,3	100,00
11	Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian	Produktivitas Komoditi Unggulan Pertanian (Ton/Ha)				
		- Padi	Ton	152,372	142.581	93.574,28
		- Jagung	Ton	103,323	82.909	80.242,54
		- Kopi	Ton	2,784	2.754	98.922,41
		- Karet	Ton	14,595	10,192	69,83
		- Kelapa Sawit	Ton	12,060	43.515	360.820,90
		Jumlah Produksi Ikan Budidaya	Ton	1810	1661,45	91,79
12	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata	Jumlah objek pariwisata unggulan (objek)	Objek Wisata	4	10	250,00
		Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata				
		- wisatawan asing	Orang	15000	na	na
		- wisatawan dalam Daerah	Orang	7000	36.196	517,09
13	Meningkatnya pengelolaan sektor jasa dan perdagangan	Persentase UKM yang memiliki HAKI (lembaga)	UKM	28	0	0,00
14	Meningkatnya penataan produk hukum Daerah, kesadaran hukum, penegakan serta kepastian hukum	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase	100	100	100,00
		% Penyelesaian batas Kecamatan	Persentase	100	100	100,00
		% Penyelesaian batas Nagari	Persentase	100	61,53	61,53

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		% kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Persentase	100	46,73	46,73
15	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan Pemerintah	Sistem informasi layanan publik berbasis IT	SIM	10	7	70,00
16	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah dengan pemanfaatan sistem informasi	Ketersediaan Dokumen tepat waktu (%)	Persentase	100	100	100,00
		Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	BB	CC	50,00
		Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00
17	Meningkatnya fungsi pengawasan dari kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel	Level kapabilitas aparatur pemeriksa internal Pemerintah (APIP)	Level	III	II*	80,00
		% Penetapan sistem operasi dan prosedur (SOP) pelayanan OPD	Persentase	100	88,8	88,80
		IKM untuk pelayanan publik	Indeks	Baik	Baik	100,00
18	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik	Persentase	62,01	41,54	66,99
		% Jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Persentase	70,56	78,26	110,91
19	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur keciptakarya.	% Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	40	na	na
		Akses Air Minum Layak (%)	Persentase	80	76,54	95,68
		Akses Sanitasi Layak (%)		52	51,98	99,96
		Jumlah Kawasan Permukiman kumuh	Kawasan	0	1	#DIV/0!
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan/sumber daya air.	Luas Daerah Irigasi Kondisi baik (ha)	%	75	21,36	28,48
21	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur perhubungan.	Rasio Ketersediaan Angkutan umum	Rasio	1,78	0,77	43,26
22	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika.	Jumlah Kawasan Permukiman yang Blank Spot (Titik)	Jorong	15	46	306,67
23	Meningkatnya kualitas SDM dan daya saing masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,09	69,04	99,93
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,83	8,28	93,77
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,85	12,71	98,91
		Angka Melek Huruf	Angka	98,8	99,69	100,90
		Umur Harapan Hidup	Angka	69,19	67,81	98,01
24	Meningkatnya kualitas SDM dan profesionalitas ASN.	Persentase Aparatur yang berijazah pasca sarjana (%)				
		- S1	Persentase	73	65,89	90,26
		- S2	Persentase	8,58	4,86	56,64
		- S3	Persentase	0,18	0,08	44,44
		% Aparatur yang menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat Jabatan struktural:				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		Eselon II	Persentase	70	17	24,29
		Eselon III	Persentase	74	21	28,38
		Eselon IV	Persentase	65	22	33,85
25	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.	% Bangunan Sekolah berondisi baik				#DIV/0!
		- SD/MI	Persentase	83,42	68,20	81,75
		- SMP/MTs	Persentase	88,4	72,49	82,00
		% Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana perpustakaan				
		- SD/MI	Persentase	93,01	79,45	85,42
		- SMP/MTs	Persentase	97,36	89,74	92,17
		% Sekolah memiliki tempat ibadah (tempat shalat), musholla				#DIV/0!
		- SMP/MTs	Persentase	96,65	58,97	61,01
26	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan.	% Puskesmas rawatan	Persentase	100	90	90,00
		Akreditasi RSUD (Versi JCI)	Pencapaian	100	100	100,00
		Rasio Puskesmas Terakreditasi	Rasio	100	100	100,00
27	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial lainnya.	% Nagari yang memiliki gelanggang/sarana olahraga (minimal 1 per Nagari)	Persentase	100	100	100,00
		% Nagari yang memiliki Balai-balai Adat dan Medan Nan Bapaneh	Persentase	80	28	35,00

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 maka dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibawah ini:

Tabel 2.66.
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	67,74	67,81	68,45	68,94	69,09	69,04
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,12	5,15	5,03	4,89	6,2	-1,24
1.3	PDRB Harga Berlaku	Rp. Juta	4.598.229,60	4.990.779,70	5.216.179,6	5.575.024,80	6.803.561,78	5.528.510,00
1.4	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Jt	28,23	30,14	30,97	32,59	35,6	32,32
1.5	Pengeluaran Perkapita	Rp/Bulan	816.833	824.250	849.916	875.417	944.206	860.416
1.6	Indek Gini Ratio	Indek	0,31	0,30	0,31	0,30	0,31	0,3
1.7	Tingkat Pengangguran	%	nd	5,54	5,85	4,91	5,3	5,62

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
1.8	Tingkat Kemiskinan	%	7,35	7,21	7,07	7,33	6,52	7,15
1.9	Jumlah Daerah Tertinggal	Nagari	19	na	10	3	1	3
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,99	8,00	8,15	8,16	8,83	8,28
1.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,51	12,68	12,69	12,70	12,85	12,71
1.3	Angka Putus Sekolah							
	a.SD/MI	%	0,35	0,32	1,25	0,76	0,04	0,8
	b.SMP/MTs	%	0,16	0,27	2,98	2,18	0,03	2,20
	c.SMA/SMK/MA	%	0,10	0,10	1,77	1,77	14	0,82
1.4	Angka Melek Huruf	%	99,01	99,61	99,63	99,28	98,8	99,69
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	112,48	116,30	117,50	117,47	113,04	115,5
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	91,87	81,84	84,02	87,54	109,59	90,33
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	%	70,73	70,10	73,32	78,87	95,20	79,71
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	97,99	99,46	100	99,10	99,53	99,20
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	73,53	76,32	74,36	77,44	81,77	76,90
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	%	67,15	67,31	67,31	63,82	73,22	64,30
1.7	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah (per 1000)							
	a.SD/MI	%	7,2	7,8	7,3	7,8	7,2	80,59
	b.SMP/MTs	%	6,2	5,9	5,9	5,1	6,2	50,50
2	Kesehatan							
2.1	Meningkatnya Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	66,78	66,92	67,21	67,58	69,19	67,81
2.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	153,2	88,03	254,04	126,86	160,4	198
2.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	6,43	6,46	4,76	3,17	5	7,9
2.4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01
2.5	Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit (Versi JCI)	Nilai	60	60	65	80	80,83	80
2.6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C	C	C	B	C
2.7	Rasio Puskesmas	Per 30.000 Penduduk	1,65	1,59	1,60	1,48	1,69	1,70
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	21,28	31,85	37,13	46,17	62,01	41,54
3.2	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	%	45	67	71	71,94	70,56	78,26
3.3	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	54,73	75,32	70,02	45,87	75	52,20

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
3.4	Persentase Pembangunan sesuai dokumen perencanaan tata ruang	%	46,71	na	na	na	70	46,73
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
4.1	Akses Air Minum Layak	%	52,72	53,40	62,78	69,02	83,8	77,04
4.2	Akses Sanitasi Layak	%	36,43	39,47	49,38	51,14	70,95	59,17
4.3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	RT	97,47	97,69	98,36	97,85	97,26	99,57
4.4	Jumlah Kawasan Kumuh	Kawasan	2	2	2	1	0	1
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan Siaga Tribun dan Tramas	Kali/Hari	0,14	0,43	0,57	0,60	3	0,29
5.2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	0	0	100	0
5.3	Cakupan Layanan WMK	%	42,86	42,86	42,86	42,86	100	42,86
5.4	Respon time	menit	nd	60,00	68,18	64,1	15	53,85
5.5	Persentase Nagari Tangguh Bencana	%	28,20	53,84	77	92,31	92,3	92,31
5.6	Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	100	100	100	100	75	100
5.7	Persentase partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada	%	-	-	-	82,29	87,85	81,7
6	Urusan Sosial							
6.1	Persentase Cakupan Pelayanan PMKS	%	66	70	75	70,28	45	57,62
6.2	Ketersediaan Tenaga Pedamping Sosial (Minimal 66 Orang)	%	87	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Penduduk Bekerja yang membayar zakat melalui Baznas	%	6,05	5,71	5,51	5,60	10	5,70
7	Urusan Ketenagakerjaan							
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	na	69,19	74,64	72,12	69,68	72,67
7.2	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat							
8.1	Indek Pembangunan Gender	%	na	94,54	94,92	95,03	72,78	95,08
8.2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	100	60	89	89,50	80	89,7
8.3	Persentase Keluarga Sejahtera	%	90,02	95,34	91,60	85,19	95,19	95,19
9	Urusan Pangan							
9.1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	183	na	na	na	188	na
9.2	Skor Pola Pangan Harapan	%	51,8	73,6	76,5	77,6	79,4	77,8
10	Lingkungan Hidup							
10.1	Cakupan Layanan Persampahan	%	18,00	18,00	20,92	11,33	65	27,78
10.2	Persentase nagari yang memiliki Ruang Terbuka Hijau	%	17,95	17,95	17,95	17,95	82,05	17,95
10.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	na	94,02	92,66	81,22	75	81,22
10.4	Penghargaan Adipura	Buah	0	0	0	0	1	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
10.5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
11	Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil							
11.1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	88,23	88,5	100	100	100	83,22
11.2	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	75,48	77,18	81,93	98,94	99	88,86
11.3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	%	47,00	66,10	75,27	78,13	85,94	85,94
12	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
12.1	Persentase Pasangan Usia Subur yang mengikuti Program KB	%	56,86	51,89	70,43	81,33	58,6	80,75
12.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,83	1,77	1,65	0,67	2	0,72
12.3	Persentase PUS sebagai Akseptor KB melalui Program Mandiri	%	25	30	7,41	24,42	55	12,86
13	Urusan Perhubungan							
13.1	Rasio Ketersediaan Angkutan Umum	Per 10.000 penduduk	0,676	0,649	0,641	0,77	1,78	0,77
13.2	Ketersediaan Prasarana Fasilitas Perhubungan							
	- Terminal Angkutan Orang (4 Unit)	%	50	50	50	50	75	50
	- Terminal Angkutan Barang (1 unit)	%	0	0	0	0	0	0
	- Dermaga (3 unit)	%	33,3	33,3	33,3	33,3	100	33,3
13.3	Persentase Angkutan Umum Laik Operasi	%	78,14	87	89	91	90	93
14	Urusan Komunikasi dan Informasi							
14.1	OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik	OPD	5	6	6	7	10	9
14.2	Cakupan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	100	100	100	100	100	86
15	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
15.1	Persentase Koperasi Aktif	%	40,6	62,6	54,5	62	68	56,5
15.2	Pertumbuhan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	%	12,64	1,81	4,88	na	1,7	na
15.3	Jumlah UMKM yang difasilitasi Permodalan	Unit	0	na	na	0	40	7
16	Urusan Penanaman Modal							
16.1	Jumlah Nilai Investasi (PMA)	US \$	10.696	167.093	52.265	72.407	307,688	13847
16.2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN)	Rp. Juta	56,072	100.128	518.726	339.618	250.000	234.850
16.3	Perizinan Tepat Waktu	(%)	90	100	100	100	100	100
17	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
17.1	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk Provinsi	Orang	0	10	0	0	2	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
17.2	Jumlah Wirausahawan Baru yang dipelopori Oleh Pemuda	Orang	10	na	na	na	10	na
17.3	Nagari yang memiliki gelanggang/ sarana olahraga (minimal 1 per nagari)	%	86	100	100	100	96	100
17.4	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	25	25	50	50	30	50
17.5	Peringkat PORPROV	Peringkat	11	-	12	-	8	-
17.6	Atlet yang berprestasi tingkat provinsi	orang	115	-	78	-	70	-
18	Urusan Statistik							
18.1	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100
19	Urusan Persandian							
19.1	Persentase OPD yang menerapkan SOP Persandian	%	0	0	0	0	100	0
20	Urusan Kebudayaan							
20.1	Jumlah Cagar Budaya yang Direvitalisasi	CB	0	0	0	0	5	0
20.2	Persentase Nagari yang memiliki Medan nan Bapaneh	%	28,21	28,21	28,21	28,21	80	6,41
20.3	Jumlah Sanggar Budaya Berprestasi	Sanggar	3	0	3	3	5	0
21	Urusan Perpustakaan							
21.1	Jumlah Koleksi Buku							
	- Jumlah Judul Buku	Judul	4.002	4.375	5.090	5.395	4.922	6.555
	- Jumlah Buku	Buah	11.474	11.757	12.624	13.901	14.764	16.467
21.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	2.694	2.566	2.850	1.155	900	698
22	Urusan Kearsipan							
22.1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	6,06	6,06	6,06	15,15	57	33,33
22.2	Implementasi Data Base Informasi Kearsipan	(e-Arsip)	Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Belum
II	Urusan Pilihan							
1	Urusan Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	874,19	1.017,000	1.340	1.731	1.810	1.661,45
1.2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita	20,30	27	28,06	30,80	23	31,58
2	Urusan Pariwisata							
2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	31.193	46.231	65.240	67.759	7.000	36.196
2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	na	139	163	253	1.500	na
2.3	Jumlah Objek Wisata Unggulan	Objek	2	7	7	10	5	10
2.4	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pokdarwis	Objek	3	20	20	20	26	26
3	Urusan Pertanian							
3.1	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan							
	- Padi	Ton	125.903	147.747	147.898	152.488	152.372	142.581
	- Jagung	Ton	54.074	95.862	99.665	103.323	62.687	82.909
	- Kopi	Ton	1.760	2.014,21	2.483,31	2.784,36	1.883	2.754

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
	- Kelapa sawit	Ton	1.491,95	4.233	11.739,84	12.059,58	2.987	43.515,98
	- Karet	Ton	12.019,97	12.226,37	14.606,39	14.624,80	13.493	10.192,81
	Ternak Besar (Sapi dan Kerbau)	Ekor	16.038	17.154	17.137	17.522	19.864	31.980
	- Ternak Kecil (Kambing)	Ekor	8.729	8.903	9.073	9.346	8.998	8.560
	- Unggas	Ekor	207.415	211.972	214.969	224.471	123.764	345.402
3.2	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	59,29	59,29	59,00	73,11	69,38	71,15
3.3	Berkembangnya KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan	4	8	8	8	7	8
3.4	Berkembangnya KSP Perkebunan	Kawasan	3	4	4	4	7	4
3.5	Berkembangnya KSP Peternakan	Kawasan	1	2	2	2	3	3
3.6	Berkembangnya Sentra Agribisnis.	Kawasan	0	0	0	0	4	0
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral							
4.1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	68,57	na	78	89,08	88	98,77
4.2	Persentase kelompok pemanfaat energi terbarukan aktif	%	62	na	na	na	79	na
5	Perdagangan							
5.1	Pengaduan Konsumen yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
5.2	Pasar Kabupaten yang representatif	unit	0	0	0	0	2	0
6	Perindustrian							
6.1	Jumlah IKM yang Mengekspor Produk ke luar Daerah	IKM	9	10	9	9	10	10
6.2	Jumlah IKM yang menerapkan Good Higiene	IKM	0	21	20	20	4	20
6.3	IKM yang memiliki HAKI	IKM	8	10	31	32	28	42
6.4	IKM memiliki Sertifikat Halal	IKM	19	19	39	39	39	54
III	Fungsi Penunjang							
1	Perencanaan							
1.1	Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran	%	100	100	98	98,97	100	98,97
1.2	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu	%	50	50	50	100	100	100
1.3	Persentase Pencapaian Kinerja	%	na	na	na	na	90	na
1.4	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati	MoU	16	na	na	0	2	0
2	Penelitian dan Pengembangan							
2.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	100	100	100	0	100	0
3	Kuangan							
3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	114,95	95	87,8	88,97	100	109,29
3.3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	5,43	9,18	7,67	7,83	8,4	10,07
4	Kepegawaian							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	
							Target	Realisasi
4.1	Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural							
	- Eselon II	%	65	65	43,3	17	70	17
	- Eselon III	%	44	21	15,3	21	74	21
	- Eselon IV	%	15	30	18,3	22	65	22
4.2	Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:	%						
	- S1	%	58,23	55,26	55,34	58,73	73	65,89
	- S2	%	4,51	4,30	4,55	4,62	8,58	4,86
	- S3	%	0,11	0,08	0,08	0,08	0,18	0,08
4.3	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	%	N/A	35	50	88,26	80	88,26
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya							
5.1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	C	CC	CC	CC	BB	CC
5.2	Nilai LKPJ	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5.3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	70	70	95	83,60	90	83,60
5.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	42	25	36,36	25	100	12
5.6	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	0	1	1	1	2	1
5.7	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	%	0	10	39,39	39,39	100	39,39
5.8	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	II dengan catatan	II	II ⁺	III dengan catatan	III	II ⁺
5.9	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Peringkat	-	15	-	14	-	-
5.10	Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Belum/ Sudah	-	Belum	-	Belum	-	-
C	ASPEK DAYA SAING							
1	Nilai Tukar Petani	Rasio	na	na	na	na	102	na
2	Produktifitas Total daerah	Rp. Juta	65,80	61,43	64,21	65,38	90,05	64,81

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020 (Bappeda)

2.2.3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk melihat keberhasilan kinerja standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka dapat dilihat dari Indikator Standar Pelayanan Minimal dibawah ini:

Tabel 2.67.
Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			
		Indikator	Target 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Kesenjangan GAP (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	97,05	3
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	17,54	82
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	82,52	17
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100		100
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	73	27
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	83,8	16
7	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	85,9	14
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	87,2	13
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,9	13
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	69,2	31
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	54,8	45
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	-
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100	62,6	37
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	-
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahn Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	9,6	90

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			
		Indikator	Target 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Kesenjangan GAP (%)
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	80	77	3
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	70	52	18
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	-
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	0	-
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100	100	-
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	53,85	46
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	% Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	% Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	0	100
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	0	100
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Tahun 2020

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek yaitu permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi..

2.3.1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan dan isu pembangunan terkait dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yaitu:

1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi.

Meskipun mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya namun tingkat pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2016-2019 terus mengalami perlambatan (*slow down*). Untuk PDRB berdasarkan ADHB mengalami perlambatan pertumbuhan dari 8,55% tahun 2016 menjadi 5,08% tahun 2019, sedangkan untuk PDRB ADHK mengalami perlambatan pertumbuhan dari 5,12% pada tahun 2016 menjadi 4,80% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 baik pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK mengalami kontraksi pertumbuhan (pertumbuhan dibawah 0) yaitu -078% untuk PDRB ADHB dan -1,24 untuk PDRB ADHK. Penurunan ini merupakan akibat kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid 19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk melakukan aktifitas perekonomian.

2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan penduduk Solok Selatan periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016-2018 tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan dari 7,35% pada tahun 2016 menjadi 7,07% pada

tahun 2018, namun penurunannya cenderung mengalami perlambatan. Tetapi pada tahun 2019 Tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan kembali mengalami peningkatan menjadi 7,33%, kenaikan ini disebabkan karena melemahnya harga-harga komoditas unggulan Kabupaten Solok Selatan seperti Sawit dan Karet, pemberantasan *illegal minning* serta faktor bencana yang melanda kabupaten Solok Selatan selama tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 7,15%. Penurunan ini menjadi kontraproduktif dengan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan kebijakan pembatasan sosial yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 selama tahun 2020, dimana akses masyarakat kesektor ekonomi sangat dibatasi. Penurunan ini diperkirakan diakibatkan efek dari kebijakan bantuan pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah dalam pemberian bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok (sesuai dengan perhitungan garis kemiskinan) melebihi garis kemiskinan.

3. Meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat (indek Gini)

Meskipun jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi periode tahun 2016-2019 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan lebih baik (atau masih dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi), masih termasuk kategori Rendah (berada pada range $0.3 \leq G \leq 0.5$) serta terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan sebesar 0,31 dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 0,295. Namun pada tahun 2020 Indeks Gini diperkirakan mengalami peningkatan sebagai dampak penurunan aktifitas ekonomi, peningkatan pengangguran dan kemiskinan yaitu menjadi 0,307.

4. Masih Tingginya Pengangguran

Pada periode tahun 2016-2017 Tingkat pengangguran di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami penurunan yaitu dari 6,3 pada tahun 2016 menjadi 5,54% pada tahun 2017. meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,85% namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 4,91%. Namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali mengalami peningkatan menjadi 5,62% sebagai akibat menurunnya aktivitas ekonomi akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk penanganan bencana pandemic Covid-19.

5. Masih rendahnya indeks Pembangunan Manusia

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan

menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 67,47 pada tahun 2016 menjadi 69,04 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan namun angkanya masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 72,38 dan Nasional yaitu 71,94 pada tahun 2020. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat berada pada rangking 15 berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai. Perhitungan indeks pembangunan manusia ini dihitung dari 3 aspek yaitu Pendidikan (angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah), Kesehatan (Umur Harapan Hidup) dan Ekonomi (Pengeluaran Perkapita)

6. Masih tingginya kriminalitas daerah

Jika dilihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2021 mengalami penurunan dari peningkatan dari 35,72 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 18,69 per 10.000 penduduk pada tahun 2020,. Ini berarti pada tahun 2020 setiap 10,000 penduduk Kabupaten Solok Selatan 18 orang tersangkut kasus kriminalitas

2.3.2. Permasalahan Terkait Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
I	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	Permasalahan: ❖ Rendahnya Ketersediaan Sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan (Persentase sekolah sudah memenuhi standar nasional pendidikan) ❖ Masih rendahnya pemenuhan hak terhadap pelayanan dasar pendidikan (Angka harapan lama sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah) Penyebab: 1. Belum meratanya pendistribusian guru serta rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i> pada seluruh tingkatan pendidikan (dilihat dari persentase guru yang bersertifikasi pendidik dan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik). 2. Rendahnya ketersediaan, mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (dilihat dari ketersediaan mobiler, alat peraga pendidikan, labor, pustaka, dan pagar; untuk mutu dan kualitas adalah ruang kelas, sanitasi sekolah dll) yang disebabkan rendahnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi. 3. Belum optimalnya sistem rayonisasi sekolah sebagai akibat tidak meratanya kualitas sekolah yang akhirnya menyebabkan

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		pendistribusian murid tidak merata. 4. Relatif tingginya biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas masyarakat kesarana pendidikan (akibat keterbatasan sarana perhubungan).
2	Kesehatan	Permasalahan: ❖ Masih Rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat (Angka harapan hidup) Penyebab: 1. Masih rendahnya rasio ketersediaan tenaga kesehatan 2. Belum meratanya tenaga kesehatan berkualitas pada setiap tingkatan fasilitas kesehatan (dokter dan tenaga keperawatan) 3. Rendahnya mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan 5. Masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permasalahan: ❖ Rendahnya kualitas aksesibilitas antar wilayah (Kemantapan jalan, kondisi jembatan) ❖ Belum optimalnya fungsi jaringan Irigasi Teknis dalam mendukung produksi pertanian (Rasio jaringan irigasi) ❖ Belum maksimalnya penataan ruang (Rasio ketaatan terhadap RTRW) ❖ Rendahnya akses masyarakat terhadap Sanitasi Layak dan Air Bersih (Akses air minum dan akses sanitasi) ❖ Masih sering terjadi banjir (Jumlah kejadian banjir dalam satu tahun) ❖ Belum adanya bangunan fasilitas umum yang laik fungsi (Persentase bangunan laik fungsi) Penyebab: 1. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan kurang baik (jalan kabupaten/Prov/Negara/non status) 2. Masih terdapat kawasan persawahan yang belum dilayani irigasi teknis dan hanya mengandalkan irigasi non teknis 3. Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi 4. Belum adanya rencana pengembangan infrastruktur berbasis kawasan yang didasarkan pada pola ruang (termasuk kawasan ibukota kabupaten). 5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi serta layanan air bersih yang layak bagi masyarakat

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		6. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang.
4	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman (Persentase kawasan perumahan yang dikelola) Penyebab: 1. Banyaknya terdapatnya rumah tidak layak huni 2. Belum tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan perumahan) 3. Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung). 4. Kurangnya penanganan kawasan kumuh. 5. Masih rendahnya ketersediaan RTH terutama dikawasan perkotaan.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Permasalahan: ❖ Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda (Pelanggaran Perda) ❖ Masih Rendahnya Pelayanan Penanganan Kebakaran (Tingkat pencapaian respon time) ❖ Belum Optimalnya Keterpaduan pengurangan resiko bencana (Cakupan penanganan bencana sesuai kewenangan) Penyebab: 1. Belum efektifnya penegakan hukum dan peraturan daerah yang disebabkan rendahnya ketersediaan aparatur, sarana dan prasarana 2. Rendahnya koordinasi antar OPD dan instansi yang terkait dengan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang terkait dengan mitigasi bencana. 4. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam (banjir, longsor, gempa).
6	Sosial	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Persentase PMKS yang ditangani) Penyebab: 1. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), selain itu terdapatnya PMKS akibat penderita HIV/AIDS, anak nakal korban narkoba dan anak yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah). 2. Meningkatnya jumlah PMKS yang diakibatkan karena

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		peningkatan tingkat kemiskinan dan Bencana Alam. 3. Rendahnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesejahteraan sosial.
II	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1	Tenaga Kerja	Permasalahan: ❖ Rendahnya perlindungan tenaga kerja (Kasus perselisihan tenaga kerja) ❖ Rendahnya daya saing tenaga kerja (Produktivitas tenaga kerja) Penyebab: 1. Belum optimalnya fungsi Bipartit ketenagakerjaan. 2. Kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, penanganan permasalahan tenaga kerja hanya berdasarkan laporan dari tenaga kerja. 3. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar. 4. Belum memadainya sistem informasi ketenagakerjaan.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya peran serta gender dalam pembangunan (Indeks pembangunan gender) ❖ Rendahnya pencapaian Kabupaten Layak Anak (Level kabupaten layak anak) Penyebab: 1. Masih terdapatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2. Masih terdapatnya kasus kriminalisasi dan eksploitasi anak yang dikarenakan rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. 3. Belum optimalnya peran lembaga pengarusutaraan gender dan anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. 4. Kurangnya wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha 5. Kurangnya kebijakan daerah yang mengatur kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga implementasi kebijakan masih dilakukan secara parsial.
3	Pangan	Permasalahan: ❖ Rendahnya tingkat kualitas dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat (Skor pola pangan harapan) ❖ Rendahnya ketersediaan pangan utama (Ketersediaan pangan utama) Penyebab:

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		1. Kurang meratanya konsumsi bahan pangan utama terutama bahan-bahan pangan yang ketersediaannya tergantung pada lokasi geografis. 2. Belum beragamnya pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat serta masih rendahnya skor pola pangan harapan. 3. Belum terjaminya tingkat keamanan pangan masyarakat (berkaitan dengan zat kimia, pengawet dan kadaluarsa). 4. Kurangnya regulasi daerah tentang ketahanan pangan dan lahan pertanian berkelanjutan.
4	Pertanahan	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pengelolaan dan penatagunaan tanah (Kepastian kepemilikan tanah) Penyebab: 1. Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik (persentase tentang luas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik). 2. Sulitnya sertifikasi tanah ex Erpacht untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. 3. Penyelesaian konflik HGU dan tanah terlantar untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (perubahan sertifikat HGU dan penerbitan sertifikat baru). 4. Sulitnya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.
5	Lingkungan Hidup	Permasalahan: ❖ Menurunnya kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Cakupan layanan persampahan) Penyebab: 1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga. 2. Banyaknya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI). 3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Banyaknya ex lokasi investasi pertambangan, kehutanan yang belum dipulihkan/reklamasi. 6. Belum optimalnya fasilitasi dan sinergi pemerintah daerah dengan komunitas penggiat lingkungan.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permasalahan: ❖ Masih belum optimalnya layanan administrasi kependudukan (Persentase cakupan kepemilikan KK, persentase cakupan kepemilikan KTP, persentase cakupan kepemilikan KIA, persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran, persentase

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		cakupan penerbitan kutipan akte kematian, persentase cakupan kepemilikan akte nikah, persentase cakupan penerbitan akte perceraian) Penyebab: 1. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan terutama bagi daerah terpencil, perbatasan Kabupaten. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. 3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Permasalahan: ❖ Rendahnya tingkat kemandirian desa (Persentase nagari mandiri) Penyebab: 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan seiring menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat diperantauan dalam mendorong kemajuan daerah dan nagari. 3. Masih rendahnya kapasitas dan sumberdaya lembaga pemberdayaan masyarakat dan perangkat nagari dalam pembangunan Desa/Nagari. 4. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan Nagari kepada masyarakat. 5. Peningkatan transfer dana desa belum berdampak banyak terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan daerah tertinggal 6. Masih kurangnya kompetensi perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Indeks pembangunan berwawasan kependudukan) Penyebab: 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif. 2. Tingginya angka kelahiran terutama pada rumah tangga miskin. 3. Masih terbatasnya Kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB. 4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB.

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		5. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
9	Perhubungan	Permasalahan: ❖ Rendahnya ketersediaan angkutan umum (ketersediaan sarana Angkutan Umum) ❖ Belum tercapai Zero Accident (Rasio angka kecelakaan dan kelayakan kendaraan umum) Penyebab: 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. 2. Berkurangnya kualitas prasarana perhubungan (rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman). 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang representative. 4. Moda transportasi AKDP illegal (travel liar) lebih diminati oleh masyarakat daripada moda transportasi AKDP legal (bus).
10	Komunikasi dan Informatika	Permasalahan: 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indeks SPBE) Penyebab: 1. Masih terdapatnya Blank Spot Area 2. Belum terintegrasi sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (e-Government). 3. Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, fax, free wi-fi area pada kawasan tertentu. 4. Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebaran informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Permasalahan: ❖ Belum adanya koperasi yang berkualitas (persentase koperasi yang berkualitas) Penyebab: 1. Lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 2. Belum optimalnya kemitraan antara UMKM, koperasi dengan lembaga lainnya. 3. Masih rendahnya SDM dalam inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk sesuai permintaan pasar (jaminan mutu, standarisasi). 4. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi. 5. Belum tersedianya Master Plan kawasan industri (One Village One Product/OVOP).
12	Penanaman Modal	Permasalahan: ❖ Rendahnya pertumbuhan investasi (Pertumbuhan investasi dan Peningkatan investor) Penyebab: 1. Rendahnya aksesibilitas, infrastruktur jalan yang terbatas untuk menghubungkan kantong-kantong potensi ekonomi dengan jalur utama. 2. Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung penanaman modal seperti hotel, restoran, lembaga keuangan. 3. Belum <i>update</i>-nya SOP perizinan beberapa kewenangan sekaitan UU 23 Tahun 2014. 4. Masih lemahnya/ belum tepatnya pendekatan penggunaan berkaitan dengan status lahan (tanah ulayat). 5. Rendahnya kesadaran penanam modal memberikan laporan kegiatan penanaman modal. 6. Minimnya regulasi yang mengatur tentang Take over/ pemindahtanganan izin investasi. 7. Minimnya kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam penanaman modal bagi investor.
13	Kepemudaan dan Olahraga	Permasalahan: ❖ Rendahnya peran aktif pemuda dalam pembangunan (Pemuda pelopor) ❖ Masih rendahnya prestasi olahraga Solok Selatan (Atlet berprestasi, Ranking PORPROV) Penyebab: 1. Masih minimnya akses dan kesempatan bagi pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan. 2. Rendahnya jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) generasi muda.. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga. 4. Belum optimalnya peran pemerintah dan organisasi olahraga dalam pembinaan serta pembibitan atlet yang berpotensi. 5. Masih relatif rendahnya prestasi di bidang olahraga yang dilihat dari prestasi atlet daerah dalam POPROV dan PON.
14	Statistik	Permasalahan: ❖ Ketersediaan data yang tidak cukup, belum berkualitas dan belum <i>up to date</i> serta belum dapat diakses secara luas (Ketersediaan data)

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		Penyebab: 1. Lemahnya kemampuan aparatur di OPD, sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sektoral sangat rendah. 2. Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).
15	Persandian	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pengamanan data informasi daerah (persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan) Penyebab: 1. Belum optimalnya OPD yang menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang persandian.
16	Kebudayaan	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pengelolaan budaya dalam penunjang pariwisata (Jumlah objek wisata yang dijadikan destinasi wisata) ❖ Masih rendahnya indek pembangunan kebudayaan (Indek pembangunan kebudayaan) Penyebab: 1. Semakin melemahnya nilai solidaritas dan kekeluargaan, jiwa gotong royong serta nilai –nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat mudahnya akses informasi teknologi yang tidak sesuai dengan adat budaya dan agama. 2. Belum optimalnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan nilai dan situs cagar budaya daerah. 3. Rendahnya partisipasi generasi muda dalam pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya.
17	Perpustakaan	Permasalahan: ❖ Rendahnya minat baca (Rasio Kunjungan Perpustakaan) Penyebab: 1. Rendahnya minat baca masyarakat 2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan dan buku bahan bacaan di perpustakaan baik pustaka daerah maupun nagari. 3. Belum Optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen koleksi perpustakaan. 4. Kurangnya jumlah perpustakaan sekolah yang representatif.
18	Kearsipan	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah (persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku)

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		Penyebab: 1. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan. 2. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah. 3. Rendahnya penataan arsip dan dokumen OPD 4. Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan kearsipan.
III	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan	
1	Kelautan dan Perikanan	Permasalahan: ❖ Rendahnya produksi perikanan (Jumlah Produksi Ikan) ❖ Rendahnya tingkat konsumsi ikan (Tingkat konsumsi ikan) Penyebab: 1. Belum optimalnya produksi hasil perikanan yang disebabkan belum maksimalnya pengelolaan perikanan budidaya. 2. Rendahnya daya saing produk perikanan. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan.
2	Pariwisata	Permasalahan: ❖ Masih Rendahnya Kunjungan Wisatawan (Jumlah kunjungan wisatawan) Penyebab: 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang bersifat umum maupun berbasis keunikan dan kearifan lokal. 2. Terbatasnya akses ke lokasi wisata 3. Belum optimalnya promosi pariwisata. 4. Kurangnya sinergi pemerintah daerah, pelaku dan masyarakat dalam pengembangan objek pariwisata. 5. Belum maksimalnya pengelolaan ikon wisata unggulan. 6. Belum adanya event wisata unggulan yang masuk kalender tingkat regional maupun nasional.
3	Pertanian	Permasalahan: ❖ Masih rendahnya produksi dan produktifitas hasil pertanian (produksi dan produktivitas pertanian utama) ❖ Masih Rendahnya kesejahteraan Petani (Nilai tukar petani) Penyebab: 1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian 2. Rendahnya nilai tambah produk pertanian 3. Lemahnya penguasaan inovasi teknologi pertanian dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan masih rendah 4. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan daerah. 5. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		terintegrasi. 6. Belum adanya kepastian serapan pasar produk pertanian dengan tingkat harga menguntungkan petani. 7. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta keterbatasan sarana dan prasarana pertanian 8. Rendahnya SDM dari kelompok tani dan pada umumnya kelembagaan petani yang belum berbentuk badan. 9. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
4	Perdagangan	Permasalahan: ❖ Belum maksimalnya pengendalian harga barang dan jasa (Tingkat Inflasi) ❖ Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentuk PDRB (Kontribusi PDRB sektor perdagangan) Penyebab: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar perdagangan yang representatif. 2. Rendahnya aksesibilitas masyarakat ke pasar tradisional 3. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan konsumen. 4. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata. 5. Lambatnya pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan.
5	Perindustrian	Permasalahan: ❖ Lambatnya perkembangan usaha industri (kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) Penyebab: 1. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standarisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain. 2. Belum terdapatnya sentra industri yang kompetitif.
6	Kehutanan	Permasalahan: ❖ Meningkatnya lahan kritis di Solok Selatan (luas lahan kritis) Penyebab: 1. Tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan 2. Masih terdapatnya ex lokasi investasi pertambangan, kehutanan yang belum dipulihkan/reklamasi 3. Masih rendahnya fungsi koordinasi antara pemerintah dengan instansi vertikal pengelola sumber daya kehutanan 4. Masih belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		masyarakat
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	Permasalahan: Penyebab:
8	Transmigrasi	Permasalahan: Penyebab: ❖ Kurang optimalnya perkembangan wilayah eks Unit Pemukiman Transmigrasi
IV	Fokus Pelayanan Fungsi Penunjang	
A	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
	Sekretariat Daerah	Permasalahan: ❖ Masih Rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Nilai SAKIP dan LPPD) ❖ Belum optimalnya pelayanan birokrasi daerah (Indek Kepuasan Masyarakat) Penyebab: 1. Rendahnya nilai laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP/SAKIP dan LPPD) 2. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan pemerintah masih rendah. 3. Rendahnya ketersediaan aturan daerah dan ketepatan waktu penerbitan aturan daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan. 4. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang keagamaan, pembinaan organisasi serta kesejahteraan masyarakat. 5. Masih terdapatnya OPD yang belum menyusun SOP pelayanan, sehingga masih terdapat tumpang tindih tupoksi antar OPD.
	Sekretariat DPRD	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya peran legislasi dalam inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Jumlah Perda inisiatif DPRD, Persentase Perda yang diterbitkan) Penyebab: 1.
B	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
1	Perencanaan Pembangunan	Permasalahan: ❖ belum memadainya kualitas perencanaan pembangunan

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		daerah (Indek Perencanaan Pembangunan Daerah) Penyebab: 1. Belum optimalnya SDM Perencana baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas. 2. Belum optimalnya pemanfaatan dan ketersediaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan. 3. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang 4. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi. 5. Rendahnya inovasi daerah dalam mendukung pencapaian target perencanaan
2	Keuangan	Permasalahan: ❖ Rendahnya Kontribusi PAD dalam Pembiayaan Pembangunan (Peningkatan realisasi PAD, Kontribusi PAD terhadap Belanja) ❖ Kualitas pengelolaan Keuangan (Kualitas pengelolaan Keuangan) Penyebab: 1. Masih rendahnya peran dari pendapatan asli daerah dalam penunjang pembiayaan pembangunan daerah. 2. Rendahnya pengelolaan asset daerah baik dari pemeliharaan dan mutu dari aset daerah 3. Minimnya ketersediaan aparatur pengelola keuangan daerah dan OPD sesuai dengan bidang keilmuannya.
3	Kepegawaian	Permasalahan: ❖ Masih Rendahnya Tata kelola ASN (Indeks Merit) Penyebab: 1. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas kinerja pegawai dan organisasi sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah masih rendah. 2. Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme
4	Pendidikan dan Pelatihan	Permasalahan: ❖ Masih Rendahnya Profesionalisme (Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara) Penyebab: 1. Rendahnya tingkat produktivitas PNS masih rendah yang disebabkan minimnya pendidikan dan pengembangan

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		aparatur (diklat) baik diklat struktural maupun fungsional 2. Penyelenggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata
5	Penelitian dan Pengembangan	Permasalahan: ❖ Minimnya penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan (Rekomendasi kelitbangan yang dimanfaatkan) ❖ Minimnya Inovasi Daerah (Inovasi Daerah dalam Pelayanan Pemerintah) Penyebab: 1. Belum tersedianya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas. 2. Minimnya pelibatan OPD penanggungjawab urusan kelitbangan dalam penyusunan kajian-kajian yang ada pada OPD lain.
6	Pengelolaan Perbatasan	Permasalahan: ❖ Belum tuntasnya masalah penegasan batas antara kabupaten, kecamatan dan nagari Penyebab:
C	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
	Inspektorat Daerah	Permasalahan: ❖ Masih Rendahnya Kapabilitas APIP (Level/Tingkatan APIP) ❖ Masih rendahnya penyelenggaraan system Pengendalian internal pemerintahan (Indeks Maturitas SPIP) Penyebab: 1. Level Kapabilitas APIP masih rendah 2. Rendahnya respon dan tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan (TLHP) 3. Belum optimalnya OPD yang menerapkan SPIP
D	Unsur Kewilayahan	
1	Kecamatan	Permasalahan: ❖ Belum optimalnya pelayanan birokrasi kecamatan (Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan) Penyebab: 1. Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan public 2. Masih rendahnya kualitas SDM ASN Kecamatan
E	Unsur Pemerintahan Umum	

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
	Kesatuan Bangsa	Permasalahan: Masih Rendahnya Indek Demokrasi Daerah (Indeks Demokrasi Daerah) Penyebab: 1. Masih kuatnya isu kedaerahan dalam pembangunan daerah 2. Masih rendahnya perlindungan hak-hak berpendapat bagi masyarakat

2.4. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan semua hal yang baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, yang dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan bentuk inovasi tata pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan Publik dan inovasi lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten Solok Selatan melakukan beberapa inovasi dalam pencapaian target kinerja daerah, yang terdiri:

1. Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19.

Tatanan normal baru merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya keberlanjutan kegiatan masyarakat yang aman dari penyebaran COVID-19, masyarakat diharuskan mematuhi protokol kesehatan dalam menyelenggarakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Implikasinya yaitu tuntutan bagi masyarakat untuk mengubah pola interaksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang selama ini ada dengan mengadopsi Adaptasi Kebiasaan Baru.

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di antaranya:

❖ Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat kerja

- 1) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun. Sebelum masuk kerja, diterapkan self assessment risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
- 2) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur, yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh.

- 3) Bagi sistem kerja shift, diminta untuk meniadakan shift 3, yakni waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari, jika memungkinkan.
 - 4) Jika tetap memberlakukan shift 3, maka yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
 - 5) Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah, dan selama di tempat kerja.
 - 6) Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
 - 7) Menerapkan physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja, dengan mengadakan pengaturan meja kerja atau workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain)
- ❖ Adaptasi Kebiasaan Baru Bagi penyelenggara /pelaku usaha sektor jasa dan perdagangan
1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik
 2. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha
 3. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 4. Pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk. Pekerja dengan suhu >37,30 derajat Celcius setelah dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 5. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker
 6. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter.
 7. Mencegah kerumunan
- ❖ Adaptasi Kebiasaan Baru Bagi konsumen / Pelanggan
1. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik

2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
 4. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.
2. Inovasi Daerah terkait dengan peningkatan pencapaian kinerja daerah
- ❖ Kaji Terap

Menguji dan menerapkan teknologi yang tepat (budidaya padi) sistem jarwo yang sudah dimodifikasi oleh petani dan penyuluh pertanian. oleh BPTP. Untuk teknologi jarwo terjadi pengurangan jarak tanam 40 X40 menjadi jarak tanam 25X25 cm dan pemanfaatan pupuk hayati bio konversi. Dengan memakai system jarwo produksi meningkat dari 4,7 Ton/Ha menjadi 6,2 Ton/Ha.
 - ❖ Sekolah Lapangan

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian padi melalui penerapan budidaya Padi Salibu. Selain itu budidaya padi salibu ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan indek pertanaman petani. Padi salibu merupakan tanaman padi yang tumbuh lagi setelah batang sisa panen ditebas/dipangkas, tunas akan muncul dari buku yang ada di dalam tanah. Beberapa keuntungan budidaya salibu diantaranya adalah umurnya relatif lebih pendek, kebutuhan air lebih sedikit, biaya produksi lebih rendah karena penghematan dalam pengolahan tanah, penanaman, penggunaan bibit dan kemurian genetik lebih terpelihara.
 - ❖ Aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kinerja)

Aplikasi simanja bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dimana penilaiannya dilakukan dengan mengukur tingkat kedisiplinan dan kinerja pegawai. Aplikasi simanja menjadi dasar dari besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana dalam perhitungan TPP tersebut 60% berasal dari produktifitas dan 40% berasal dari disiplin dan kehadiran. Aplikasi ini dapat diakses dan diimplementasikan melalui mobile dan PC.
 - ❖ Pos Gizi

Pos gizi bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita dan underweight menjadi status gizi baik/normal. Pos gizi adalah aplikasi dari pendekatan positive deviance yaitu serangkaian kegiatan selama 12 hari yang diadakan untuk merehabilitasi anak yang mengalami kekurangan gizi serta mengajarkan berbagai kebiasaan dan perilaku khusus positif. Pos gizi mendorong terjadinya perubahan perilaku dan memberdayakan para ibu balita untuk bertanggung jawab terhadap rehabilitasi gizi anak-anak mereka yang menggunakan pengetahuan dan sumber daya lokal yang ada. Pada kegiatan Pos Gizi, ibu balita dan anak kurang gizi mempraktekkan berbagai perilaku baru dalam hal memasak, pemberian makanan, kebersihan dan pengasuh anak.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makroekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran proyeksi pencapaian indikator makroekonomi untuk tahun 2022 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global. Sedangkan pencapaian target kinerja makroekonomi daerah tersebut sangat dipegaruhi dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan pembangunan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2022.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2022 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Solok Selatan

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi dan Target Perekonomian Nasional

Pada tahun awal tahun 2020 penyebaran wabah Covid-19 di kota Wuhan, China, dampak negative terhadap ekonomi dunia. Penyebaran wabah yang cepat serta penanganan beberapa Negara yang awalnya kurang siap, pada akhir bulan Februari episentrum penyebaran wabah Covid-19 tidak lagi di China, beralih ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menetapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Internasional Monetary Fund (IMF) yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi (-3,0) persen pada April 2020. Lembaga internasional lain, Oxford Economics dan Goldman Sachs, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar (-2,8) dan 2,0 persen pada tahun 2020. Penurunan ini diikuti oleh penurunan harga komoditas yang disebabkan penurunan permintaan sebagai dampak penurunan aktivitas industri global dan perjalanan internasional.

Tidak berbeda dari negara lain, dinamika perekonomian Indonesia 2020 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi Covid-19

berdampak luar biasa (extraordinary) terhadap Indonesia, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Awal Maret 2020, Indonesia memasuki siklus kasus positif Covid-19, yang dalam waktu singkat menyebar cepat ke berbagai wilayah Indonesia.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 tidak dapat dielakkan memberikan tekanan yang luar biasa kepada perekonomian nasional. Pada tahap awal, Covid-19 memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dunia dan berdampak pada aliran masuk modal asing ke Indonesia yang menurun dan Rupiah yang terdepresiasi. Tekanan berlanjut pada penurunan kegiatan ekonomi akibat ekspor dan perekonomian dunia yang menurun. Tekanan juga merupakan implikasi dari kebijakan PSBB dan protokol kesehatan yang mengurangi mobilitas manusia, barang, dan jasa. Akibatnya, kegiatan ekonomi di berbagai sektor menurun tajam, yang bila tidak ditangani dan direspons dengan segera akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan memperluas kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun juga menjadi perhatian karena apabila berlanjut dapat mengganggu stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah dengan segera menempuh kebijakan untuk memitigasi penyebaran Covid-19, termasuk melalui kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan terutama dilakukan dengan mengurangi mobilitas individu, termasuk menerapkan kebijakan menjaga jarak (social distancing) antarindividu. Kebijakan ini memperkuat kebijakan pengelolaan kesehatan 3T (Tracing, Testing, Treatment), yang kemudian diimplementasikan melalui protokol kesehatan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) di tengah masyarakat. Sejalan dengan kebijakan ini, sejumlah Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020.

Pada paruh pertama 2020, perekonomian Indonesia mendapat tekanan cukup dalam. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional, pascaperang dagang AS-Tiongkok yang sempat mengemuka pada akhir 2019 dan awal 2020, menjadi pudar dengan pandemi Covid-19 yang merebak. Tekanan bersumber dari penurunan ekspor sejalan dengan pelemahan ekonomi global dan gangguan rantai pasokan dunia. Selain itu, tekanan juga dipengaruhi oleh mobilitas yang menurun sejalan dengan PSBB. Akibatnya, PDB berkontraksi cukup dalam pada triwulan II 2020 dan terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi. Sektor pariwisata dan jasa transportasi merupakan sektor yang paling terdampak mobilitas yang rendah. Aliran modal keluar juga meningkat pada periode awal pandemi sejalan ketidakpastian pasar keuangan global dan akhirnya menekan nilai tukar Rupiah. Meskipun demikian, tekanan terhadap perekonomian berkurang pada semester II 2020 sejalan dengan bauran kebijakan yang ditempuh. Kontraksi PDB menurun pada triwulan III, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di kisaran -2% hingga -1%.

Tekanan inflasi juga rendah sejalan dengan permintaan domestik yang lemah. Sementara itu, sistem keuangan, termasuk perbankan, yang berada dalam kondisi baik pada saat pandemi mulai terjadi, menjadi bantalan ketahanan sistem keuangan.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Trend perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021 dengan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Perbaikan ekonomi domestik triwulan IV 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2020, yakni tumbuh -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2,63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor.

Di sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020. LU yang terkait dengan kesehatan dan aktivitas *work from home* dan *school from home* tercatat tetap tumbuh positif dan melanjutkan perbaikan, seperti LU Informasi dan Komunikasi dan LU Jasa Kesehatan. LU Pertanian dan LU Pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian terus melanjutkan perbaikan, meski masih terkontraksi.

Secara tahunan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,88 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 12,93 persen; dan Konstruksi sebesar 10,71 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen

Tabel 3.1.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Rp.Triliun)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 900,6	2 012,8	2 115,1	1 307,3	1 354,4	1 378,1
B.	Pertambangan dan Penggalian	1 199,0	1 149,9	993,5	796,5	806,2	790,5
C.	Industri Pengolahan	2 947,5	3 119,6	3 068,0	2 193,4	2 276,7	2 209,9
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	176,6	185,1	179,7	107,1	111,5	108,8
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,0	10,7	11,3	8,4	9,0	9,5
F.	Konstruksi	1 562,3	1 701,7	1 652,7	1 048,1	1 108,4	1 072,3
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 931,8	2 060,4	1 995,5	1 376,9	1 440,3	1 386,7
H.	Transportasi dan Pergudangan	797,8	881,6	689,7	435,3	463,2	393,5
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	412,7	440,2	394,2	315,1	333,3	299,3
J.	Informasi dan Komunikasi	558,9	626,5	695,8	538,8	589,5	651,9
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	616,3	671,4	696,1	415,6	443,1	457,5
L.	Real Estat	406,0	439,5	453,8	299,6	316,9	324,3
M,N.	Jasa Perusahaan	267,1	304,3	294,3	187,7	206,9	195,7
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541,7	571,6	580,2	349,3	365,5	365,4
P.	Jasa Pendidikan	481,8	522,4	549,4	321,1	341,4	350,3
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158,1	174,7	201,1	117,3	127,5	142,3
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	268,6	309,0	302,6	185,4	205,0	196,6
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar		14 236,8	15 181,4	14 873,0	10 002,9	10 498,8	10 332,6

Sumber: BPS Republik Indonesia

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha
(Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Distribusi		
	Atas Dasar Harga Konstan 2010			Atas Dasar Harga Berlaku		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,88	3,61	1,75	12,81	12,71	13,70
B. Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22	-1,95	8,08	7,26	6,44
C. Industri Pengolahan	4,27	3,80	-2,93	19,86	19,71	19,88
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	4,04	-2,34	1,19	1,17	1,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,56	6,83	4,94	0,07	0,07	0,07
F. Konstruksi	6,09	5,76	-3,26	10,53	10,75	10,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	4,60	-3,72	13,02	13,01	12,93
H. Transportasi dan Pergudangan	7,05	6,39	-15,04	5,38	5,57	4,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,79	-10,22	2,78	2,78	2,55
J. Informasi dan Komunikasi	7,02	9,42	10,58	3,77	3,96	4,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	6,61	3,25	4,15	4,24	4,51
L. Real Estat	3,48	5,76	2,32	2,73	2,78	2,94
M,N. Jasa Perusahaan	8,64	10,25	-5,44	1,80	1,92	1,91
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,97	4,65	-0,03	3,65	3,61	3,76
P. Jasa Pendidikan	5,36	6,30	2,63	3,25	3,30	3,56
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	8,69	11,60	1,06	1,10	1,30
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,95	10,57	-4,10	1,81	1,95	1,96
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	4,95	4,96	-1,58	95,94	95,89	96,36
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	10,82	6,46	-13,42	4,06	4,11	3,64
Produk Domestik Bruto (PDB)	5,17	5,02	-2,07	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Republik Indonesia

Sedangkan untuk PDRB berdasarkan pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

(PK-P) yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,70 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang masing-masing sebesar 4,95 persen; 4,29 persen; dan 2,63 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen

Tabel 3.3.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Rp. Triliun)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8 274,2	8 965,8	8 900,0	5 651,5	5 936,4	5 780,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	180,9	206,1	201,3	123,0	136,0	130,2
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 338,6	1 394,8	1 433,7	828,9	855,9	872,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 791,2	5 121,4	4 897,8	3 444,3	3 597,7	3 419,7
5. Perubahan Inventori	338,6	226,9	97,9	197,4	130,0	51,3
6. Ekspor Barang dan Jasa	3 116,5	2 920,5	2 649,8	2 286,4	2 266,7	2 092,0
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3 275,1	3 008,6	2 472,9	2 203,3	2 040,4	1 740,2
Diskrepani Statistik ⁽¹⁾	73,9	5,6	-273,4	97,7	66,7	116,6
Produk Domestik Bruto (PDB)	14 838,8	15 832,5	15 434,2	10 425,9	10 949,0	10 722,4

Sumber: BPS Republik Indonesia

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 5,0 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 dapat memulihkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi dan investasi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021. Oleh sebab itu pertumbuhan Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 4,3 persen pada tahun 2021.

Sedangkan Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 4,4 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 5,3 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 7,3 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 6,1 persen, yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Untuk tahun 2022 kondisi perekonomian global diperkirakan relative lebih baik daripada kondisi 2021 namun masih sangat tergantung pada keberhasilan proses vaksinasi dalam menekan pertumbuhan kasus Covid-19. Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Nasional diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 5,4-6,0 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia.

Berdasarkan hal diatas serta perkiraan capaian ekonomi makro diatas dan perkiraan ekonomi capaian ekonomi tahun 2021, maka sasaran ekonomi pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP pada tahun 2022 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022

3.1.2. Kondisi dan Target Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2020 relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya walaupun masih mengalami kontraksi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2020 tumbuh -2,23% (yoy) atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh pada level -2,91% (yoy). Perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2020 sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah.

Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi juga terjadi pada mayoritas lapangan usaha terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor industri pengolahan. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat tumbuh sebesar 1,91% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -0,18% (yoy). Peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terjadi didorong oleh hasil produksi tanaman pangan yang meningkat seiring dengan permintaan yang relatif membaik. sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi sebesar -14,41% (yoy) membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -18,34% (yoy). Peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan dipengaruhi mobilitas masyarakat yang relatif meningkat pada HBKN Nataru. sektor industri pengolahan tercatat meningkat sebesar 1,88% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -1,24% (yoy). Peningkatan kinerja industri pengolahan didorong oleh normalisasi aktivitas industri secara umum serta meningkatnya permintaan CPO dan karet pada akhir tahun. Perbaikan juga terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebesar -14,58% (yoy) mereda dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang kontraksi sebesar -20,41% (yoy) seiring dengan HBKN Nataru yang mendorong sebagian wisatawan nusantara mulai melakukan kunjungan wisata. Di sisi lain, sektor konstruksi tercatat kontraksi sebesar -6,80% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -3,61% (yoy) seiring dengan proyek pembangunan yang terhambat akibat refocusing anggaran yang dilakukan. sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar -4,36% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -2,49% (yoy) seiring dengan aktivitas dan kunjungan wisatawan saat HBKN Nataru yang tidak setinggi tahun sebelumnya.

Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi ekonomi menjadi -1,60% tahun 2020 didorong oleh penurunan kinerja mayoritas sektor lapangan usaha terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Aktivitas masyarakat yang cenderung menurun di tahun 2020 mendorong rendahnya permintaan produk pertanian Sumatera Barat. Aktivitas MICE dan kunjungan wisnus serta wisman yang menurun pada tahun 2020

mendorong penurunan kinerja sektor transportasi dan sektor perdagangan. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha meningkat terutama yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 yaitu sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Peningkatan pemasangan dan penggunaan internet terutama bagi masyarakat yang bekerja atau belajar dari rumah saat kebijakan PSBB diterapkan mendorong kinerja sektor informasi dan komunikasi sedangkan sektor jasa kesehatan meningkat sehubungan dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan selama pandemi.

Tabel 3.4.
PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Lapangan Usaha
(Rp. Triliun rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017					2018					2019					2020			
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.66	8.80	8.98	8.95	35.39	8.87	9.15	9.28	9.35	36.64	9.18	9.38	9.53	9.48	37.56	9.41	9.42	9.51	9.66
2	Pertambangan dan Penggalian	1.56	1.55	1.59	1.63	6.34	1.60	1.64	1.70	1.77	6.71	1.68	1.72	1.82	1.90	7.12	1.77	1.64	1.77	1.84
3	Industri Pengolahan	4.04	4.15	4.21	4.15	16.54	3.94	4.07	4.41	4.02	16.44	3.90	3.85	4.24	4.13	16.12	3.86	3.78	4.19	4.20
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.04	0.04	0.04	0.04	0.17	0.04	0.04	0.04	0.04	0.18	0.04	0.05	0.05	0.05	0.18	0.05	0.04	0.04	0.04
5	Pengadaan Air	0.04	0.04	0.04	0.04	0.16	0.04	0.04	0.04	0.04	0.16	0.04	0.04	0.04	0.04	0.17	0.04	0.04	0.04	0.04
6	Konstruksi	3.34	3.40	3.58	3.75	14.08	3.60	3.63	3.78	4.06	15.06	3.89	3.97	4.07	4.40	16.34	4.07	3.77	3.92	4.10
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.88	5.99	6.16	6.25	24.28	6.19	6.42	6.59	6.77	25.98	6.54	6.90	7.13	7.30	27.87	6.95	6.67	6.95	6.98
8	Transportasi dan Pergudangan	4.46	4.72	4.83	4.75	18.76	4.83	5.02	5.04	5.09	19.97	5.04	5.36	5.36	5.16	20.92	4.98	3.78	4.38	4.42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.40	0.42	0.43	0.44	1.69	0.44	0.46	0.46	0.48	1.83	0.47	0.49	0.50	0.52	1.98	0.49	0.33	0.40	0.44
10	Informasi dan Komunikasi	2.58	2.72	2.73	2.77	10.80	2.82	2.95	2.95	3.01	11.72	3.08	3.22	3.23	3.22	12.75	3.42	3.59	3.48	3.50
11	Jasa Keuangan	1.15	1.16	1.15	1.16	4.62	1.18	1.19	1.14	1.15	4.67	1.16	1.18	1.19	1.25	4.77	1.20	1.16	1.22	1.25
12	Real Estate	0.74	0.77	0.75	0.77	3.03	0.76	0.79	0.79	0.82	3.17	0.82	0.85	0.85	0.87	3.38	0.87	0.86	0.83	0.82
13	Jasa Perusahaan	0.17	0.17	0.17	0.17	0.69	0.17	0.18	0.18	0.19	0.72	0.19	0.19	0.20	0.19	0.77	0.19	0.18	0.18	0.18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.08	2.14	2.19	2.24	8.66	2.23	2.28	2.35	2.32	9.18	2.36	2.48	2.46	2.51	9.81	2.50	2.39	2.35	2.50
15	Jasa Pendidikan	1.44	1.48	1.51	1.52	5.95	1.56	1.58	1.61	1.63	6.38	1.68	1.70	1.74	1.78	6.89	1.79	1.74	1.87	1.83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.52	0.53	0.55	0.56	2.15	0.56	0.57	0.58	0.60	2.31	0.61	0.61	0.62	0.64	2.49	0.65	0.64	0.70	0.71
17	Jasa lainnya	0.64	0.67	0.68	0.69	2.67	0.70	0.72	0.72	0.74	2.88	0.75	0.78	0.78	0.79	3.10	0.78	0.63	0.67	0.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.75	38.76	39.59	39.88	155.98	39.53	40.75	41.68	42.08	164.03	41.45	42.80	43.83	44.24	172.32	43.07	40.71	42.57	43.22

Sumber: BPS Republik Indonesia

Activate Windows

Tabel 3.5.
Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan
Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,43	3,54	2,63	1,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31
3. Industri Pengolahan	4,90	2,27	-0,57	1,95	-0,54
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,28
6. Konstruksi	6,59	7,23	7,04	8,42	-2,92
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	7,03	7,33	-1,14
8. Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,47	4,74	-16,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95
10. Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,57	8,75	9,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34
12. Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	7,09	-0,69
15. Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83
17. Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10
PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,16	5,05	-1,60

Sumber: BPS Republik Indonesia

Disisi Pengeluaran ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menahan aktivitas ekonomi secara umum. Ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat menurun sebesar -1,60% (yoy), dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional namun lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera yang masing-masing berkontraksi sebesar -2,07% (yoy) dan -1,19% (yoy). Dari sisi pengeluaran, penurunan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 didorong oleh penurunan mayoritas komponen pengeluaran terutama konsumsi RT dan PMTB yang berkontraksi masing-masing sebesar -2,47% (yoy) dan -2,62% (yoy). Perlambatan konsumsi RT di pengaruhi oleh menurunnya pendapatan masyarakat. Pembatasan aktivitas yang dilakukan pada April 2020 memberikan dampak pada permintaan yang berujung pada penurunan pendapatan masyarakat. Investasi berkontraksi dipengaruhi oleh perlambatan permintaan yang menahan penjualan swasta sehingga mereka lebih cenderung wait and see. Di sisi lain, kontraksi ekspor luar negeri tercatat mereda pada tahun 2020 sebesar -3,31% (yoy) dibandingkan

dengan tahun sebelumnya sebesar -7,52% (yoy). Kontraksi ekspor yang mereda didorong oleh peningkatan ekspor CPO terutama pada akhir tahun 2020.

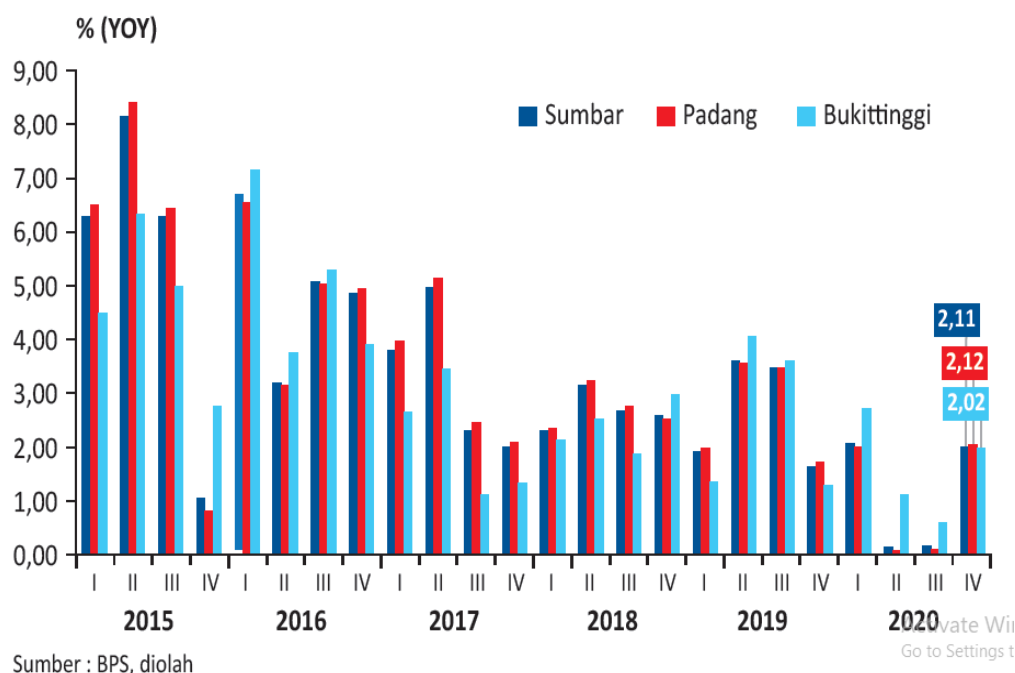
Tabel 3.6.
Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan Berdasarkan Pengeluaran (% yoy)

Komponen Pengeluaran	2018	2019					2020				
	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.62	4.56	4.86	4.66	4.88	4.74	4.00	(4.47)	(4.60)	(4.62)	(2.47)
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.54	13.58	11.77	11.62	10.55	11.85	(1.04)	(6.42)	(6.32)	(3.67)	(4.39)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.40	3.51	12.06	1.08	4.24	5.13	3.77	(10.52)	(9.16)	(12.61)	(8.50)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.52	4.12	5.82	5.61	5.08	5.16	2.82	(4.69)	(4.26)	(4.07)	(2.62)
Perubahan Inventori	68.68	(150.70)	(65.66)	(89.62)	(145.51)	(60.75)	(67.93)	(73.90)	134.66	535.04	261.03
Ekspor Luar Negeri	(6.83)	(7.67)	(4.52)	(15.52)	(1.11)	(7.52)	6.35	(16.57)	(13.12)	9.21	(3.31)
Impor Luar Negeri	0.31	(1.08)	13.60	(11.38)	(50.41)	(14.31)	(37.75)	(53.47)	(65.93)	(59.38)	(53.85)
Net Ekspor Antar Daerah	(76.69)	77.80	15.96	(184.82)	53.44	(128.41)	(43.26)	(34.23)	31.76	(13.06)	(96.65)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.14	4.82	5.03	5.16	5.09	5.01	3.88	(4.95)	(2.94)	(2.23)	(1.60)

Sumber: BPS Republik Indonesia

Sedangkan Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,11% (yoy) meningkat dibandingkan realisasi inflasi pada tahun 2019 sebesar 1,67% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Barat ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional yaitu 1,68% (yoy) namun tetap pada sasaran inflasi nasional di tahun 2020 sebesar $3 \pm 1\%$. Peningkatan Inflasi pada tahun 2020 utamanya didorong oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan nilai inflasi 4,74% (yoy) dan andil 1,44% (yoy) di Desember 2020. Inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh inflasi komoditas cabai merah yang tercatat masuk ke dalam sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi di Sumatera Barat sebanyak tujuh kali (Januari, Februari, Juli, September, Oktober, November dan Desember). Demikian pula bawang merah yang turut menyumbang inflasi di Sumatera Barat sebanyak enam kali (Januari, April Mei, September, Oktober dan November). Peningkatan harga komoditas pangan terutama cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh tingginya curah hujan di tahun 2021 sebagai dampak fenomena La Nina sehingga produktivitas dan distribusi pasokan menjadi terganggu. Sementara itu inflasi yang terjadi pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh pola tahunan dimana terjadi kecenderungan peningkatan permintaan di akhir tahun. Kelompok lain yang memberikan andil inflasi cukup tinggi di tahun 2020 yaitu kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan nilai inflasi sebesar 6,35% (yoy) dan 0,38% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang utama inflasi di Sumatera Barat sebanyak enam kali pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli dan Agustus. Inflasi emas perhiasan pada awal tahun terjadi seiring dengan peningkatan harga emas global akibat mulai merebaknya COVID-19. Ketidakpastian ekonomi mendorong perubahan preferensi investor untuk berinvestasi pada instrumen *safe haven*

Gambar 3.1.
Inflasi Tahunan (yoy) Per Kota Sampel Inflasi Sumbar



Berdasarkan hal diatas serta perkiraan capaian ekonomi makro diatas dan perkiraan ekonomi, maka sasaran ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.7.
Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Indikator	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,44	3,40
IPM (Indek)	72,56	72,74
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,40	6,28
Indeks Gini (Indek)	0,299	0,298
Tingkat Pengangguran (%)	6,70	6,60

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan perdagangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi COVID-19 untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan

wilayah serta tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap pergerakan/mobilisasi orang dan barang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus yang lebih masif

2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar serta dengan memperluas sektor UMKM dan memperkuat fondasi pertanian yang terbukti defensive dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti dengan adanya ketidakpastian ekonomi akibat pandemi covid 19
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.3. Kondisi dan Target Perekonomian Kabupaten Solok Selatan

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atau perekonomian suatu daerah Kabupaten / Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut.

Sampai tahun 2019 perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain. Namun pada tahun 2020, hampir seluruh kinerja indikator ekonomi Kabupaten mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi bencana Covid-19 yang melanda dunia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi penyebaran Covid 19 yaitu melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol)

yaitu -1,24% seiring dengan menurunnya kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar -1,60% dan Nasional sebesar -2,07%. Jika dibandingkan dengan penurunan perekonomian nasional dan provinsi penurunan pertumbuhan Kabupaten Solok Selatan relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih ditopang dari sektor primer yaitu sebesar 38,21%, meskipun sektor ini juga terdampak kebijakan pemerintah PSBB namun dampaknya tidak separah sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa). Penurunan kinerja perekonomian ini diikuti oleh penurunan kinerja ekonomi lainnya seperti kenaikan tingkat pengangguran menjadi 5,62% (meningkat 0,71%), Indeks Gini menjadi 0,305 (meningkat 0,01). Namun untuk tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan menjadi 7,15% (menurun 0,18%).

Penurunan ini menjadi kontraproduktif dengan penurunan pertumbuhan ekonomi serta dampak sosial ekonomi yang diakibatkan kebijakan pembatasan sosial yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 selama tahun 2020, dimana akses masyarakat ke sektor ekonomi sangat dibatasi. Penurunan ini diperkirakan diakibatkan efek dari bantuan pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah dalam pemberian bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat dimana bantuan tersebut bisa meningkatkan pengeluaran penduduk miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok terutama yang berada disekitar garis kemiskinan lebih besar dari garis kemiskinan Kabupaten Solok Selatan yaitu 419.442 perbulan.

Tabel 3.8.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020 (juta)

INDIKATOR	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.598.219,45	4.893.871,25	5.216.179,64	5.575.024,79	5.528.507,31
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3.435.698,41	3.612.641,03	3.794.200,15	3.979.921,31	3.928.031,94
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (jt)	28,25	30,14	30,97	32,59	32,32
Persentase Penduduk Miskin	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15
Indeks Gini	0,31	0,30	0,309	0,295	0,305
Tingkat Pengangguran	na	5,54	5,85	4,91	5,62

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika Dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tahun 2015-2019 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 4.236.186,58 juta (ADHB) dan Rp. 3.267.806,77 juta (ADHK) pada tahun 2015 menjadi Rp 5.575.024,79 juta (ADHB) dan Rp. 3.979.921,31 juta (ADHK) pada tahun 2019. Selama periode 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Solok Selatan sebesar 5,35 persen dan terus mengalami perlambatan sampai tahun 2019 menjadi 4,89 persen. Namun pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya penurunan sektor ekonomi akibat kebijakan PSBB yang membatasi masyarakat ke aktifitas ekonomi PDRB Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan menjadi Rp.5.528,507,31,- juta (ADHB) dan 3.928.031,94, juta (ADHK).

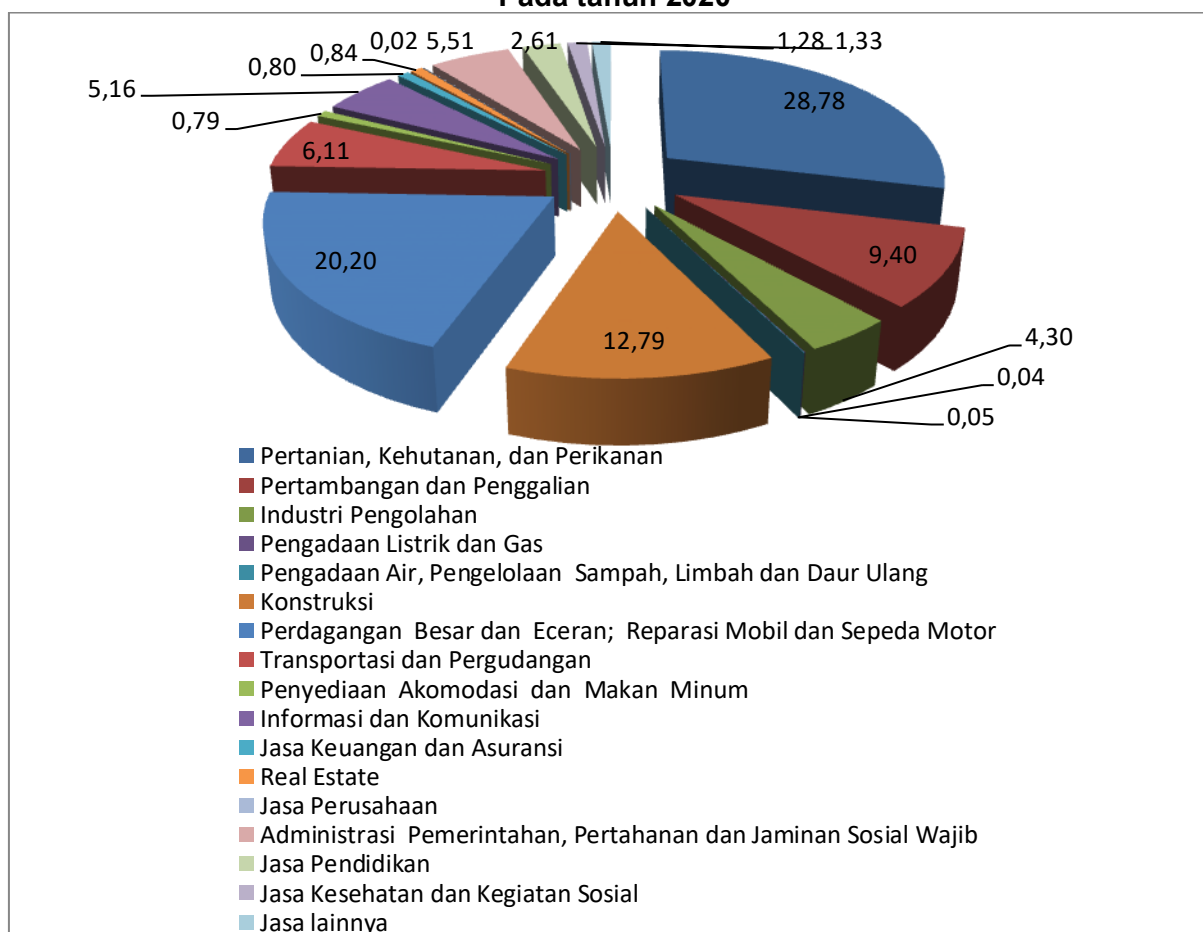
Dilihat dari per sektor pembentuk PDRB atas Harga Konstan yang menggambarkan kondisi rill pertumbuhan nilai tambah barang dengan mengeluarkan inflasi harga barang dari perhitungan dengan cara memakai harga dasar tahun 2010 dapat dilihat bahwa sebahagian besar sektor perekonomian mengalami penurunan, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa lainnya, Konstruksi, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan. Meskipun masih mengalami penurunan pertumbuhan namun sektor utama pembentuk perekonomian Kabupaten Solok Selatan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih bisa bertumbuh masing-masing 0,25% dan 0,09%. Beberapa sektor yang masih bisa tetap mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 7,44 untuk sektor Informasi dan Komunikasi dan 7,40 untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sekolah daring dan memaksimalkan penggunaan internet dan aplikasi untuk penyelesaian tugas-tugas pemerintahan dan dunia usaha serta peningkatan anggaran pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Pandemi Covid 19.

Dilihat dari PDRB Perkapita Rill yang dihitung berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat slope kurva pada tahun kenaikan sampai tahun 2019 lebih landai dari pada slope kurva PDRB ADHB hal ini seiring terjadinya perlambatan dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2020 terjadinya kontraksi perekonomian di Kabupaten Solok Selatan menyebabkan terjadi penurunan yang cukup tinggi dari PDRB perkapita disaat jumlah penduduk meningkat akan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Dalam menilai kemajuan perekonomian daerah PDRB per lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor perekonomian yang terdiri atas 1). Sektor primer, merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan 2). Sektor Sekunder, merupakan sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi dan 3) Sektor tersier merupakan menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir sektor sekunder dan sektor primer seperti penyediaan jasa-jasa

ekonomi, perdagangan, dll. Dilihat dari hal diatas dapat dilihat bahwa sebahagian besar aktifitas ekonomi di Kabupaten Solok Selatan masih bergerak pada sektor primer yaitu 38,21% sedangkan sektor skunder hanya sebesar 17,14%. Meskipun sektor tersier berkontribusi 44,65% terhadap pembentuk PDRB namun hal tersebut sebahagian besar lebih disebabkan karena pengaruh dari penjualan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 3.2.
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Pada tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari perkembangan indikator makro daerah sampai tahun 2020 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan provinsi Sumatera Barat serta perkembangan dampak akibat yang ditimbulkan oleh bencana Covid-19 maka pada tahun 2021-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan hanya mengalami pertumbuhan 2,40% pada tahun 2021 dan 2,79% pada tahun 2022 . Proyeksi target ini diikuti oleh proyeksi indikator makro lainnya seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.9.
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan

Indikator	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,40	2,79
PDRB Perkapita Rill	32,30	33,74
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,32	7,20
Indek Pembangunan Manusia	69,44	69,83
Indeks Gini	0,297	0,295
Tingkat Pengangguran (%)	5,44	5,38

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat

3.2. Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kekuatan (*output*) dan dampak hasil (*outcome*) diharapkan dari kegiatan dan program, serta mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Dengan demikian APBD tidak hanya berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaannya, namun merupakan alat kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan

Kuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana sumber-sumber pembiayaan desentralisasi fiskal tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penganggaran selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat asas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus. Struktur APBD Kabupaten Solok Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah didasari oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diimplementasikan oleh Kabupaten Solok Selatan melalui: 1). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012, Tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak

Kabupaten Solok Selatan bersumber dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pajak Air Bawah Tanah; 2). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- ❖ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemungutan Retribusi Daerah didasari oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan oleh Kabupaten Solok Selatan melalui:
 - 1). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 2). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 3). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Solok Selatan bersumber dari:
 - a) Retribusi Jasa Umum bersumber dari: Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan; Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum; Retribusi Pasar; Retribusi PKB; Retribusi Menara Telekomunikasi.
 - b) Retribusi Jasa Usaha bersumber dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu bersumber dari Retribusi IMB
- ❖ Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan bagi hasil dari penyertaan modal daerah pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pendapatan ini bersumber dari Bagi Hasil/Dividen dari keuntungan Bank Nagari.
- ❖ Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah. Pendapatan ini bersumber dari Hasil Pengelolaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Hasil Penjualan Aset Daerah; Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan BLUD, Penerimaan Denda, dll.

2. Dana Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian

objek. Pendapatan Tranfer. Kebijakan Belanja Transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:

a) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

- ❖ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil serta daerah sekitarnya atau daerah terdampak berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil pajak terdiri dari Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan, Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan serta Bagi Hasil Cukai Tembakau. Dan dana bagi hasil bukan pajak/Sumber daya alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi serta Bagi Hasil Dari Mineral dan Batubara.
- ❖ Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bidang Urusan yang kegiatannya bisa didanai oleh Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Solok Selatan antara lain Bidang Pendidikan; Urusan Kesehatan; Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi; Bidang Perumahan dan Permukiman; Bidang Sosial; Bidang Irigasi; Bidang Pertanian; Bidang kelautan dan Perikanan; Bidang Pasar; Bidang Industri Kecil dan Menengah; Bidang Pariwisata; Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bidang Transportasi Pedesaan.

c) Dana Intensif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

d) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan Dana Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) **Pendapatan hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xxx Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah
- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

I. Urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan;
- r. kearsipan.

II. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;

- d) energi dan sumber daya mineral;
- e) Perdagangan;
- f) perindustrian;
- g) transmigrasi.

III. Unsur pendukung, meliputi:

- a) sekretariat Daerah;
- b) sekretariat DPRD.

IV. Unsur penunjang, meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian;
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; .

V. Unsur pengawas yaitu inspektorat;

VI. Unsur kewilayahan, meliputi kecamatan.

VII. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Selanjutnya belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini terdiri:

- 1) Belanja Pegawai; merupakan belanja yang digunakan untuk kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa; merupakan pengeluaran dalam bentuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- 3) Belanja Bunga; merupakan belanja yang digunakan Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja Subsidi; merupakan belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*) dan diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 5) Belanja Hibah; merupakan belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- 6) Belanja Bantuan Sosial; merupakan belanja uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri:

1) Belanja Bagi Hasil;

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada

pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan serta Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Untuk melihat perkembangan kemampuan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Secara umum perkembangan belanja Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada periode 2016-2018 trend anggaran belanja daerah cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2017 yaitu dari Rp. 863.149.466.224,- pada tahun 2016 menjadi Rp, 998.194.358.064,-pada tahun 2019. Namun dari periode 2019-2020 belanja Kabupaten Solok Selatan kembali mengalami penurunan hingga mejadi Rp. 864.139.880.343,-. Dari tabel perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan dibawah ini dapat dilihat bahwa naik turunnya perkiraan anggaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh perkiraan pendapatan terutama pendapat transfer (pemerintah pusat dan provinsi) dan penerimaan pembiayaan daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kontribusi dari pendapatan asli daerah dalam belanja daerah yaitu rata-rata 7,75%.

Tabel 3.10.
Perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 – 2021

KODE			URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (APBD Awal)
4			PENDAPATAN DAERAH						
4	1		Pendapatan Asli Daerah	44.626.315.107	78.860.456.111	68.939.543.222	76.429.704.083	70.333.349.257	75.220.606.795
4	1	01	Pajak Daerah	5.472.539.541	9.235.467.451	11.263.000.000	12.908.000.000	6.599.221.993	10.480.500.000
4	1	02	Restribusi Daerah	1.596.963.750	1.599.000.000	2.085.000.000	2.940.000.000	996.875.000	1.566.000.000
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.914.000.000	1.914.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	1.843.023.859	1.200.000.000
4	1	04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.642.811.816	66.111.988.660	54.091.543.222	58.081.704.083	60.894.228.405	61.974.106.795
4	2		Pendapatan Transfer	731.262.018.460	737.505.886.000	722.721.369.961	876.551.897.261	767.809.108.734	726.157.202.800
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689.507.415.984	699.299.654.000	677.743.839.821	830.732.843.000	733.236.286.255	683.389.874.000
			Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.982.048.000	19.923.449.000	18.543.104.000	23.286.137.000	30.756.946.757	25.247.665.000
			Dana Alokasi Umum	453.580.377.384	480.406.179.000	480.406.179.000	494.405.575.000	445.646.713.000	451.638.869.000
			Dana Alokasi Khusus	139.088.035.000	163.543.902.000	143.073.155.821	233.334.897.000	188.214.399.498	150.247.034.000
			Dana Insentif Daerah				36.296.683.000	24.095.009.000	8.567.934.000
			Dana Otonomi Khusus	47.127.669.600					
			Dana Desa	27.729.286.000	35.426.124.000	35.721.401.000	43.409.551.000	44.523.218.000	47.688.372.000
4	2	02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	41.754.602.476	38.206.232.000	44.977.530.140	45.819.054.261	34.572.822.479	42.767.328.800
			Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	34.142.482.476	36.156.232.000	41.597.530.140	43.756.376.470	34.572.822.479	42.767.328.800
			Bantuan Keuangan	7.612.120.000	2.050.000.000	3.380.000.000	2.062.677.791	-	
4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.000.000.000	5.200.000.000	24.617.028.932	28.708.400.000	24.839.170.000	22.693.180.268
4	3	01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	5.200.000.000	24.617.028.932	28.708.400.000	24.839.170.000	1.000.000.000
4	3	02	Dana Darurat						
4	3	03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan						21.693.180.268
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				777.888.333.567	821.566.342.111	816.277.942.115	981.690.001.344	862.981.627.991	824.070.989.863
5			BELANJA DAERAH						

KODE			URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (APBD Awal)
5	1		Belanja Operasi	531.668.773.108	529.677.399.567	524.769.556.589	597.101.230.275	608.477.388.205	622.356.517.112
5	1	01	Belanja Pegawai	309.322.262.526	300.168.333.594	325.387.739.329	360.438.357.095	365.158.456.022	371.820.633.955
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.706.003.582	223.370.840.973	193.461.817.260	227.031.473.180	210.414.082.683	218.949.882.301
5	1	03	Belanja Hibah	7.610.507.000	5.301.600.000	5.920.000.000	6.501.400.000	32.204.849.500	29.675.194.356
5	1	04	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	836.625.000	-	3.130.000.000	700.000.000	1.910.806.500
5	2		Belanja Modal	251.884.130.268	249.660.117.369	217.614.380.733	301.666.389.574	156.376.556.525	143.201.687.831
5	2	01	Belanja Modal Tanah	4.683.583.908	8.774.418.542	9.086.950.000	6.480.160.000	3.386.540.000	4.818.760.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.905.202.757	33.027.869.186	18.279.305.437	33.826.267.581	38.106.605.026	21.193.929.964
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.176.034.068	49.366.791.755	37.849.565.656	111.423.320.243	68.396.544.881	33.072.141.931
5	2	04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.058.269.035	156.094.499.386	146.932.513.040	146.266.479.890	40.263.667.843	82.827.144.286
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.061.040.500	2.396.538.500	5.466.046.600	3.670.161.860	6.223.198.775	1.289.711.650
5	3		Belanja Tidak Terduga	2.384.407.117	2.233.068.551	855.126.514	1.869.000.000	68.298.692.590	2.000.000.000
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	2.384.407.117	2.233.068.551	855.126.514	1.869.000.000	68.298.692.590	2.000.000.000
5	4		Belanja Transfer Keuangan	77.212.155.731	87.809.450.592	88.185.571.228	97.557.738.215	93.654.352.584	96.581.675.400
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	848.513.129	1.082.246.745	1.334.800.000	1.987.580.587	1.035.305.140	1.204.650.000
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	76.363.642.602	86.727.203.847	86.850.771.228	95.570.157.628	92.619.047.444	95.377.025.400
JUMLAH BELANJA DAERAH				863.149.466.224	869.380.036.079	831.424.635.064	998.194.358.064	926.806.989.904	864.139.880.343
SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN				(85.261.132.657)	(47.813.693.968)	(15.146.692.949)	(16.504.356.720)	(63.825.361.913)	(40.068.890.480)
6			PEMBIAYAAN DAERAH						
6	1		Penerimaan Pembiayaan	89.475.438.657	50.813.693.968	19.646.692.949	22.004.356.720	66.825.361.913	40.068.890.480
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.475.438.657	48.374.912.054	19.646.692.949	22.004.356.720	66.825.361.913	40.068.890.480
6	1	02	Pencairan Dana Cadangan						
6	1	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6	1	04	Penerimaan Pembiayaan Daerah		2.438.781.914				
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6	1	06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000	-
6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan						

KODE			URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (APBD Awal)
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000	-
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
6	2	04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6	2	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan						
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH				85.475.438.657	47.813.693.968	15.146.692.949	16.504.356.720	63.825.361.913	40.068.890.480
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)				214.306.000	-	-	-	-	-

Sumber: APBD Perubahan tahun 2016-2020 dan APBD Tahun 2021

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Dalam penganggaran pendapatan daerah dalam APBD diharuskan dilakukan secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kinerja dari pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Jika dilihat dari perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 776.513.084.983,- pada tahun 2016 menjadi Rp 913.258.324.428,- pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 861.998.332.754,-. Penurunan merupakan dampak dari bencana pandemic *Corona virus disease (Covid-19)* yang berdampak terhadap perekonomian dunia, nasional dan daerah yang menyerang kedua sisi perekonomian baik sisi produksi atau penawaran (*supply*) maupun dari sisi permintaan (*demand*). Penurunan aktifitas ekonomi ini pada akhirnya berdampak terhadap perubahan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian dan rasionalisasi perkiraan pendapatan negara berdampak terhadap penurunan kemampuan negara dalam membiayai belanja. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan Efisiensi, *Realokasi* dan *Recofusing* dari anggaran belanja negara. Dampak dari penurunan belanja negara ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan dana perimbangan daerah, yang dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 60 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang bertujuan memberikan insentif kepada pemilik kendaraan pada masa pandemic Covid 19 dalam membayar pajak sehingga dalam jangka pendek juga berdampak terhadap penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sumatera

Barat yang akhirnya berdampak terhadap penurunan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya.

Selain berpengaruh negatif terhadap perekonomian dan pendapatan nasional Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) tentu juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah Provinsi dan Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Solok Selatan juga melakukan penyesuaian anggaran APBD yaitu merasionalisasi perkiraan target pendapatan. Rasionalisasi tersebut dilakukan pada hampir semua pos pendapatan daerah yang terimbas secara langsung maupun tidak langsung akibat pelemahan perekonomian daerah sebagai akibat dampak pandemic Covid-19, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer (pusat dan provinsi) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain Rasionalisasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak terimbas oleh pandemi Covid 19 terutama yang berasal dari seperti pendapatan BLUD, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Bagi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dampak dari hal tersebut adalah pada perubahan tahun 2020 target pendapatan mengalami penurunan sebesar 5,9% atau Rp. 54.162.896.208,- dari target awal tahun 2020 menjadi Rp. 862.981.627.991,-.

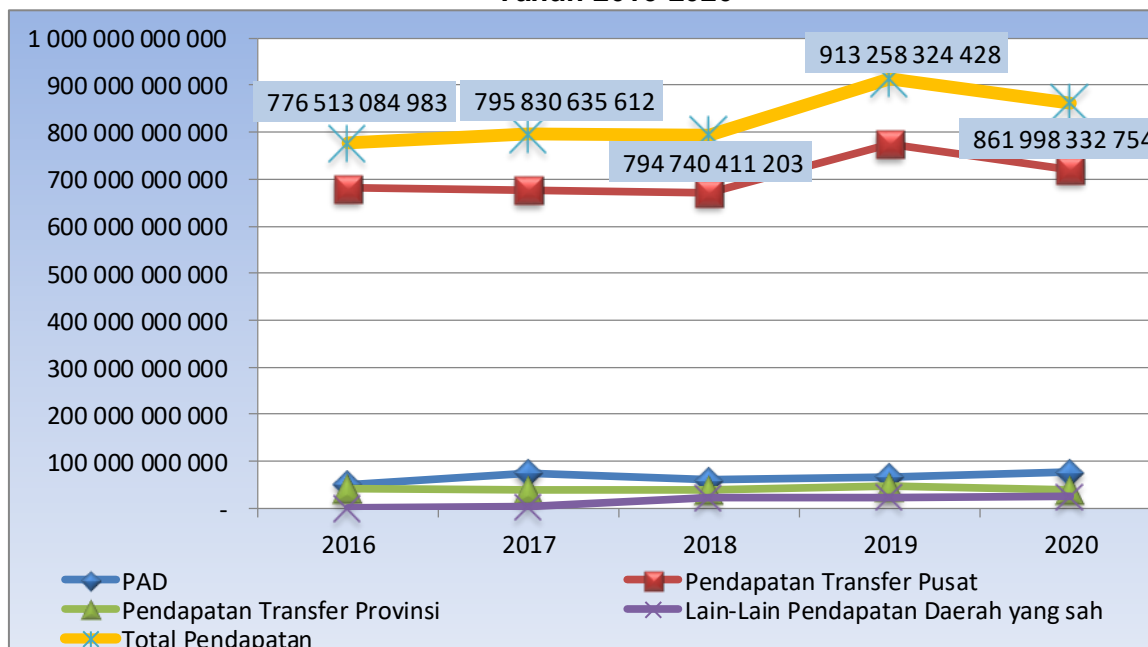
Disisi pendapatan asli daerah meskipun perekonomian daerah mengalami kontraksi pertumbuhan namun masih dapat mengalami pertumbuhan dari tahun 2019 sebesar 13,30% yaitu dari Rp. 67.842.785.844,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 76.864.310.842,- pada tahun 2020. Namun peningkatan ini lebih disebabkan karena terjadinya peningkatan dari rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (terutama Dana Kapitasi Kesehatan yang berasal dari BPJS yang diterima oleh puskesmas dan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD) dan rekening Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Bagi Hasil Bank Nagari). Sedangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan sejalan dengan kondisi perekonomian daerah sebesar 19,38% untuk pajak daerah dan 12,00% untuk retribusi daerah.

Jika dilihat dari realisasi pendapatan daerah sampai tahun 2020 terlihat bahwa sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan masih bersumber dari dana transfer, hal ini dapat dilihat dari kontribusi dana transfer terhadap pendapatan rata-rata 90,23% per tahun. Hal ini dapat diartikan tingkat ketergantungan Kabupaten Solok Selatan dalam membiayai belanja daerah cukup tinggi, terutama dari: 1). Dana Transfer Pemerintah Pusat baik dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan bagi hasil sumber daya alam; dana alokasi umum; dan dana alokasi khusus; dana insentif daerah serta dana desa, 2) Dana Transfer Antar Daerah yaitu Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintahan daerah lainnya. Meskipun demikian pada tahun 2020 kontribusi pendapatan transfer mengalami penurunan dari 89,93% pada tahun 2019 menjadi 88,22% pada tahun 2020, penurunan ini seiring

dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah dari 7,43% pada tahun 2020 menjadi 8,92% pada tahun 2020, terutama rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bersumber dari dana kapitasi layanan kesehatan dan BLUD RSUD. Sedangkan untuk Pajak, Retribusi dan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan baru berkontribusi paling tinggi 1,14% dari Pendapatan Daerah.

Rendahnya penerimaan dan kontribusi pendapatan asli daerah terutama untuk pajak dan retribusi menggambarkan masih lemahnya aktifitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan objek pungut, serta belum tergalinya dan terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penggalan sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Penggalan sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah.

Gambar 3.3.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2016-2020

Tabel 3.11.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.000)

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Realisasi
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
4	PENDAPATAN DAERAH											-
4 1	Pendapatan Asli Daerah	51.138.126	114,6	75.505.888	95,7	60.545.296	87,8	67.842.786	88,8	76.864.311	109,3	99,24
4 1 01	Pajak Daerah	4.962.467	90,7	6.991.350	75,7	7.618.652	67,6	8.435.032	65,3	6.800.569	103,1	80,48
4 1 02	Restribusi Daerah	6.609.884	413,9	1.047.276	65,5	922.009	44,2	1.362.801	46,4	1.199.290	120,3	138,06
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.290.537	67,4	1.984.390	103,7	1.470.319	98,0	1.677.245	67,1	1.843.024	100,0	87,24
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	38.275.238	107,4	65.482.872	99,0	50.534.316	93,4	56.367.708	97,0	67.021.428	110,1	101,39
4 2	Pendapatan Transfer	724.594.959	99,1	717.774.678	97,3	711.389.401	98,4	821.250.271	93,7	760.455.717	99,0	97,52
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681.759.445	98,9	677.599.019	96,9	672.016.315	99,2	775.072.868	93,3	720.618.426	98,3	97,30
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.017.409	95,6	14.713.777	73,9	18.494.085	99,7	13.309.793	57,2	23.408.771	76,1	80,49
	Dana Alokasi Umum	488.996.271	107,8	480.406.179	100,0	480.406.179	100,0	490.084.500	99,1	441.989.749	99,2	101,22
	Dana Alokasi Khusus	110.276.258	79,3	146.846.571	89,8	137.314.856	96,0	191.972.341	82,3	186.601.679	99,1	89,29
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	36.296.683	100,0	24.095.009	100,0	100,00
	Dana Otonomi Khusus	33.740.220	71,6	206.368	#DIV/0!	79.795	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	Dana Desa	27.729.286	100,0	35.426.124	100,0	35.721.401	100,0	43.409.551	100,0	44.523.218	100,0	100,00
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	42.835.515	102,6	40.175.659	105,2	39.373.086	87,5	46.177.403	100,8	39.837.291	115,2	102,26
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	35.223.395	103,2	38.125.659	105,4	39.373.086	94,7	46.177.403	105,5	39.837.291	115,2	104,81
	Bantuan Keuangan	7.612.120	100,0	2.050.000	100,0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	780.000	39,0	2.550.070	49,0	22.805.714	92,6	24.165.268	84,2	24.678.305	99,4	72,84
4 3 01	Pendapatan Hibah	780.000	39,0	2.550.070	49,0	22.805.714	92,6	24.165.268	84,2	24.678.305	99,4	72,84
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		776.513.085	99,8	795.830.636	96,9	794.740.411	97,4	913.258.324	93,0	861.998.333	99,9	97,39

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2016-2020

Tabel 3.12.

Pertumbuhan dan Kontribusi per Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016-2020 (Persen)

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Realisasi	
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
4	PENDAPATAN DAERAH												
4 1	Pendapatan Asli Daerah	24,10	6,59	47,65	9,49	(19,81)	7,62	12,05	7,43	13,30	8,92	10,72	8,01
4 1 01	Pajak Daerah	12,40	0,64	40,88	0,88	8,97	0,96	10,72	0,92	(19,38)	0,79	8,20	0,84
4 1 02	Restribusi Daerah	329,64	0,85	(84,16)	0,13	(11,96)	0,12	47,81	0,15	(12,00)	0,14	(34,73)	0,28
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	(11,49)	0,17	53,76	0,25	(25,91)	0,19	14,07	0,18	9,88	0,21	9,32	0,20
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	13,25	4,93	71,08	8,23	(22,83)	6,36	11,54	6,17	18,90	7,78	15,03	6,69
4 2	Pendapatan Transfer	6,84	93,31	(0,94)	90,19	(0,89)	89,51	15,44	89,93	(7,40)	88,22	1,21	90,23
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6,47	87,80	(0,61)	85,14	(0,82)	84,56	15,34	84,87	(7,03)	83,60	1,40	85,19
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(2,95)	2,71	(29,99)	1,85	25,69	2,33	(28,03)	1,46	75,88	2,72	2,73	2,21
	Dana Alokasi Umum	12,78	62,97	(1,76)	60,37	-	60,45	2,01	53,66	(9,81)	51,28	(2,50)	57,75
	Dana Alokasi Khusus	(3,81)	14,20	33,16	18,45	(6,49)	17,28	39,80	21,02	(2,80)	21,65	14,05	18,52
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	-	3,97	(33,62)	2,80	#DIV/0!	1,35
	Dana Otonomi Khusus	(41,95)	4,35	(99,39)	0,03	(61,33)	0,01	(100,00)	-	-	-	(100,00)	0,88
	Dana Desa	124,42	3,57	27,76	4,45	0,83	4,49	21,52	4,75	2,57	5,17	12,57	4,49
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	13,17	5,52	(6,21)	5,05	(2,00)	4,95	17,28	5,06	(13,73)	4,62	(1,80)	5,04
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	4,45	4,54	8,24	4,79	3,27	4,95	17,28	5,06	(13,73)	4,62	3,13	4,79
	Bantuan Keuangan	84,54	0,98	(73,07)	0,26	(100,00)	-	-	-	-	-	(100,00)	0,25
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	(96,11)	0,10	226,93	0,32	794,32	2,87	5,96	2,65	2,12	2,86	137,17	1,76
4 3 01	Pendapatan Hibah	(96,11)	0,10	226,93	0,32	794,32	2,87	5,96	2,65	2,12	2,86	137,17	1,76
4 3 02	Dana Darurat												
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan												
PENDAPATAN DAERAH		5,01	100,00	2,49	100,00	(0,14)	100,00	14,91	1,00	(5,61)	100,00	2,65	100,00

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2016-2020 (data diolah)

3.2.1.2. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dilihat pada periode 2016-2018 dapat dilihat terjadi penurunan dari surplus pembiayaan daerah dari Rp. 86.210.016.057,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 16.099.532.949,- pada tahun 2018. Penurunan ini lebih disebabkan karena terjadinya penurunan SILPA tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018-2020 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan SILPA tahun sebelumnya sehingga surplus pembiayaan menjadi Rp. 66.825.361.913,-

Dari data diatas dapat dilihat bahwa besar kecilnya dari surplus nya pembiayaan daerah lebih dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang utamanya berasal dari efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun sebelumnya serta tidak atau kurang optimalnya pelaksanaan program atau kegiatan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah hanya digunakan untuk peningkatan penyertaan Modal ke Bank Nagari yang bertujuan untuk meningkatkan *car ratio* perbankan dan PDAM yang ditujukan untuk peningkatan pelayanannya kepada masyarakat.

Tabel 3.13.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp. 000)

KODE			URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Realisasi
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
6			PEMBIAYAAN DAERAH											-
6	1		Penerimaan Pembiayaan	89.502.016	100,0	48.423.486	95,3	19.654.533	100,0	22.004.357	100,0	66.825.362	100,0	99,07
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.475.439	100,0	48.371.280	100,0	19.646.693	100,0	22.004.357	100,0	66.825.362	100,0	100,00
6	1	02	Pencairan Dana Cadangan											
6	1	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan											
6	1	04	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.577	#DIV/0!									
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			52.206	#DIV/0!	7.840	#DIV/0!					#DIV/0!
6	1	06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.292.000	82,3	1.690.000	56,3	3.555.000	79,0	1.000.000	18,2	3.000.000	100,0	67,16
6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan											
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	3.292.000	82,3	1.690.000	56,3	3.555.000	79,0	1.000.000	18,2	3.000.000	100,0	67,16
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo											
6	2	04	Pemberian Pinjaman Daerah											
6	2	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Undangan											
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH				86.210.016	100,9	46.733.486	97,7	16.099.533	106,3	21.004.357	127,3	63.825.362	100,0	106,43

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2016-2020 (data diolah)

3.2.1.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan tugas pemerintah itu sendiri. Sumber dari belanja daerah berasal dari pendapatan daerah tahun bersangkutan serta surplus pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta urusan penunjang pelayanan pemerintahan, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer keuangan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Dilihat dari realisasi belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2019 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi belanja daerah cenderung mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 814.299.953.923,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 866.621.381.086,- pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 788.840.060.716,-, penurunan ini lebih merupakan efek dari penurunan pendapatan daerah dan surplus pembiayaan daerah yang merupakan sumber pendanaan dari dari belanja daerah. Kemudian pada tahun 2020 belanja daerah kembali mengalami menjadi Rp. 856.253.414.284,- atau mengalami penurunan sebesar -1,29%, penurunan seiring dengan menurunnya target pendapatan daerah. Meskipun mengalami penurunan namun jika dilihat dari tingkat realisasi. Namun jika dilihat dari rata-rata realisasi belanja daerah periode 2016-2020 menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 92,63%, dengan tingkat realisasi tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu 94,88% dan yang terendah pada tahun 2019 yaitu 86,90%. Tingginya tingkat realisasi belanja ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam menetapkan target belanja daerah hal ini dikarenakan karena rata-rata realisasi pendapatan daerah yang merupakan sumber utama belanja daerah 97,39%. Jika target belanja daerah realisasinya tinggi namun tidak diiringi oleh realisasi pendapatan daerah maka otomatis belanja daerah tidak akan dapat dibiayai atau keuangan daerah akan defisit.

Jika dilihat dari rata-rata komposisi realisasi belanja daerah pada periode 2016-2019 dapat dilihat bahwa rata-rata 63,77% belanja daerah merupakan belanja operasional, belanja modal 24,10%, belanja transfer 10,63%, dan belanja tidak terduga 1,51%.

Jika dilihat dari perkembangan belanja operasional periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 501.526.655.783,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 580.350.641.160,- pada tahun 2020 atau rata-rata mengalami peningkatan Rp. 3,72%. Penyebab utama peningkatan dikarenakan terjadinya peningkatan dari belanja pegawai (rata-rata 3,99%) dan belanja kebutuhan barang dan jasa (rata-rata 0,52%) untuk

pemenuhan belanja program dan kegiatan serta operasional kantor, peningkatan belanja hibah daerah sebesar (43,63). Peningkatan belanja pegawai dikarenakan oleh kebijakan penerimaan CPNS, kenaikan pangkat dan gaji berkala serta kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akhirnya menyebabkan belanja pegawai mengalami peningkatan dari Rp. 298.098.182.133,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 348.620.480.143,- pada tahun 2020, dengan komposisi belanja pegawai terhadap belanja daerah pada tahun 2020 mencapai 40,71%. Sedangkan peningkatan belanja hibah lebih disebabkan karena pada tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak sehingga harus menganggarkan belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada, serta kebijakan pemerintah pusat memasukan belanja bantuan operasional TK/PAUD swasta kedalam DAK non fisik sehingga pemerintah daerah harus menganggarkan kembali dalam bentuk belanja hibah ke TK/PAUD swasta.

Untuk realisasi belanja modal daerah pada periode 2016-2020 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2019 yaitu dari Rp. 234.219.029.497,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 124.585.198.868,- pada tahun 2020. Peningkatan belanja modal pada tahun 2019 lebih disebabkan karena peningkatan realisasi kinerja dari belanja modal yang bersumber dari DAK. Selain karena peningkatan belanja operasional, penurunan realisasi ini mengakibatkan semakin menurunnya kontribusi/komposisi belanja modal dalam belanja daerah yaitu dari 28,76% pada tahun 2016 menjadi 14,55% pada tahun 2020. Khusus untuk tahun 2020 penurunan belanja modal daerah lebih disebabkan karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk belanja penanganan pandemi 19 melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang sebahagian besar berdampak terhadap pengurangan target pendapatan serta target belanja modal daerah. Dampak dari kebijakan diatas adalah meningkatnya belanja tidak terduga daerah yang merupakan belanja untuk penanganan bencana alam dan sosial termasuk penanganan Covid 19 dari Rp. 1.832.664.273,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 57.805.877.089,- pada tahun 2020. Untuk penanganan dan pengurangan dampak resiko bencana pandemi Covid 19 Kabupaten Solok Selatan menganggarkan sebesar Rp. 66.298.692.590,- dengan realisasi Rp. 53.218.459.877,- . dengan rincian untuk Bidang kesehatan sebesar Rp. 22.364.659.877,- dipergunakan untuk

penyiapan fasilitas kesehatan, pembelian alat kesehatan, insentif tenaga kesehatan terkait penanganan Covid 19, Bantuan Sosial sebesar Rp. 30.853.800.000,- yang dipergunakan untuk mengurangi dampak resiko penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak akibat bencana Pandemi Covid 19.

Sedangkan untuk belanja transfer keuangan yang merupakan belanja transfer keuangan pemerintah daerah ke Desa atau Nagari periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 76.499.908.113,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 93.511.697.167,-. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kebijakan pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 10% dari dana alokasi umum; dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat ke Desa atau Nagari.

Tabel 3.14.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.000)

KODE			URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Realisasi
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
5			BELANJA DAERAH											
5	1		Belanja Operasi	501.526.656	94,3	503.469.861	95,1	503.917.691	96,0	558.625.718	93,6	580.350.641	95,4	94,87
5	1	01	Belanja Pegawai	298.098.182	96,4	292.765.273	97,5	316.931.115	97,4	341.301.328	94,7	348.620.480	95,5	96,29
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.017.637	91,3	205.528.038	92,0	181.141.399	93,6	208.116.229	91,7	200.106.981	95,1	92,74
5	1	03	Belanja Hibah	7.395.837	97,2	4.995.800	94,2	5.845.176	98,7	6.246.161	96,1	31.473.430	97,7	96,79
5	1	04	Belanja Bantuan Sosial	15.000	50,0	180.750	21,6	-	-	2.962.000	94,6	149.750	21,4	46,91
5	2		Belanja Modal	234.219.029	93,0	230.734.914	92,4	196.414.121	90,3	210.375.471	69,7	124.585.199	79,7	85,01
5	2	01	Belanja Modal Tanah	3.879.752	82,8	6.081.543	69,3	4.933.039	54,3	2.253.843	34,8	1.646.375	48,6	57,97
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.069.831	92,9	32.278.558	97,7	16.923.032	92,6	30.013.601	88,7	45.530.195	119,5	98,29
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.740.592	93,9	47.738.196	96,7	35.803.303	94,6	59.276.348	53,2	54.832.639	80,2	83,72
5	2	04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.333.726	93,5	142.255.443	91,1	133.431.112	90,8	115.276.142	78,8	20.898.146	51,9	81,22
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.195.129	58,0	2.381.173	99,4	5.323.635	97,4	3.555.537	96,9	1.677.844	27,0	75,72
5	3		Belanja Tidak Terduga	2.054.361	86,2	1.740.063	77,9	793.071	92,7	1.832.664	98,1	57.805.877	84,6	87,90
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	2.054.361	86,2	1.740.063	77,9	793.071	92,7	1.832.664	98,1	57.805.877	84,6	87,90
5	4		Belanja Transfer Keuangan	76.499.908	99,1	86.972.591	99,0	87.710.505	99,5	96.603.465	99,0	93.511.697	99,8	99,29
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	347.044	40,9	584.205	54,0	859.852	64,4	1.055.974	53,1	892.650	86,2	59,73
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	76.152.864	99,7	86.388.386	99,6	86.850.653	100,0	95.547.492	100,0	92.619.047	100,0	99,86
JUMLAH BELANJA DAERAH				814.299.954	94,3	822.917.429	94,7	788.835.387	94,9	867.437.319	86,9	856.253.414	92,4	92,63

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2016-2020 (data diolah)

Tabel 3.15.
Pertumbuhan dan Komposisi Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan 2016-2020

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Realisasi	
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
5	BELANJA DAERAH												
5 1	Belanja Operasi	9,64	61,59	0,39	61,18	0,09	63,88	10,86	64,40	3,89	67,78	3,72	63,77
5 1 01	Belanja Pegawai	3,52	36,61	(1,79)	35,58	8,25	40,18	7,69	39,35	2,14	40,71	3,99	38,48
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27,46	24,07	4,85	24,98	(11,87)	22,96	14,89	23,99	(3,85)	23,37	0,52	23,87
5 1 03	Belanja Hibah	(49,53)	0,91	(32,45)	0,61	17,00	0,74	6,86	0,72	403,88	3,68	43,63	1,33
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	(98,52)	0,00	1.105,00	0,02	(100,00)	-	#DIV/0!	0,34	(94,94)	0,02	77,75	0,08
5 2	Belanja Modal	8,71	28,76	(1,49)	28,04	(14,87)	24,90	7,11	24,25	(40,78)	14,55	(14,60)	24,10
5 2 01	Belanja Modal Tanah	20,84	0,48	56,75	0,74	(18,89)	0,63	(54,31)	0,26	(26,95)	0,19	(19,29)	0,46
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(43,63)	2,96	34,10	3,92	(47,57)	2,15	77,35	3,46	51,70	5,32	17,28	3,56
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(1,73)	4,63	26,49	5,80	(25,00)	4,54	65,56	6,83	(7,50)	6,40	9,79	5,64
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28,15	20,55	(14,99)	17,29	(6,20)	16,91	(13,61)	13,29	(81,87)	2,44	(40,55)	14,10
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113,42	0,15	99,24	0,29	123,57	0,67	(33,21)	0,41	(52,81)	0,20	8,85	0,34
5 3	Belanja Tidak Terduga	109,88	0,25	(15,30)	0,21	(54,42)	0,10	131,08	0,21	3.054,20	6,75	130,32	1,51
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	109,88	0,25	(15,30)	0,21	(54,42)	0,10	131,08	0,21	3.054,20	6,75	130,32	1,51
5 4	Belanja Transfer Keuangan	158,95	9,39	13,69	10,57	0,85	11,12	10,14	11,14	(3,20)	10,92	5,15	10,63
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	(42,73)	0,04	68,34	0,07	47,18	0,11	22,81	0,12	(15,47)	0,10	26,64	0,09
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	163,18	9,35	13,44	10,50	0,54	11,01	10,01	11,01	(3,06)	10,82	5,02	10,54
JUMLAH BELANJA DAERAH		15,77	100,00	1,06	100,00	(4,14)	100,00	9,96	100,00	(1,29)	100,00	1,26	100,00

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2016-2020 (data diolah)

3.2.2. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Dalam memproyeksi perencanaan belanja daerah hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah memproyeksikan kemampuan keuangan daerah baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah. Dalam memproyeksikan hal tersebut harus dilakukan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang didasari perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pencapaian pendapatan tahun berjalan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah mempunyai dasar hukum penerimaannya serta kondisi perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah

Berdasarkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016-2020, Target APBD Tahun 2021 maka pada tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut:

I. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 7.669.568.205,- dari APBD 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 10,19% sehingga menjadi Rp. 82.890.175.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami kenaikan dari target awal APBD tahun 2021 sebesar Rp. 1.179.275.000,-, sehingga menjadi Rp. 11.659.775.000,- atau mengalami penurunan sebesar 11,25%.
- b) Pendapatan Retribusi Daerah diperkirakan mengalami penurunan dari target awal APBD tahun 2021 sebesar Rp. 998.500.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.564.500.000,- atau mengalami penurunan sebesar 63,76%.
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diperkirakan mengalami penurunan dari target awal APBD tahun 2021 sebesar Rp. 900.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.100.000.000,- atau mengalami penurunan 75,00%.
- d) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diperkirakan mengalami peningkatan dari target Awal APBD tahun 2021 sebesar Rp. 4.591.793.205,- sehingga menjadi Rp. 66.565.900.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 7,4%.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Perimbangan diperkirakan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 139.350.563.277,- (19,19%), sehingga menjadi Rp. 586.806.639.523,-, hal ini lebih disebabkan belum dianggarkannya Pendapata Dana transfer yang bersumber dari Dana alokasi Khusus Daerah dan Dana Intesif Daerah yang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

bahwa penganggaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Intensif Daerah harus menunggu Informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta petunjuk teknis penggunaannya.

dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan mengalami peningkatan dari target Awal APBD tahun 2021 sebesar Rp. 142.919.746.497,- sehingga menjadi Rp. 540.470.127.503,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 20,51%. Proyeksi dana transfer dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

- ❖ Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperkirakan mengalami peningkatan dari target awal APBD tahun 2021 sebesar Rp. 2.346.055.433,-, sehingga menjadi Rp. 27.593.720.433,- atau mengalami peningkatan sebesar 9,29%.
- ❖ Pendapatan Dana Alokasi Umum Daerah diperkirakan mengalami peningkatan dari target pada APBD Awal tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 13.549.166.070,-, sehingga menjadi Rp. 465.188.035.070,- atau mengalami peningkatan sebesar 3,00%.
- ❖ Pendapatan Dana Alokasi Khusus Daerah belum dianggarkan
- ❖ Pendapatan Dana Intensif Daerah belum dianggarkan.
- ❖ Pendapatan Dana Desa Daerah diperkirakan tidak mengalami peningkatan atau sama dengan target pada APBD Awal tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 47.688.372.000,-.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- ❖ Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya diperkirakan mengalami peningkatan dari target pada APBD Awal tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.569.183.220,-, sehingga menjadi Rp. 46.336.512.020,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,35%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (4,41%), sehingga menjadi Rp. 21.693.180.268,-, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan Hibah Daerah diperkirakan mengalami penurunan dari target pada APBD Awal tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 0,-.

- b) Pendapatan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan diperkirakan tidak mengalami peningkatan dari target pada APBD Awal tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 21.693.180.268.

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah diatas maka kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan pada tahun 2022 adalah:

1. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
4. Mengoptimalkan penggunaan aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
5. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan.
6. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
7. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah.

II. Pembiayaan Daerah

Dengan mempertimbangkan dari realisasi pembiayaan 2016-2020 dan kondisi daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 maka pada tahun 2022 diperkirakan surplus dari pembiayaan daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp. - 5.321.685.999,- sehingga menjadi Rp. 34.747.204.481,-. Surplus penerimaan pembiayaan diperkirakan hanya berasal dari perkiraan SILPA Tahun sebelumnya, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2022 tidak dianggarkan.

III. Belanja Daerah

Dengan mempertimbangkan dari Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020, target dan perkiraan realisasi Belanja 2021 serta proyeksi pendapatan dan surplus pembiayaan

sampai tahun 2022 maka pada tahun 2022 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 726.137.199.272,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 138.002.681.071,- atau mengalami penurunan sebesar 15% dari target APBD Awal Tahun 2021.

Berdasarkan hal diatas secara umum kebijakan belanja daerah periode tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja wajib mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Gaji dan tunjangan) dan operasional pelayanan dasar pemerintahan (belanja operasional kantor / *Fixed Cost*), serta pemenuhan mandatory spending atau alokasi belanja yang diatur oleh Undang-undang seperti pendidikan (20% dari APBD), kesehatan (10% dari APBD setelah dikurangi gaji), Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah (25% dari APBD) dan Alokasi Dana Desa (10% Dana Perimbangan dikurangi DAK serta 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Pemberian belanja hibah ditujukan penyelenggaraan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan masyarakat dan keagamaan, sedangkan untuk bansos ditujukan untuk mendanai program atau kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan beasiswa yang mekanismenya penganggaran dan pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bansos.
3. Pemenuhan kewajiban penyaluran keuangan Nagari oleh pemerintah daerah untuk Dana Desa yang berasal dari APBN.
4. Pemenuhan bantuan keuangan kepada partai politik di daerah sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan.
6. Mengoptimalkan dan mengefisiensikan penggunaan belanja daerah yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan umum pemerintahan terutama belanja operasional daerah yang menjadi kewenangan daerah dengan tetap mempertimbangkan optimalisasi pelayanan dari perangkat daerah.
7. Untuk belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah dan Dana Insentif Daerah atau belanja yang belum dianggarkan akibat kenaikan dari realisasi pendapatan daerah maka pengalokasiannya besaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada

pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut diarahkan pada:

- ❖ Bidang pendidikan, yaitu:
 - a) Perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah (ruang kelas, ruang guru, rumah dinas, ruang laboratorium, uks dan sarana sanitasi sekolah)
 - b) Pengadaan sarana belajar dan mengajar (peralatan teknologi informasi dan komunikasi, media pendidikan)
 - c) Pemberian tunjangan guru (sertifikasi dan tunjangan guru terpencil)
- ❖ Bidang Kesehatan, yaitu:
 - a) Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rumah sakit
 - b) Peningkatan penyediaan obat-obatan
 - c) Penguatan dan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB
- ❖ Bidang Pekerjaan Umum
 - a) Peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana air minum masyarakat
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi masyarakat.
 - d) Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan
- ❖ Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan (hunian layak) bagi masyarakat

8. Memprioritaskan anggaran program dan kegiatan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026, serta penerapan anggaran berbasis program dan kegiatan (*money follow program*) dengan prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*e-governance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal di atas maka proyeksi target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.16.

Proyeksi dan Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2023.

KODE	URAIAN	2021		2022	
		Awal	%	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	824.070.989.863	100,00	691.389.994.791	100,00
4	1 Pendapatan Asli Daerah	75.220.606.795	9,13	82.890.175.000	11,99
4	1 01 Pajak Daerah	10.480.500.000	1,27	11.659.775.000	1,69
4	1 02 Restribusi Daerah	1.566.000.000	0,19	2.564.500.000	0,37
4	1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.200.000.000	0,15	2.100.000.000	0,30

KODE			URAIAN	2021		2022	
				Awal	%	Rp	%
4	1	04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	61.974.106.795	7,52	66.565.900.000	9,63
4	2		Pendapatan Transfer	726.157.202.800	88,12	586.806.639.523	84,87
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.389.874.000	82,93	540.470.127.503	78,17
			Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.247.665.000	3,06	27.593.720.433	3,99
			Dana Alokasi Umum	451.638.869.000	54,81	465.188.035.070	67,28
			Dana Alokasi Khusus	150.247.034.000	18,23	-	-
			Dana Insentif Daerah	8.567.934.000	1,04	-	-
			Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
			Dana Desa	47.688.372.000	5,79	47.688.372.000	6,90
4	2	02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	42.767.328.800	5,19	46.336.512.020	6,70
			Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	42.767.328.800	5,19	46.336.512.020	6,70
			Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	22.693.180.268	2,75	21.693.180.268	3,14
4	3	01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	0,12	-	-
4	3	02	Dana Darurat	-	-	-	-
4	3	03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	21.693.180.268	2,63	21.693.180.268	3,14
5			BELANJA DAERAH	864.139.880.343	100,00	726.137.199.272	100,00
5	1		Belanja Operasi	622.356.517.112	72,02	530.924.621.120	73,12
5	2		Belanja Modal	143.201.687.831	16,57	94.893.722.148	13,07
5	3		Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0,23	1.737.180.604	0,24
5	5		Belanja Transfer	96.581.675.400	11,18	98.581.675.400	13,58
SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN				(40.068.890.480)		(34.747.204.481)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH (Surplus/Defisit)	40.068.890.480	100,00	34.747.204.481	100,00
6	1		Penerimaan Pembiayaan	40.068.890.480	100,00	34.747.204.481	100,00
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.068.890.480	100,00	34.747.204.481	100,00
6	1	02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)				-	-	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dilakukan karena penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 berbarengan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan kemungkinan RKPD ditetapkan lebih dulu daripada RPJMD. Selain itu penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2020 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2021 terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Solok Selatan, sedangkan untuk masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

4.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah:

**“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang

Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk menyelaraskan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden maka dalam penyusunan perencanaan Tahun 2022, Presiden mengeluarkan 5 (lima) arahan utama yang akan menjadi dasar utama bagi daerah dalam penyusunan RKP dan RKPD Tahun 2022 yang terdiri atas:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arahan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan dalam RKP Nasional menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri atas:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Agenda ini menitik beratkan pada peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Untuk mewujudkan agenda hal tersebut direncanakan melalui beberapa program prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat diarahkan melalui program prioritas sebagai berikut:
- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah.
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
- Agenda ini menitik beratkan pada pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah ,dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya

manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Peningkatan sumberdaya ini diarahkan melalui program prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - f. Pengentasan kemiskinan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - b. Memajukan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
 - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis tik;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Melalui pelaksanaan arahan presiden dan juga pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, dampak terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal Triwulan I Tahun 2020 yang menyebabkan kontraksinya perekonomian dunia nasional pada tahun 2020, adanya prediksi

masih melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sedang dalam tahapan pemulihan maka tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk pematapan pemulihan ekonomi.

Selain itu, tahun 2022 juga merupakan tahun kunci untuk dilakukannya transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang untuk memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia Maju yang salah satunya ditandai dengan keluarnya Indonesia dari *middle income trap* sebelum tahun 2045. Transformasi ekonomi ditandai dengan mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sector dengan cara bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tinggi bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”, dengan arah kebijakan makro pada :

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah

Beberapa asumsi optimis yang dibangun dalam perencanaan dan penetapan target RKP tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022, didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin telah meluas.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Sektor jasa yang akan terkena dampak besar akibat pandemic Covid 19 akan mengalami akselerasi.
3. Stabilitas makro ekonomi terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang terjaga dan defisit transaksi berjalan yang aman.
4. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilaukan dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran masih sebesar 4,8 – 5,5, PDB.

Berdasarkan hal diatas maka sasaran pembangunan pada RKP tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,2%
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
6. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 – 105
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1%

4.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan 2016-2020 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan
		Meningkatnya Produktifitas Peternakan
		Meningkatnya Produktifitas Perikanan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan
		Meningkatnya Pelaku UMKM Yang Sejahtera
		Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	Sumatera Barat sebagai Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing
		Sumatera Barat sebagai Pusat Ekonomi Kreatif
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kinerja birokrasi

MISI	TUJUAN	SASARAN
Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan Kesejahteraan Petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatkan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan

bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Rancangan RPJMD tersebut, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR STRATEGIS DAERAH”

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Beberapa pertimbangan yang mendasari antara lain yakni :

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020)
2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri ada PDRB Sumatera Barat sebesar 24,5% namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor perdagangan dan sebesar -0,54% untuk sektor industri. (BPS, Tahun 2020)
3. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestic, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak akan bisa diprediksi akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka untuk tahun 2022 prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Tabel 4.2.
Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,60
Tingkat Kemiskinan (%)	6,28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74
Indeks Gini (ratio)	0,298

Sumber Data : RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sama seperti Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan tahun pertama penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2024. Sesuai dengan edaran mendagri nomor

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020, menyatakan Dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

1. **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.
2. **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indek pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat

Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima)) Misi yang merupakan fokus dan arah pembangunan yang kemudian dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 diturunkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk periode 2021-2026 yang terdiri atas:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif**

Misi ini menitik beratkan kepada penciptaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berdaya saing dengan perhatian utama

peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing

2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah

Misi ini menitikberatkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian dalam menunjang sektor pariwisata.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani

Misi ini bertujuan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan dan pemertaan ketersediaan infrastruktur daerah dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana).

5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini menitikberatkan pada beberapa hal yaitu:

- ❖ Pelestarian seni dan budaya daerah terutama dalam mendukung prioritas pariwisata daerah. Untuk itu kawasan cagar budaya, koleksi-koleksi budaya dan kepurbakalaan yang amat berharga, serta kesenian terus dilestarikan dengan tujuan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu kebudayaan tidak hanya dipandang statis namun terus berkembang melalui kreativitas masyarakatnya.
- ❖ Membudayakan olahraga bagi masyarakat. Selain untuk peningkatan prestasi olahraga titik berat dari misi ini adalah membudayakan olahraga dalam masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa olah raga hanya ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi tujuan utamanya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat

- ❖ Penanganan permasalahan sosial menitik beratkan pada penanganan masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Penanganan permasalahan sosial tidak lagi hanya dipandang hanya memberikan bantuan sosial saja, akan tetapi lebih memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan setara dengan masyarakat lainnya.
- ❖ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Menitik beratkan pada peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya dianggap objek dari pembangunan saja tetapi juga dijadikan subjek dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah hanya bertumpu dengan mengandalkan pembangunan yang berasal dari APBD saja. Pemamfaatan potensi ini dioptimalkan selain melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten dan nagari juga memanfaatkan ketelibatan masyarakat, perantau serta dunia usaha.

Tabel 4.3.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022
Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif			
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,83
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,48
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,08
	Persentase Penduduk Usia Sekolah Hafiz Qur'an (1 Juz)	Persen	4%
Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,21
Sasaran 3 : Meningkatkan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,38
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tahun	70
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah			
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Indeks	5,00

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022
Sasaran 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,79
Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,20
	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,295
Sasaran 3 : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (BRIN)	Indeks	1,3000
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani			
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65
Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Indeks	68
	Opini BPK	Opini	WTP
	indeks profesionalitas ASN	Indeks	60
	Indeks Kelembagaan	Indeks	56
Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indek Pelayanan Publik	Indeks	68
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	63
Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian dan kawasan pertumbuhan	Rata-rata Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Indeks	32,25
Sasaran 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat	Akses air minum layak	Persen	80,05
	Akses sanitasi Layak	Persen	62,00
	Persentase Kawasan Pemukiman yang dikelola	Persen	70
Tujuan 2 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,03
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,34
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,03
Sasaran 2 : Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,34
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			
Tujuan 1 : Terwujudnya Pengelolaan Seni dan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56,00
Sasaran 1 : Meningkatkan peran seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	133
	Peningkatan lembaga seni dan budaya yang aktif	Persen	10
Tujuan 2 : Terwujudnya pengelolaan Olahraga yang profesional	Peringkat POPROV	Peringkat	10
Sasaran 1 : Meningkatkan prestasi Olah Raga	Jumlah atlet olahraga yang berprestasi	Orang	15
Tujuan 3 : Menurunnya Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial	Penurunan permasalahan sosial masyarakat	Persen	5

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022
Sasaran 1 : Penurunan masyarakat yang mengalami masalah sosial	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Rasio	17,45
	Cakupan Pelayanan PMKS	Persen	73
Sasaran 2 : Penyetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,59
Tujuan 4 : Meningkatnya peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun Persentase	Indeks	0,7782
	Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	85
Sasaran 1 . Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7782
Sasaran 2 . Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan	Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	85

4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Rancangan Awal RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi dunia, nasional, provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok Selatan sampai awal tahun 2021, serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan pencapaian kinerja daerah tahun 2020 dan perkiraan pencapaian target tahun 2021 maka tema pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah: **“Pemulihan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Berdasarkan tema diatas maka fokus pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 diarahkann kepada 3 Fokus utama yaitu: 1) Pemulihan ekonomi; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3). Reformasi birokrasi, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut

1. Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terkait dengan 1). pertumbuhan ekonomi, 2). penurunan kemiskinan, 3). penurunan pengangguran dan 4) peningkatan produktifitas tenaga kerja

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan investasi daerah
- b) Meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing produk unggulan yang berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan budidaya perikanan

- c) Pengembangan sektor Industri dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan
 - d) Pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana dengan sasaran terkait dengan 1). peningkatan aksesibilitas, 2). Infrastruktur kewilayahan dan dasar masyarakat, 3). peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah
 - b) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kewilayahan
 - c) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran terkait dengan pendidikan, kesehatan

Arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan akses masyarakat ke sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat
 - b) Peningkatan layanan termasuk kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
 - c) Penyediaan dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan kesehatan yang berkualitas
 - d) Mengembangkan Rumah Tahfiz berbasis jorong
 - e) Membudayakan olah raga dan pola hidup sehat di masyarakat
4. Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani dengan sasaran terkait dengan perbaikan dan peningkatan birokrasi pemerintahan

Arah kebijakan pelayanan birokrasi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- b) Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- c) Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- d) Mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.
Keterkaitan Prioritas Kabupaten Solok Selatan dengan
Prioritas Nasional

No	Prioritas Daerah	No	Prioritas Nasional
1.	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat (terkait dengan prioirtas Nasional 1, 2)	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana (terkait dengan prioritas Nasional 5, 6)	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (terkait dengan prioritas Nasional 3 dan 4))	3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani (terkait dengan prioritas Nasional 7)	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
		7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Tabel 4.5.
Keterkaitan Prioritas Kabupaten Solok Selatan dengan
Prioritas Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Daerah	No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat
1.	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat (terkait dengan prioirtas Provinsi 3,4 dan 5)	1	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing.
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana (terkait dengan prioritas Provinsi 6)	2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (terkait dengan prioritas Provinsi 1 dan 2)	3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4.	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani (terkait dengan prioritas Provinsi 7)	4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
		5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya

No	Prioritas Daerah	No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat
		6	saing kepariwisataan
		7	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
			Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas

4.5. Inovasi yang direncanakan dilaksanakan atau dilanjutkan pada Tahun 2022

Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah , pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah , dimana bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil iptek dan temuan baru dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dapat juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi dijelaskan inovasi daerah dapat meningkatkan kinerja OPD, meningkatkan daya saing dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.bentuk-bentuk inovasi daerah Inovasi tata kelolah pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria inovasi daerah antara lain:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi artinya bahwa rancangan dalam inovasi daerah tersebut seluruhnya atau sebahagian berbeda dengan rancangan yang telah ada sebelumnya.
2. Memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat.yang mengakibatkan menambah pendapatan daerah , menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan mutu pelayanan publik atau ditunjuk bukan kepentingan pribadi /kelompok.
3. Tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dapat direplikasikan oleh daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi

sosiologis dan kebudayaan serta potensi daerah yang akan mereplikasikan inovasi daerah.

Untuk tahun 2022 dalam mendukung visi misi yang telah dijabarkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Selatan akan merencanakan suatu inovasi supaya program pimpinan ini tercapai pada sasaran antara lain:

1. Penciptaan Geerasi Muda yang berkarakter melalui Program Satu Rumah Tahfidz Satu Jorong.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya masyarakat serta penciptaan generasi muda yang berkarakter dan berlandaskan keagamaan, melalui Visi dan Misi Bupati yaitu Satu Rumah Tahfidz Satu Jorong. Program ini diwujudkan dengan memperluas cakupan atau mengupgrade pengajaran TPA dan MDA di Kabupaten Solok Selatan dengan menambahkan Program Tahfizh dalam kurikulumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah bekerjasama dengan Kementerian Agama memberikan pembinaan serta peningkatan kapasitas dari Guru TPA dan MDA untuk dapat menunjang program tersebut. Selain itu memberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan memberikan reward berupa pemberian insentif kepada tenaga pendidik yang mensukseskan program tersebut.

2. Peningkatan, perluasan serta pemerataan kesempatan penduduk usia sekolah dalam memperoleh pendidikan (Bantuan seragam sekolah gratis dan Beasiswa)

Dilihat Angka partisipasi penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 masih relative rendah yaitu untuk PAUD: APK 54,88%; Untuk SD/MI : APK 115,50% dan APM 90,33%; SMP/Mts: APK 90,33% dan APM 76,90%; SMA/MA: APK 79,71% dan APM 64,30%. Rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah ini lebih disebabkan rendahnya aksesibilitas ke sekolah. Jika ditinjau dari rasio sekolah per jumlah murid, jumlah sekolah sudah mencukupi atau sudah lebih rendah dari standar pendidikan yang ditetapkan namun karena kondisi geografis daerah serta penyebaran penduduk yang tidak merata yang ditambah dengan keterbatasan keterjangkauan sarana perhubungan menyebabkan relatife besarnya beban yang dikeluarkan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya selain untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah lainnya. Untuk megurangi beban tersebut, sesuai dengan visi dan misi Buapti dan Bupati terpilih pemerintah berkomitmen untuk

memberikan bantuan seragam sekolah kepada siswa serta memberikan beasiswa pada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu serta memberikan beasiswa kepada peserta didik yang kurang mampu tetapi berprestasi hingga perguruan tinggi.

3. Peningkatan Ekonomi Petani dan Peternak melalui Program Satu Sapi Satu KK.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian serta merupakan mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Solok Selatan (48,30% penduduk penduduk usia kerja). Namun sebahagian besar pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Solok Selatan masih secara tradisional, tidak optimal dan hanya menghasilkan satu produk, sehingga jika terjadi gejolak harga maka berdampak langsung terhadap pendapatan petani. Hal ini menyebabkan sektor petanian menjadi salah satu penyumbang dari peningkatan kemiskinan. Program satu sapi satu keluarga bertujuan agar petani dapat mengkombinasikan sektor pertanian dengan peternakan sehingga petani dapat mengoptimalkan jam kerja dari petani. Dalam jangka menengah dan panjang diharapkan melalui kombinasi pertanian dan peternakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menjadikan Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu sentra daging di Sumatera Barat dan Indonesia.

4. Mengoptimalkan penggunaan belanja daerah melalui pemamfaatan dan penggunaan produksi dalam daerah

Inovasi ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja belanja daerah dalam peningkatan perekonomian daerah. Belanja APBD dioptimalkan untuk dibelanjakan dengan mengutamakan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha dan industri dalam daerah. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memberi stimulus kebijakan dan perlindungan pada pelaku usaha perdagangan, industri dan UMKM di daerah agar dapat berkembang serta dapat meningkatkan perputaran uang APBD di dalam daerah.

5. Mengoptimalkan penggunaan CSR dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Inovasi ini bertujuan agar penggunaan dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility – CSR) lebih terorganisir sehingga menghasilkan hasil yang optimal dan lebih tepat sasaran serta sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjalin komitmen dengan perusahaan melalui pemberian arah dan tawaran program dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan melalui dana CSR nya. Program dan kegiatan yang ditawarkan antara lain:

- Peningkatan pendidikan masyarakat melalui beasiswa, bantuan seragam dan pembinaan rumah tahfiz.
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat.
 - Peningkatan kapasitas SDM masyarakat terutama dalam penciptaan peluang usaha dan entrepreneur.
 - Bantuan peningkatan ekonomi masyarakat.
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - Penyediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
6. Mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah dalam pelaksanaan pembangunan (pemberdayaan alat berat per Kecamatan).

Inovasi ini bertujuan untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan belanja daerah dalam pelaksanaan pekerjaan fisik melalui pemberdayaan alat berat (excavator) milik pemerintah daerah. Alat berat ini direncanakan pengadaannya secara bertahap ada pada setiap kecamatan dengan fungsi utama membuka lahan tidur, jalan-jalan lingkungan yang ada di nagari, jalan usaha tani/perkebunan, normalisasi sungai dan lainnya yang penggunaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dilihat dari kondisi geografis yang berbukit-bukit dan dilalui oleh banyak aliran sungai besar dan kecil menyebabkan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana terutama banjir dan longsor. Dengan adanya alat berat perkecamatan ini diharapkan dapat

mempercepat mobilisasi serta mempercepat proses penanganan bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana tersebut.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berpijak kepada Visi dan Misi Daerah, Prioritas serta Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 yang terdapat pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan capaian kinerja RPJMD sampai tahun 2020 serta serta perkiraan perkembangan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan per OPD penanggungjawab. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			153.488.234.158			153.598.234.158	
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya operasional pelayanan kantor	100%	124.395.249.140			124.395.249.140	
1	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	123.470.529.140			123.470.529.140	
1	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	122.720.529.140	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	122.720.529.140	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	12 Bulan 49 Orang	750.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	750.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	452.720.000			452.720.000	
1	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	1 Tahun	7.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	7.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan sarana dan perlengkapan kantor	1 Tahun	202.720.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	202.720.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	7.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang Cetakan	1 Tahun	35.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	35.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam dan keluar daerah Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Dinas	1 Tahun 1 Tahun	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	200.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	250.000.000			250.000.000	
1	01	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	4 unit	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya sarana dan perlengkapan kantor	1 Paket	150.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	150.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penunjang administrasi kantor yang tersedia	100%	82.000.000			82.000.000	
1	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya persentase Jasa Surat Menyurat selama 1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	1 Tahun	70.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	70.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Paket	10.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	10.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	140.000.000			140.000.000	
1	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Paket	40.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	40.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,48	29.092.985.018			29.202.985.018	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Angka Harapan Lama Sekolah	13,08						
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI APM SD/MI	100 99,5	20.110.147.030			20.110.147.030	
1	01	002	2.01	006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pagar, Halaman dan Areal Parkir Sekolah Pagar dan Gapura SDN 02 Sikumbang Pagar SDN 03 Sigintir Pagar SDN 03 Sungai Kalu Pagar SDN 08 Koto Ranah Pagar SDN 12 Pincuran Tujuh Pagar SDN 17 Pinti Kayu Ketek Pagar SDN 20 Sungai Rambutan Pagar SDN 22 Batang Pasampan Pagar SDN 6 Pakan Selasa	10 Sekolah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.350.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1.350.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.01	014	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mobiler di Sekolah	5 Sekolah	125.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	125.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.01	021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah masyarakat kurang mampu dan berprestasi yang diberi beasiswa Jumlah Siswa Baru yang Mendapat Seragam Seragham PBB Kreatif	400 Org 3638 Orang 1 Paket	1.320.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1.320.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kec. KPGD Kec. Pauh Duo Kec. Sangir Kec. Sangir Balai Janggo Kec.Sangir Jujuan Kec. Sungai Pagu Kecv. Sangir Batang Hari	23 SD 16 SD 32 SD 9 SD 13 SD 28 SD 22 SD	16.125.147.030	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	16.125.147.030	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.01	024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Serta Verifikasi dan Validasi Dokumen KTSP SD oleh TPK Kabupaten Terlaksananya Monitoring Pembelajaran, Sosialisasi Asesmen, Kompetensi Minimum dan Survey Karakter Tingkat SD	148 Sekolah 148 Sekolah	155.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	155.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.01	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kompetensi Sains Nasional, FL2SN dan Pelatihan Karakter peserta didik tingkat SD	3 Kegiatan	75.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	75.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.01	027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengawas SD yang Dibutuhkan Jumlah Tim Asesor Penilai Angka Kredit SD yang Bersertifikat Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru SD Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Peningkatan Kompetensi Guru Persentase Kepala Sekolah SD yang Memiliki NUKS Rekrutmen Pengawas Terciptanya Guru Berprestasi Jenjang SD	10 Orang 15 Orang 20 Orang 100 Orang 300 Orang 20 Orang 14 Orang 35 Orang	700.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	700.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
						Terciptanya Pembinaan Karakter Guru jenjang SD	40 Orang					
						Terlaksananya Pelatihan Guru SD tentang kegiatan Keagamaan (Tahfiz,Azan dan Penyelenggaraan Mayat)	50 Sekolah					
						Terlaksananya Pelatihan Penggunaan TIK Dalam Proses Pembelajaran jenjang SD	50 Orang					
						Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen KTSP jenjang SD	50 Orang					
						Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian/Asesmen SD	50 Orang					
						Terlaksananya Pemantauan/Monitoring Proses Pembelajaran pada Jenjang SD	148 Sekolah					
						Terlaksananya Pembinaan KKG	10 Kelompok					
						Terlaksananya Penilaian jabatan Fungsional Guru SD	280 Orang					
						Terlaksananya Penilaian Kinerja dan Induksi Guru SD	40 Orang					
						Terlaksananya Sertifikasi Guru SD	70 Orang					
1	01	002	2.01	028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Fasilitasi Sekolah Penggerak SD (Sosialisasi bagi Sekolah)	1 Kegiatan	260.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	260.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
						Meningkatnya Kualitas Aplikasi SIMANTAP	1 Tahun					
						Pembinaan UKS SD	7 Sekolah					
						Persentase Aset Sekolah yang Terinventarisir	1 Kegiatan					
						Terciptanya sekolah yang disiplin dan sehat tingkat SD	7 Sekolah					
						Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program BOS SD	148 Sekolah					
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan SD	142 Sekolah					
						Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Sekolah SD	20 Sekolah					
						Tersedianya Operator Sekolah dalam Pengelolaan Program Dapodikdas SD	148 Orang					
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	100	8.418.033.238			8.528.033.238	
						APM SMP/MTs	77,25					
1	01	002	2.02	012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pagar, Halaman dan Areal Parkir Sekolah	2 Sekolah	400.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	400.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
						Pagar SMPN 32 Solok selatan	1 Paket					
						Pagar SMPN 4 Solok Selatan	1 Paket					
1	01	002	2.02	032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah masyarakat kurang mampu dan berprestasi yang diberi beasiswa	533 Orang	1.800.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1.800.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
						Jumlah Siswa Baru yang Mendapat Seragam	3257 Orang					
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama	36 Sekolah	5.568.033.238	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	5.568.033.238	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	01	002	2.02	040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tim Asesor Penilai Angka Kredit SMP yang Bersertifikat Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru SMP Peningkatan Administrasi Pembelajaran Guru SMP Persentase Kepala Sekolah SMP yang Memiliki NUKS Rekrutmen Pengawas SMP Terciptanya Guru Berprestasi Jenjang SMP Terciptanya Pembinaan Karakter Guru jenjang SMP Terlaksananya Pelatihan Penggunaan TIK dalam Proses Pembelajaran jenjang SMP Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen KTSP Jenjang SMP Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian jenjang SMP Terlaksananya Pelatihan tentang kegiatan Keagamaan (Tahfiz, Azan dan Penyelenggaraan Mayat) Terlaksananya Pemantauan/Monitoring Proses Pembelajaran pada Jenjang SMP Terlaksananya Penilaian jabatan Fungsional Guru SMP Terlaksananya Penilaian Kinerja dan Induksi Guru SMP Terlaksananya Sertifikasi Guru SMP	5 Orang 10 Orang 39 Sekolah 10 Orang 10 Orang 25 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 39 Sekolah 39 Sekolah 100 Orang 20 Orang 60 Orang	450.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	450.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.02	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan UKS SMP Terciptanya sekolah yang disiplin dan sehat tingkat SMP Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program BOS SMP Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan SMP Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Sekolah Terlaksananya Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksananya Pendidikan Inklusi SMP Tersedianya Operator Sekolah dalam Pengelolaan Program Dapodikdas SMP Tersusunnya Profil Pendidikan tingkat SMP Kabupaten Solok Selatan	15 Sekolah 7 Sekolah 39 Sekolah 36 Sekolah 16 Sekolah 1 Kegiatan 7 Sekolah 39 Sekolah 1 Dokumen	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	200.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	59,68	464.804.750			464.804.750	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	01	002	2.03	002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Sangir Balai Janggo Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Sangir Blai Janggo	1 Sekolah 1 Paket	80.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	80.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.03	013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Fasilitasi Pembinaan Akreditasi PAUD Terlaksananya Kegiatan IGTK Terlaksananya Lomba Kreatifitas Siswa dan Tenaga Pendidik PAUD Tersedianya Operasional Forum PAUD Tersedianya Operasional Kegiatan HIMPAUDI Terselenggaranya Gebyar PAUD	120 Lembaga 1 Tahun 80 Orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan	184.804.750	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	184.804.750	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.03	016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pengawas TK yang di Butuhkan Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (PPG) Persentase Kepala Sekolah TK yang Memiliki NUKS (Diklat CKS) Terciptanya Guru Berprestasi Jenjang PAUD Terlaksananya kompetensi guru PAUD Terlaksananya Monitoring dan Verifikasi Guru Profesional PAUD Terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik/ Guru (TK,KB dan SPS) Terlaksananya pelatihan pengembangan materi belajar mengajar bagi tenaga pendidik PAUD Terlaksananya pelatihan pengembangan materi belajar mengajKelompok Bermain (KB) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen KTSP jenjang KB dan SPS Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen KTSP jenjang Kelompok Bermain (KB) dan SPS Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen KTSP jenjang Taman Kanak Kanak (TK) Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajar bagi tenaga pendidik/Guru Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajardan Model Model Pembelajaran bagi tenaga pendidik/Guru Taman Kanak Kanak (TK)	5 Orang 10 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 4 Triwulan 180 Orang 94 Orang 86 Orang 86 Orang 86 Lembaga 94 Lembaga 86 Orang 94 Orang	150.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	150.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
					Terlaksananya Penilaian jabatan Fungsional Guru PAUD Terlaksananya Sertifikasi Guru PAUD Terlaksananya Verfikasi dan Validasi Dokumen KTSP Jenjang Kelompok Bermain (KB) Terlaksananya Verfikasi dan Validasi Dokumen KTSP Jenjang Taman Kanak Kanak	20 Orang 20 Orang 86 Lembaga 94 Lembaga							
1	01	002	2.03	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya PAUD HI	160 Lembaga	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	50.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
1	01	002	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,48	100.000.000			100.000.000		
1	01	002	2.04	001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Praktek Sangir	1 Ruang		0	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	002	2.04	012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Belanja Hibah PKBM Faslitasi Pembinaan Akreditasi Pendidikan Kesetaraan Pelatihan dan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik/ Tutor Kesetaraan Pelatihan Penyusunan Dokumen KTSP jenjang Pendidikan Kesetaraan Pelatihan Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian/Asesmen Pendidikan Kesetaraan Paket A Pelatihan Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian/Asesmen Pendidikan Kesetaraan Paket B Pelatihan Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian/Asesmen Pendidikan Kesetaraan Paket C Pengembangan materi belajar mengajardan Model Model Pembelajaran bagi tenaga pendidik/tutor Kesetaraan Pengenmbangan Pendidikan Kecakapan Hidup Penyelenggaraan kegiatan paket A Penyelenggaraan kegiatan paket B Penyelenggaraan kegiatan paket C Penyelenggaraan Rumah Pintar Tersedianya Biaya Operasional UPT SKB Validasi Insetif Guru /Tutor Pendidikan Kesetaraan Validasi pelaksanaan BOP Non Formal Kesetaraan Verfikasi dan Validasi Dokumen KTSP Jenjang Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun 11 Lembaga 15 Lembaga 60 Orang 15 Lembaga 20 Orang 24 Orang 30 Orang 100 Orang 1 Tahun 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Tahun 1 UPT 50 Orang 15 Lembaga 15 Lembaga	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		6.278.851.810			6.278.851.810		
2	19	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	405.195.250			405.195.250	
2	19	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase SDM yang mendapatkan pelatihan	100%	405.195.250			405.195.250	
2	19	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Baju Devile (Kontingen) untuk Porprov	1 Kegiatan	405.195.250	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	405.195.250	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	19	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Berprestasi	100 Orang	1.055.000.000			1.055.000.000	
2	19	002	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Berprestasi	100 Orang	1.055.000.000			1.055.000.000	
2	19	002	2.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Pemula	47 Orang	300.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	300.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
						Pelaksanaan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	47 Orang					
						Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pelajar dan Pemuda Tk. Kabupaten	47 Orang					
						Penyelenggaraan Pelatihan Karang Taruna Nagari	47 Orang					
						Penyelenggaraan Pelatihan Pemuda Pelopor Kabupaten	47 Orang					
2	19	002	2.01	007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Tersedianya Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berprestasi	100 Orang	355.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	355.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	19	002	2.01	009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Paskibra yang dilatih	67 orang	400.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	400.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peringkat Porprov	10 besar	4.518.656.560			4.518.656.560	
2	19	003	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga	1 GOR	2.200.000.000			2.200.000.000	
2	19	003	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	1 Gor	2.200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.200.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
						Terlaksananya Pemeliharaan secara Berkala GOR Rimbo Tengah	1 Tahun					
2	19	003	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kompetisi Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten	2 Event	925.000.000			925.000.000	
2	19	003	2.02	001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan O2SN SD dan SMP, GSI tingkat SMP dan Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten di Tingkat Provinsi	3 Kegiatan	405.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	405.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang Dimasyarakat bola kaki Bupati Cup	1 Kegiatan						
					Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang Dimasyarakat bola voli Bupati Cup	1 Kegiatan						
					Terlaksananya pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	6 Cabor						
2	19	003	2.02	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Budaya Olahraga Kesehatan Jasmani dan Rohani Masyarakat (Car free day)	6 Cabor	520.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	520.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
					Terlaksananya Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (POPDA)	6 Cabor						
					Terlaksananya Pekan Olahraga Beladiri Daerah (PORDIDA)	1 Kegiatan						
					Terlaksananya Pekan Olahraga Perlombaan Daerah (PEPOLDA)	1 Kegiatan						
					Terlaksananya Pekan Olahraga Permainan Daerah (PORPERDA)	1 Kegiatan						
2	19	003	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga	9 kegiatan	210.000.000			210.000.000	
2	19	003	2.03	002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Kegiatan	210.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	210.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
					Penyelenggaraan Pelatihan Guru-guru PJOK SD dan SMP dalam Menyusun Program Pembelajaran disekolah	70 Orang						
					Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pelatih pada Cabang Olahraga	34 Cabor						
2	19	003	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terfasilitasinya organisasi olahraga	1 Organisasi	763.656.560			763.656.560	
2	19	003	2.04	002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya Operasional Organisasi Olahraga	1 Organisasi	763.656.560	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	763.656.560	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	19	003	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	terlaksananya olahraga rekreasi	2 keg.	420.000.000			420.000.000	
2	19	003	2.05	001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan Lomba Olahraga Rekreasi antar Kecamatan	2 Cabor	420.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	420.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
					Penyelenggaraan Sekolah-sekolah yang menjadi Sentreal Pembinaan Olahraga (Pilotting) Kelas Olahraga pada tingkat Kecamatan	14 Sekolah						
					Penyelenggaraan Lomba Olahraga Hari Besar Nasional	5 Hari Besar						
2	19	004			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prestasi bidang kepramukaan / jumlah pembinaan pramuka	10 Besar	300.000.000			300.000.000	
2	19	004	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan SDM kepramukaan	60 orang	300.000.000			300.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
2	19	004	2.01	003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pramuka Mahir Dasar	30 Orang	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	50.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2	19	004	2.01	005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Operasional Kwarcab	1 Tahun	250.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	250.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							73.505.000.000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	45.986.790.640			48.645.000.000		
1	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	34.488.640.640			36.350.000.000		
1	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai	454 orang	34.154.680.640	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	36.000.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pegawai	455 orang	333.960.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	350.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum	100%	973.000.000			1.565.000.000		
1	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jaringan instalasi Listrik lampu, kabel, dan alat listrik lainnya	1 paket 12 bulan	58.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	70.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC CCTV laptop puskesmas Personal Computer Printer puskesmas printer RS pratama scaner TV	10 unit 11 paket 10 unit 5 unit 22 unit 5 unit 2 unit 4 unit	500.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	750.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gorden anti bakteri kompor laken lengkap peralatan makan pasien trolley makanan	1 paket 3 unit 120 paket 1 paket 2 unit	150.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	175.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak disposisi Cetak dokumen bidang cetak kalender Cetak lakip cetak laporan Keuangan cetak SPM DPA dan DPPA KLPJ LPPD profil Renja Renstra Stempel	10 buah 4 paket 1 paket 5 buah 5 buah 5 buah 30 buah 5 buah 5 buah 21 buah 10 buah 10 buah 5 buah	65.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	70.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	500.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	300.000.000			300.000.000		
1	02	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	kursi Kursi kerja kursi tunggu Lemari Arsip	150 buah 1 paket 1 paket 20 buah	300.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	300.000.000	Dinas Kesehatan	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Lemari MR lemari obat Meja Meja Rapat meja resepsionis Meja untuk Aula Sofa	1 paket 20 buah 30 buah 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket						
1	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	120.000.000			180.000.000	
1	02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai ongkos kirm dokumen	1300 buah 12 bulan	2.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	air Listrik Tlp dan internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan	108.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	150.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan kantor, printer, laptop, AC, scaner, dll	12 bulan	10.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	230.000.000			250.000.000	
1	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM kendaraan jasa perbaikan kendaraan Oli dan Pelumas perizinan kendaraan roda 2 dan 4 Suku Cadang	12 bulan 12 bulan 12 bulan 45 unit 12 bulan	230.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	250.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD	100%	9.875.150.000			10.000.000.000	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas RS Pratama	10 Unit 1 Unit	9.875.150.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	10.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	19.237.400.000			24.650.000.000	
1	02	002	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100%	382.830.000			4.205.000.000	
1	02	002	2.01	007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas terakreditasi	4 Puskesmas	150.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	160.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi pagar pustu	1 pustu	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	4.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin alat kesehatan puskesmas Pemeliharaan rutin RS Pratama	10 Puskesmas 1 Unit	32.830.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	45.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	18.804.570.000			20.385.000.000	
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menurunkan Angka Kematian Bayi	5 per 1000 KH	23.700.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	25.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penemuan kasus baru TB BTA+	32 per 100000 penduduk	20.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan dengan orang resiko terinfeksi HIV	4200 Orang	16.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan KLB	10 Puskesmas	29.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	15.000.000	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penurunan balita stunting Penurunan kasus gizi buruk Terapi pemulihan gizi buruk	28 persen 0.02 persen 100 persen	23.700.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	25.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	10 Puskesmas	22.201.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	25.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada anak usia pendidikan dasar Pengembangan media promosi kesehatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	10 Puskesmas 1 Paket 10 Puskesmas	22.684.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	25.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kesehatan jiwa	10 Puskesmas	13.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	15.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Penyuluhan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	10 Puskesmas	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pencegahan dan Penanggulangan Malaria (API) Pencegahan dan Penanggulangan penyakit DBD (Rata-rata kesakitan DBD) Penemuan dan Penanganan kasus diare Penemuan dan penanganan kasus pneumonia balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus Pengelolaan Pelayanan Penderita Hipertensi	1 per 1000 penduduk 34.28 per 100.000 penduduk 20.98 1000 penduduk 17918 balita 10 Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas	35.285.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	40.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan	47827 jiwa	16.000.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	17.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional RS Pratama	12 bulan	2.500.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	3.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	P4TO Penduduk miskin dan daerah terpencil (LUA)	100 persen 3 Nagari	45.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase akreditasi	100 persen	25.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.02	037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase wabah yang ditangani	100 %	13.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	15.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan fasilitas kesehatan	100%	50.000.000			60.000.000	
1	02	002	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit	RS pratama tipe D RSUD Solok Selatan tipe B	1 Unit 1 Unit	25.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.04	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	keterampilan petugas dalam penanggulangan masalah kesehatan pelatihan penanganan asfiksia pada bayi baru lahir Pembinaan Tenaga Kader	10 puskesmas 100 orang 294 Kader	25.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
						pengkajian penyebab masalah kematian bayi dan anak terlaksananya pengembangan kelas ibu hamil	100 orang 10 Puskesmas					
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	25%	50.000.000			90.000.000	
1	02	003	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang mendapat peningkatan kompetensi	30 orang	50.000.000			90.000.000	
1	02	003	2.03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelatihan jabatan fungsional pelatihan kesehatan lainnya Pelatihan peningkatan kopetensi tenaga kesehatan Pelatihan Tenaga ahli pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan Tenaga Labor Pelatihan untuk tenaga kesehatan lainnya perencanaan SDMK	10 orang 4 orang 50 orang 8 orang 10 Orang 8 orang 10 puskesmas	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	90.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	004			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan Farmasi Persentase ketersediaan alkes Cakupan pengawasan PIRT	98% 62% 91%	30.000.000			60.000.000	
1	02	004	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sertifikat yang diterbitkan	100%	15.000.000			30.000.000	
1	02	004	2.03	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	pengawasan dan pengendalian Produksi Pangan Industri Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	120 PIRT	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pemeriksaan produk IRT	100%	15.000.000			30.000.000	
1	02	004	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	pengawasan dan pengendalian TPM	419 TPM	15.000.000		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga PHBS	77%	50.000.000			60.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	02	005	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan PHBS	2%	25.000.000			30.000.000	
1	02	005	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	fasilitasi STBM monev program pemerintah bidang kesehatan pemantapan desa siaga pembinaan dan pengawasan kualitas air minum pengembangan posyandu	272 jorong 1 tahun 47 Nagari 179184 orang 294 posyandu	25.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	005	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi kesehatan yang dilakukan	4 kali	25.000.000			30.000.000	
1	02	005	2.02	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	BOK promkes dan gernas Fasilitasi Bulan Bhakti Pemantapan PKPR bagi anak sekolah penjaringan kesehatan siswa siswi baru di sekolah Terlaksana PHBS	1 tahun 5 kegiatan 100 persen 100 persen 72 persen	25.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			122.500.000			160.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			122.500.000			160.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	122.500.000			160.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Pakan Rabaa	12 bulan	122.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	160.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			125.000.000			70.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	125.000.000			70.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	125.000.000			70.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Opearasional dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muaralabuh	12 bulan	125.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	70.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			52.200.000			65.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	52.200.000			65.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	52.200.000			65.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Pakan Selasa	12 Bulan	52.200.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	65.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			120.200.000			135.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	120.200.000			135.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	120.200.000			135.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Lubuk Gadang	12 Bulan	120.200.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	135.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			101.000.000			140.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	101.000.000			140.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	101.000.000			140.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Bidar Alam	12 Bulan	101.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	140.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			83.200.000			90.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	83.200.000			90.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	83.200.000			90.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Talunan	12 Bulan	83.200.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	90.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			51.400.000			65.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	51.400.000			65.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	51.400.000			65.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Mercu	12 Bulan	51.400.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	65.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			81.200.000			90.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	81.200.000			90.000.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	81.200.000			90.000.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Abai	12 Bulan	81.200.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	90.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			82.200.000			90.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	82.200.000			90.000.000			
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	82.200.000			90.000.000			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Lubuk Ulang Aling	12 Bulan	82.200.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	90.000.000	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							85.000.000	90.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	85.000.000			90.000.000			
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan layanan Kesehatan kabupaten	100%	85.000.000			90.000.000			
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional dan Pelayanan Puskesmas Sungai Kalu	100 persen	85.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	90.000.000	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							21.302.207.533	31.685.197.000	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	20.342.207.533			30.725.197.000			
1	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	20.242.207.533			30.395.197.000			
1	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	230 Orang	20.097.010.533	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	30.250.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
1	02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Anggaran untuk pengelola keuangan RSUD Solok Selatan	10 Orang	145.197.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	145.197.000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
1	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan	30%	100.000.000			330.000.000			
1	02	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	64 Orang	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	330.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan SDM sesuai dengan standar	100%	960.000.000			960.000.000			
1	02	003	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan SDM sesuai dengan standar	100%	960.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	960.000.000			
1	02	003	2.02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga Kesehatan Reveral	5 Orang	960.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	960.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							44.887.400.000	55.000.000.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	44.887.400.000			55.000.000.000			
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Standar Pelayanan Minimal	75 Persentase	44.887.400.000			55.000.000.000			
1	02	002	2.02	032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Rumah Rumah Sakit	12 Bulan	44.887.400.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	55.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			77.060.016.778			184.678.500.000	
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	12.471.891.234			14.838.500.000	
1	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	6.674.891.234			8.700.000.000	
1	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	68 orang	6.074.891.234	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dana pendukung administrasi	37 Orang	600.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	280.000.000			1.186.000.000	
1	03	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aksesoris Listrik Kabel	20 set 1 Rol	5.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	6.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Tersedia Bola Lampu Penerangan	30 Bh			infrastruktur penunjang perekonomian		Pertanahan	
1	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Laptop Tersedianya Printer	1 Unit 1 Unit	40.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	160.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
1	03	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Trsedianya danan untuk penyediaan cetakan dan penggandaan	1 tahun	35.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	70.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	200.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	5.000.000.000			4.400.000.000	
1	03	001	2.07	003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Kendaraan Berat	3 Unit	5.000.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	47.000.000			77.500.000	
1	03	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	2.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bln	35.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga lainnya Tersedianya Jasa Perbaikan Laptop Tersedianya Jasa Perbaikan Printer	20 BH 10 Unit 10 Unit	10.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	12.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	470.000.000			300.000.000	
1	03	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya dana untuk pembayaran pajak kendaraan terpelihara Kendaraan Roda Dua Terpeliharanya Alat Berat Terpeliharany kendaraan dinas	40 unit 33 Unit 4 Unit 7 Unit	470.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	60% 26%	3.305.125.544			13.800.000.000	
1	03	002	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Sungai yang dikelola	360 Ha	1.275.000.000			5.050.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	03	002	2.01	001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen Perencanaan Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing	3 Dokumen	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	002	2.01	010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Dinding Penahan yang dibangun	500 M	950.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	002	2.01	046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai ternormalisasi	4 Km	300.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	002	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Daerah Irigasi yang dikelola	0,6%	2.030.125.544			8.750.000.000	
1	03	002	2.02	001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan Irigasi	1 Dokumen	75.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	002	2.02	014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi yang di Rehab Rehab irigasi batang sungai padi Rehab Irigasi Sungai Landeh	1500 meter 100 m 200 m	1.555.125.544	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	002	2.02	022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Luas Daerah Irigasi (DI) yang dipelihara	1500 ha	400.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Air Minum Layak	80,05%	1.430.000.000			9.000.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	03	003	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang dikelola	2%	1.430.000.000			9.000.000.000	
1	03	003	2.01	004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunanan Jaringan Air bersih pedesaan	500 m	350.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	003	2.01	005	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	pembangunan jaringan air bersih	10 unit	1.000.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	003	2.01	006	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum /pamsimas dan hibah air minum pedesaan	800 SR	50.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	003	2.01	007	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan	1800 SR	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses Sanitasi Layak	53,8%	90.000.000			2.000.000.000	
1	03	005	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah MCK yang dikelola	50%	90.000.000			2.000.000.000	
1	03	005	2.01	006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah MCK yang dibangun	5 Unit	40.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	005	2.01	012	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	IPAL Kombinasi MCK dan Penunjang	2 Unit	50.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang berfungsi dengan baik	30%	8.018.000.000			9.300.000.000	
1	03	006	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Sistem Drainase yang dikelola	1%	8.018.000.000			9.300.000.000	
1	03	006	2.01	006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	panjang drainase yang dimangun	300 m	18.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	006	2.01	008	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Nagari Koto Baru Drainase Perkotaan Trotoar Jalan Simpang Timbulun - Samsat Trotoar Kawasan RTH Muara Labuh Trotoar Padang Aro	250 m 1 Km 1 Km 1 Km 3 KM	6.500.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	03	006	2.01	013	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Kawasan Perkantoran	500 m	1.500.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	2,5%	16.175.000.000			5.700.000.000	
1	03	008	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	1 unit	16.175.000.000			5.700.000.000	
1	03	008	2.01	001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang memiliki persyaratan layak fungsi	3 Paket	150.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	008	2.01	002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan infrstruktur yang dibangun Lanjutan Pembangunan Tugu Pemekaran Solok Selatan Pengembangan dan Landscape Kantor Bupati	2 Unit 1 Unit 1 Unit	16.000.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	008	2.01	013	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	33,23% 62%	35.205.000.000			129.600.000.000	
1	03	010	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kabupaten yang dikelola Persentase Jembatan Kabupaten yang dikelola	1,6% 0,5%	35.205.000.000			129.600.000.000	
1	03	010	2.01	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan Jalan dan Jembatan Jumlah tersusunnya dokumen lingkungan Ruas Jalan Sungai Sungkai-Log Batu Sandi_Batas dharmasraya dan Sapan Salak - Sungai Pangkua Pakan Rabaa	10 Dokumen 2 Dokumen	1.300.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	tersusunnya data base jalan dan jembatan	2 Dokumen	75.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	03	010	2.01	005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang dibangun	5 Km	300.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	008	Rekonstruksi Jalan	Jalan Bara (Lokasi Batang Lawe - Jawi Jawi) Jalan Lingkar Muara Labuh Jalan Lingkar Pasar Baru Pekan Selasa Jalan Padang Alai - Air Dingin Jalan Poros Kantor Bupati Jalan Taratak Tinggi Simpang Pekonina Lanjutan Jalan TPA Jujutan Lubuk Gadang Timur Pakan Rabaa Timur Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Peningkatan Jalan Padan Alai - Rimbo Tengah Peningkatan Jalan Pasir Simancung (Pengerasan) Rp. 750.000.000 Sungai Kunyit	500 m 1 Km 750 m 1 Km 1.5 Km 1 KM 1.5 Km 500 m 750 m 30 Km 500 m 2 KM 500 m	23.300.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	75.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	009	Rehabilitasi Jalan	Rehab Jalan Simpang Lampu Merah Padang Aro	2 Km	3.050.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	21.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang di pelihara secara rutin	30 Km	1.000.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	012	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Jembatan Buluah Kasok Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Kampung Tarandam	1 Unit 1 unit	5.150.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	018	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	10 Unit	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	010	2.01	019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab secara rutin	25 Unit	1.000.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	5%	40.000.000			80.000.000	
1	03	011	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten	1 Laporan	40.000.000			80.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
1	03	011	2.02	006	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah tenaga kerja yang bersertikat	1 Dokumen	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	011	2.02	007	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Adanya data ketersediaan/penggunaan material dan peralatan	1 Dokumen	15.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase RDTR Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	66,67%	325.000.000			360.000.000		
1	03	012	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 Dokumen	280.000.000			280.000.000		
1	03	012	2.01	001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Adanya laporan kinerja Tata Ruang	1 Laporan	100.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	012	2.01	002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang diperdakan	2 Dokumen	150.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	012	2.01	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi perundangan undangan	21 Kali	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	80.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	012	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi ruang daerah Kabupaten	1 Laporan	20.000.000			30.000.000		
1	03	012	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya rapat tim koordinasi penataan ruang	6 Kali	20.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	012	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian ruang daerah Kabupaten	1 Dokumen	25.000.000			50.000.000		
1	03	012	2.04	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	20 Laporan	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							7.065.000.000	
2	10	005			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	50%	5.020.000.000			7.035.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
2	10	005	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian permasalahan sengketa garapan dalam daerah Kabupaten yang telah dilaksanakan	1 Dokumen	5.020.000.000			7.035.000.000			
2	10	005	2.01	001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi terkait hukum pertanahan	15 kali	20.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	35.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan		
2	10	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya dokumen perencanaan tanah Penyerahan hasil pengadaan tanah Terlaksananya pengadaan tanah Terlaksananya persiapan pengadaan tanah	5 Dokumen 5 Dokumen 8 Ha 1 tahun	5.000.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							16.060.680.950	30.593.985.838	
1	04	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Perkantoran	100 %	4.423.180.950			6.088.985.838			
1	04	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.838.680.950			4.528.985.838			
1	04	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	36 Orang	3.591.280.950	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	4.091.513.838	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
1	04	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	19 Orang	247.400.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	437.472.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
1	04	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	267.500.000			685.000.000			
1	04	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1 Tahun	5.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	5.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
1	04	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
1	04	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.500.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	04	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 Kali	200.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	47.000.000			125.000.000	
1	04	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan materai	200 Buah	2.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	10.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	35.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	75.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	10.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	40.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	270.000.000			750.000.000	
1	04	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	15 Unit	210.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	350.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	2 Unit	60.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	400.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	100 %	580.000.000			2.280.000.000	
1	04	002	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1 Dokumen	20.000.000			150.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	04	002	2.01	005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	20.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	150.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	002	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat Untuk Tim Teknis/ Fasilitator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	1 Kali	50.000.000			100.000.000	
1	04	002	2.02	004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Pelatihan / Diklat untuk tim teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ relokasi	1 Kali	50.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	002	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	14 Unit	480.000.000			2.000.000.000	
1	04	002	2.03	001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehab Rumah Bagi Korban Bencana	5 Unit	165.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	002	2.03	004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Untuk Korban Bencana	10 Unit	315.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	1.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	002	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendistribusian rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 kegiatan	30.000.000			30.000.000	
1	04	002	2.04	001	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi	Terlaksananya serah terima bantuan rumah korban bencana	1 kegiatan	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	30.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan
1	04	003			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan rehabilitasi dan pembangunan RTLH dalam kawasan permukiman kumuh	14 %	60.000.000			575.000.000	
1	04	003	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penyediaan rehabilitasi dan pembangunan RTLH dalam kawasan permukiman kumuh	14%	25.000.000			75.000.000	
1	04	003	2.02	001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah data untuk lokasi perumahan dan kawasan kumuh	1 Dokumen	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	75.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	003	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan pelaksanaan rehab RTLH dan PSU	100 Unit	35.000.000			500.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	04	003	2.03	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Fasilitas untuk rehabilitasi RTHL dalam Kawasan Kumuh	3 kali	35.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	004			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penyediaan perbaikan RTLH guna pencegahan terbentuknya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	75,5%	400.000.000			500.000.000	
1	04	004	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	12,5%	400.000.000			500.000.000	
1	04	004	2.01	001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Jumlah RTLH yang terverifikasi Perbaikan RTLH agar tidak bertumbuhkembangan nya kawasan kumuh	1500 Unit 10 Unit	400.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	005			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang mendapatkan akses PSU	6%	10.582.500.000			21.100.000.000	
1	04	005	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya PSU perumahan	10%	10.582.500.000			21.100.000.000	
1	04	005	2.01	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah KWh Listrik untuk PJU Jumlah LPJU Jumlah Taman Kota Terbangun Jumlah Taman Terpelihara Panjang Drainase dan Jalan Lingkung Panjang Meterisasi LPJU	12 Bulan 500 Buah PJU 2 Lokasi 5 Lokasi 165 Meter 500 Meterisasi	10.582.500.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	21.100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	04	006			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	15.000.000			50.000.000	
1	04	006	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya koordinasi dan tata laksana penerbitan sertifikat dan register untuk Perumahan dengan kaulifikasi kecil	100%	15.000.000			50.000.000	
1	04	006	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Data Perusahaan / Pengembang Perumahan yang terdaftar dan teregister Jumlah koordinasi dan tata laksana penerbitan sertifikat dan register untuk Perumahan dengan kaulifikasi kecil	1 Laporan 5 Kali	15.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen kualitas lingkungan hidup (IKA, IKU, ITL) yang disusun	3 Dokumen	375.000.000			4.200.000.000	
2	11	003	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup	90%	325.000.000			3.500.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	11	003	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	Jumlah Uji Kualitas Air Jumlah Uji Kualitas Tanah Jumlah Uji Kualitas Udara	50 Sample 7 Sampel 20 Titik	200.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	400.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	003	2.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kelompok KSDA Jumlah Pembentukan kampung iklim, Jumlah Pengembangan teknologi Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta koordinasi dan konservasi SDA	2 Kelompok 4 Jorong 15 Unit	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	400.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	003	2.01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Akreditasi Laboratorium LH	75 Persen	100.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	2.700.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	003	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	% Ketersediaan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup % pengisolasian dan penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75% 75%	25.000.000			600.000.000	
2	11	003	2.02	001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah media informasi (manual/elektronik) untuk peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	600.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	003	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemulihan fungsi lingkungan hidup	10 Ha	25.000.000			100.000.000	
2	11	003	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Pengawasan dan Penegakan Hukum untuk sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	10 Usaha Kegiatan	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kabupaten	0,20%	25.000.000			25.000.000	
2	11	004	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten /Kota	0,2%	25.000.000			25.000.000	
2	11	004	2.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terdatanya RTH Solok Selatan	1 Laporan	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	25.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola usaha dan/atau perusahaan	100%	25.000.000			25.000.000	
2	11	005	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya penyimpanan sementara limbah B3 sesuai persyaratan administrasi dan teknis	10 Usaha dan/atau Kegiatan	25.000.000			25.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	11	005	2.01	002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Adminstrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara LB3	10 Usaha Kegiatan	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	25.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100.000.000			320.000.000	
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	25 Usaha dan/atau kegiatan	100.000.000			320.000.000	
2	11	006	2.01	001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi atau izin lingkungan	10 Izin/Rekomen dasi	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	006	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat fungsional PPLHD yang mengikuti peningkatan kapasitas	4 Orang	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	120.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang terawasi	10 Usaha/kegiatan	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	006	2.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Kegiatan/Usaha yang diawasi dan ditindaklanjuti penerapan sanksi	5 Usaha/kegiatan	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	007			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	% Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	100%	25.000.000			50.000.000	
2	11	007	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	25.000.000			50.000.000	
2	11	007	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Legalitas/Pengakuan/ Keputusan MHA dan Kearifan lokal	1 Dokumen	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000			350.000.000	
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000			350.000.000	
2	11	008	2.01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah perorangan/kelompok usaha penyelamaat kawasan konservasi Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata Skala Nasional	5 kelompok 3 Sekolah	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	008	2.01	002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Peduli Lingkungan, Penghargaan Adipura	1 Piagam 5 Kelompok	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	150.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	008	2.01	003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	 Sosialisasi Pembuatan Baliho, Wab Basis Internet dan Diklat	1 Event 3 Agenda 100 M2 3 Agenda Hari Nasional	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	6 Penghargaan	25.000.000			150.000.000	
2	11	009	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan lingkungan hidup	6 Penghargaan	25.000.000			150.000.000	
2	11	009	2.01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Penghargaan Adiwiyata Penghargaan Kalpataru Penghargaan Proper	5 Peringkat 2 Peringkat 5 Peringkat	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	150.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat/penegakan hukum lingkungan	100%	25.000.000			50.000.000	
2	11	010	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	100%	25.000.000			50.000.000	
2	11	010	2.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah aduan masyarakat/penegakan hukum lingkungan	100 % Tindak lanjut	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Layanan Persampahan	75 %	2.875.000.000			41.400.000.000	
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah pengurangan sampah Jumlah timbulan sampah yang ditangani	12.200 ton 14.600 ton	2.875.000.000			41.400.000.000	
2	11	011	2.01	002	Pengurangan Sampah dengan melakukan	Pengurangan Sampah di TPS3R	1500 Ton	75.000.000	Membangun Lingkungan Hidup,	Meningkatnya ketersediaan	5.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
					Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan Timbulan Sampah di Nagari	4700 Ton		Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian		Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
2	11	011	2.01	003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Timbulan Sampah Yang ditangani	14600 Ton	2.000.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	6.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
2	11	011	2.01	004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengurangan Sampah di TPA	6000 Ton							
						Jumlah Kelompok Peduli Sampah Aktif	4 Kelompok	150.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	400.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup		
						Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pelatihan Persampahan	15 Kelompok							
						Jumlah Pemberian Sanksi Pelanggaran Peraturan Persampahan	5 Sanksi							
2	11	011	2.01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Pengadaan Kontainer Sampah	5 Unit	650.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	30.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA							6.021.125.166	6.118.125.166	
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.906.125.166			3.918.125.166			
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	3.436.625.166			3.436.625.166			
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	3.324.065.166	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.324.065.166	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola keuangan dan tenaga pendukung pelayanan administrasi kantor	14 orang	112.560.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	112.560.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	261.000.000			263.000.000			
1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan alat elektronik yang tersedia	1 Tahun	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun 28 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	1 Tahun	6.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi OPD	1 Tahun	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	37.000.000			47.000.000			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	05	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	171.500.000			171.500.000	
1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa perizinankendaraan dinas/operasional rutin dan berkala	15 unit	146.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	146.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya Gedung kantor	1 unit	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda	100%	915.000.000			1.000.000.000	
1	05	002	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Satlinmas	30%	855.000.000			940.000.000	
1	05	002	2.01	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan Jumlah pengawalan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	56 orang 60 kali 30 kegiatan	550.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2.01	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan trantibum linmas kedalam dan luar daerah yang terlaksana	1 Tahun	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2.01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota satlinmas yang terbentuk	44 orang	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2.01	005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti kegiatan pendidikan dasar Pol-PP	150 orang	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
1	05	002	2.01	007	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi gabungan Tim SK-6	6 kali	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	002	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan penanganan pelanggaran Perda	100%	60.000.000			60.000.000		
1	05	002	2.02	002	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penanganan pelanggaran perda/ perkara	24 kasus	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencapaian respon time	90%	1.200.000.000			1.200.000.000		
1	05	004	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan bencana kebakaran	75%	1.200.000.000			1.200.000.000		
1	05	004	2.01	001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kebakaran Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana damkar	65 % 5 unit	1.200.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	1.200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA							5.259.911.872	
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.134.911.872			3.134.911.872		
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.322.011.872			2.322.011.872		
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	19 Orang	2.205.011.872	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	2.205.011.872	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan	13 Orang	117.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	117.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	272.500.000			272.500.000		
1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan	6 Jenis peralatan	5.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	25 Jenis ATK	36.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	36.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan kebersihan yang disediakan	10 jenis bahan	7.500.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	7.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis hasil cetakan	24.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	24.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar provinsi	20 rapat koordinasi	200.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	55.400.000			55.400.000	
1	05	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	200 Buah	2.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	2.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian telepon dan air	14000 KWH 12 Bulan	36.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	36.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga tukang angkut sampah Jumlah tenaga kebersihan dan penjaga kantor	1 Orang 1 Orang	17.400.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	17.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	485.000.000			485.000.000	
1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional/ lapangan yang terpelihara	16 Unit	250.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.09	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah kendaraan wheel loader yang terpelihara	1 Unit	200.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	10 Jenis peralatan	35.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	35.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	0,36	2.125.000.000			2.125.000.000	
						% Penduduk terdampak bencana yang ditangani	1					
						% Daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	0,8					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	05	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0,36	25.000.000			25.000.000	
1	05	003	2.01	002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	500 Orang	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peresentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	0,05%	1.375.000.000			1.375.000.000	
1	05	003	2.02	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	100.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Pusdalops Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	7 Kecamatan 2 Unit	250.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Survey sungai rawan bencana	1 Laporan	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah destana yang dibina Jumlah KSB yang dibina	6 DESTANA 10 KSB	50.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	007	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan pekerjaan rehab rekon yang disusun	6 Dokumen	850.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	850.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TRC kabupaten yang dibina/ dibentuk	35 Orang	100.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penduduk terdampak bencana yang ditangani	100%	700.000.000			700.000.000	
1	05	003	2.03	002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap bencana	100 %	300.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	50.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	05	003	2.03	004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20 bahan/ peralatan	350.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi kebencanaan	3 Kali	25.000.000			25.000.000	
1	05	003	2.04	002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rapat kelembagaan bencana di kabupaten	3 Kali	25.000.000	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.068.837.403			7.150.682.144	
1	06	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.448.837.403			5.665.682.144	
1	06	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.934.837.403			4.858.682.144	
1	06	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.826.487.403	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	4.060.682.144	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Pendukung Pelayanan Adminstrasi Kantor	14 Orang 1 Orang 60 Orang	108.350.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	798.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	309.500.000			573.000.000	
1	06	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalaaasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	6.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Gudang Kantor Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	1 Tahun 1 Unit 9 Unit	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	200.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	1 Tahun	4.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	5.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	20.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	22.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	1 Tahun 1 Tahun	200.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	340.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	20.500.000			29.000.000	
1	06	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teresdianya jasa surat menyurat	100 Persen	2.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan dava beli masvarakat	6.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	06	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	100 persen	13.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	15.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100 persen	5.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	8.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	184.000.000			205.000.000	
1	06	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit 13 Unit	164.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	175.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	20.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	30.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	002			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	100.000.000			140.000.000	
1	06	002	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM PSKS yang ditingkatkan Kemampuannya	100%	100.000.000			140.000.000	
1	06	002	2.03	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	3 Kelembagaan	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	140.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	50%	170.000.000			525.000.000	
1	06	004	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	50 orang	120.000.000			200.000.000	
1	06	004	2.01	001	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	36 orang	70.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	200.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2.01	003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan	70 Orang	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial	160 orang	50.000.000			325.000.000	
1	06	004	2.02	003	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial	50 orang	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	325.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar Mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	290.000.000			560.000.000	
1	06	005	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Mendapat perlindungan dan jaminan sosial	11 orang	40.000.000			160.000.000	
1	06	005	2.01	001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang Terlayani	7 orang	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	160.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi	100%	250.000.000			400.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
1	06	005	2.02	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari/Jorong Terbaik untuk Pendataan DTKS Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN yang Tervalidasi	3 Nagari 100 persen	250.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100%	50.000.000			250.000.000			
1	06	006	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang Terlayani	100%	50.000.000			250.000.000			
1	06	006	2.01	001	Penyediaan Makanan	Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Alam	100 persen	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	250.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	06	007			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola		10.000.000			10.000.000			
1	06	007	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola		10.000.000			10.000.000			
1	06	007	2.01	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Terpelihara	1 TMP	10.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	10.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.955.000.000	1.540.000.000	
2	13	003			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang ditindaklanjuti	100%	150.000.000			700.000.000			
2	13	003	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	158	150.000.000			700.000.000			
2	13	003	2.01	002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	1 TNI 2 Orgaanisasi Rantau 151 KP-SPAMS 4 Perguruan Tinggi	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	700.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	004			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari tertib administrasi pemerintahan	100%	3.675.000.000			180.000.000			
2	13	004	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah nagari tertib administrasi	47	3.675.000.000			180.000.000			
2	13	004	2.01	001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Dibina	39 Nagari	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	004	2.01	002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum yang Dibuat	10 Perbup/SK	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	180.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	004	2.01	009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Walinagari yang Dipilih	32 Walinagari	3.525.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga desa aktif dalam pemberdayaan masyarakat	60%	130.000.000			660.000.000			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas						
									Nasional	Daerah					
2	13	005	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga pemberdayaan dan keuangan aktif	60%	130.000.000			660.000.000				
2	13	005	2.01	002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lemabaga Adat yang Dibina	11 KAN	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	160.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	005	2.01	003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota LPMN dan KPM yang Dibina	100 Orang	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	250.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	005	2.01	005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Uasaha Ekonomi Masyarakat yang Difasilitasi Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang Difasilitasi Jumlah Usaha Ekonomi Masyrakat yang Difasilitasi	346 Nasabah 7 BKAN 10 KEL-UEM	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	250.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4.805.527.108		5.905.884.285	
2	07	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.600.527.108				4.235.884.285			
2	07	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.602.268.508				3.159.061.963			
2	07	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	23 orang	2.515.508.508	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.915.648.963	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	15 orang	86.760.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	243.413.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	270.500.000				313.623.496			
2	07	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	1 unit	5.000.000				6.050.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	07	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	30.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	39.510.096	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan	8 Jenis	5.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	6.050.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah Barang yang digandakan	80 macam 100000 lembar	30.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	36.300.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Penggantian Biaya Perjalanan Dinas	400 Porsi 245 orang/hari	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	225.713.400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	500.000.000				500.000.000			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	07	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Unit	500.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	76.508.600			111.948.826	
2	07	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Rp. 6000	200 lembar	2.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	4.719.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Internet Listrik Telepon	1743 Kubik 23000 Kilobyte 10101 Kwh 250 Kilobyte	35.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	42.310.906	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	10.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	32.459.460	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Jumlah Tenaga Keamanan	2 orang	29.508.600	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	32.459.460	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	151.250.000			151.250.000	
2	07	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	151.250.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	151.250.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja	90%	1.105.000.000			1.560.000.000	
2	07	003	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi	224 Orang	1.055.000.000			1.480.000.000	
2	07	003	2.01	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang dilatih	128 Orang	975.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2.01	002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase instruktur Bersertifikat Kompetensi	15 kali	80.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	80.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja Swasta yang dibina	10 LPKS	50.000.000			80.000.000	
2	07	003	2.02	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja Swasta yang dibina	5 LPKS	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	80.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,02	40.000.000			50.000.000	
2	07	004	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bursa Kerja Online	3000 Orang	40.000.000			50.000.000	
2	07	004	2.03	001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	40.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pencegahan dan tindak lanjut penyelesaian Hubungan Industrial	100%	60.000.000			60.000.000	
2	07	005	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	60.000.000			60.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
2	07	005	2.02	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5 Kasus	60.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							250.000.000		
3	32	003			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	50%	30.000.000			250.000.000			
3	32	003	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang ditata	1 Lokasi	30.000.000			250.000.000			
3	32	003	2.01	003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi yang ditata	1 Lokasi	30.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	250.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4.042.616.015	4.950.500.000	
2	09	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	2.897.616.015			3.285.500.000			
2	09	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.208.116.015			2.450.000.000			
2	09	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	2.076.116.015	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	12 Bulan	132.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	262.500.000			327.500.000			
2	09	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	12 bulan	30.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan Pembersih	12 bulan	7.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	12.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah Penggadaan Yang diadakan	12 bulan	25.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	12 bulan	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	77.000.000			88.000.000			
2	09	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	300 Lembar	2.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	3.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Bulan	55.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	350.000.000			420.000.000			
2	09	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	23 Unit	150.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
2	09	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik yang good governance	220.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	09	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan	20%	50.000.000			80.000.000	
2	09	002	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit infrastruktur kemandirian pangan	1 Unit	50.000.000			80.000.000	
2	09	002	2.01	001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Pangan Sentra Produksi (DAK Fisik)	1 Unit	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan	78%	765.000.000			1.115.000.000	
						Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan dan kestabilan harga komodity pertanian.	87%					
2	09	003	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan akses pangan	50%	490.000.000			680.000.000	
2	09	003	2.01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Buku Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.01	002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 KWT	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Yang Terlaksana	1 tahun	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.01	004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemantauan Stok Pangan, Jumlah Pemantauan Pasokan dan Jumlah Pemantauan Harga Pangan	1 tahun	90.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	130.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.01	006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Yang Dibina, Jumlah Pasar Pangan Murah Yang Diadakan	1 unit	0	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Cadangan Pangan	5 Ton	100.000.000			150.000.000	
2	09	003	2.02	003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	5 Ton	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memahami diversikasi konsumsi pangan	50%	175.000.000			285.000.000	
2	09	003	2.04	001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	77 %	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	85.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.04	002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Benih Sayuran	2 KWT	75.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	003	2.04	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	004			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Nagari yang rawan pangan tertangani	77%	230.000.000			320.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	09	004	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh instansi terkait	50%	150.000.000			200.000.000	
2	09	004	2.01	001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan	1 Dokumen	150.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	004	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari yang rawan pangan tertangani	36 Nagari	80.000.000			120.000.000	
2	09	004	2.02	002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima dalam penanganan daerah rawan pangan	250 KK	80.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	005			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan,persentase penurunan bahan pangan mengandung zat berbahaya	66%	100.000.000			150.000.000	
						Persentase Terjaminnya mutu dan keamanan pangan dikabupaten Solok Selatan	66%					
2	09	005	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi yang diawasi kewanaman pangan segar daerah kabupaten/kota	6 Komoditi	100.000.000			150.000.000	
2	09	005	2.01	002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	6 Sampel	100.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3	25	004			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya(ton/Tahun)	2159 Ton	585.000.000			755.000.000	
3	25	004	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah kelompok pembudidaya yang di bina	30 Kelompok	355.000.000			435.000.000	
3	25	004	2.02	001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Calon Induk Melalui Seleksi Benih Bekerjasama dengan UPT Pusat Kementrian Kelautan Untuk BBI dan UPR	2000 Ekor	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	004	2.02	002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Frekwensi Pertemuan Pelaku Usaha Perikanan (Pokdakan, Pokmaswas dan Pelaku Usaha Perikanan)	1 Kali	25.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	004	2.02	004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Frekwensi Pelatihan Untuk Petugas dan Pendamping Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya dan Gerakan Pakan Mandiri dari APBN	2 Kali	230.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	285.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	004	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya yang di bina	30 Kelompok	230.000.000			320.000.000	
3	25	004	2.04	002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana dan Prasarana Pembenihan	1 unit	150.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	004	2.04	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	2 unit	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	006			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat kosumsi ikan (Kg/kapita/Tahun)	32,10 Kg	75.000.000			120.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
3	25	006	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran	5 kelompok	75.000.000			120.000.000		
3	25	006	2.02	001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Event Gerakan Memasyarakatkan makan Ikan melalui usia dini dan terciptanya keatifitas menu olahan bahan baku ikan dan pengadaan freezer pendingin ikan	2 Event	75.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							450.000.000	
3	25	004			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya(ton/Tahun)	2159 Ton	450.000.000			500.000.000		
3	25	004	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya yang di bina	30 Kelompok	450.000.000			500.000.000		
3	25	004	2.04	005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Bibit Ikan	3500000 Ekor	450.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.843.499.992	7.901.245.199
2	12	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.118.499.992			4.527.111.089		
2	12	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.589.364.992			2.972.332.589		
2	12	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji danTunjangan ASN	21 orang	2.507.134.992	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.890.102.589	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Kantor, Tersedianya jasa administrasi Keuangan	9 orang	82.230.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	82.230.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	302.500.000			1.296.350.000		
2	12	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor	1 tahun	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	9.350.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor,Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 tahun	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	825.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	7.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	1 tahun	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	12	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dan tersedianya makan Rapat dan Tamu	1 tahun	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	407.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	94.100.000			112.640.000	
2	12	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.830.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan	59.900.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	65.890.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peraltan Kerja Kantor	1 tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	16.500.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	2 orang	22.200.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	24.420.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	132.535.000			145.788.500	
2	12	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas /operasional, dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	8 unit	122.535.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	134.788.500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor	1 unit	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	11.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	002			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase rumah tangga yang memiliki KK	95	262.500.000			1.429.277.200	
						persentase penduduk ber KTP	100					
2	12	002	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan pendaftaran penduduk	100%	212.500.000			1.174.226.350	
2	12	002	2.01	001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Data Penduduk yang Valid	5000 orang	25.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	81.079.900	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	002	2.01	002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terbitnya Dokumen Kependudukan	12 bulan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	591.474.400	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	002	2.01	004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	12 bulan	102.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	283.625.100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	12	002	2.01	007	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terbitnya Dokumen kependudukan (KK dan KIA)	12 bulan	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	218.046.950	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	002	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	95%	50.000.000			255.050.850	
2	12	002	2.03	001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pendaftaran Penduduk	12 bulan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	93.050.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	002	2.03	005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta Sosialisasi	180 orang	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	162.000.850	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	003			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	97	262.500.000			949.647.310	
2	12	003	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	10500 dokumen	192.500.000			666.502.760	
2	12	003	2.01	001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	10500 dokumen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	96.479.900	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	003	2.01	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4211 orang	112.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	416.942.900	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	003	2.01	003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil melalui Pemuatlhiran Data Akta Pencatatan Sipil	5000 data	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	153.079.960	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	003	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan Catatan Sipil	100%	70.000.000			283.144.550	
2	12	003	2.02	003	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 tahun	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	68.427.700	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	003	2.02	006	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat terkait dengan pencatatan Sipil	1 Tahun	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	003	2.02	008	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	120 orang	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	174.716.850	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	004			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	170.000.000			954.750.500	
2	12	004	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya laporan agregat kependudukan	2 laporan	35.000.000			168.971.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
2	12	004	2.01	002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersusunnya laporan agregat semester I, laporan agregat semester II dan Profil	33 opd	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	168.971.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	004	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi kependudukan	100%	135.000.000			785.779.500		
2	12	004	2.03	001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolan Informasi Kependudukan	40 opd dan kec	44.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	143.297.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	004	2.03	003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhnya Pembangunan dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	1 tahun	26.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	473.838.200	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	004	2.03	005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi	100 orang	65.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	168.644.300	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	005			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data profil kependudukan	100%	30.000.000			40.459.100		
2	12	005	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	tersediannya dokumen profil kependudukan	1 dokumen	30.000.000			40.459.100		
2	12	005	2.01	002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersedianya Data konsolidasi Bersih (DKB)Semester	50 kecamatan dan nagari	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.459.100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.250.000.000	
2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks pemberdayaan gender	54,15	530.000.000			580.000.000		
2	08	002	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persenttase OPD responsif gender	15%	55.000.000			105.000.000		
2	08	002	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG	1 tahun	30.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	30.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	002	2.01	003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1. Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG 2. Terlaksananya Advokasai kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PPRG 3. Terlaksananya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	33 Perangkat daerah 4 Perangkat daerah 3 kasus	25.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	002	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang difasilitasi	3 Lembaga	475.000.000			475.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	08	002	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Terlaksananya fasilitasi kegiatan GOW Kab. Solok Selatan 2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan DWP Kab. Solok Selatan 3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan IKA DPRD Kab. Solok Selatan	1 tahun 1 tahun 1 tahun	475.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	475.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,018	25.000.000			30.000.000	
2	08	003	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	25.000.000			30.000.000	
2	08	003	2.01	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelayanan perlindungan perempuan	1 tahun	25.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	30.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	004			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	20%	575.000.000			575.000.000	
2	08	004	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	14 kegiatan	575.000.000			575.000.000	
2	08	004	2.01	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya rumusan kebijakan kabupaten layak anak	1 dokumen	25.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	35.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	004	2.01	002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah duta anak	3 orang	25.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	40.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	004	2.01	003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dihasilkan kader kader desa wisata yang memahami tugasnya diperoleh kader asman yang dapat memanfaatkan TOGA untuk mengatasi masalah kesehatan diperolehnya tenaga pendidik PAUD yang benar-benar memahami tupoksinya sebagai pendidik kader yang mendapat pelatihan dapat menerapkan cara penanaman secara hidroponik meningkatkan kinerja kader dalam mendata dan mengelola administrasi PKK meningkatnya jumlah kader yang berprestasi dan tangguh ditingkat nagari dan kecamatan	300 orang 94 orang 65 orang 94 orang 47 Nagari 36 orang	525.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	500.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					meningkatkan jumlah pengurus TP-PKK nagari dan kecamatan yang berpengetahuan dalam mendidik dan mengasuh anak dan remaja meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi bagi kehidupan meningkatkan ketahanan pangan keluarga di tingkat rumah tangga meningkatkan kinerja dan ketrampilan kader UP2K di nagari dan kecamatan meningkatkan pengetahuan ibu-ibu kader PKK tentang cara dan etika berpakaian dan bergaul terlaksannya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	54 orang 94 posyandu 47 nagari 94 kelompok 108 orang 100 %						
2	08	005			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang responsif gender	18%	20.000.000			25.000.000	
2	08	005	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender kabupaten	1 dokumen	20.000.000			25.000.000	
2	08	005	2.01	001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya data Gender Kabupaten solok selatan	1 dokumen	20.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	25.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status kabupaten layak anak	sudah	20.000.000			20.000.000	
2	08	006	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya forum/jejaring lembaga layanan kualitas hidup anak	1	20.000.000			20.000.000	
2	08	006	2.02	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya forum/jejaring lembaga layanan kualitas hidup anak	1 Forum/Jejaring	20.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	20.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditangani	100%	20.000.000			20.000.000	
2	08	007	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100%	20.000.000			20.000.000	
2	08	007	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	1 tahun	20.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	20.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3.351.104.474			7.102.591.253	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	14	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	2.893.264.474			3.720.317.253	
2	14	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.438.504.474			3.018.217.253	
2	14	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.331.504.474	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	2.636.829.013	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga kontrak daerah	36 orang	107.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	381.388.240	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	274.160.000			295.000.000	
2	14	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	59.160.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	30.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	15.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 tahun	200.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	250.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang yang tersedia	100%	45.600.000			46.600.000	
2	14	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	1 tahun	2.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	15.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	10.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	10.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	14	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	1 orang	18.600.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	18.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	135.000.000			360.500.000	
2	14	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	43 unit	115.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	115.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya gedung kantor	1 unit	20.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	245.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan akseptor KB aktif	81,25%	327.340.000			3.276.774.000	
2	14	003	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya pelayanan KB melalui Bhakti IBI,	4 kegiatan	65.000.000			106.200.000	
2	14	003	2.01	003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	tersedianya alat kontrasepsi dan Side efek Implant	1 Paket	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	15.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.01	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	terlaksananya pelayanan KB melalui Bhakti IBI, BAYANGKARA, TMKK, HKG PKK	4 kegiatan	50.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	90.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedinanya operasional PKKBD dan Sub PKKBD	12 Bulan	246.840.000			1.416.776.000	
2	14	003	2.03	010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	jumlah kelompok atau kader yang dilatih	30 kelompok/kader	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	15.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	2.03	011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	terlaksananya operasional PKKBD dan Sub PKKBD Terlaksananya Pembangunan/Alih Fungsi/ Rehab Balai Penyuluh KB (DAK) Terlaksananya pembangunan/Alih Fungsi/ Rehab Gudang dan Alat Kontrasepsi (DAK)	80 % 9 paket 1 paket	231.840.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.401.776.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga (DAK) Terlaksananya Pengadaan Sarana Transportasi KB (DAK)	37 paket/unit 5 unit						
2	14	003	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kelompok masyarakat peduli KB	7 kelompok	15.500.000			15.780.000	
2	14	003	2.04	001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB	7 kelompok	15.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	15.780.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	32,50%	130.500.000			105.500.000	
2	14	004	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga lansia sehat mandiri yang dibina	30 keluarga	110.500.000			95.500.000	
2	14	004	2.01	001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	jumlah keluarga balita yang terbina jumlah keluarga lansia sehat dan mandiri jumlah remaja yang berkarakter dan berpengetahuan jumlah remaja yang mempunyai kepedulian masalah remaja jumlah remaja yang visioner yang terhindar dari resiko triat (KRR)	30 keluarga 30 keluarga 30 orang 50 % 4 orang	110.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	95.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	004	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan SDM UPPKS	30 kelompok	20.000.000			10.000.000	
2	14	004	2.02	002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah UPPKS yang melakukan pelatihan	30 kelompok	20.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	10.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.517.732.615			3.947.771.252	
2	15	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.958.232.615			3.223.771.252	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	15	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	2.868.232.615	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	3.133.771.252	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan Yang Dibayarkan Honorarium Keuangan	10 Orang	90.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	90.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	262.500.000			329.000.000	
2	15	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	60 Item	5.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	5.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Administrasi Perkantoran	5 Unit/Tahun	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	40.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	2.500.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	3.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biaya Photo Copy Biaya Spanduk Jumlah Biaya Cetak Blangko , kwitansi dan MAP	50000 Lembar 100 Meter 900 Buah	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Mami Rapat Jumlah Mami Tamu Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Perjalan dinas Dalam Kota	500 Orang / Porsi 100 Orang / Porsi 6 Kali/Tahun 425 Kali/Tahun	200.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	250.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	37.000.000			45.000.000	
2	15	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	200 Lembar	2.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	3.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Air Per 1 Kubik Jumlah Biaya Listrik Per 1 kWh	3400 Kubik 14000 kWh	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di service	10 Unit	10.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	12.000.000	Dinas Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	15	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	260.000.000			350.000.000	
2	15	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang memerlukan pemeliharaan, bbm, pajak dan KIR	36 Unit	200.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	250.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab	2 Unit	60.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	% Penurunan Angka Kecelakaan	6%	1.150.000.000			1.295.000.000	
						Rasio Ketersediaan Angkutan Umum	0,6					
2	15	002	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	% Tersedianya Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	60%	490.000.000			500.000.000	
2	15	002	2.02	002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	23 Unit	490.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	500.000.000	Dinas Perhubungan
						Panjang Pemasangan Guadrail	300 Meter					
2	15	002	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Type C yang beroperasi	2 Terminal	145.000.000			150.000.000	
2	15	002	2.03	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Muara Labuh	1 Unit	145.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan	150.000.000	Dinas Perhubungan
						Terminal Padang Aro	1 Unit					
2	15	002	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir yang telah berizin dan beroperasi	2 Lokasi	30.000.000			40.000.000	
2	15	002	2.04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Terkoordinasi Dengan Stakhorder Lainnya	12 Bulan	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	40.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rata-rata Kendaraan yang diuji	10 kno/hari	95.000.000			125.000.000	
2	15	002	2.05	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM Yang Handal Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor	3 Orang	35.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05	004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Bukti Lulus Uji (Smart Card)	1200 Buah	30.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	35.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05	007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dikalibrasi	6 Buah	15.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	20.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2.05	008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pelaksaan Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Terkoordinasi Dengan Stekholder Lainnya	1 Tahun	15.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	20.000.000	Dinas Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
2	15	002	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Kegiatan MRLL	9 Kegiatan	325.000.000			400.000.000		
2	15	002	2.06	001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen WTN Jumlah kegiatan Forum Lalu Lintas Sosialisasi SIPENCATAR 2022	1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian	50.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	002	2.06	004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pengamanan Lalu Lintas	6 Event/ Kegiatan	300.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	350.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	002	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang dinilai	12 Dokumen	15.000.000			20.000.000		
2	15	002	2.07	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi ANDALALIN	1 Tahun	15.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	20.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	002	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan yang dilaksanakan	12 Kali/ Tahun	25.000.000			30.000.000		
2	15	002	2.09	002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum (Barang dan Orang)	12 Kali/Tahun	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	002	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Jaringan Trayek	1 Dokumen	25.000.000			30.000.000		
2	15	002	2.12	001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Tersusunnya Rute Jaringan Trayek Angkutan Desa	1 Dokumen	25.000.000	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	003			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	% Penduduk yang terlayani angkutan sungai	50%	20.000.000			30.000.000		
2	15	003	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga yang Beroperasi	4 Lokasi	20.000.000			30.000.000		
2	15	003	2.13	004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Aktifitas dan Kegiatan Dalam Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dapat Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	12 Bulan	20.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	30.000.000	Dinas Perhubungan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.479.841.023	
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.153.010.143			3.961.841.023		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	16	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.613.710.143			3.370.591.023	
2	16	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	28 Orang	2.529.630.143	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.278.103.023	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang	10 Orang	84.080.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	92.488.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	303.500.000			331.870.000	
2	16	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.300.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Pendukung Peralatan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor	5 Jenis 33 Jenis	70.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	77.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	20 Jenis	8.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	9.350.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	22.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	22.220.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	150 Porsi 45 Porsi 8 Kali 70 Kali	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	85.800.000			94.380.000	
2	16	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Materai	400 Lembar	4.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Air Per 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Listrik Per 1 Tahun	400 Kubik 25000 KWh	38.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	41.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis jasa perbaikan peralatan kerja/Peralatan Kantor	5 Jenis	6.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Penjaga Kantor	2 Orang 1 Orang	37.800.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	41.580.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana perkantoran yang terpeliharaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	150.000.000			165.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	16	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional, jasa perizinan kendaraan dinas / Operasional	11 Unit	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	165.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	60 (Indeks)	1.010.000.000			1.111.000.000	
2	16	002	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pernsetase informasi dan komukasi publik yang dikelola	100%	1.010.000.000			1.111.000.000	
2	16	002	2.01	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio	1 Media Informasi	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	82.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Solok Selatan Jumlah Website OPD yang telah dilakukan Updating secara berkala	33 OPD 33 OPD	95.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	104.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek	35 Orang	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan, dibina dan diberdayakan Jumlah Partisipasi dalam Pameran/Expo untuk pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Terjalannya kerjasama dengan media dan kehumasan	10 Kelompok 3 Kali 35 Media	540.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	594.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana Pendukung Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Media Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6 Jenis 20 Media Publikasi 20 Publikasi Informasi	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penurunan jumlah bankspot Nilai Indeks SPBE Persentase penanganan terhadap gangguan Cyber	2,6% 2,14 (Nilai) 100%	2.199.000.000			2.407.000.000	
2	16	003	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang dikelola perangkat daerah	12 Domain/Sub Domain	1.850.000.000			2.035.000.000	
2	16	003	2.01	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub domain OPD yang Tersedia Jumlah Website OPD yang Tersedia	12 OPD 12 OPD	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	33.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	16	003	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Terhubung dengan Internet dan LAN Jumlah Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan	34 OPD 34 OPD	1.820.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.002.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi SPBD yang dikelola	100%	349.000.000			372.000.000	
2	16	003	2.02	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Tenaga Pengamanan Sistem Server dan Aplikasi	1 Orang	54.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	54.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Tenaga Programer yang Dibayarkan	4 Orang	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Lokasi Percontohan berbasis IT (Kampung Digital)	1 Lokasi	30.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	33.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Internet Satelit (VSAT) yang terdata, memenuhi syarat dan ketentuan secara teknis Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata, memenuhi syarat dan ketentuan secara teknis	25 VSAT 57 BTS	65.000.000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	65.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			100.000.000			110.000.000	
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dikelola	100%	100.000.000			110.000.000	
2	20	002	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	80%	100.000.000			110.000.000	
2	20	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Database Statistik Sektoral OPD yang Valid Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka Solok Selatan Jumlah Dokumen PDRB Solok Selatan Jumlah Dokumen Solok Selatan Dalam Angka	1 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			37.500.000			37.500.000	
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian	22%	37.500.000			37.500.000	
2	21	002	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian	7 PD	37.500.000			37.500.000	
2	21	002	2.01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Pendukung Guna Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1 Unit 7 OPD	37.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	37.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		3.872.734.113			8.018.457.524		
2	18	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.217.734.113			6.697.957.524	
2	18	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.654.734.113			3.000.207.524	
2	18	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	25 orang	2.475.034.113	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	2.722.537.524	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	19 orang	179.700.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	197.670.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100	230.500.000			253.550.000	
2	18	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis	5.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	5.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Kertas	45 jenis	38.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	41.800.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	7.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	8.250.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Penjilidan	8 jenis 40000 lembar 4 jenis	30.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	33.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 kali	150.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	165.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	32.500.000			34.200.000	
2	18	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 10000	200 buah	2.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	2.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air dan listrik tiap bulan	24 rekening	20.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	21.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang di servis	18 unit	10.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	11.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	300.000.000			2.610.000.000	
2	18	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	12 unit	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	200.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	2.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	003			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat	1 Investor	50.000.000			305.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
2	18	003	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	3 Event	50.000.000			305.000.000		
2	18	003	2.01	001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	1 Dokumen	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	100%	306.000.000			486.600.000		
2	18	004	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan non Perizinan yang diterbitkan	1000 Izin dan non perizinan	306.000.000			486.600.000		
2	18	004	2.01	001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Informasi Perizinan	2 Aplikasi	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	004	2.01	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin dalam Pengawasan dan Pemantauan	100 izin	156.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	171.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	004	2.01	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Frekuensi Kunjungan Perizinan Keliling Presentase atas permohonan yang diajukan	7 kecamatan 100 persen	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	1	219.000.000			240.900.000		
2	18	005	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1	219.000.000			240.900.000		
2	18	005	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dengan Forum TJSLP dan Perusahaan	6 Kali	65.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	71.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Kemudahan Berusaha	3 Kegiatan	95.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	104.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	005	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan yang dilakukan ke Perusahaan	8 Kali	59.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	64.900.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah media penyampaian informasi perizinan dan non perizinan	2 Media	80.000.000			88.000.000		
2	18	006	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	50%	80.000.000			88.000.000		
2	18	006	2.01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah penyampaian media Informasi Publik Tersedianya Data Perizinan dan Non Perizinan	1 media 1 aplikasi	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	88.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							66.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
3	29	005			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			60.000.000			66.000.000		
3	29	005	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diawasi	2 izin	60.000.000			66.000.000		
3	29	005	2.01	003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diawasi	2 izin	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	66.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.396.200.107			3.896.967.645		
2	23	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	2.271.200.107			2.861.967.645		
2	23	001	2.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.882.700.107			2.101.467.645		
2	23	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran Gaji ASN	12 Bulan	1.809.740.107	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.876.467.645	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan 12 Bulan	72.960.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	225.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	229.500.000			430.000.000		
2	23	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	4.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	1 Tahun 1 Tahun	30.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	180.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	300.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	20.000.000			120.000.000		
2	23	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung yang layak pakai	1 Tahun	20.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	35.000.000			55.500.000		
2	23	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	1 Tahun	2.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran langganan jasa komunikasi	1 Tahun	28.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	35.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	5.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	17.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	104.000.000			155.000.000		
2	23	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang di bayar surat perizinannya Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun 1 Tahun	94.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	105.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	23	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Rehab Bangunan Gedung dan bangunan lainnya	1 Tahun	10.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	002			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan perpustakaan	1000	95.000.000			885.000.000	
2	23	002	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola	1 Pustaka	95.000.000			885.000.000	
2	23	002	2.01	002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gedung Layanan Perpustakaan Tersedianya Perabot untuk Layanan Perpustakaan	1 Gedung 1 Set	42.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	002	2.01	003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, rekaman suara Tersedianya koleksi khusus (bahan perpustakaan yang dilarang) sesuai amanat undang-undang no. 43 tahun 2007 Tersedianya koleksi perpustakaan untuk kaum disabilitas dan lanjut usia Tersedianya layanan perpustakaan deposit	250 Judul 250 Judul 250 Judul 500 Pemustaka	32.500.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	500.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	002	2.01	004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Nagari, dan Sekolah	12 Perpustakaan	20.000.000	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	185.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	003			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno diselamatkan	1 Naskah Kuno	30.000.000			150.000.000	
2	23	003	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	jumlah naskah kuno yang didaftarkan	1 Naskah Kuno	30.000.000			150.000.000	
2	23	003	2.01	001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersedianya koleksi khusus (bahan perpustakaan yang dilarang) sesuai amanat undang-undang no. 43 tahun 2007 Tersedianya koleksi umum koleksi anak di Perpustakaan Daerah Tersedianya naskah kuno yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan Tersedianya penghargaan untuk masyarakat serta yang berperan dalam menyimpan dan melestarikan naskah kuno	1 Naskah Kuno 1 Orang	30.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			125.000.000			800.000.000	
2	24	002			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang dikelola	50%	60.000.000			600.000.000	
2	24	002	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis	10 OPD	60.000.000			600.000.000	
2	24	002	2.01	002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tersedianya dana Pemeliharaan dan penyusutan arsip Dinamis Nagari Tersedianya dana Pemeliharaan dan penyusutan arsip Dinamis OPD Tersedianya dana Pemeliharaan dan penyusutan arsip Dinamis Sekolah	6 Nagari 6 OPD 6 Sekolah	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	002	2.01	003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan arsip ke Nagari	10 Nagari	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah		
					Terlaksananya Pengawasan arsip ke OPD	10 OPD						
					Terlaksananya Pengawasan arsip ke Sekolah	10 Sekolah						
2	24	003			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	30%	65.000.000			200.000.000	
2	24	003	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip baku yang diselamatkan	1 dokumen	35.000.000			100.000.000	
2	24	003	2.02	001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terselamatnya Arsip Akibat Bencana	1 Dokumen	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	003	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip pemekaran yang diselamatkan	1 dokumen	30.000.000			100.000.000	
2	24	003	2.03	003	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	terselamatkannya dan bertambahnya koleksi arsip Pemekaran Kecamatan	1 Kecamatan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2	22	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase atraksi budaya daerah yang dilestarikan	60%	455.000.000			3.100.000.000	
2	22	002	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atraksi budaya daerah yang dilestarikan	12 Atraksi	165.000.000			1.100.000.000	
2	22	002	2.01	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	jumlah Fasilitas Pelestarian Adat (Tradisi Turun Kasawah dan Mandabia Kabau Nan Gadang yang terlaksana Jumlah Festival Saribu Rumah Gadang yang dilaksanakan (Indosiana)	3 event 1 event	120.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	900.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	002	2.01	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Duta Budaya Solok Selatan yang diseleksi	47 Pasang	45.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	002	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan kegiatan kebudayaan daerah	94 Sanggar	170.000.000			700.000.000	
2	22	002	2.02	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	50 Sanggar	170.000.000		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	002	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	100%	120.000.000			300.000.000	
2	22	002	2.03	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Adat Budaya yang dibina	3 Lembaga Adat	120.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina	70%	110.000.000			500.000.000	
2	22	003	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Kesenian yang di bina	50 kelompok	110.000.000			500.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	22	003	2.01	001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Fasilitas Masyarakat dalam bentuk penampilan Seni dan Hiburan Masyarakat	12 Kali	110.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	500.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	005			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya terdata yang dilestarikan	100%	230.000.000			500.000.000	
2	22	005	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	15 Cagar Budaya	230.000.000			500.000.000	
2	22	005	2.01	001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Studi terhadap 15 calon Cagar Budaya	1 Dokumen	230.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	500.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			5.254.718.132			14.045.780.000	
3	26	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.989.718.132			5.650.780.000	
3	26	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	3.488.718.132			4.047.280.000	
3	26	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.328.718.132	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	3.687.980.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DibayarkanTenaga Pengelola Administrasi Kantor Dibayarkan Tenaga Pengelola Keuangan Kantor	22 Orang 21 Orang	160.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	359.300.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	249.000.000			447.500.000	
3	26	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 Gedung Kantor	5.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	17.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor(Laptop 1 unit).	1 Unit	15.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.500.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	20 Buah	6.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	6.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak Tersediannya Foto copy	35 Buah 15000 lembar	23.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	23.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat	120 Kali/hari 1000 Porsi	200.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	291.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	62.000.000			66.000.000	
3	26	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Benda-benda Pos dan Jasa Surat-menyurat Lainnya (Materai dan Perangko)	12 Bulan	2.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	6.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyedian Jasa Telekomunikasi Tersediannya layanan Air Tersediannya layanan Listrik	12 Paket 4000 Kubit 8400 kwh	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	60.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	190.000.000			210.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	26	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	9 Unit	150.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Gedung Kantor	1 Unit	25.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	40.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Peralatan Gedung	20 Unit	15.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	002			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi wisata yang siap dipasarkan	10 Objek wisata	900.000.000			6.395.000.000	
3	26	002	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	5 Objek Wisata	250.000.000			4.000.000.000	
3	26	002	2.02	002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Master Plan Pengembangan KSP	1 Dokumen	250.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	2.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	002	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek wisata unggulan yang di kembangkan	1 Objek wisata	650.000.000			2.395.000.000	
3	26	002	2.03	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan bangunan pendukung Objek Wisata HWB (Rumah Spa)	1 Unit	150.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	1.700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	002	2.03	004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Objek Wisata	5 Objek Wisata	420.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	002	2.03	006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum komunikasi Pegiat Wisata yang dikembangkan dengan fasilitas	2 Kali	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	165.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	003			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan kunjungan wisata	25%	275.000.000			1.000.000.000	
3	26	003	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	36,196 Kunjungan	275.000.000			1.000.000.000	
3	26	003	2.01	001	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya dan termanfaatkannya Aplikasi Informasi dan Pemasaran Pariwisata (Digital Tourism)	1 Aplikasi	75.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	003	2.01	002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang dilaksanakan/diikuti	2 Event	125.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	750.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	003	2.01	003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data Pariwisata	2 Dokumen	75.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	005			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata terakreditasi	25 Orang	90.000.000			1.000.000.000	
3	26	005	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di fasilitas	50 Orang	90.000.000			1.000.000.000	
3	26	005	2.01	002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelatihan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan	1 Kali	90.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
					Jumlah pelatihan Sumber Daya Manusia Penggiat wisata	1 Kali		Berkeadilan	daya beli masyarakat				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			25.073.822.397				27.386.950.000	
3	27	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	10.583.872.397			11.520.950.000		
3	27	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	9.864.372.397			10.733.000.000		
3	27	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	9.634.372.397	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	10.500.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	28 Orang	230.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	233.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	287.500.000			320.750.000		
3	27	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Lampu Sorot Tersedianya Instalasi Internet Tersedianya Komponen Instalasi air Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 unit 1 unit 1 Instalasi air 1 Instalasi listrik	5.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	6.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	48.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 tahun	7.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	8.250.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan Jumlah Fotocopy/Penggandaan	10 jenis 40000 Lembar	35.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	38.500.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	1 tahun 1 tahun	200.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	220.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	62.000.000			68.200.000		
3	27	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	200 Lembar	2.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	2.200.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 tahun	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	66.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	370.000.000			399.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	27	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	280.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	300.000.000	Dinas Pertanian
3	27	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	30.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	33.000.000	Dinas Pertanian
3	27	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehap Gedung Kantor/Rumah Dinas	1 unit	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	66.000.000	Dinas Pertanian
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi hasil pertanian		11.577.450.000			12.786.500.000	
						Padi	84.233 Ton					
						Jagung	92.837 Ton					
						Kacang Tanah	870 Ton					
						Manggis	448 Ton					
						Cabe	7.026 Ton					
						Bawang Merah	43.05 Ton					
						Kelapa Sawit	52.654 Ton					
						Kopi	3.139 Ton					
						Daging	1.595,47 Ton					
						Telur	434,24 Ton					
3	27	002	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	170.000.000			187.000.000	
3	27	002	2.01	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Optimalisasi pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian komoditi tanaman pangan (teknologi dan spesifik lokasi)	48 kali	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Pertanian
						terlaksananya pengawasan pupuk pestisida	40 Kios					
3	27	002	2.01	002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	terlaksananya pendampingan penyusunan RDKK, update dan entry data e-RDKK, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	15000 orang	120.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	132.000.000	Dinas Pertanian
3	27	002	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	90%	1.077.450.000			1.226.500.000	
3	27	002	2.02	001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jaminan kemurnian komoditi tanaman pangan (padi sawah dan padi ladang), 2 MT setiap tahun	1 VARIETAS	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Pertanian
						Pengajuan Sertifikat Varietas Unggul Komoditi Tanaman Pangan	1 komoditi					
3	27	002	2.02	002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Angka Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	500 EKOR	587.450.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	687.500.000	Dinas Pertanian
						Penambahan luasan kawasan Bawang Merah	1 HEKTAR					
						Penambahan luasan kawasan cabai	1 HEKTAR					
						Penambahan luasan kawasan Manggis	5 HEKTAR					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
						Terlaksananya upaya peningkatan kualitas SDG Padi sawah dan padi ladang	1 LOKASI					
3	27	002	2.02	003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan / Pinang Optimalnya pemanfaatan SDG dan benih berlabel komoditi tanaman pangan/benih Padi Pengadaan Benih Jagung	10 HEKTAR 500 HEKTAR 20 HEKTAR	440.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	484.000.000	Dinas Pertanian
3	27	002	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	100%	50.000.000			70.000.000	
3	27	002	2.03	001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan, Pengawalan dan Pembinaan Kelompok Tani Peternak	10 kelompok	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	70.000.000	Dinas Pertanian
3	27	002	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	100%	40.000.000			40.000.000	
3	27	002	2.04	001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	jumlah produk legal dan terdaftar	3 produk	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan dava beli masvarakat	40.000.000	Dinas Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	27	002	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan Bibit Unggul dan hijauan pakan ternak	100%	10.240.000.000			11.263.000.000	
3	27	002	2.06	001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak Sapi didistribusikan Jumlah ternak unggas didistribusikan	500 ekor 1000 ekor	10.190.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	11.208.000.000	Dinas Pertanian
3	27	002	2.06	002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Luasan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	10 HEKTAR	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktifitas pertanian utama /Tahun Padi Jagung Kacang Tanah Kelapa Sawit Kopi	 4,11 Ton 5,6 Ton 1,85 Ton 6,26 Ton 2,07 Ton	1.230.000.000			1.221.000.000	
3	27	003	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan luas panen pertahun	5%	390.000.000			297.000.000	
3	27	003	2.01	001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pelaksanaan Ubinan Swakarsa sebagai upaya Optimalisasi penguatan data produksi komoditi tanaman pangan melalui ubinan swakarsa Tertatanya kawasan LP2B, KP2B dan LCP2B sesuai lokasi yang ditetapkan	48 kali 7000 HEKTAR	120.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	132.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.01	002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Ditetapkannya kawasan LP2B untuk meningkatkan produksi pertanian	7.000 HEKTAR	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dari hilir hingga hulu Perencanaan Jaringan Irigasi TersierKetersediaan Cost Sharing kegiatan APBN (Operasional, Perencanaan dan Pengawasan RJIT, Embung, dll)	12 kali 12 kali	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.01	004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	tersusunnya masterplan kajian tanaman padiPenyusunan masterplan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan (Spasialisasi Varietas Komoditi Tanaman Pangan)	1 dokumen	120.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	0	Dinas Pertanian
3	27	003	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan luas tanam petani pertahun	5%	770.000.000			847.000.000	
3	27	003	2.02	001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Membaik dan menambah jaringan irigasi tersier	100 HEKTAR	150.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	165.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.02	003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi jalan usaha tani / produksi di RPC	1 km	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.000.000	Dinas Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	27	003	2.02	004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan/Rehabilitasi Pipanisasi di Sangir Jujuan	1 unit	120.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	132.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.02	006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan/Rehabilitasipintu air	2 unit	70.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	77.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.02	007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Meningkatkan RPH yang ASUH	1 unit	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	88.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.02	009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah unit kerja puskesmas dan IB Pembangunan Screen House	1 unit 1 unit	250.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan	275.000.000	Dinas Pertanian
3	27	003	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Terbinanya kelompok tani dalam pegembangan peternakan	10 kelompok	70.000.000			77.000.000	
3	27	003	2.04	003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Kelompok Tani Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman Sawit	10 kelompok	70.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	77.000.000	Dinas Pertanian
3	27	004			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan	80%	452.500.000			504.000.000	
						Persentase penurunan kasus penyakit menular hewan	80%					
3	27	004	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus penyakit menular hewan	80%	270.000.000			297.000.000	
3	27	004	2.01	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	peyanaan vaksinasi Rabies	2500 ekor	150.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	165.000.000	Dinas Pertanian
3	27	004	2.01	002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peraturan kepala daerah tentang Rabies dan turunannya sampai ke Nagari peyanaan vaksinasi jembrana peyanaan vaksinasi SE	1 PERATURAN 2000 ekor 2000 ekor	120.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	132.000.000	Dinas Pertanian
3	27	004	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelayanan jasa labor dan medik veteriner	75%	112.500.000			130.000.000	
3	27	004	2.03	001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	pemeriksaan laboratorium dalam surveillance penyakit ternak	2500 sampel	62.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	75.000.000	Dinas Pertanian
3	27	004	2.03	002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	pelayanan kesehatan hewan pelayanan kesehatan hewan	47 NAGARI 3000 LAYANAN	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Pertanian
3	27	004	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaku/Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan/Pelatihan serta Bantuan	88%	70.000.000			77.000.000	
3	27	004	2.04	001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pelaku/Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan/Pelatihan serta Bantuan	6 unit	70.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	77.000.000	Dinas Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	27	005			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	100%	60.000.000			66.000.000	
3	27	005	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	60.000.000			66.000.000	
3	27	005	2.01	005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Luas lahan sawah yang ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	200 HEKTAR	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	66.000.000	Dinas Pertanian
3	27	006			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang dikeluarkan	100%	100.000.000			110.000.000	
3	27	006	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pertanian yang terawasi	80%	100.000.000			110.000.000	
3	27	006	2.01	003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya perusahaan dan plasma perkebunan	18 perusahaan	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.000.000	Dinas Pertanian
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah tingkatan kelas kelompok tani Pemula lanjut Madia	209 Kelatan 11 keltan 1 keltan	1.070.000.000			1.178.500.000	
3	27	007	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Ketersediaan penyuluh pertanian	100%	1.070.000.000			1.178.500.000	
3	27	007	2.01	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pembinaan PERHIPTANI Penguatan BPP Penguatan Posluhnag Penilaian berprestasi ketenagaan dan Kelembagaan penyuluh dan petani Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan petani dalam budidaya dan pengolahan tanaman sawit, kopi arabika dan pinang Terlaksananya penerapan metodologi penyuluhan Terlaksananya pertemuan (Rapat Teknis, Temu Teknis, Temu Tugas, Temu Teknologi, Temu Evaluasi, Temu lapang, Workshop dll) Tersusunnya Program Penyuluhan pertanian Nagari, Kecamatan dan Kabupaten Training BPP (7 BPP)	4 KALI 7 BPP 24 POS LUHNAG 7 BPP 150 ORANG 6 METODE 12 KALI 33 PROGRAMA 14 KALI	400.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	440.000.000	Dinas Pertanian
3	27	007	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian Jumlah Kenaikan Kelas kelompok tani Magang, demplot, kaji Terap bagi petani milenial Meningkatnya jumlah Gapoktan yang aktif	6 paket 4 KELAS KELOMPOK 7 KALI 5 GAPOKTAN	205.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	227.500.000	Dinas Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Meningkatnya jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	1 KEP						
					Pembinaan Kelompok UP3HP	11 kelompok						
					Pengembangan Petani milenial yang mampu mengakses dan berkontribusi dalam pengembangan pasar modern	61 PETANI MILENIAL						
					Penguatan informasi pasar hasil pertanian	96 KALI						
					Penumbuhan dan Pengembangan P4S	3 unit						
					Penumbuhan kelompok UP3HP baru	2 kelompok						
					Penumbuhan Petani milenial	456 PETANI MILENIAL						
					Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian hortikultura	1 KALI						
					Terbentuknya Indikasi Geografis Kopi Arabika Solok Selatan	1 kawasan						
					Terdampinginya Kegiatan sumber dana APBN/APBD Prov dan RPL	3 DIPA						
					Tersedianya informasi harga komoditi perkebunan	13 komoditi						
3	27	007	2.01	003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	penyediaan sarana Penyuluhan elektronik dan media lainnya	7 BPP	250.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	275.000.000	Dinas Pertanian
					penyediaan sarana pertemuan BPP	7 BPP						
					sarana dan Prasarana IT bagi BPP	2 BPP						
					sarana dan Prasarana IT bagi Posluhnag	5 POSLUHNAG						
					(Tenaga kontrak Daerah) di BPP	15 orang						
					Terlaksananya Demplot BPP	7 BPP						
					Terlaksananya Demplot Posluhnag	5 Posluhnag						
					Tersedianya Honor Admin Kostratani	7 Orang						
					Tersedianya operasional Kantor BPP	1 BPP						
					Tersedianya Paket Data Admin BPP	1 BPP						
3	27	007	2.01	004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Penumbuhan dan Pengembangan BUMS	1 BUMS	35.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	38.000.000	Dinas Pertanian
3	27	007	2.01	005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sekolah Lapang di Sekolah	14 paket	180.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	198.000.000	Dinas Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
3	27	004			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan	80%	110.000.000			110.000.000	
3	27	004	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus penyakit menular hewan	80%	110.000.000			110.000.000	
						Persentase penurunan kasus penyakit menular hewan	80%					
3	27	004	2.01	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Angka Jumlah Pelayanan	40 persen	110.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	110.000.000	Dinas Pertanian
						Peningkatan Jumlah Hewan sehat	50 persen					
						Peningkatan Tersedianya Medvet dan Paravet ditiap unit layanan	50 persen					
						Penurunan Angka Hewan Tertular	10 persen					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikator			Prioritas	
					Pesentase Angka Pengawasan keluar masuk Hewan	50 persen		Nasional	Daerah			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			120.000.000		132.000.000		
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi hasil pertanian		120.000.000		132.000.000		
					Padi	84.233 Ton						
					Jagung	92.837 Ton						
					Kacang Tanah	870 Ton						
					Manggis	448 Ton						
					Cabe	7.026 Ton						
					Bawang Merah	43.05 Ton						
					Kelapa Sawit	52.654 Ton						
					Kopi	3.139 Ton						
					Daging	1.595,47 Ton						
					Telur	434,24 Ton						
3	27	002	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	90%	120.000.000		132.000.000		
3	27	002	2.02	002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	tersedianya operasional BBI	1 tahun	120.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	132.000.000	Dinas Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			857.000.000		1.642.000.000		
2	17	003			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi Aktif	67,80%	70.000.000		125.000.000		
2	17	003	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	62,71%	70.000.000		125.000.000		
2	17	003	2.01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	10 Unit	45.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan	75.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
2	17	003	2.01	002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin	10 Unit	25.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	004			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi Berprestasi	2,70%	80.000.000		80.000.000		
2	17	004	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP Koperasi Sehat	63%	80.000.000		80.000.000		
2	17	004	2.01	001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	7 Unit	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	004	2.01	002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi penghargaan	7 Unit	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	005			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan baik	43,08%	65.000.000		180.000.000		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
2	17	005	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan	50%	65.000.000			180.000.000	
2	17	005	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasiann	30 Orang	65.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	180.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	006			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya	5%	30.000.000			250.000.000	
2	17	006	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	115 Koperasi	30.000.000			250.000.000	
2	17	006	2.01	001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan Dukungan difasilitas Pemasaran Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Kemitraan Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	5 Koperasi 10 Koperasi 115 Koperasi	30.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	250.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	007			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya	5%	495.000.000			607.000.000	
2	17	007	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan	90 UMKM	495.000.000			607.000.000	
2	17	007	2.01	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Jumlah Usaha Mikro	9907 UMKM 9619 Usaha Mikro	113.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	180.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	007	2.01	002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	60 Usaha Miko	38.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	75.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	007	2.01	003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi	15 halal/UMKM 15 merek/UMKM	84.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	84.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	007	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lembaga/kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	2 lembaga	42.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	007	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kerjasama dengan Mitra Usaha	1 Lembaga	218.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	218.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	008			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha	1%	117.000.000			400.000.000	
2	17	008	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi Usaha Kecil	15 Usaha Mikro	117.000.000			400.000.000	
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pelatihan	30 Orang	117.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan	400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana Pemasaran	10 Usaha Mikro		Berkeadilan	daya beli masyarakat		Kecil dan Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.625.000.000			2.680.000.000	
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perusahaan yang memiliki Izin	100%	70.000.000			95.000.000	
3	30	002	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang yang diterbitkan	60 Izin	40.000.000			50.000.000	
3	30	002	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan yang difasilitasi	60 izin	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	002	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang dikendalikan.	100%	30.000.000			45.000.000	
3	30	002	2.06	001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Tempat penyimpanan barang berbahaya yang diperiksa	14 lokasi	30.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	45.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	1.885.000.000			1.900.000.000	
3	30	003	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	2 Pasar	1.850.000.000			1.850.000.000	
3	30	003	2.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi/Pasar yang dibangun	2 pasar	1.850.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	1.850.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	003	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pesentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	100%	35.000.000			50.000.000	
3	30	003	2.02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang diBina	30 Pengelola	35.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15%	305.000.000			320.000.000	
3	30	004	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15%	100.000.000			115.000.000	
3	30	004	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang dipantau	7 pasar	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	55.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	004	2.01	003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah lokasi yang diawasi ketersediaan barang pokok	7 lokasi	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	60.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	004	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	65%	115.000.000			115.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	30	004	2.02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang di Pantau	14 Lokasi	25.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	25.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	004	2.02	003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Operasi Pasar	7 Lokasi/Kecamatan	90.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	90.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	004	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsisi yang tersalurkan	65%	90.000.000			90.000.000	
3	30	004	2.03	002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	jumlah distributor Pupuk bersubsidi yang diawasi	5 distributor	40.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	004	2.03	003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	persentase penyaluran pupuk bersubsidi	5 distributor	50.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	006			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	43,30%	265.000.000			265.000.000	
3	30	006	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	43,30%	265.000.000			265.000.000	
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat standar Metrologi yang dibeli jumlah alat uttp yang ditera Jumlah gedung Metrologi yang dibangun	20 alat 1026 unit 1 gedung	185.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	185.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah UTTP yang dilakukan penyuluhan	80 uttp	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)	30%	100.000.000			100.000.000	
3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Penggunaan produk daerah	30 Produk	100.000.000			100.000.000	
3	30	007	2.01	001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi yang dilaksanakan	5 event	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	007	2.01	002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang dipasarkan	30 20 produk	100.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.896.854.465			3.896.854.465	
3	31	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.186.854.465			3.186.854.465	
3	31	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	2.689.354.465			2.689.354.465	
3	31	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	24 orang	2.571.994.465	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masvarakat	2.571.994.465	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
3	31	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertibnya Laporan Keuangan	12 Bulan	117.360.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	117.360.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tertibnya laporan keuangan	12 bulan	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	307.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	307.500.000	
3	31	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	5.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	60.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	7.500.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	7.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	35.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	35.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	200.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	200.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	62.000.000			62.000.000	
3	31	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1500 buah	2.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	2.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	3 Rekening	60.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	60.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	128.000.000			128.000.000	
3	31	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah dalam Kondisi layak pakai	1 tahun	106.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	106.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Gedung	15.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	15.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Barang Milik Daerah dalam Kondisi layak pakai	1 tahun	7.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	7.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun	2 Sentra	579.000.000			579.000.000	
3	31	002	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra Industri Kabupaten	1 Sentra	579.000.000			579.000.000	
3	31	002	2.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra Industri yang akan dikembangkan	5 Sentra	65.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	65.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerhati dan pencinta produk daerah	1 Lembaga	514.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	514.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Industri yang dipantau	100%	80.000.000			80.000.000		
3	31	003	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100%	80.000.000			80.000.000		
3	31	003	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah industri yang di pantau izin industri	26 industri	80.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri terdaftar dalam Aplikasi SIINAS	100%	51.000.000			51.000.000		
3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan informasi industri	1 Aplikasi	51.000.000			51.000.000		
3	31	004	2.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	Jumlah Database Jumlah IKM	1 Dokumen 100 IKM	51.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan	51.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							450.000.000	
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pesentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	100%	450.000.000			450.000.000		
3	30	003	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	450.000.000			450.000.000		
3	30	003	2.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UPT Pasar	1 UPT	450.000.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan	450.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							355.000.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	105.000.000			240.000.000		
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			180.000.000		
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 Persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	180.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian PUM)	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			60.000.000		
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	2 Unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian PUM)	
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Tinggi	250.000.000			2.085.000.000		
4	01	002	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan pemerintahan yang terfasilitasi	100%	250.000.000			2.085.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	01	002	2.01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Hari Besar Nasional dan Daerah yang Difasilitasi Peringatannya	3 kali	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	245.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian PUM)
						Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintah	2 kali					
4	01	002	2.01	002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pembakuan nama rupabumi	1 dokumen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.365.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian PUM)
						Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Penataan Batas Wilayah	1 kecamatan					
						Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pemerintahan Kecamatan	4 kali					
4	01	002	2.01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKPD dan Nilai Sangat Tinggi	2 dokumen	160.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	475.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian PUM)
						Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM	1 dokumen					
						Jumlah Kerjasama Daerah	20 MoU					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			310.000.000			960.000.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	105.000.000			130.000.000	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			100.000.000	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	100 persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			30.000.000	
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan bantuan hukum daerah yang difasilitasi	100%	205.000.000			830.000.000	
4	01	002	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100%	205.000.000			830.000.000	
4	01	002	2.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase nagari yang dilakukan monitoring terhadap produk hukumnya	100 persen	80.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	280.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
						Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100 persen					
4	01	002	2.03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase OPD yang melakukan konsultasi hukum	100 persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
						Persentase OPD yang menyampaikan data pelaksanaan HAM	100 persen					
						Persentase Perkara yang tertangani	100 persen					
4	01	002	2.03	003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	1 kali	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	250.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
						Persentase penyusunan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan	100 persen					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
						Persentase Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	100 persen					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			6.180.000.000			6.995.000.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	105.000.000			60.000.000	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			0	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	0	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			60.000.000	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	1 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan pemerintahan bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	100%	6.075.000.000			6.935.000.000	
4	01	002	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas kebijakan bidang kesejahteraan dan Keagamaan	100%	6.075.000.000			6.935.000.000	
4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah cabang lomba jumlah cabang yang difasilitasi Jumlah Guru Tahfidz yang difasilitasi jumlah masjid yang dikunjungi jumlah rapat koordinasi dan mobitoring urusan terkait jumlah tausiah ramadhan jumlah wirid ramadhan pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Koto Parik Gadang Diateh)) pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Pauh Duo) pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Sangir) pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Sangir balai janggo) pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Sangir batang hari) pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Sangir jujuan) pemberian bantuan hibah masjid (kecamatan Sungai Pagu) tersediannya bantuan operasional BAZNAS Tersediannya bantuan operasional LPTQ	4 cabang 5 cabang 275 Orang 35 masjid 6 kali 15 kali 12 kali 3 masjid 3 masjid 3 masjid 3 masjid 3 masjid 3 masjid 1 tahun 1 tahun	3.770.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.875.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					tersedianya dana operasional kegiatan organisasi LASQI/MUI	1 tahun						
					Tersedianya bantuan Beasiswa tingkat perguruan Tinggi	100 Orang						
					Tersedianya bantuan Beasiswa tingkat SLTA sederajat	100 Orang						
					Tersedianya Bantuan Operasional PSDKU	1 Tahun						
					Tersedianya Bantuan Operasional Widyaswara	1 Tahun						
4	01	002	2.02	002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Fasilitas Jemaah Haji	2 kali	490.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	590.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
					Jumlah Peserta Pembinaan Lembaga Keagamaan	100 orang						
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring Urusan Terkait	12 kali						
					Jumlah UKS yang difasilitasi	1 UKS						
					Tersedianya Operasional Peduli Anak Yatim	1 tahun						
4	01	002	2.02	003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlag Guru Thafidz yang dibina	275 orang	1.815.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.470.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
					Jumlah Guru BK yang dibina	100 orang						
					Jumlah Guru Pesantren yang mengikuti TOT	120 orang						
					Jumlah Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS)	100 orang						
					Jumlah Kafilah yang difasilitasi	100 Qori dan Qori						
					Jumlah Peserta Pembinaan /ABS-SBK	100 orang						
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring Urusan Terkait	12 kali						
					Jumlah Ulama,Da	150 orang						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			675.000.000			1.083.500.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	675.000.000			1.083.500.000	
4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100%	25.000.000			55.000.000	
4	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Sosial	20 orang	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	105.000.000			121.000.000	
4	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah / buku mengenai informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	300 majalah / buku	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	66.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat rakor yang diikuti	100 persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	60.000.000			99.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 mobil 2 motor	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	99.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4	01	001	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100%	485.000.000			808.500.000	
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Terfasilitasi keprotokolan pimpinan	1 tahun	85.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	93.500.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4	01	001	2.14	002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah media publikasi informasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	17 media publikasi	140.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	275.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4	01	001	2.14	003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase dokumetasi kegiatan pimpinan	100 persen	260.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	440.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			240.000.000			445.000.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	105.000.000			145.000.000	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			100.000.000	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			45.000.000	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaran dinas / opreasional yang terpelihara 1 unit	2 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan layanan pemerintahan bidang Perekonomian	100%	135.000.000			300.000.000	
4	01	003	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi kebijakan bidang perekonomian	100%	135.000.000			300.000.000	
4	01	003	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	2 dokumen 2 kali	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)
4	01	003	2.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan perumusan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	1 tahun	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
4	01	003	2.01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan Urusan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 tahun	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			270.000.000			610.000.000		
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	165.000.000			360.000.000		
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	60.000.000			100.000.000		
4	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			200.000.000		
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	100 %	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			60.000.000		
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara/terawat	2 Unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan layanan pemerintahan bidang Pembangunan	100%	105.000.000			250.000.000		
4	01	003	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi kebijakan bidang Pembangunan	100%	105.000.000			250.000.000		
4	01	003	2.02	002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan serta monitoring pelaksanaan tugas urusan PUTR, Pertanian, Perkim dan Lingkungan Hidup	3 Kebijakan	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	003	2.02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pelaporan tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	33 OPD	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			345.000.000			1.550.000.000		
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			155.000.000			470.000.000		
4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan PBJ	100%	50.000.000			305.000.000		
4	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pokja Pemilihan yang Fungsional dan Pengelola PBJ yang memahami Perpres PBJ	28 Orang	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas						
									Nasional	Daerah					
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			120.000.000				
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 Persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)			
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			45.000.000				
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang dipelihara/ dirawat	2 Unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)			
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terkoordinirnya kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	190.000.000			830.000.000				
4	01	003	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perentase cakupan pelayanan pengadaann barang dan jasa	100%	190.000.000			830.000.000				
4	01	003	2.03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Klarifikasi Rekanan ke Perusahaan Pendukung Persentas Tender yang terlaksana 100 % Melalui Pokja Pemilihan (ULP)	100 Persen 100 Persen	70.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	350.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)			
4	01	003	2.03	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Aplikasi Pelaporan Jumlah Tender yang terlaksana 100% dan Pembuatan Aplikasi Persiapan LPSE menuju ISO 9001	1 Aplikasi 100 Persen 1 Award	90.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	330.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)			
4	01	003	2.03	003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya advokasi pengadaan barang dan jasa	1 kegiatan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							440.000.000		1.020.000.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	440.000.000			1.020.000.000				
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	75.000.000			120.000.000				
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 Persen	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)			
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	30.000.000			100.000.000				
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	1 Unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)			
4	01	001	2.13		Penataan Organisasi	Tersusunnya organisasi tepat struktur dan fungsi	100%	335.000.000			800.000.000				
4	01	001	2.13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Organisasi tepat struktur sesuai RPJMD Persentase jabatan administrasi yang dialihfungsikan ke jabatan fungsional persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetisi jabatan Persentase Perubahan Perbup SOTK	100 persen 100 persen 100 persen 100 Persen	135.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	01	001	2.13	002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Jumlah Perbup tata naskah dinas Persentase OPD yang melaksanakan pelaporan pengaduan melalui Lapor S4PN Persentase Perbup Proses Bisnis yang ditetapkan	80 Nilai 1 Perbup 1 Perbup 100 persen 100 %	120.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
4	01	001	2.13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	100 100	80.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			15.919.708.117			20.162.863.665	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	15.919.708.117			20.162.863.665	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	10.094.708.117			12.192.863.665	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sesuai aturan	12 Bulan	9.744.708.117	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.302.863.665	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dengan Baik	12 Bulan	350.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.820.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tertibnya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sesuai Aturan	12 Bulan	0	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	70.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	2.180.000.000			2.430.000.000	
4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dengan Maksimal	12 Bulan	80.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	80.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai	12 Bulan	90.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	90.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Memadai	12 Bulan	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Kunjungan Tamu Dengan Tertib	12 Bulan	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sesuai Aturan	12 Bulan	1.800.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	1.600.000.000			2.950.000.000	
4	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Aturan	2 Unit	1.100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.950.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang memadai	12 Bulan	500.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.000.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	385.000.000			510.000.000	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Memadai	12 Bulan	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Dengan Memadai	12 Bulan	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai	12 Bulan	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Dengan Maksimal	12 Bulan	80.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	80.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	1.380.000.000			1.700.000.000	
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Atau Lapangan Dengan Baik	12 Bulan	900.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dengan Baik	12 Bulan	400.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	500.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dengan Baik	12 Bulan	80.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya kerumahtanggaan sekretariat daerah	100%	130.000.000			130.000.000	
4	01	001	2.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Memadai	12 Bulan	130.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	130.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	150.000.000			250.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Terfasilitasinya Keprotokolan Yang Baik	12 Bulan	125.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	01	001	2.14	002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan Sesuai Aturan	12 Bulan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			4.255.000.000			5.770.000.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	4.255.000.000			5.770.000.000	
4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	100%	220.000.000			250.000.000	
4	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	12 Bulan	220.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	250.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	1.890.000.000			2.370.000.000	
4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan baik	12 Bulan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 Bulan	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan maksimal	12 Bulan	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tertib	12 Bulan	1.750.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.200.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	250.000.000			500.000.000	
4	01	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhi sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya sesuai aturan	12 Bulan	250.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	500.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	305.000.000			410.000.000	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinyajasa surat menyurat dengan baik	12 Bulan	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan baik	12 Bulan	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas						
									Nasional	Daerah					
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 Bulan	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)			
4	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan baik	12 Bulan	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)			
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	540.000.000			740.000.000				
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	515.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	700.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)			
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	12 Bulan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)			
4	01	001	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Kepala Daerah	100%	1.050.000.000			1.500.000.000				
4	01	001	2.12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Dengan Maksimal	12 Bulan	600.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	800.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)			
4	01	001	2.12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Dengan Maksimal	12 Bulan	450.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	700.000.000	Sekretariat Daerah (KDH/WKDH)			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	02				SEKRETARIAT DPRD							27.526.324.961		38.540.610.000	
4	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	17.413.454.961			23.602.610.000				
4	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	13.887.324.961			16.144.840.000				
4	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan Anggota DPRD yang dibayarkan	58 orang	13.742.484.961	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	16.000.000.000	Sekretariat DPRD			
4	02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN	13 orang	144.840.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	144.840.000	Sekretariat DPRD			
4	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan	100%	220.000.000			230.000.000				
4	02	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Asdeski dan Bimtek	33 Orang	220.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	230.000.000	Sekretariat DPRD			
4	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	1.220.000.000			2.359.270.000				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan yang tersedia	1 Tahun	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	87 unit	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	400.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik yang tersedia	20 Jenis	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	250.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	15 Jenis	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	194.270.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	700.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.100.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan penunjang yang tersedia	100%	205.000.000			313.500.000	
4	02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2500 Buah	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening sumber daya yang terbayarkan	12 Bulan	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	300.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	805.000.000			1.040.000.000	
4	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 unit	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	6 unit	205.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	270.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	400.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	550.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	425.000.000			690.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	02	001	2.15	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	150 stel	375.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	600.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.15	003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up	25 Orang	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	90.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100%	651.130.000			1.125.000.000	
4	02	001	2.16	003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan	115 Kali	651.130.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.125.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda	100%	10.112.870.000			14.938.000.000	
4	02	002	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ranperda yang menjadi Perda	100%	4.853.829.500			6.500.000.000	
4	02	002	2.01	002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda Usulan Pemda yang Dibahas DPRD Menjadi Perda	6 perda	4.853.829.500	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.500.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	13 kali	500.000.000			1.250.000.000	
4	02	002	2.03	001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Hearing/Dialog Bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	2 Kali	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.03	002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Hearing/Dialog Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	2 Kali	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.03	003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hearing/Dialog Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kali	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.03	004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Hearing/Dialog Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	2 Kali	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	110.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.03	005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 Kali	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang mendapat peningkatan SDM	100%	1.183.934.000			2.118.000.000	
4	02	002	2.04	002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	25 Orang	738.934.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.350.000.000	Sekretariat DPRD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
4	02	002	2.04	003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	12 kegiatan	85.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	180.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04	004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	7 Orang	108.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	294.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.04	005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	252.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	294.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersusunnya pokok pokok pikiran DPRD	1 dokumen	720.407.500			1.770.000.000	
4	02	002	2.05	001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	2 Kali	250.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	850.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.05	003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	3 Kali	470.407.500	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	700.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	6 kali	2.854.699.000			3.300.000.000	
4	02	002	2.08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	6 Kali	2.854.699.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.300.000.000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	01				PERENCANAAN			5.901.481.883			6.298.150.000	
5	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3.751.481.883			3.846.400.000	
5	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	3.156.981.883			3.156.900.000	
5	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	26 ORANG	3.071.781.883	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.071.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan 15 Orang	85.200.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	282.500.000			316.000.000	
5	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	1 Tahun	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Tersedianya Kursi dan Meja Rapat Tersedianya Printer dan Laptop	1 Tahun 50 Set 4 Unit	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	7.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	8.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	22.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi Kedalam dan Luar Daerah	1 Tahun	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	225.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Makan-minum Tamu dan Rapat	1 Tahun	57.000.000			58.500.000	
5	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman	1 Tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	46.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	1 Tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	255.000.000			315.000.000	
5	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun 12 Unit	155.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	80%	1.012.500.000			1.125.000.000	
						Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah RKPD dan RPJMD	80%					
						Persentase pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	71%					
5	01	002	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan dokumen Tahunan tepat waktu (RKPD Tahun 2023, RKPD Perubahan 2022, Renja OPD 2023 dan Perubahan Renja PD 2022)	100%	882.500.000			975.000.000	
5	01	002	2.01	001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen Analisis data kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	1 Laporan	120.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	130.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	01	002	2.01	002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan	1 Laporan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.01	003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Kesepakatan	1 Dokumen	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.01	004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Kesepakatan	1 Dokumen	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.01	005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Kesepakatan	1 Dokumen	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.01	006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Kesepakatan	1 Dokumen	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.01	007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	542.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	545.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan data perencanaan daerah	95%	50.000.000			60.000.000	
						Ketersediaan informasi pembangunan daerah	2 Dokumen					
5	01	002	2.02	002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Database Perencanaan	1 Dokumen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi prioritas perencanaan RKPD dengan RPJMD	95%	80.000.000			90.000.000	
						Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah	90%					
						Persentase kinerja pelaporan tepat waktu	100%					
5	01	002	2.03	001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Laporan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Daerah	1 Laporan					
5	01	002	2.03	003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Per Triwulan	1 Laporan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Per Triwulan	1 Laporan					
						Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021	1 Laporan					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	01	003			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	1.137.500.000			1.326.750.000	
						Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%					
5	01	003	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dan RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD)	90%	360.000.000			409.750.000	
						Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (IKK)	80%					
5	01	003	2.01	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah rumusan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan persentase sinkronisasi tujuan, sasaran dan program RKPD dengan RPJMD lingkup bidang pemerintahan	8 rumusan 100 persen	102.245.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.01	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah renja perangkat daerah yang sinkron dengan Renstra perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan Jumlah renja perangkat daerah yang sinkron dengan RKPD lingkup bidang pemerintahan	30 dokumen 30 dokumen	27.315.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.01	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan	100 Persen	19.154.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	24.250.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.01	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase usulan DAK yang diakomodir lingkup bidang pemerintahan Persentase usulan kebutuhan daerah tertinggal entas yang diakomodir Kementerian dan Lembaga	70 Persen 80 Persen	42.827.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.01	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rumusan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Persentase sinkronisasi tujuan, sasaran dan program RKPD dengan RPJMD lingkup bidang pembangunan manusia	8 rumusan 100 Persen	78.519.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.01	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah renja perangkat daerah yang sinkron dengan Renstra perangkat daerah lingkup bidang pembangunan manusia Jumlah renja perangkat daerah yang sinkron dengan RKPD lingkup bidang pembangunan manusia	12 dokumen 12 dokumen	26.445.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	01	003	2.01	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang pembangunan manusia	100 persen	19.014.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.01	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pengarusutamaan gender Persentase capaian RANDA PUG Persentase usulan DAK yang diakomodir lingkup bidang pembangunan manusia	33 dokumen 100 Persen 100 persen	44.481.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PBidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dan RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD) Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (IKK)	90% 80%	399.000.000			487.000.000	
5	01	003	2.02	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	konsistensi dokumen perencanaaan	3 opd	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya asistensi penyusunan Dok ren daerah	3 opd	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemsikinan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya dokumen penanggulangan kemsikinan erlaksananya asistensi penyusunan Dok ren daerah	1 Lap	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya harmonisasi perencanaan pusat dan daerahokumen penanggulangan kemsikinan erlaksananya asistensi penyusunan Dok ren daerah	4 OPD	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	konsistensi dokumen perencanaaan	3 OPD	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya asistensi penyusunan Dok ren daerah OPD lingkup SDA	4 OPD	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	22.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.02	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya monev perencanaan OPD lingkup SDAasistensi penyusunan Dok ren daerah OPD lingkup SDA	3 OPD	39.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	01	003	2.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya harmonisasi perencanaan pusat dan daerahokumen penanggulangan kemsikinan erlaksananya asistensi penyusunan Dok ren daerah	3 OPD	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dan RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD) Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IKK)	90% 80%	378.500.000			430.000.000	
5	01	003	2.03	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	lokasi pamsimas yang difasilitasi terkoordinirnya penyusunan perencanaan OPD Bidang Infrastruktur	10 lokasi 3 OPD	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	terlaksananya asistensi penyusunan renja OPD Bidang Infrastruktur	3 OPD	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Bidang Infrastruktur	1 laporan	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPIJM dan DAK)	1 laporan	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	terkoordinirnya penyusunan perencanaan OPD Bidang Kewilayahan	3 OPD	85.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	95.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	terlaksananya asistensi penyusunan renja OPD Bidang Kewilayahan	2 OPD	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Bidang Kewilayahan	1 laporan	18.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	003	2.03	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (POKJA PKP, DAK dan BAKTI KOMINFO)	1 laporan	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			150.000.000			165.000.000	
5	05	002			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbbangan dalam perumusan kebijakan daerah	20%	150.000.000			165.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	05	002	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya data kelitbangan	1 dokumen	50.000.000			55.000.000	
5	05	002	2.01	001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	002	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yag dimanfaatkan	100%	100.000.000			110.000.000	
5	05	002	2.04	003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya pembinaan koordinasi konsultasi fasilitas pengukuran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, daya saing daerah dan kepemimpinan daerah	4 Indeks	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	002	2.04	004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rekomendasi Inovasi Daerah	1 dokumen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	02				KEUANGAN			125.018.742.261			125.023.742.261	
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	21.475.693.211			21.480.693.211	
5	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	55.150.000			60.150.000	
5	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKD yang ditetapkan (Renstra, Renja, RKA/DPA-BK (2 Dok), RKAP/DPA-PPKD (2	8 Dokumen	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan BPKD yang ditetapkan ((Lakip (10 Dok), PK (38 Dok), RKT (10 Dok), IKU (1 Dok), RAP (10 Dok), LKPJ (6 Dok), LPPD (10 Dok), EKPP (1 Dok), SIRUP (1 Dok), SPIP (1 Dok), Gender ('1 Dok), Laporan Fisik Bulanan BPKD (12 Dok), Laporan Evaluasi Kinerja BPKD (6 Dok)	107 Dokumen	30.150.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.150.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	20.198.170.836			20.198.170.836	
5	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN BPKD yang Menerima Gaji dan Tunjangan di Tahun 2022 Jumlah ASN yang dibayarkan Insentif Pajak dan Retribusi TA 2022 Persentase jumlah ASN Solok Selatan yang Dibayarkan Iuran Jamkes, Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian ASN	49 Orang 70 Orang 100 Persen	19.613.170.836	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	19.613.170.836	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan BPKD TA. 2022 yang Menerima Honorarium JumlahTKD yang Menerima Gaji di TA. 2022	20 Orang 23 Orang	535.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	535.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	02	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM, UP/ GU/ LS/ TU yang disahkan TA. 2022	5000 Lembar	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan yang ditetapkan Kepala BPKD (Neraca, LRA, LO, LPE, dan CALK)	5 Laporan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	753.080.875			753.080.875	
5	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang tersedia ((Bola Lampu (50 Buah), Saklar (10 Buah), Stop Kontak (50 Buah), Fitting (50 Buah), Terminal Lampu (20 Buah), Kabel (5 Rol), Baterai Kecil (50 Buah), Baterai Laptop (10 Buah), Charger Laptop (10 Buah),	255 Komponen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Meter Roller Blind yang disediakan Jumlah Unit Pengadaan PC/Laptop Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan TA. 2022 (ATK, Mouse Wireless (30 bh), Kunci Laci Meja (20 bh), Spanduk (6 bh), Struktur Organisasi (2 bh), Bendera (2 bh), Kertas dan Cover	70 Meter 10 Unit 7 Paket	341.346.875	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	341.346.875	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan dan Alat Dapur yang disediakan pada TA. 2022 (Bahan Kimia untuk pembersih, Alat Pembersih, Alat Dapur dan Pakan Natura)	100 Unit	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan TA. 2022 (Stempel, Map Kop OPD, Cetak Buku Register) Jumlah Lembar Cetak dan Jilid TA. 2022	500 Buah 255000 Lembar/Doku men	32.340.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	32.340.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jumlah Porsi Makan Minum yang disediakan TA. 2022 (Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu)	5400 Kali PD 700 Porsi	317.394.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	317.394.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan barang milik daerah	100%	27.500.000			27.500.000	
5	02	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebeleur yang disediakan TA 2022 (Meja Kerja, Lemari Arsip, dan Kursi Kerja)	3 Paket	27.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	27.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	127.781.500			127.781.500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya (Perangko dan Materai)	500 Buah	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Pemakaian Listrik TA. 2022 Jumlah Pemakaian Air TA. 2022 Jumlah Rekening Telepon yang dibayarkan	60000 Kwh 8000 Kubik 12 Rekening	83.181.500	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	83.181.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservice/ Maintenance (Genset, AC, PC/Laptop, Printer/Scanner)	46 Unit	39.600.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	39.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	314.010.000			314.010.000	
5	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kali Service Kendaraan (Mobil dan Motor) Jumlah Kendaraan yang dibayar pajaknya (Mobil dan Motor) Jumlah Kendaraan yang Suku Cadangnya diganti ((Mobil (6 Unit), Motor (20 Unit)) Jumlah Liter Pemakaian BBM	15 Kali 26 Unit Kendaraan 26 Unit Kendaraan 6200 Liter	164.010.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	164.010.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Dinding Gedung yang dicat	5000 M2	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemindahan Arsip dan Dokumen Negara Jumlah unit gedung yang disewa TA. 2022	3 Paket 1 Unit	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	102.724.049.050			102.724.049.050	
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran yang tepat waktu	100%	1.465.999.000			1.465.999.000	
5	02	002	2.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disahkan TA. 2022 (Dokumen KUA dan PPAS Awal 2022) Jumlah penerima Honorarium TAPD TA. 2022	2 Dokumen 30 Orang	190.297.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	190.297.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen yang disahkan TA. 2022 (KUPA PPAS Perubahan) Jumlah penerima honorarium TAPD TA. 2022	2 Dokumen 30 Orang	185.400.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	185.400.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.01	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	33 SKPD	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.01	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang diverifikasi	33 SKPD	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	02	002	2.01	007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disahkan (Perbup Penjabaran APBD TA 2022) Jumlah Dokumen yang disahkan (Perda APBD TA 2022)	2 Dokumen 2 Dokumen	396.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	396.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.01	008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen yang disahkan (Perbup Penjabaran APBD Perubahan TA 2022) Jumlah Dokumen yang disahkan (Perda APBD Perubahan TA 2022)	2 Dokumen 2 Dokumen	357.502.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	357.502.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mendapatkan nilai postes > 85 Point Jumlah Perbup yang disahkan Tahun 2022 (Standar Harga, Standar Biaya, Hak Keuangan DPRD, KKD, dan HSPK) Jumlah Regulasi tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan	150 Orang 5 Perbup 5 Dokumen	236.800.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	236.800.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	100	410.000.000			410.000.000	
5	02	002	2.02	005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Realisasi dan Konsolidasi Dana Transfer/DAK Sesuai JUKNIS	2 Laporan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Akurasi Data Gaji Pegawai yang Dapat Diakses Melalui Sistem Aplikasi Gaji	100 Persen	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.02	011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang Telah Diterbitkan dan Disahkan BUD	8000 Dokumen	280.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	280.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketersediaan dokumen pelaporan keuangan daerah tepat waktu	100	493.000.000			493.000.000	
5	02	002	2.03	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan ke Pusat (Laporan Keuangan Daerah, BLUD) Jumlah SKPD yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan	2 Laporan 33 SKPD	160.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	160.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.03	005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda yang ditetapkan (Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022)	1 Dokumen	91.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	91.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	02	002	2.03	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Kebijakan Akuntansi, Perubahan Sistem Akuntansi Pemda, Perubahan Bagan Akun Standar Pemda)	3 Buku	96.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	96.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.03	010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SISKUR tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.03	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Jumlah Peserta Bimtek mendapatkan nilai postes > 85 Poin Persentase Penerapan Aplikasi dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi	1 Kali 150 Orang 100 Persen	95.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	95.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran dana transfer daerah dan Belanja Tidak Terduga	100%	100.355.050.050			100.355.050.050	
5	02	002	2.04	008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan (ADD, DD, BTT, Bantuan Partai Politik, Bagi Hasil, Hibah, Bansos) Tersedianya Dana Bantuan Keuangan untuk Nagari	100 Persen 47 Nagari	98.621.675.400	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	98.621.675.400	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	002	2.04	009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Persediaan untuk Kegiatan Tidak Terduga	1 Tahun	1.733.374.650	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.733.374.650	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	95%	301.000.000			301.000.000	
5	02	003	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik	100%	301.000.000			301.000.000	
5	02	003	2.01	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBD dan RKPBM Tahun 2022 Sesuai Kebutuhan Daerah	2 Dokumen	18.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	18.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	003	2.01	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang Telah Berbasis Aplikasi dalam Penatausahaan Aset	33 OPD	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	003	2.01	006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Updating Data Barang Milik Daerah	100 Persen	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	003	2.01	007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Prosentase Pengamanan Asset Daerah Baik Secara Fisik Maupun Bukti Legal Kepemilikan Pemda Kab. Solok Selatan	100 Persen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
5	02	003	2.01	010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah BMD yang dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan	100 Persen	96.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	96.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Prosentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemda Solok Selatan		100 Persen						
5	02	003	2.01	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kuantitas OPD yang Sinkron Rekapitulasi Laporan Asset OPD dengan Laporan Asset Daerah	33 OPD	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	02	003	2.01	012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang telah Konsolidasi	33 OPD	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	02	003	2.01	013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	100 Persen	56.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	56.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	02	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	95%	518.000.000			518.000.000		
5	02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	100%	518.000.000			518.000.000		
5	02	004	2.01	002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diupdate	15 Regulasi	56.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	56.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	02	004	2.01	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang telah dilakukan Pendataan dan Evaluasi NJOP PBB P2	4 Kecamatan	106.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	106.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	02	004	2.01	011	Penagihan Pajak Daerah	Objek Pajak yang telah dilakukan Pemungutan Pajak PBB P2, PBB P3 dan BPHTB Pencapaian Target Realisasi Pemungutan PBB P2, PBB P3 dan BPHTB	90000 OP 8 Milyar	270.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	270.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	02	004	2.01	013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB P2 Jumlah Pelaporan Realisasi Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Provinsi dan Pusat)	12 Kali 12 Dokumen	85.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	85.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	03				KEPEGAWAIAN						26.336.829.350	19.691.650.000	
5	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	24.591.829.350			17.227.000.000		
5	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	24.197.829.350			16.667.000.000		
5	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang disediakan Gaji dan Tunjangannya Jumlah PPPK yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	180 Orang 102 Orang	15.444.095.350	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	16.442.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	03	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan Jumlah TKD yang dibutuhkan	12 Orang 600 Orang	8.753.734.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	246.000.000			330.000.000	
5	03	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat/Instalasi Listrik yang tersedia	20 Jenis	4.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 Jenis	22.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	25.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia	20 Jenis	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia	15 Jenis 30000 Lembar	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makanan dan minuman rapat dan tamu yang terfasilitasi Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah yang terfasilitasi	100 Persen 100 Persen	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	275.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	38.000.000			43.000.000	
5	03	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Materai yang tersedia Persentase pengiriman paket yang terfasilitasi	1 Jenis 100 Persen	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan Jumlah tagihan telepon/Speedy yang dibayarkan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	26.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	27.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	10 Jenis	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	11.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	110.000.000			112.000.000	
5	03	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang diurus pembayaran STNK/ Pajaknya Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	7 Unit 5 Unit 2 Unit	90.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	91.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor yang terpelihara	100 Persen	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	21.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit	176 (Angka)	1.745.000.000			2.464.650.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	03	002	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan & pengadaan pegawai yang sesuai dengan ANJAB & ABK Jumlah sistem informasi yang aktif	100% 1 Aplikasi	785.600.000			1.024.500.000	
5	03	002	2.01	002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pegawai yang disusun dan dievaluasi	1 Dokumen	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN / PNS yan dilakukan pembekalan dan pengambilan sumpah Jumlah Siswa STTD yang dibantu uang kuliahnya Jumlah tahap pelaksanaan rekrutmen CPNS yang terpenuhi sesuai aturan Jumlah tahap pelaksanaan rekrutmen CPPPK yang terpenuhi sesuai aturan	150 Orang 3 Orang 5 Tahap 5 Tahap	580.600.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	720.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS pensiun yang terlayani Jumlah PNS yang terlayani pengurusan taspennya	98 Orang 98 Orang	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	27.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem (aplikasi) yang di kembangkan	1 Aplikasi	70.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	115.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya telah dimutakhirkan Jumlah PNS yang terlayani pembuatan Karpeg, Karis, dan Karsu	3467 Orang 500 Orang	65.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	82.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pegawai yang promosi dan mutasi berdasarkan talent pool	50%	319.196.000			479.000.000	
5	03	002	2.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen regulasi terkait Mutasi Jumlah Surat Keputusan JP dan JF yang telah disusun Persentase jumlah mutasi PNS yang dilayani sesuai aturan yang berlaku	1 Dokumen 50 SK 100 Persen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi kenaikan pangkatnya secara tepat waktu Jumlah PNS yang difasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian PI di Kabupaten Solok Selatan Jumlah PNS yang diproses izin pemakaian gelar dan perhitungan masa kerjanya	800 Orang 120 Orang 30 Orang	135.600.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	165.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.02	003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Lelang JPT yang dilaksanakan secara terbuka	7 Jabatan	133.596.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	254.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	03	002	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja	50%	364.374.500			495.000.000	
5	03	002	2.03	002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Blueprint Assesment Center Jumlah Pegawai yang dinilai kompetensinya Jumlah TKD yang dinilai kompetensinya	1 Dokumen 40 Orang 600 Orang	263.845.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	270.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.03	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang diberikan bantuan dan difasilitasi tugas belajarnya Persentase ASN yang dibantu dan difasilitasi izin belajarnya	2 Orang 100 Persen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	90.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.03	013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme inpassing Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan jabatan	50 Orang 50 Orang 250 Orang	50.529.500	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	135.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan indikator kinerja individu Persentase Pegawai dengan Nilai SKP “Sangat Baik”	50% 80%	275.829.500			466.150.000	
5	03	002	2.04	001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen indikator kinerja ASN yang disusun secara akuntabel Jumlah dokumen Pola dan Pengembangan Karir ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.04	002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya secara obyektif	3467 Orang	41.329.500	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	88.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.04	005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diberi penghargaan tanda jasa (Satya Lencana Karya Satya)	200 Orang	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.04	007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah regulasi terkait disiplin, kode etik, dan kode prilaku Persentase ASN yang tidak melanggar disiplin	3 Dokumen 95 Persen	108.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.04	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti Persentase pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti Persentase pelanggaran kode prilaku yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen 100 Persen	66.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	73.150.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	2.04	009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100 Persen	0	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.430.000.000			1.737.000.000	
5	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase penempatan aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan analisis jabatan	85%	1.430.000.000			1.737.000.000	
5	04	002	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat	100%	30.000.000			37.000.000	
5	04	002	2.01	001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi non classical	1 Dokumen 1 Dokumen	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	37.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	002	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat	100%	1.400.000.000			1.700.000.000	
5	04	002	2.02	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Latsar Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	120 Orang 20 Orang 3 Orang 10 Orang	1.400.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.700.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			4.936.989.758			9.011.000.000	
6	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	4.086.989.758			7.101.000.000	
6	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	3.206.989.758			5.045.000.000	
6	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	32 Orang	3.121.989.758	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	8 orang	85.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	0	Inspektorat
6	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100 persen	0	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan	80%	250.000.000			380.000.000	
6	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase aparatur yang ikut pelatihan	100 persen	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang ikut Pelatiha	10 Orang	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	180.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	271.000.000			436.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
6	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	6.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan penggandaan	12 Bulan	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	22.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultansi	12 Bulan	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	350.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	125.000.000			900.000.000	
6	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana Dan Prasarana Gedung kantor	1 Tahun	125.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jaspemunjang yang tersedia	100%	19.000.000			28.000.000	
6	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	12 Bulan	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tesedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 bulan	17.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	25.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	215.000.000			242.000.000	
6	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	1 tahun	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	225.000.000	Inspektorat
6	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	17.000.000	Inspektorat
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	III	645.000.000			1.435.000.000	
6	01	002	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	cakupan pengawasan internal	100%	545.000.000			1.265.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas				
									Nasional	Daerah			
6	01	002	2.01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan kinerja Pemerintah	56 Obrik	250.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	650.000.000	Inspektorat	
6	01	002	2.01	003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Review Kinerja Pemerintah	12 laporan	155.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	450.000.000	Inspektorat	
6	01	002	2.01	004	Reviu Laporan Keuangan	Terkasananya review laporan Keuangan daerah	1 laporan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Inspektorat	
6	01	002	2.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	meningkatnya tindak lanjut LHP BPK/ APIP	85 persen	115.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.000.000	Inspektorat	
6	01	002	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan/penanganan kasus yang ditangani	100%	100.000.000			170.000.000		
6	01	002	2.02	002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	meningkatnya Pengawasan / penanganan kasus	8 LHP	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	170.000.000	Inspektorat	
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	2,6 (Nilai)	205.000.000			475.000.000		
6	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan	1 Rumusan	25.000.000			60.000.000		
6	01	003	2.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksanya kebijakan Teknis Bidangpengawasan	2 rumusan	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Inspektorat	
6	01	003	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan pendampingan dan asistensi	100%	180.000.000			415.000.000		
6	01	003	2.02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya pelaporan urusan pemerintah	1 tahun	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	175.000.000	Inspektorat	
6	01	003	2.02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan, Asistensi, Veifikasi	8 Laporan	80.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.000.000	Inspektorat	
6	01	003	2.02	004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Asistensi Dan Ferifikasi integritas	3 Laporan	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	120.000.000	Inspektorat	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN							3.016.500.000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	2.224.834.146			2.694.500.000		
7	01	001	2.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.754.834.146			2.150.500.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	1.699.834.146	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.090.500.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pengelola keuangan ASN	8 Orang	55.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	172.000.000			236.000.000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangun kantor	12 bulan	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya atk dan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan	1 tahun	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat dan bahan pembersih	1 tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengandaan	1 tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dan makan minum tamu	1 tahun	143.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	198.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan penunjang yang tersedia	100%	28.000.000			33.000.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1 tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa air,listrik dan telekomunikasi	1 tahun	22.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	23.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	4.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	270.000.000			275.000.000	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 tahun	55.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 unit	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	200.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	47.000.000			78.000.000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase layanan PATEN	80%	40.000.000			70.000.000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksananya kegatan pennyelenggaraan kegiatan kecamatan	3 kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	70.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	7.000.000			8.000.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pelayan yang baik kepada masyarakat	1 tahun	7.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	8.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	45.000.000			65.000.000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	45.000.000			65.000.000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKK	12 BULAN	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	65.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	86.000.000			135.000.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	86.000.000			135.000.000	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	terlaksananya peringatan hari besar nasional	1 kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	70.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terlaksananya kegiatan keagamaan dan festival sarantau sasaranbi	2 kegiatan	36.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	terlaksananya rapat koordinasi kecamatan	1 tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	29.000.000			44.000.000			
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	29.000.000			44.000.000			
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa peraturan kepala desa	1 kegiatan	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh		
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa	1 kegiatan	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	8.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh		
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya pengeloaan keuangan desa	1 kegiatan	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	9.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh		
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya musremang	1 kegiatan	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	8.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh		
7	01	006	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	terlaksananya pembinaan nagari rancak	8 nagari	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN							2.406.327.697	2.931.183.658	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	2.196.327.697			2.625.183.658			
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.882.127.697			2.112.883.658			
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	1.822.127.697	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.968.883.658	Kecamatan Sungai Pagu		
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Adminstrasi Keuangan	12 bulan	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	144.000.000	Kecamatan Sungai Pagu		
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum		185.000.000			374.000.000			
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Kantor dan gedung nasional	1 tahun	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Kecamatan Sungai Pagu		
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	16.000.000	Kecamatan Sungai Pagu		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	1 tahun 1 tahun	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	333.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	26.200.000			32.300.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	200 buah	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 bulan	12.200.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.300.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	103.000.000			106.000.000	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	55.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	56.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH dan Monumen Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan 1 tahun	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	36.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor yang dipelihara/direhab	18 unit	13.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	14.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	47.000.000			41.000.000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan PATEN	80%	40.000.000			33.000.000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	2 kali 1 kali	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	33.000.000	Kecamatan Sungai Pagu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Jumlah koordinasi dan pembinaan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan	1 kali						
					Jumlah rapat koordinasi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	4 kali						
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	7.000.000			8.000.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 tahun	7.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	8.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	35.000.000			42.000.000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	35.000.000			42.000.000	
7	01	003	2.01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah nagari yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Musrenbang Nagari	11 nagari	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan perempuan dan pembinaan PKK	4 kegiatan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	36.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	7.000.000			8.000.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	7.000.000			8.000.000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi masalah transtib yang dilaksanakan	4 kali	7.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	8.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	93.000.000			180.000.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	93.000.000			180.000.000	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	2 kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	86.000.000	Kecamatan Sungai Pagu
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	38.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	61.000.000	Kecamatan Sungai Pagu

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas						
									Nasional	Daerah					
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	33.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		28.000.000			35.000.000				
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		28.000.000			35.000.000				
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006	2.01	004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah nagari yang difasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan	11 nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	11.000.000	Kecamatan Sungai Pagu			
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN							2.269.097.353		3.030.861.000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	1.969.097.353			2.658.861.000				
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.378.887.353			1.770.561.000				
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	1 tahun	1.331.007.353	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.657.521.000	Kecamatan Sangir			
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa Administrasi keuangan Tersedianya Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Kantor	12 bulan 6 orang	47.880.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	113.040.000	Kecamatan Sangir			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	210.000.000			302.500.000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun 3 unit	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	56.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	1 tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.500.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat, tamu dan kegiatan Tersedianya rakor & konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun 1 tahun	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	228.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	30.210.000			30.800.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1 tahun	1.710.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.800.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya Air, Listrik dan Telepone	12 bulan	13.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	3.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga petugas kebersihan kantor	1 orang	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	350.000.000			555.000.000	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	4 unit	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	300.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	500.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	60.000.000			83.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan PATEN	80%	50.000.000			73.000.000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Terlaksananya kegiatan pemuda dan Olah raga Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan	2 keg 1 keg 2 keg 6 kali	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	73.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	10.000.000			10.000.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 keg	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	53.000.000			70.000.000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	53.000.000			70.000.000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 keg	53.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	70.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	13.000.000			10.000.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	13.000.000			10.000.000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	5 kali	13.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	135.000.000			170.000.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	135.000.000			170.000.000	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	2 keg	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Kecamatan Sangir

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional	2 keg	75.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan	5 kali	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		39.000.000			39.000.000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		39.000.000			39.000.000	
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Nagari	1.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan keuangan desa dan pendayunaan aset desa	7 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	7 Nagari	1.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Tugas kepala Desa dan Perangkat desa	7 Nagari	1.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi badan permusyawaratan desa	7 Nagari	1.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	7 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Sangir
7	01	006	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa	7 Nagari	14.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	14.000.000	Kecamatan Sangir
7					UNSUR KEWILAYAHAN							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01				KECAMATAN			1.906.858.035			2.107.358.035	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	1.696.858.035			1.897.358.035	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.378.858.035			1.378.858.035	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 orang	1.330.858.035	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.330.858.035	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	7 orang	48.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	48.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	209.000.000			209.500.000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.500.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun 1 Unit	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	1 tahun	4.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat, tamu dan kegiatan	1 tahun 1 tahun	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	24.000.000			24.000.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1 tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan listrik, air dan telepon	12 bulan	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Sangir Jujan
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	85.000.000			85.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 unit	55.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor	2 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	41.000.000			41.000.000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan PATEN	80%	35.000.000			35.000.000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan	3 kali 1 Kegiatan 1 kali	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	6.000.000			6.000.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	1 tahun	6.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	45.000.000			45.000.000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	45.000.000			45.000.000	
7	01	003	2.01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat	5 Nagari	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKK	4 Kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.000.000			6.000.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.000.000			6.000.000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi masalah trantib	4 Kali	6.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	90.000.000			90.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	90.000.000			90.000.000	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	2 Kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	4 Kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	4 Kali	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	28.000.000			28.000.000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	28.000.000			28.000.000	
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	01	006	2.01	009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Sangir Jujuan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN			2.128.623.665			2.790.500.000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	1.818.623.665			2.392.500.000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.497.123.665			1.950.000.000	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun	1.443.243.665	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.800.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	6 orang	53.880.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	150.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	250.000.000			361.500.000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.500.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Peralatan dan Perelengkapan Kantor	1 Tahun 6 Unit	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	75.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.500.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan/Penggandaan/Penjilidan	1 Tahun	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.500.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersediaanya Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu	1 Tahun 1 Tahun	180.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	260.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	11.500.000			16.000.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko, materai dan bendapos lainnya	1 Tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022		Pagu Indikatif		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Prioritas			
											Nasional	Daerah		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	9.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari		
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	60.000.000			65.000.000			
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Kantor	8 Unit	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	65.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari		
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	60.000.000			80.000.000			
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan PATEN	80%	35.000.000			50.000.000			
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial Terlaksananya Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	4 Kali 2 kali 2 Keg 2 Keg	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari		
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	25.000.000			30.000.000			
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Tahun	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari		
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	35.000.000			45.000.000			
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	35.000.000			45.000.000			
7	01	003	2.01	002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK Nagari dan Kecamatan	5 Keg	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	45.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari		
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	12.000.000			13.000.000			
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	12.000.000			13.000.000			
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Ketentraman dan Kenyamanan	4 Kali	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari		
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	108.000.000			140.000.000			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	108.000.000			140.000.000	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah	4 Keg	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	4 Keg	43.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	65.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan	3 Kali	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	95.000.000			120.000.000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	95.000.000			120.000.000	
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Nagari	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Nagari	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	40.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Nagari	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Dok	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN			1.830.152.222			2.845.700.000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	1.630.152.222			2.270.700.000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.315.152.222			1.373.150.000	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN	15 Orang	1.273.632.222	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.325.630.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium jasa keuangan	5 orang	41.520.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	47.520.000	Kecamatan Pauh Duo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	200.500.000			306.000.000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun 4 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	67.500.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya alat dan bahan pembersih tersedianya peralatan rumah tangga	1 tahun 1 paket	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.500.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	14.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat, tamu dan kegiatan	1 tahun 1 tahun	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	215.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	29.500.000			31.550.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianyan jasa surat menyurat	1 tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.050.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.500.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	5.500.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	7.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga petugas kebersihan kantor	1 orang	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	85.000.000			125.000.000	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7 unit 2 unit	55.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	65.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab gedung dan sarana prasarana kantor	2 unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	60.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	55.000.000			171.000.000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan PATEN	80%	30.000.000			90.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan pemuda dan olah raga Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan	1 tahun 2 kegiatan 4 kali	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	90.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	25.000.000			81.000.000	
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1 tahun	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	27.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	002	2.04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	1 tahun	0	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	27.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	27.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	40.000.000			68.000.000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	30.000.000			55.000.000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembiaian PKK	3 kegiatan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	55.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	10.000.000			13.000.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya monitoring pemberdayaan masyarakat nagari	5 Nagari	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	13.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	10.000.000			15.000.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	10.000.000			15.000.000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi masalah trantib	1 tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	65.000.000			191.000.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	65.000.000			191.000.000	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	2 kegiatan	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	85.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan sarantau sasurambi	1 tahun 1 kali	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	78.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	8 kali	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	28.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	30.000.000			130.000.000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	30.000.000			130.000.000	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan administrasi tata pemerintahan desa	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya pembinaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pembinaan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	1 dokumen	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	18.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7	01	006	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya pembinaan nagari	5 Nagari	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	37.000.000	Kecamatan Pauh Duo
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN			1.900.867.946			2.217.380.000	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	1.645.867.946			1.938.380.000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	100%	1.168.867.946			1.372.880.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.117.987.946	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	1.250.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	12 Bulan 12 Bulan 8 Orang	50.880.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	122.880.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	245.000.000			377.500.000	
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun 8 Unit	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	1 Tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2.500.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	10.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dan tamu	1 Tahun 1 Tahun	180.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	262.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	22.000.000			23.000.000	
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	1 Orang	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	210.000.000			165.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 Unit	60.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	65.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Unit	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	100.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	55%	60.000.000			55.000.000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan PATEN	80%	40.000.000			50.000.000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan pemuda dan olah raga Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan	2 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kali	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	20.000.000			5.000.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PATEN	1 Kegiatan	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan	100%	40.000.000			50.000.000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	40.000.000			50.000.000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKK	3 Kegiatan	40.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	50.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	9.000.000			9.000.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100%	9.000.000			9.000.000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi masalah transtib	3 Kali	9.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	9.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	102.000.000			117.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	102.000.000			117.000.000	
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan hari besar nasional dan daerah	2 Kegiatan	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	75.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	5 Kegiatan	45.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	30.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	4 Kali	12.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	12.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	44.000.000			48.000.000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	44.000.000			48.000.000	
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	4 Nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	4 Nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Nagari	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	0	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Nagari	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas					
									Nasional	Daerah				
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	14.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	15.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo		
7	01	006	2.01	014	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terfasilitasinya Kerjasama Antardesa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	4 Nagari	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo		
7	01	006	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Nagari	5.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6.000.000	Kecamatan Sangir Balai Janggo		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							2.566.686.007	4.249.698.944	
8	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	1.136.686.007			1.559.700.000			
8	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Keuangan		797.686.007			1.070.000.000			
8	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	736.726.007	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	915.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga pendukung administrasi	12 Bulan	60.960.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	155.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi Umum	100%	231.000.000			417.500.000			
8	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Tersedianya Laptop Tersedianya Printer	12 Bulan 2 unit 2 Unit	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	75.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantoor	12 Bulan	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3.500.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	20.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi Tersedianya Makan dan Minum untuk Rapat Staf dan Tamu	12 Bulan 12 Bulan	180.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	315.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	35.000.000			35.000.000			
8	01	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyedian Jasa Sewa Gedung Kantor Lainnya	1 Unit	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	35.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
8	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25.000.000			32.000.000	
8	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.500.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	23.500.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kator	12 Bulan	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	48.000.000			5.200.000	
8	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	5 Unit	48.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	5.200.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	002			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	% Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila	78%	30.000.000			347.000.000	
8	01	002	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu separatisme di daerah	78%	30.000.000			347.000.000	
8	01	002	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Napak Tilas HBN Jumlah Peserta Peringatan HBN Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pelaksanaan Rapat Forum Pembauran Kebangsaan Pelaksanaan Rapat Gerakan Nasional Revolusi Mental Seminar sejarah PDRI	500 Orang 350 Orang 350 Orang 2 Kali 2 kali 1 Kali	30.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	347.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	003			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	% Peningkatan Peran Partai Politik	80%	1.050.000.000			1.295.248.944	
8	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase parpol terverifikasi yang mendapat bantuan keuangan	100%	1.050.000.000			1.295.248.944	
8	01	003	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan	Jumlah Parpol yang di Verifikasi	10 Parpol	1.050.000.000	Memperkuat Stabilitas Politik,	Menciptakan birokrasi pelayanan	1.295.248.944	Kantor Kesatuan Bangsa dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PER URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
					Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Keuanganl dari APBD Jumlah Peserta Bimtek	10 Parpol 40 Orang		Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	publik yang bersih dan melayani		Politik
8	01	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	% Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan ORMAS	82%	25.000.000			153.300.000	
8	01	004	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang diawasi	100%	25.000.000			153.300.000	
8	01	004	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas	Jumlah Peserta Pembinaan Ormas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ormas	100 Orang 12 Kali	25.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	153.300.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	005			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kasus narkoba yang tertangani	100%	50.000.000			295.000.000	
8	01	005	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kasus narkoba yang tertangani	100%	50.000.000			295.000.000	
8	01	005	2.01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Peserta Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN Pelaksanaan Rapat FKUB Pelaksanaan Rapat Tim P4GN	350 Orang 150 Orang 2 Kali 2 Kali	50.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	295.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	006			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial	100%	275.000.000			599.450.000	
8	01	006	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	275.000.000			599.450.000	
8	01	006	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Rapat FKDM Pelaksanaan Rapat Forkopimda Pelaksanaan Rapat PKS Pelaksanaan Rapat TKDPD Pengawasan Orang Asing Sosialisasi Manajemen Penanganan Konflik	6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 12 Kali 350 Orang	275.000.000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	599.450.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								726.137.199.272			982.826.528.197	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini ditujukan untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan menjalankan program dan kegiatan. Untuk target kinerjanya disesuaikan dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Penetapan indikator ini terdiri dari Indikator dari Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pencapaian target dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan yang menjadi target kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2022 adalah:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian	
		2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,83	70,37
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,48	8,57
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,08	13,20
Persentase Penduduk Usia Sekolah Hafiz Qur'an (1 juz)	Persen	4	8
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,21	68,41
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,38	5,26
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tahun	70	75
Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Indeks	5,00	5,04
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,79	4,07
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,20	7,07
Indeks Gini Ratio	Indeks	0,295	0,291
Indeks Daya Saing Daerah (BRIN)	Indeks	1,3000	1,4000
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	70
Nilai SAKIP	Indeks	68	72

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian	
		2022	2023
Opini BPK	Opini	WTP	WTP
indeks profesionalitas ASN	Indeks	60	65
Indeks Kelembagaan	Indeks	56	63
Indek Pelayanan Publik	Indeks	68	72
Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	63	65
Rata-rata Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Indeks	32,25	34,0
Akses air minum layak	Persen	80,05	82,50
Akses sanitasi Layak	Persen	62,00	65,00
Persentase Kawasan Pemukiman yang dikelola	Persen	70	75
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,03	82,53
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,34	0,36
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,03	82,53
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,34	0,36
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56,00	56,50
Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	133	136
Peningkatan lembaga seni dan budaya yang aktif	Persen	10	10
Peringkat POPROV	Peringkat	10	-
Jumlah atlet olahraga yang berprestasi	Orang	15	20
Penurunan permasalahan sosial masyarakat	Persen	5%	5%
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Rasio	17,45	16,90
Cakupan Pelayanan PMKS	Persen	73	76
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,59	97,15
Indeks Desa Membangun Persentase	Indeks	0,7782	0,8125
Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	85	90
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7782	0,8125
Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	85	90

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

6.2. Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Utama ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 target Indikator Kunci penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah:

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2022	2023
A	INDIKATOR KINERJA MAKRO			
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	69,83	70,37
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,79	4,07
1.3	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Jt	33,74	35,25
1.4	Pengeluaran Perkapita	Rp/Bulan	895.177	913.081
1.5	Indek Gini Ratio	Indek	0,295	0,291
1.6	Tingkat Pengangguran	%	5,38	5,26
1.7	Tingkat Kemiskinan	%	7,20	7,07
B	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
I	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan			
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48	8,57
1.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,08	13,20
1.3	Angka Melanjutkan			
	a.SD/MI ke SMP/MTs	%	98,25	99,15
	b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK	%	99,75	100
1.4	Angka Melek Huruf	%	96,60	97,50
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	100	102,25
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	100	100
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	81,25	83
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,50	99,75
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	77,25	80,75
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	66,60	69,25
1.7	Persentase guru bersertifikat Pendidik			
	a. SD/MI	%	93,65	94,35
	b. SMD/MTs	%	96,00	96,75
	c. SMA/MA	%	98,00	98,75
2.	Kesehatan			
2.1	Meningkatnya Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	68,21	68,41
2.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	186	180
2.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	7	6,7
2.4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,01	0,01
2.6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	33.23	33.32
3.2	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	%	62	65
3.3	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	26	30
3.4	Akses Air Minum Layak	%	80.05	82.50
3.5	Akses Sanitasi Layak	%	53.80	55.10
3.6	Persentase RDTR Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	%	66.67	66.67
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4.1	Persentase Rumah layak huni	%	91.25	91.50
4.2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	RT	97.5	98

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2022	2023
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Cakupan Penanganan Perda	%	100	100
5.2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	20	40
5.4	Respon time	menit	35	30
5.5	Persentase Nagari Tangguh Bencana	%		
5.6	Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	%	10	9
5.7	Persentase partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada	%		
6	Urusan Sosial			
6.1	Persentase Cakupan Pelayanan PMKS	%	73	76
6.2	Ketersediaan Tenaga Pedamping Sosial (Minimal 66 Orang)	%	60%	70%
II	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar			
7	Urusan Ketenagakerjaan			
7.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3	3,1
7.2	Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	%	20	25
7.3	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat			
8.1	Indek Pembangunan Gender	indeks	96,59	97,15
8.2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	100	100
8.3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	32,50	35,10
9	Urusan Pangan			
9.1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	9	14
9.2	Skor Pola Pangan Harapan	%	77,8	79
10	Pertanahan			
10.1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	%	100	100
10.2	Persentase penyelesaian konflik pertanahan yang ditangani	%	90	90
11	Lingkungan Hidup			
11.1	Cakupan Layanan Persampahan	%	75	85
11.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.26	93.26
11.3	Indeks Kualitas Air	Indeks	67.52	67.53
11.4	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	79.34	79.34
11.5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	%	100	100
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
12.1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	90	95
12.2	Persentase penduduk ber KTP	%	95	96
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
13.1	Jumlah Desa Mandiri	Desa /Nagari	10	14
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
14.1	Cakupan akseptor KB aktif	%	83,90	85,20
14.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,45	0,45
15	Urusan Perhubungan			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2022	2023
15.1	RasioKetersediaanAngkutanUmum	Nilai	0.6	0.7
15.2	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan lalin	Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan	0.25	0.23
15.3	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	6	6
16	Urusan Komunikasi dan Informasi			
16.1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	2.14	2.34
16.2	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	%	89.6	92.2
17	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
17.1	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya	%	6,15	9,23
17.2	Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi	%	8,1	13,51
17.3	Persentase usaha mikro berkualitas (standarisasi produk)	%	0,07	0,07
18	Urusan Penanaman Modal			
18.1	Persentase peningkatan investasi (PMA)	%	2	3
18.2	Persentase Nilai Investasi (PMDN)	%	3,5	4
18.3	Perizinan Tepat Waktu	(%)	100	100
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
19.1	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	Kelompok	40	43
19.2	Peringkat PORPROV	Peringkat	10	
19.3	Atlet / Pemuda yang berprestasi	orang	15	20
20	Urusan Statistik			
20.1	Persentase jumlah data sektoral yang dikelola	%	80	90
21	Urusan Persandian			
21.1	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	22	24
22	Urusan Kebudayaan			
22.1	Indek Pembangunan Kebudayaan	indek	56,00	56,5
22.2	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	133	136
22.3	Jumlah Sanggar Budaya dibina	Sanggar	93	93
23	Urusan Perpustakaan			
23.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	2750	3000
24	Urusan Kearsipan			
21.1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	18,18	27,27
II	Urusan Pilihan			
1	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1.1	Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian	Persen	0,82	0,85
1.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	2159	2343
1.3	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	32,10	32,6
2	Urusan Pariwisata			
2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	70.000	85.000
2.2	Jumlah Objek Wisata Unggulan	Objek	4	4
2.3	% Pelaku ekraf yang dibina	%	10	15
3	Urusan Pertanian			
3.1	Kontribusi sektor pertanian	Persen	29.8	31.00
	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan			
	- Padi	Ton	81.899	84.233
	- Jagung	Ton	92.837	99.231
	- Kacang tanah	Ton	870	879

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2022	2023
	- Manggis	Ton	448	456
	- Cabe	Ton	7.026	7.148
	- Bawang Merah	Ton	4.304	4.386
	- Kopi	Ton	3.139	3.319
	- Kelapa sawit	Ton	52.654	56.866
	- Daging	Ton	1.595	1.627
	- Telor	Ton	434	442
3.2	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas:			
	a. Pemula	Keltan	953	893
	b. Lanjut	Keltan	209	266
	c. Madia	Keltan	11	14
	d. Utama	Keltan	1	1
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral			
4.1	Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina	%	100	100
5	Perdagangan			
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	20,50	21,00
5.2	Persentase alat UTTP tanda tera sah yang berlaku	%	52	54
5.3	Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)	%	40	50
6	Perindustrian			
6.1	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	4,95	4,98
6.2	Persentase pertumbuhan IKM	%	5	5
6.3	Persentase pertumbuhan izin Industri	%	10	15
III	Fungsi Penunjang			
1	Perencanaan			
1.1	Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran	%	95	100
1.2	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu	%	100	100
1.3	Persentase Pencapaian Kinerja	%	90	93
1.4	Persentase pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	%	71	75
2	Penelitian dan Pengembangan			
2.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	20	30
3	Keuangan			
3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
3.2	Persentase Pencapaian Target PAD (Pajak dan Retribusi)	%	90	95%
3.3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	11	12
4	Kepegawaian			
4.1	Indeks Sistem Merit	indeks	226	276
4.2	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	%	85	88
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya			
5.1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	68	72
5.2	Nilai LPPD	Nilai	3'0514	3'0763
5.3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	70	75
5.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	Baik	Baik
5.5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	100	100
5.6	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	1	1
5.8	Maturitas SPIP	nilai	2,6	3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2022	2023
5.9	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	III	III
5.10	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Peringkat	10	-

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

6.3. Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakatnya maka dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian indikator SPM dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang target dan indikatornya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6.3.
Indikator Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	80
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	70
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	0
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	% Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	% Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 disusun dengan mempedomani dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 serta mempedomani penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang telah dijabarkan pada rancangan Awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RKPD merupakan perencanaan operasional pembangunan untuk tahun 2022, dan merupakan pedoman untuk penyusunan Renja OPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD Tahun 2022.

Tersusunnya dokumen ini melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur, serta koordinasi baik kepada instansi dalam lingkup Pemda Kabupaten Solok Selatan, instansi vertikal, masyarakat, ataupun dengan instansi pada Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk forum-forum, antara lain Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, serta Musrenbang Kabupaten.

Diharapkan RKPD Kabupaten Solok Selatan ini mampu memberikan akselerasi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dalam bentuk lebih terkoordinir dan terintegrasinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.